



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Seri Buku Advokasi Daerah



BUKU PANDUAN BAGI TKPK

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES

Analisis Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes

Cetakan Pertama, Januari 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©2019 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Foto Sampul: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program MAHKOTA. Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Buku Panduan ini, silahkan hubungi TNP2K melalui Unit Advokasi Daerah (advokasi@tnp2k.go.id)

Buku Panduan ini juga tersedia di Website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
Email: info@tnp2k.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Pengantar

Perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas ini terutama ditunjukkan oleh relevansi dan ketepatan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran belanja publik.

Di daerah, upaya ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi APBD sebagai alat perencanaan dan koordinasi. APBD sebagai alat perencanaan harus dapat memastikan bahwa program-program yang dirumuskan relevan dengan akar-akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Sedangkan sebagai alat koordinasi, APBD harus dapat menjamin adanya keselarasan antar-program secara lintas sektoral dalam mencapai target-target yang hendak dicapai.

Dalam konteks di atas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di setiap daerah dapat memainkan peran kunci dalam pemanfaatan data dan analisis bagi perencanaan prioritas dan penetapan sasaran intervensi kebijakan, serta penganggarannya melalui APBD. Selain itu TKPK dapat terlibat aktif dalam memastikan berjalannya sistem pemantauan yang baik terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang bersangkutan.

Panduan ini disusun sebagai panduan bagi TKPK untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Secara garis besar, panduan ini menjelaskan model analisis situasi kemiskinan dan evaluasi relevansi program dan anggaran, serta rekomendasi proses advokasi untuk diterapkannya model tersebut di dalam siklus rutin perencanaan dan penganggaran di daerah.

Melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan, kami berharap substansi panduan ini dapat terus dikembangkan demi terus memantapkan basis analisis dan evaluasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.

Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Unit Advokasi Daerah di Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K yang telah bekerja keras bersama tim teknis TKPK di daerah proyek percontohan untuk menghasilkan buku panduan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019
Bambang Widianto

*Deputi Seswapres Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan
Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K*

Penghargaan

Buku ini merupakan hasil kerjasama TNP2K dengan TKPK dari daerah proyek replikasi Model Advokasi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Brebes, di Provinsi Jawa Tengah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus disampaikan kepada:

Bupati Kabupaten Brebes, Idza Priyanti, S.E., M.H. dan Wakil Bupati Brebes Narjo, S.H., M.H. selaku Ketua TKPK Kabupaten Brebes.

Kepala BAPPERLITBANGDA Kabupaten Brebes, Dr. Drs. Angkatno, S.H., M.Pd, Kepala Bagian Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Ratnawati, S.Sos, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPERLITBANGDA Kabupaten Brebes, R. Rela Rahayuningsih, S.Sos., M.Si.

Seluruh Tim Kabupaten Brebes yang telah membantu menyusun buku ini, Arbi Faujiyahuti, S.KM (Dinkes Provinsi Jawa Tengah); Ulfah Olivia Madiana, S.Sos, M.M. (Dindik Provinsi Jawa Tengah); Muh. Alwi Sofwan, S.Pd. (Bappeda Provinsi Jawa Tengah); Susilo Harjanto, S.Si. (BAPPERLITBANGDA Kabupaten Brebes); Anjas Asmara, S.T (BAPPERLITBANGDA Kabupaten Brebes); Khoerul Umam, S.Kom (BPPKAD Kabupaten Brebes); Fatkhurohman, S.E (Dinsos Kabupaten Brebes); Kambali, SKM, MKes (Dinkes Kabupaten Brebes); Iklia Marita, SKM (Dinkes Kabupaten Brebes); Alfian Budi Prasetyo, SKM (Dinkes Kabupaten Brebes); Heryadi, SIP (Dindikpora Kabupaten Brebes); Helmi Firmansyah, S.E. (Dinperwaskim Kabupaten Brebes); Taufik Laksmana, S.T. (DPU Kabupaten Brebes); Sofiyati, S.E. (DPKP Kabupaten Brebes); Casa Sujarwo, SP (DPKP Kabupaten Brebes); M. Ahda Rifqi Hanief, S.Pi (DPKP Kabupaten Brebes).

Tim Pendamping dari TNP2K: Muhammad Arif Tasrif, Eneng Siti Saidah, Edi Safrijal, Toton Dartono, Sukmawah Yuningsih, Nur Arifina Vivinia, dan Kartina Prihastati.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| DAFTAR TABEL | i |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR SINGKATAN | vii |
| BAB 1 PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BREBES | 01 |
| 1.1 DIMENSI KONSUMSI | 02 |
| 1.2 DIMENSI NON KONSUMSI | 13 |
| 1.3 DAYA DUKUNG FISKAL | 19 |
| 1.4 BELANJA FUNGSI TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 26 |
| BAB 2 ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN UTAMA DI KABUPATEN BREBES | 35 |
| 2.1 ISU STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN | 36 |
| 2.2 PRIORITAS INTERVENSI SEKTOR PERTANIAN | 45 |
| 2.3 PRIORITAS WILAYAH SEKTOR PERTANIAN | 63 |
| 2.4 MODUS OPERANDI SEKTOR PERTANIAN | 95 |
| 2.5 PENERIMA PROGRAM SEKTOR PERTANIAN | 98 |
| 2.6 KECUKUPAN ANGGARAN SEKTOR PERTANIAN | 104 |
| 2.7 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN | 115 |
| BAB 3 ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BREBES | 117 |
| 3.1 ISU STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN | 118 |
| 3.2 PRIORITAS INTERVENSI SEKTOR KESEHATAN | 122 |
| 3.3 PRIORITAS WILAYAH SEKTOR KESEHATAN | 135 |
| 3.4 MODUS OPERANDI SEKTOR KESEHATAN | 161 |
| 3.5 PENERIMA PROGRAM SEKTOR KESEHATAN | 164 |
| 3.6 KECUKUPAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN | 177 |
| 3.7 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR KESEHATAN | 185 |

Daftar Tabel

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Capaian Indikator Kemiskinan Dimensi Pendidikan Tahun 2017 | 13 |
| Tabel 1.2 | Kondisi Mikro Pendidikan Penduduk Miskin dan Rentan | 14 |
| Tabel 1.3 | Capaian Indikator Kemiskinan Dimensi Kesehatan | 15 |
| Tabel 1.4 | Kondisi Mikro Kesehatan Penduduk Miskin dan Rentan | 16 |
| Tabel 1.5 | Capaian Indikator Kemiskinan dalam Dimensi Prasarana Dasar | 17 |
| Tabel 1.6 | Kepemilikan Jamban pada Rumah Tangga Miskin dan Rentan | 17 |
| Tabel 1.7 | Capaian Indikator Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan | 18 |
| Tabel 1.8 | Status Bekerja Individu Miskin dan Rentan | 18 |
| Tabel 2.1 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017 | 36 |
| Tabel 2.2 | Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017 | 41 |
| Tabel 2.3 | Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah | 42 |
| Tabel 2.4 | Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah | 43 |
| Tabel 2.5 | Evaluasi Fokus Program dan Kegiatan Urusan Pertanian di Kabupaten Brebes dalam Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Unggulan | 95 |
| Tabel 2.6 | Lokasi Belanja Program dan Kegiatan Terkait Prioritas Wilayah Intervensi dalam Rangka Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 101 |
| Tabel 2.7 | Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017 | 104 |
| Tabel 2.8 | Belanja Langsung dan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tahun 2015-2017 | 105 |
| Tabel 2.9 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 106 |
| Tabel 2.10 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 108 |
| Tabel 2.11 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 109 |
| Tabel 2.12 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 109 |
| Tabel 2.13 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 111 |
| Tabel 2.14 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 113 |
| Tabel 3.1 | Program Terkait Prioritas Intervensi dalam Rangka Penurunan Stunting menurut Dinas Terkait di Kabupaten Brebes | 161 |
| Tabel 3.2 | Lokasi Belanja Program dan Kegiatan Terkait Prioritas Intervensi Dalam Rangka Penurunan Persentase Stunting | 164 |
| Tabel 3.3 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 178 |
| Tabel 3.4 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 179 |
| Tabel 3.5 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 180 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 3.6 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 181 |
| Tabel 3.7 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 182 |
| Tabel 3.8 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya Di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 183 |
| Tabel 3.9 | Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 184 |

Daftar Gambar

| | | |
|-------------|--|----|
| Gambar 1.1 | Karakteristik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes | 02 |
| Gambar 1.2 | Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Brebes | 05 |
| Gambar 1.3 | Garis Kemiskinan, Harga Eceran Beras dan Kinerja Raskin Kabupaten Brebes | 07 |
| Gambar 1.4 | Nilai Tukar Petani dan Upah Minimum Regional Kabupaten Brebes | 09 |
| Gambar 1.5 | Kemiskinan dan Kerentanan di Kabupaten Brebes | 10 |
| Gambar 1.6 | Kemiskinan dan Kerentanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes | 11 |
| Gambar 1.7 | Persentase Penduduk Miskin dan Kondisi Fiskal di Kabupaten Brebes | 20 |
| Gambar 1.8 | Derajat Otonomi Fiskal dan Kemiskinan | 21 |
| Gambar 1.9 | Ruang Fiskal dan Kemiskinan | 22 |
| Gambar 1.10 | Rasio Pajak & Retribusi Daerah dan Kemiskinan | 23 |
| Gambar 1.11 | Belanja Modal dan Kemiskinan | 24 |
| Gambar 1.12 | Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Kemiskinan | 25 |
| Gambar 1.13 | Belanja Kesejahteraan dan Persentase Penduduk Miskin | 26 |
| Gambar 1.14 | Belanja Fungsi Pendidikan dan Indikator Bidang Pendidikan | 28 |
| Gambar 1.15 | Belanja Fungsi Kesehatan dan Indikator Bidang Kesehatan | 31 |
| Gambar 1.16 | Belanja Fungsi Fasilitas Umum & Perumahan dan Indikator Bidang Infrastruktur Dasar | 33 |
| Gambar 2.1 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017 | 37 |
| Gambar 2.2 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017 | 37 |
| Gambar 2.3 | Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Bawang Merah (Ton) Kabupaten Brebes | 38 |
| Gambar 2.4 | Perkembangan Produktivitas dan Harga Jual Padi, Jagung, dan Bawang Merah (Ton) Kabupaten Brebes | 39 |
| Gambar 2.5 | Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017 | 41 |
| Gambar 2.6 | Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017 | 42 |
| Gambar 2.7 | Permasalahan dan Tantangan Pertanian di Kabupaten Brebes | 44 |
| Gambar 2.8 | Theory of Change Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan Kabupaten Brebes | 46 |
| Gambar 2.9 | Analisis Keterkaitan Produksi Padi terhadap Sasaran Jangka Menengah | 48 |
| Gambar 2.10 | Analisis Keterkaitan Produksi Jagung terhadap Sasaran Jangka Menengah | 49 |
| Gambar 2.11 | Analisis Keterkaitan Produksi Bawang Merah terhadap Sasaran Jangka Menengah | 50 |
| Gambar 2.12 | Analisis Keterkaitan Produktivitas Tanaman Unggulan terhadap Sasaran Jangka Pendek | 53 |
| Gambar 2.13 | Analisis Keterkaitan Perkembangan Luas Panen terhadap Sasaran Jangka Pendek | 58 |
| Gambar 2.14 | Analisis Keterkaitan Harga Jual Tanaman Unggulan terhadap Sasaran Jangka Pendek | 61 |
| Gambar 2.15 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 63 |
| Gambar 2.16 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Luas Panen untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 65 |
| Gambar 2.17 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Permodalan untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 68 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 2.18 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan SDM Petani untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 70 |
| Gambar 2.19 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Lumbung Pangan Aktif untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan | 72 |
| Gambar 2.20 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Asuransi Lahan untuk Meningkatkan Produksi Padi | 73 |
| Gambar 2.21 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Penyuluhan untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 74 |
| Gambar 2.22 | Analisis Prioritas Wilayah Penggunaan Bibit Unggul untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 76 |
| Gambar 2.23 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Irigasi untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 78 |
| Gambar 2.24 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Jalan Usaha Tani untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 80 |
| Gambar 2.25 | Analisis Prioritas Wilayah Penurunan Lahan Puso untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 82 |
| Gambar 2.26 | Analisis Prioritas Wilayah Bantuan Alsintan untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan | 84 |
| Gambar 2.27 | Analisis Prioritas Wilayah Bantuan Alsintan untuk Meningkatkan Luas Panen | 86 |
| Gambar 2.28 | Analisis Prioritas Wilayah Penurunan Lahan Puso untuk Meningkatkan Luas Panen | 88 |
| Gambar 2.29 | Analisis Prioritas Wilayah Fasilitasi Irigasi untuk Meningkatkan Luas Panen | 90 |
| Gambar 2.30 | Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Jalan Usaha Tani untuk Meningkatkan Luas Panen | 92 |
| Gambar 2.31 | Fasilitasi Benih/Saprodi Budidaya Padi dan Bawang Merah (Ha) per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2016 | 94 |
| Gambar 2.32 | Perbaningan RTM Pertanian dan Non Pertanian di Kabupaten Brebes | 99 |
| Gambar 2.33 | Program BEKERJA Berbasis Pertanian Memutus Perangkap Lingkaran Kemiskinan | 100 |
| Gambar 2.34 | Belanja Langsung APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 105 |
| Gambar 2.35 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 107 |
| Gambar 2.36 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 108 |
| Gambar 2.37 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 110 |
| Gambar 2.38 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 112 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 2.39 | Komposisi Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017 | 114 |
| Gambar 3.1 | Perkembangan Stunting di Indonesia | 118 |
| Gambar 3.2. | Tren Stunting Balita Di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2017 | 119 |
| Gambar 3.3. | Posisi Relatif Stunting Kabupaten Brebes Terhadap Provinsi Jawa Tengah | 120 |
| Gambar 3.4 | Analisis Relevansi Angka Stunting Antara Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017 | 120 |
| Gambar 3.5 | Analisis Relevansi Total Anggaran Kesehatan dengan Persentase Stunting | 121 |
| Gambar 3.6 | TOC stunting | 123 |
| Gambar 3.7 | Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Persentase Stunting | 124 |
| Gambar 3.8 | Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Peningkatan Rumah Sehat | 127 |
| Gambar 3.9 | Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Penurunan Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi | 129 |
| Gambar 3.10 | Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Peningkatan Kesehatan Balita | 132 |
| Gambar 3.11 | Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Sehat untuk Menurunkan Stunting | 135 |
| Gambar 3.12 | Prioritas Wilayah Penurunan Ibu Hamil Resiko Tinggi (Anemi) untuk Menurunkan Stunting | 136 |
| Gambar 3.13 | Prioritas Wilayah Penurunan Ibu Hamil Resiko Tinggi (KEK) untuk Menurunkan Stunting | 137 |
| Gambar 3.14 | Prioritas Wilayah Penurunan Balita Gizi Buruk untuk Menurunkan Stunting | 138 |
| Gambar 3.15 | Prioritas Wilayah Peningkatan Desa Siaga Aktif untuk Menurunkan Stunting | 139 |
| Gambar 3.16 | Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Air Minum Layak untuk Menurunkan Stunting | 140 |
| Gambar 3.17 | Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Jamban Layak untuk Menurunkan Stunting | 140 |
| Gambar 3.18 | Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Tangga PHBS untuk Meningkatkan Rumah Sehat | 141 |
| Gambar 3.19 | Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Akses Air Minum Layak untuk Meningkatkan Rumah Sehat | 142 |
| Gambar 3.20 | Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Akses Jamban Layak untuk Meningkatkan Rumah Sehat | 143 |
| Gambar 3.21 | Prioritas Wilayah Intervensi Ibu Hamil Anemi dan Ibu Hamil dengan HIV (+) | 144 |
| Gambar 3.22 | Prioritas Wilayah Intervensi Persentase Ibu Hamil KEK dan Ibu Hamil dengan HIV (+) | 145 |
| Gambar 3.23 | Prioritas Wilayah Intervensi Ibu Anemi dan Ibu Hamil Mendapat Fe 3 | 146 |
| Gambar 3.24 | Prioritas Wilayah Intervensi Mengurangi Ibu Hamil KEK dengan Pemberian Tablet Fe3 | 147 |
| Gambar 3.25 | Prioritas Wilayah Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Mengurangi Ibu Anemi | 148 |
| Gambar 3.26 | Prioritas Wilayah Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Mengurangi Ibu Kurang Energi Kronis (KEK) | 149 |
| Gambar 3.27 | Prioritas Wilayah Intervensi Posyandu Aktif untuk Mengurangi Ibu Anemi | 150 |
| Gambar 3.28 | Prioritas Wilayah Intervensi Posyandu Aktif untuk Mengurangi Ibu Kurang Energi Kronis | 151 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 3.29 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase BBLR | 152 |
| Gambar 3.30 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Baduta BGM | 153 |
| Gambar 3.31 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita BGM | 154 |
| Gambar 3.32 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase ASI Eksklusif | 155 |
| Gambar 3.33 | Pengelompokan Wilayah Balita Gizi Buruk dan Persentase Pemberian Vitamin A Pada Balita | 156 |
| Gambar 3.34 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | 157 |
| Gambar 3.35 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita Ditimbang | 158 |
| Gambar 3.36 | Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Posyandu Aktif | 159 |
| Gambar 3.37 | Pengelompokan Wilayah Persentase Desa Siaga Aktif dan Persentase Posyandu Aktif | 160 |
| Gambar 3.38 | Anggaran Urusan Keseharian Per Program di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016 | 177 |

Daftar Singkatan

| | |
|----------|--|
| AIDS | Acquired Immuno Deficiency Syndrome |
| AKABA | Angka Kematian Balita |
| AKI | Angka Kematian Ibu |
| AKB | Angka Kematian Bayi |
| AKG | Angka Kecukupan Gizi |
| Alsintan | Alat Mesin Pertanian |
| AM | Angka Melanjutkan |
| APBD | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah |
| APBD-P | Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan |
| APBN | Anggaran Pendapatan Belanja Negara |
| APM | Angka Partisipasi Murni |
| APK | Angka Partisipasi Kasar |
| APS | Angka Partisipasi Sekolah |
| APtS | Angka Putus Sekolah |
| ASI | Air Susu Ibu |
| Baduta | (Anak) Bawah Dua Tahun |
| Balita | (Anak) Bawah Lima Tahun |
| Bappenas | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BBLR | Bayi Berat Lahir Rendah |
| BDT | Basis Data Terpadu |
| BGM | Bawah Garis Merah |
| BOK | Bantuan Operasional Kesehatan |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| CPCL | Calon Lokasi Calon Penerima |
| DAK | Dana Alokasi Khusus |
| DAU | Dana Alokasi Umum |
| DOF | Derajat Otonomi Fiskal |
| DPI | Dampak Perubahan Iklim |
| GK | Garis Kemiskinan |
| GAKY | Gangguan Akibat kurang Yodium |
| Ha | Hektar |
| HIV | Human Immunodeficiency Virus |
| HPK | Hari Pertama Kehidupan |
| IP | Indeks Pertanaman |
| IPM | Indeks Pembangunan Manusia |
| JUT | Jalan Usaha Tani (JUT) |
| KEK | Kekurangan Energi Kronis |
| KEP | Kurang Energi Protein |
| Kg | Kilogram |
| KIA | Kesehatan Ibu dan Anak |
| KM | Kilometer |

| | |
|----------|--|
| KPM | Keluarga Penerima Manfaat |
| KTP | Kartu Tanda Penduduk |
| K/L | Kementerian Lembaga |
| NPK | Nitrogen Phosphat Kalium |
| NTP | Nilai Tukar Petani |
| NTNP | Nilai Tukar Petani Perikanan |
| NTPH | Nilai Tukar Petani Hortikultura |
| NTPP | Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan |
| NTPR | Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat |
| NTPT | Nilai Tukar Petani Peternakan |
| OPT | Organisme Pengganggu Tanaman |
| PAD | Pendapatan Asli Daerah |
| PDB | Produk Domestik Bruto |
| PDRB | Produk Domestik Regional Bruto |
| Pemda | Pemerintah Daerah |
| Perpres | Peraturan Presiden |
| PHBS | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| PKH | Program Keluarga Harapan |
| PMT | Pemberian Makanan Tambahan |
| Polindes | Pondok Bersalin Desa |
| Posyandu | Pos Pelayanan Terpadu |
| PPH | Pola Pangan Harapan |
| PUAP | Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan |
| Puskemas | Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pustu | Puskesmas Pembantu |
| Rakor | Rapat Koordinasi |
| Raskin | Beras Miskin |
| Rastrra | Beras Sejahtera |
| Resti | Resiko Tinggi |
| RKPD | Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RMU | Rice Milling Unit |
| RPJPN | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| RPJMD | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
| RTM | Rumah Tangga Miskin |
| RTS | Rumah Tangga Sasaran |
| RTSM | Rumah Tangga Sangat Miskin |
| Saprodi | Sarana Produksi |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SD/MI | Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah |
| SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |

| | |
|---------|---|
| SMA/MA | Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah |
| SMP/MTs | Sekolah Menengah Pertama/mandrasah Tsanawiyah |
| SNP | Standar Nasional Pendidikan |
| SPM | Standar Pelayanan Minimum |
| SPKD | Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah |
| SUSENAS | Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| TB | Tuberkulosis |
| TKPK | Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| TNP2K | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| TOC | Theory of Change |
| TPAK | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
| TPT | Tingkat Pengangguran Terbuka |
| UKBM | Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat |
| UKM | Usaha Mikro dan Kecil |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
| UMR | Upah Minimum Regional |
| UU | Undang-Undang |
| WBC | Wereng Batang Coklat |



BAB 1

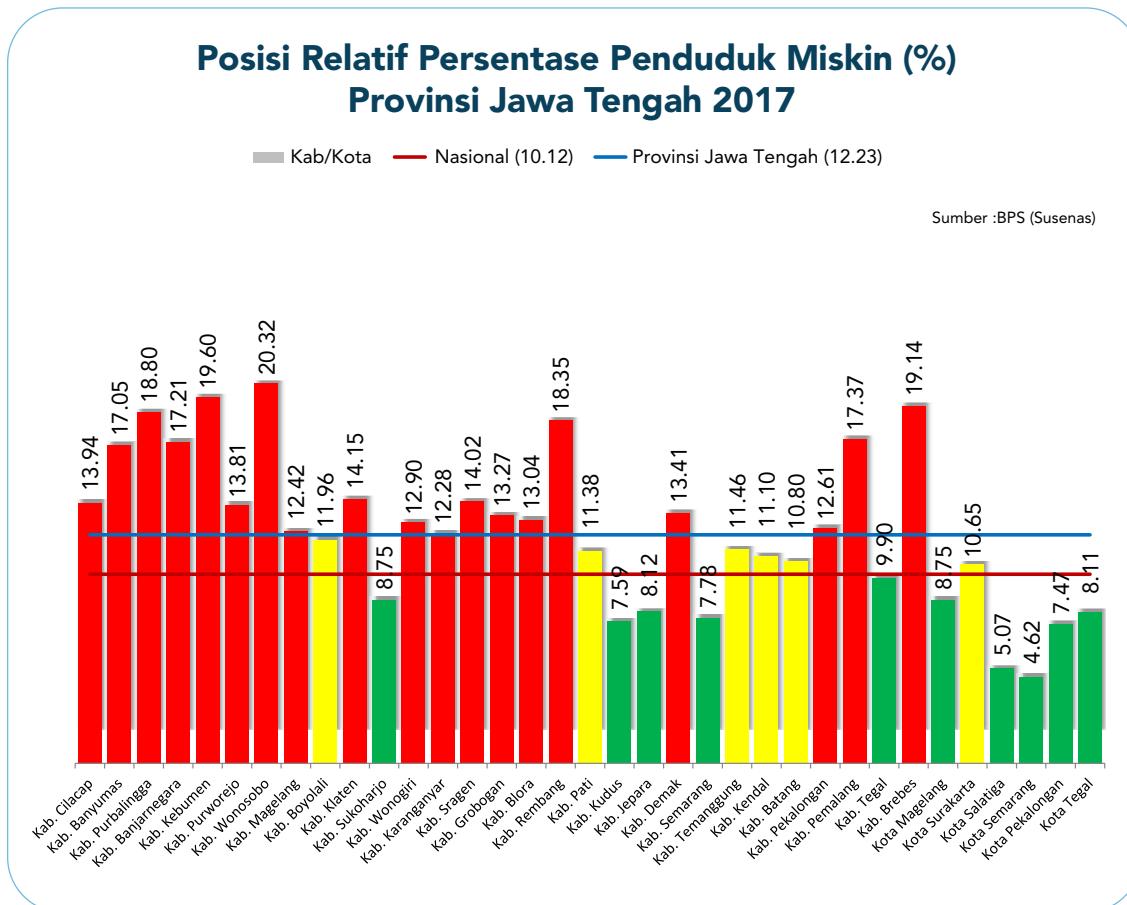
PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN BREBES

1.1 DIMENSI KONSUMSI

Di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes menempati urutan ketiga terbesar setelah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2017, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Meskipun demikian, angka tersebut sudah merupakan pencapaian penurunan paling baik dalam 8 tahun terakhir. Dilihat dari sisi perkembangan antar waktu dari tahun 2010 hingga 2017, di setiap tahunnya Kabupaten Brebes selalu mengalami penurunan angka kemiskinan. Selama kurun waktu tersebut, kemiskinan menurun sebesar 3,87%. (Gambar 1.1)

Sesuai dengan penurunan angka kemiskinan yang terus terjadi di setiap tahunnya, hal ini pun menunjukkan grafik yang relevan terhadap penurunan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Meskipun penurunan tersebut relevan terhadap penurunan Provinsi dan Nasional, namun posisi garis penurunan di Kabupaten Brebes berada cukup jauh di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menjadi peringatan bagi Kabupaten Brebes karena tidak akan mampu mengejar angka Provinsi dan Nasional jika pola penurunan masih sama. Perlu usaha yang cukup besar untuk percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes dengan laju yang lebih besar agar mampu mengejar angka Provinsi dan Nasional. (Gambar 1.1)

Gambar 1.1 Karakteristik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes



Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2017

Kab/Kota

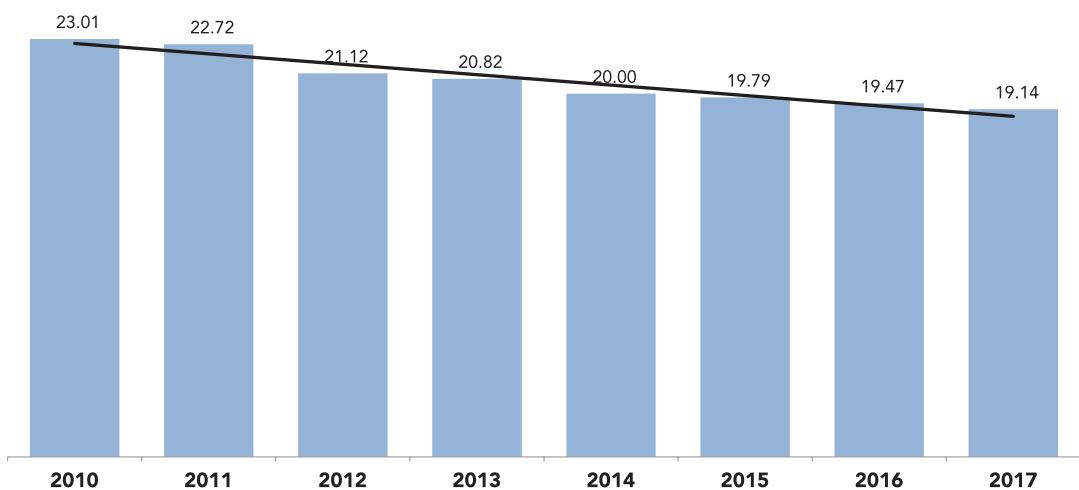
Sumber :BPS (Susenas)



Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2017)

Nasional Provinsi Jawa Tengah Linear (Provinsi Jawa Tengah)

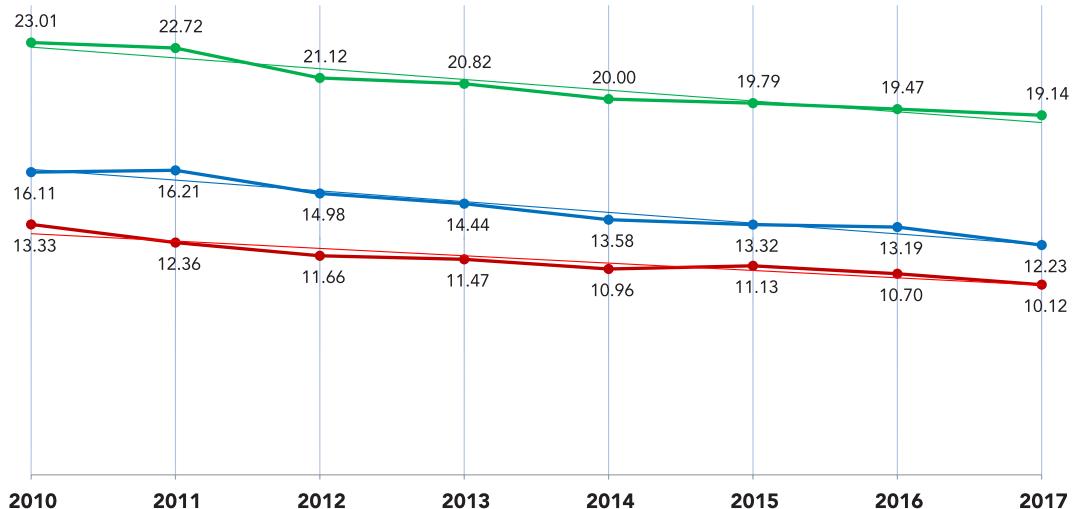
Sumber :BPS (Susenas)



Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2017

Nasional Provinsi Jawa Tengah Kab. Brebes

Sumber :BPS (Susenas)



Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 cukup tinggi di atas Provinsi dan Nasional. Indeks Kedalaman menunjukkan seberapa sulit mengangkat atau mengeluarkan orang miskin dari Garis Kemiskinan (GK), sedangkan Indeks Keparahan akan menilai sejauh mana gap atau perbedaan konsumsi antar penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kabupaten Brebes tahun 2017 adalah 3,06 sedangkan angka Provinsi sebesar 2,21 dan Nasional hanya 1,79. Tidak jauh berbeda kondisinya, Indeks Keparahan Kabupaten Brebes yaitu 0,78 masih cukup tinggi di atas Provinsi sebesar 0,57 dan Nasional sebesar 0,46. (Gambar 1.2)

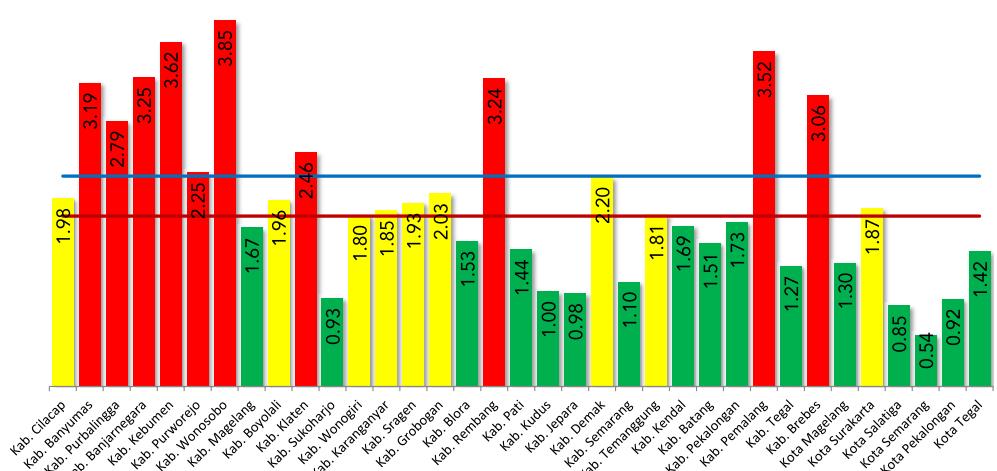
Angka P1 dan P2 di Kabupaten Brebes tersebut yang masih berada di atas posisi Provinsi dan Nasional pada tahun 2017 merupakan angka yang sudah menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan P1 dari 1,16 dan P2 3,96 merupakan penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya selama 2 tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Secara umum selama 8 tahun terakhir kondisi P1 dan P2 di Kabupaten Brebes terus mengalami naik turun atau fluktusi. Pencapaian terbaik terdapat pada tahun 2014 di mana P1 pada saat itu 2,93 dan P2 0,66. Sedangkan pencapaian terburuk berada di tahun 2016. (Gambar 1.2)

Gambar 1.2 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Brebes

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2017

■ Kab/Kota ■ Nasional (1.79) ■ Provinsi Jawa Tengah (2.21)

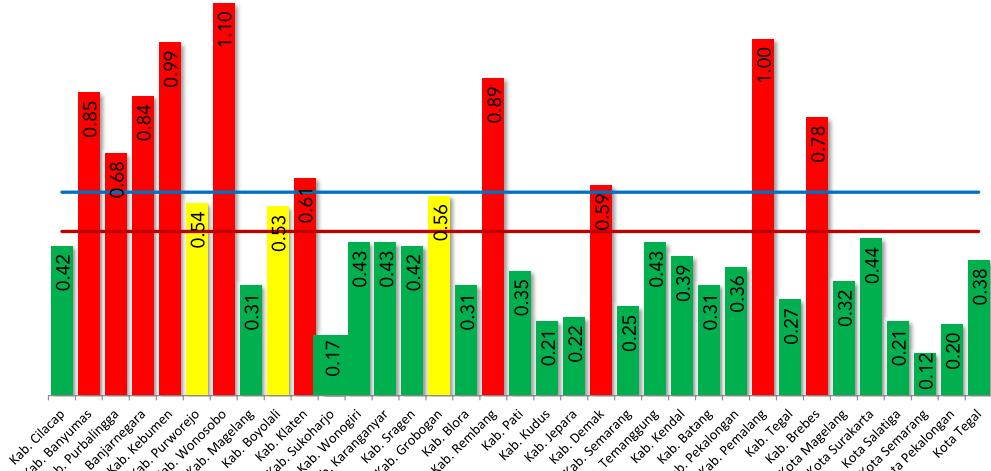
Sumber :BPS (Susenas)



Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2017

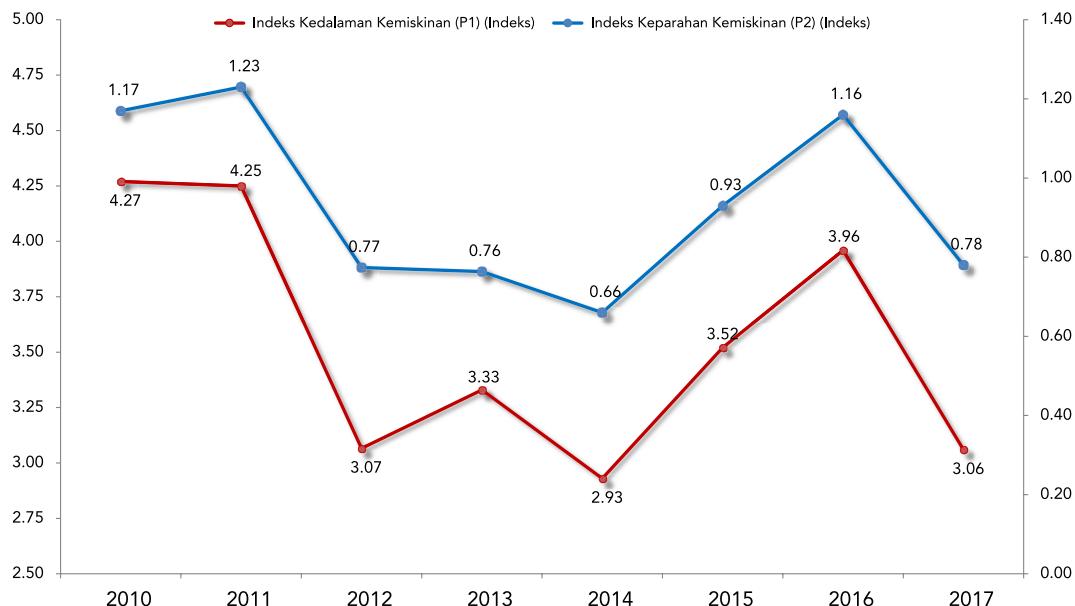
■ Kab/Kota ■ Nasional (0.46) ■ Provinsi Jawa Tengah (0.57)

Sumber :BPS (Susenas)



Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2017

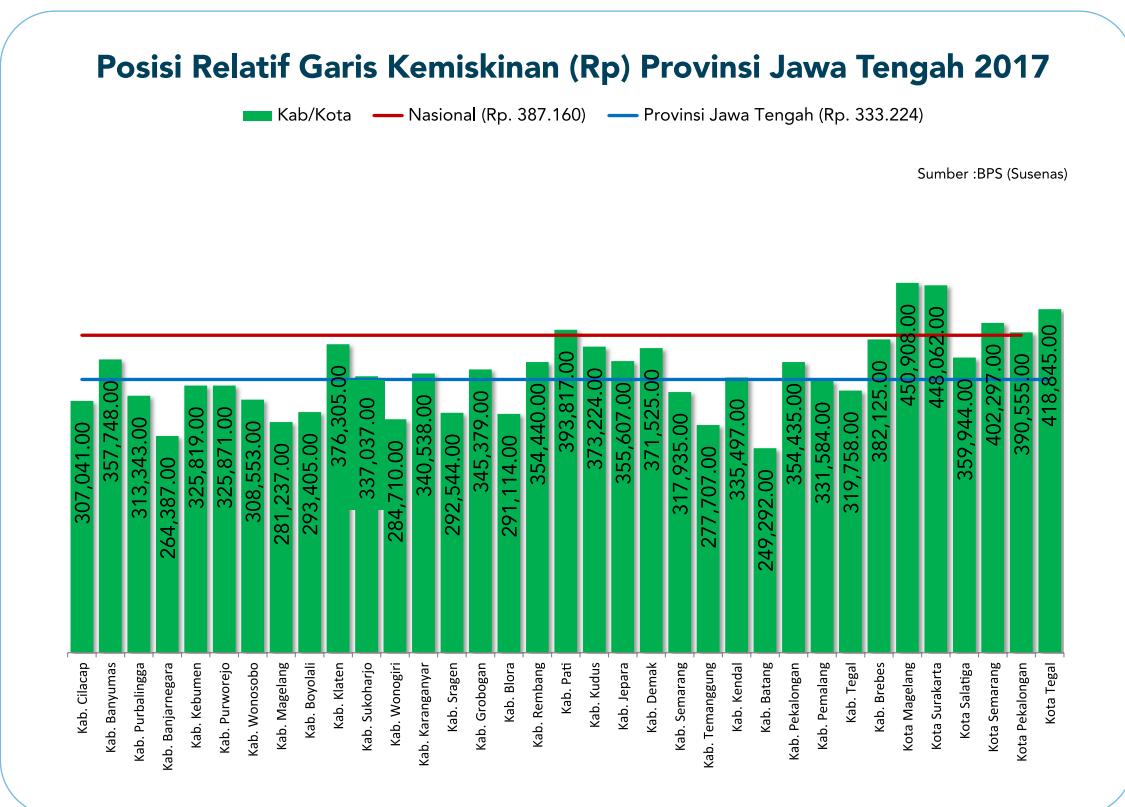
Sumber: BPS, diolah



Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Brebes pada tahun 2017 adalah sebesar Rp382.125 yang berada di atas garis GK Provinsi sebesar Rp333.224 namun berada di bawah nasional sebesar Rp387.160. GK Kabupaten Brebes relative berada di pertengahan antara GK Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, GK terendah ditempati oleh Kabupaten Batang yaitu Rp249.292 dan GK tertinggi yaitu Rp450.908 ditempati oleh Kota Magelang. (Gambar 1.3)

Pada umumnya Garis Kemiskinan akan cenderung naik seiring dengan perkembangan inflasi dari tahun ke tahun. Seperti halnya yang terjadi pada Kabupaten Brebes di mana GK pada tahun 2010 masih berada di Rp239.086 dan menjadi Rp382.125 pada 2017. Disamping GK yang terus naik, diiringi dengan harga beras eceran yang juga semakin naik yaitu Rp10.471/ Kg pada tahun 2017. Di samping mahalnya harga eceran beras, rata-rata Beras Miskin (Raskin) yang dibeli oleh kelompok penduduk miskin di Kabupaten Brebes adalah 5,62 Kg/ Rumah Tangga. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terus menurun selama 7 tahun terakhir. Hal ini tentunya akan menambah beban pengeluaran masyarakat miskin karena harga beras eceran yang semakin tinggi, sedangkan bantuan Raskin berkurang. (Gambar 1.3)

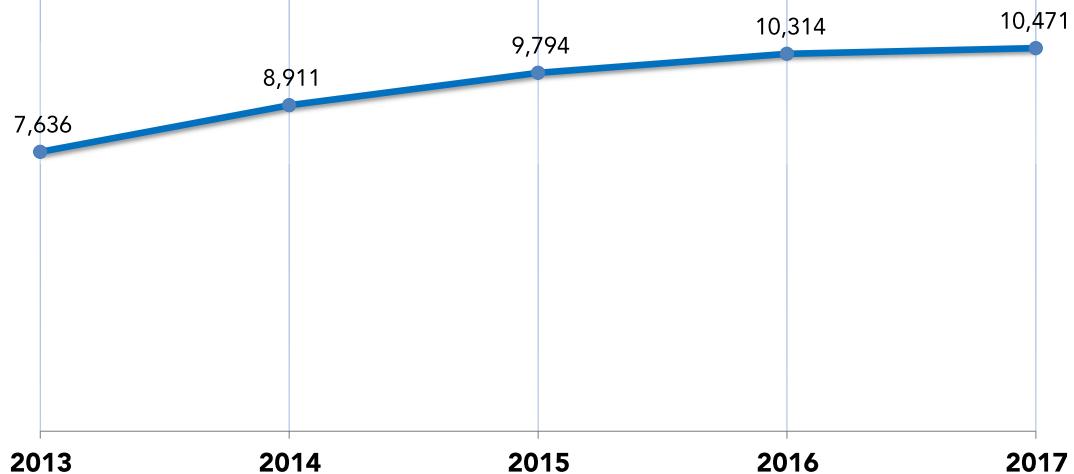
Gambar 1.3 Garis Kemiskinan, Harga Eceran Beras dan Kinerja Raskin Kabupaten Brebes



Perkembangan Harga Eceran Beras (Rp/Kg) Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017

■ Kab/Kota

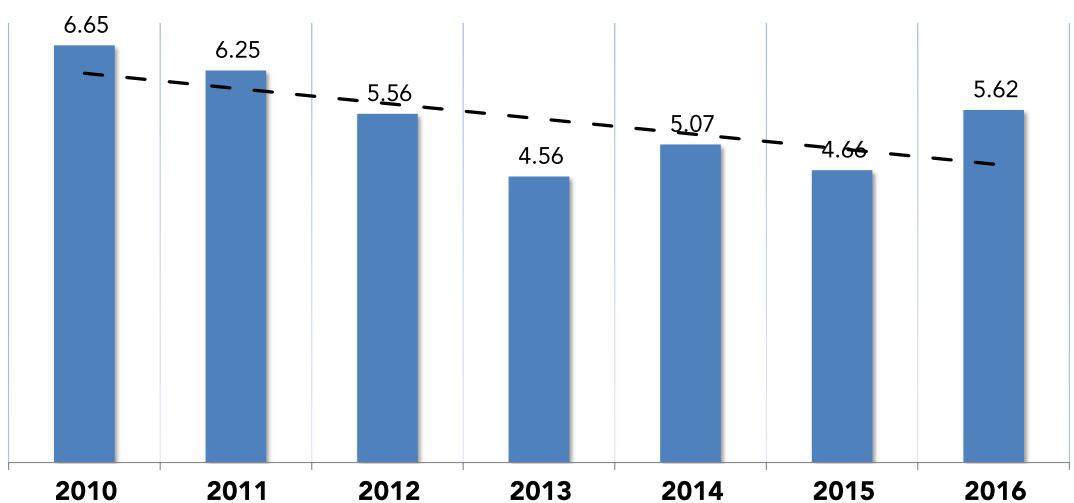
Sumber :Dinas Pertanian
Kab. Brebes



Perkembangan Rata-rata Jumlah Beras Raskin (Kg) Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2016

■ Kab/Kota - - Linear (Kab/Kota)

Sumber : BPS-Data dan Informasi
Kemiskinan Kabupaten Kota

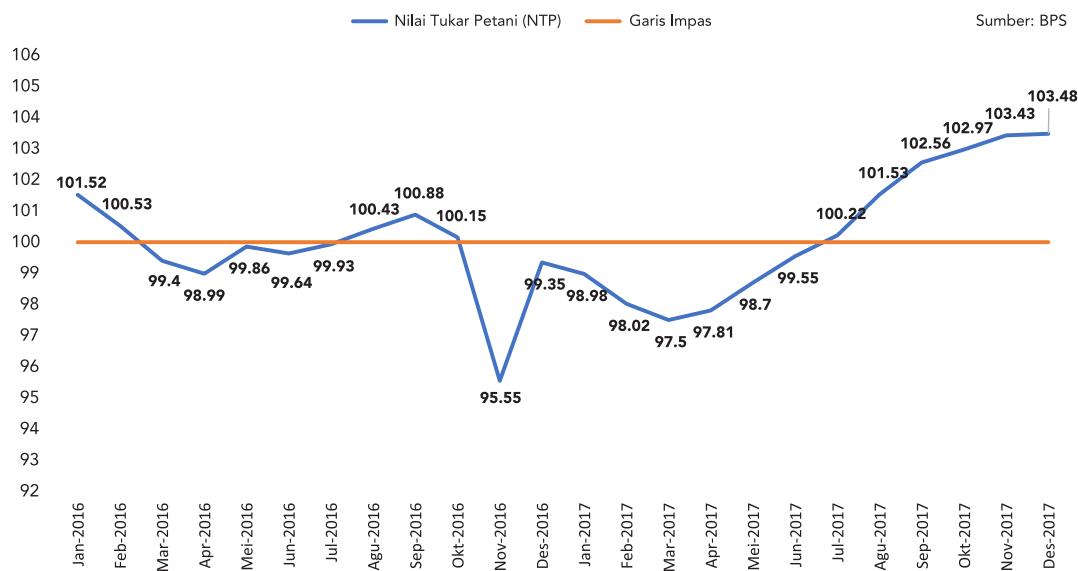


Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menunjukkan seberapa besar petani mengalami keuntungan atau kerugian. Di Provinsi Jawa Tengah, selama periode Maret hingga Desember 2017 NTP terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka tertinggi selama dua tahun terakhir yaitu 103.48 pada Desember 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa Petani mengalami keuntungan karena nilai berada di atas angka 100. Jika petani mengalami keuntungan maka terjadi

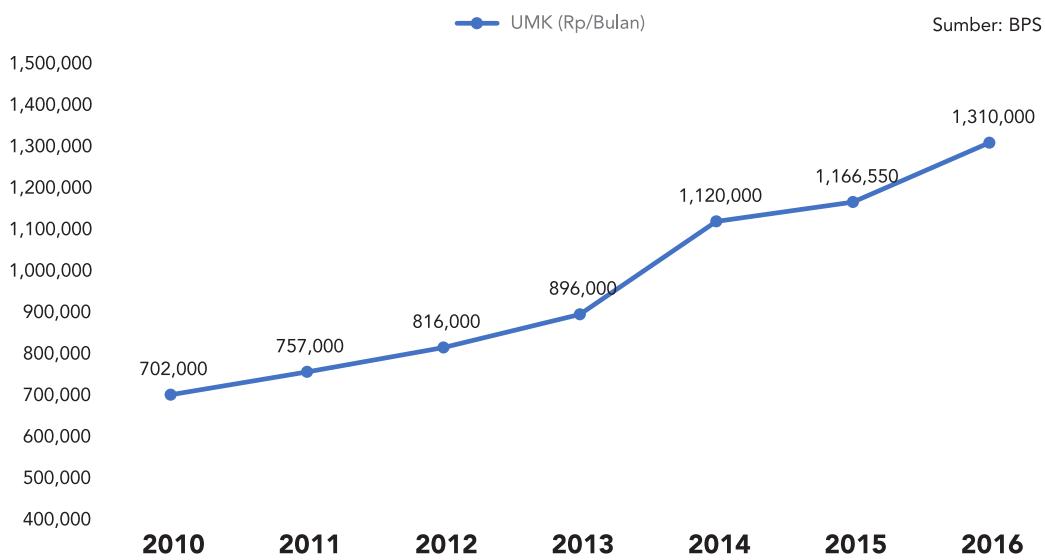
stabilitas harga pangan terutama beras dan berpengaruh pada kemampuan masyarakat miskin dalam membeli beras. Oleh karena itu, dengan tingginya NTP di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pencegah bertambahnya beban pengeluaran masyarakat miskin dalam mengkonsumsi beras. (Gambar 1.4)

Gambar 1.4 Nilai Tukar Petani dan Upah Minimum Regional Kabupaten Brebes

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2017



Upah Minimum Kabupaten Brebes (Rp/Bulan) Tahun 2010 - 2016

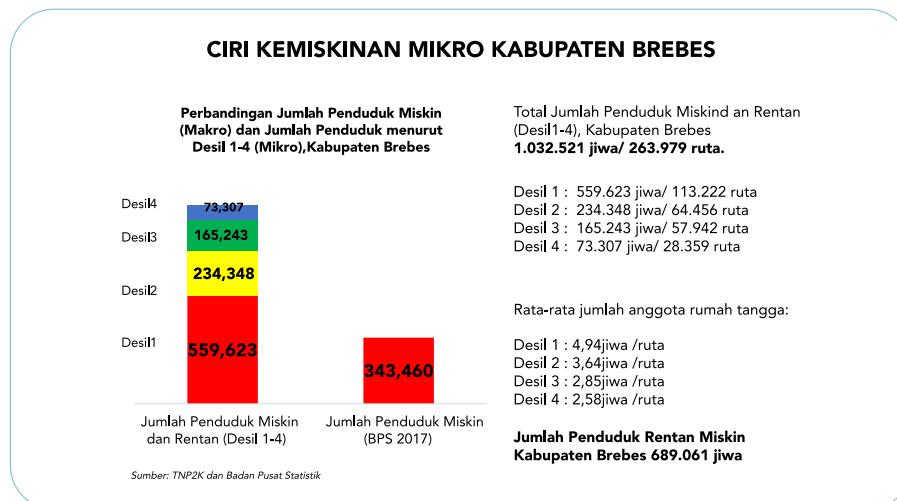


Semua penduduk Kabupaten Brebes dengan kategori miskin berada di dalam kelompok sepuluh persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah nasional. Dengan demikian bahwa semua penduduk miskin dengan perhitungan kemiskinan makro semua berada pada kategori paling tidak sejahtera di Indonesia.

Jika dilihat dari sisi kemiskinan mikro yang terbagi menjadi desil 1-4 atau 10% hingga 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah berasarkan Basis Data Terpadu, Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk miskin dengan kesejahteraan terendah (Desil 1) paling banyak dibandingkan dengan Desil 2-3. Jumlah Penduduk dengan kesejahteraan paling rendah yaitu sebanyak 559.623 jiwa dan ini lebih dari setengah total jumlah penduduk miskin dan rentan yaitu 1.032.521 jiwa. Total jumlah rumah tangga desil 1-4 di Kabupaten Brebes adalah 263.979 rumah tangga dengan jumlah rumah tangga terbanyak yaitu berasal dari desil 1 sebanyak 113.222 rumah tangga. (Gambar 1.5)

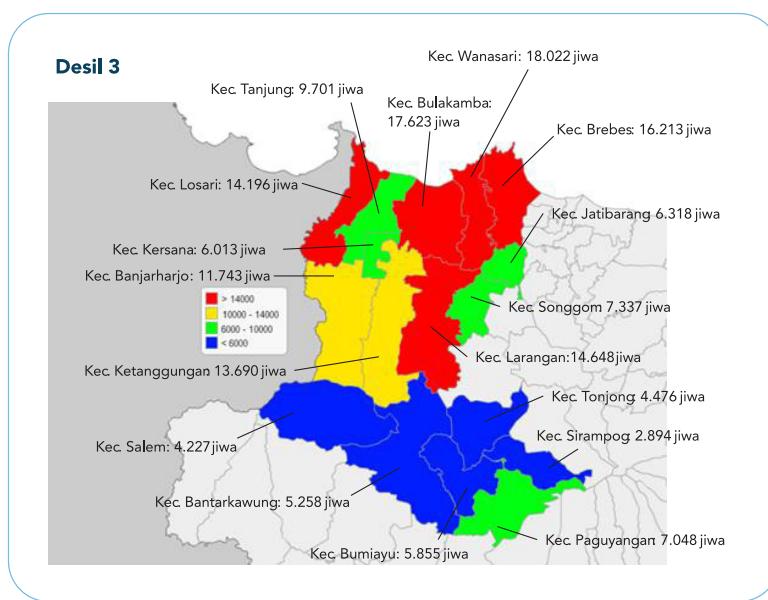
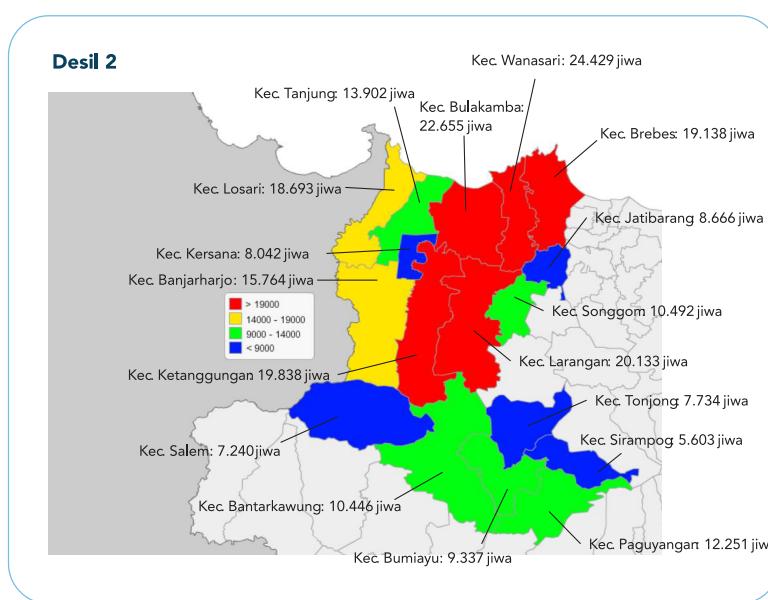
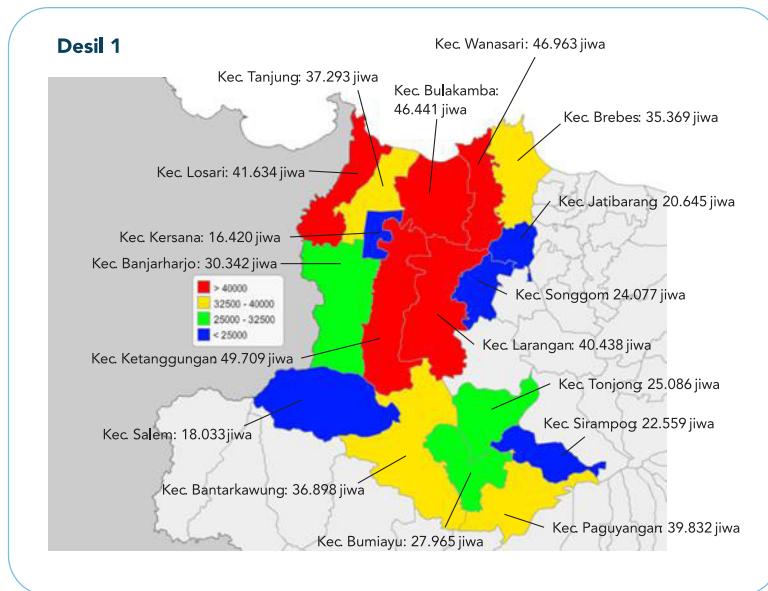
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga Desil 1 di Kabupaten Brebes adalah 4,94 jiwa atau hampir 5 jiwa per Rumah Tangga. Semakin tinggi tingkat desil, jumlah anggota rumah tangga semakin sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kesejahteraan penduduk Brebes, semakin banyak anak-anak yang mereka miliki. Artinya beban rumah tangga dalam menghidupi anggota rumah tangga semakin tinggi. Kabupaten Brebes juga dinilai memiliki penduduk rentan miskin sebanyak 689.061 jiwa. Jumlah tersebut merupakan jumlah pengurangan dari total jumlah penduduk miskin dan rentan (desil 1-4) terhadap jumlah penduduk miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (Gambar 1.5)

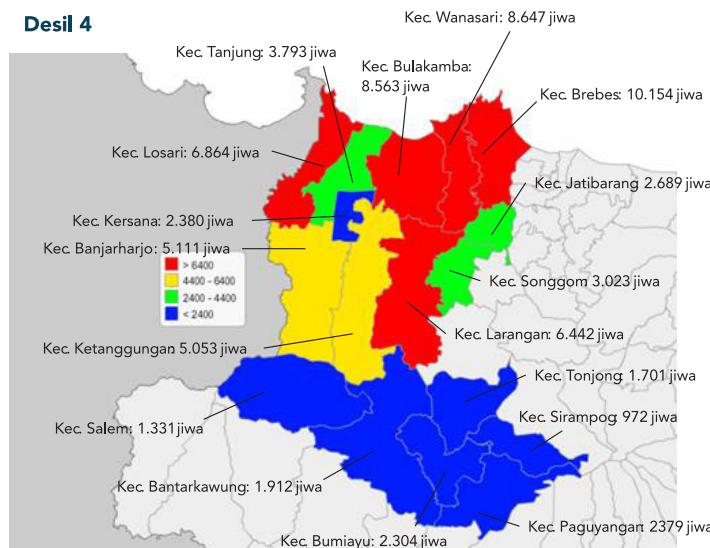
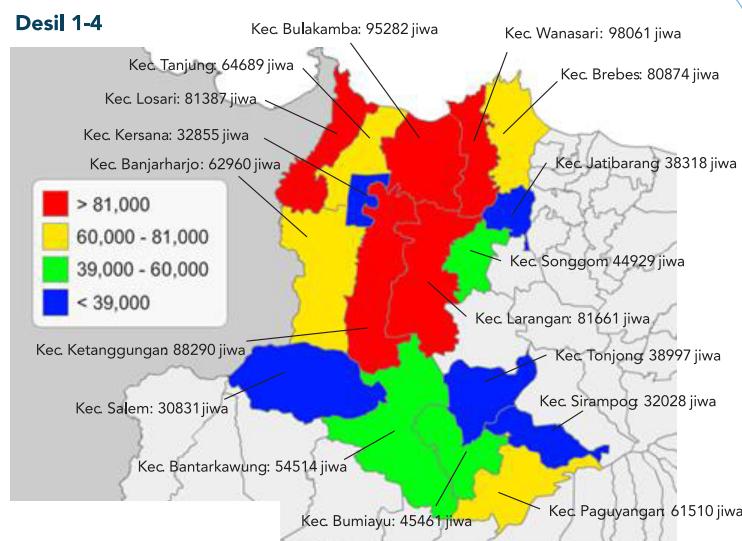
Gambar 1.5 Kemiskinan dan Kerentanan di Kabupaten Brebes



Jumlah individu Desil 1 di Kabupaten Brebes paling banyak terdapat di Kecamatan Ketanggungan yaitu sebesar 49.709 jiwa. Selain itu, Kecamatan Losari, Bulakamba, Wanasaari, dan Larangan juga mendominasi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk Desil 1 paling besar. Jumlah individu Desil 2 berada paling banyak di kantung-kantung Kecamatan Bulakamba, Wanasaari, Brebes, Larangan, dan Ketanggungan. Jumlah individu Desil 3 paling banyak di Kecamatan Losari, Bulakamba, Wanasaari, Brebes, dan Larangan. Sama hal nya dengan Desil 3, Desil 4 juga paling banyak berada di Kecamatan Losari, Bulakamba, Wanasaari, Brebes, dan Larangan. (Gambar 1.6)

Gambar 1.6 Kemiskinan dan Kerentanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes



Desil 4**Desil 1-4**

Secara keseluruhan, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk desil 1-4 paling banyak terdapat di Kecamatan Wanasari yaitu sebesar 98.061 jiwa. Selain itu, Kecamatan Losari, Bulakamba, Larangan, dan Ketanggungan juga menjadi Kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah penduduk miskin dan rentan miskin (Desil-1-4) terbanyak. (Gambar 1.6)

1.2 DIMENSI NON KONSUMSI

Pendidikan

Hampir seluruh indikator utama Pendidikan di Kabupaten Brebes menempati angka di bawah

Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2017 bisa dilihat beberapa indikator utama Pendidikan dan membandingkannya dengan capaian Provinsi dan Nasional. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Brebes adalah 84,53%, angka tersebut cukup jauh di bawah capaian Provinsi yaitu 97,55% dan Nasional yaitu 97,14%. Kondisi lebih buruk terlihat pada APM SMP/MTs yaitu hanya 64,13% yang lebih jauh lagi di bawah nasional yaitu 80,11% dan Nasional 78,30%. (Tabel 1.1)

Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih tinggi dibandingkan dengan APM, namun APK Kabupaten Brebes masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional. APK SD/MI tahun 2017 di Kabupaten Brebes adalah 99,62% sedangkan capaian Provinsi sudah 100% begitupun dengan Nasional. APK SMP/MTs Kabupaten Brebes tahun 2017 sebesar 89,26%. (Tabel 1.1)

Selain itu Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Brebes tahun 2017 juga masih berada di atas angka capaian Provinsi dan Nasional yaitu pada usia SD mencapai 0,13% sedangkan provinsi sebesar 0,06%. APS Kabupaten Brebes usia SMP mencapai 0,33% sedangkan Provinsi 0,17%. Lebih besar lagi, APS usia SMA 0,82% sedangkan angka Provinsi hanya 0,24%. Selain APM, APK, dan APS, Kabupaten Brebes juga perlu memerhatikan Angka Melanjutkan (AM) khususnya dari SMP/MTs ke SMA/MA yang hanya mencapai 74,95% pada tahun 2017. (Tabel 1.1)

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kemiskinan Dimensi Pendidikan Tahun 2017

| INDIKATOR | CAPAIAN (%) | CAPAIAN PROVINSI (%) | CAPAIAN NASIONAL (%) | STANDAR INDIKATOR |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) tahun 2017 | 84.53 | 97.55 | 97.14 | 100 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS (%) tahun 2017 | 64.13 | 80.11 | 78.30 | 100 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) tahun 2017 | 37.25 | 64.03 | 60.19 | 100 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) tahun 2017 | 99.62 | 100 | 108.43 | 100 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (%) tahun 2017 | 89.26 | 100 | 90.00 | 100 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) tahun 2017 | 57.29 | 78.02 | 82.25 | 100 |
| Angka Putus Sekolah Usia 7 -12 (%) Tahun 2017 | 0.13 | 0.06 | 0.15 | 0 |
| Angka Putus Sekolah Usia 13 -15 (%) Tahun 2017 | 0.33 | 0.17 | 0.39 | 0 |
| Angka Putus Sekolah Usia 16 -18 (%) Tahun 2017 | 0.82 | 0.24 | 0.84 | 0 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 94.29 | | | |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA | 74.95 | | | |

Sumber: BPS

Di Kabupaten Brebes, dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan, jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak yang tidak bersekolah. Dari total jumlah anak yang tidak bersekolah kelompok masyarakat miskin dan rentan sejumlah 70.572 anak, paling banyak berasal dari kelompok usia SMA/MA (16-18 tahun) yaitu sebanyak 39.427 anak. Kecamatan dengan jumlah anak tidak bersekolah dari kelompok miskin dan rentan berasal dari Kecamatan Bulakamba dan Wanasari dengan jumlah lebih dari 7000 anak. Sebaliknya, kecamatan paling sedikit anak tidak bersekolah dari kelompok miskin dan rentan adalah dari Kecamatan Sirampog yaitu hanya 1.458 anak. (Tabel 1.2)

Tabel 1.2 Kondisi Mikro Pendidikan Penduduk Miskin dan Rentan

| Nama Kecamatan | Jumlah Anak yang Bersekolah | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Usia 7-12 tahun | Usia 13-15 tahun | Usia 16-18 tahun | Total |
| SALEM | 3,131 | 1,317 | 503 | 4,951 |
| BANTARKAWUNG | 5,688 | 2,554 | 1,127 | 9,369 |
| BUMIAYU | 5,287 | 2,723 | 1,525 | 9,535 |
| PAGUYANGAN | 6,977 | 3,354 | 1,639 | 11,970 |
| SIRAMPOG | 3,777 | 1,866 | 1,030 | 6,673 |
| TONJONG | 4,199 | 2,169 | 1,190 | 7,558 |
| LARANGAN | 8,266 | 3,483 | 1,309 | 13,058 |
| KETANGGUNGAN | 8,574 | 3,411 | 1,351 | 13,336 |
| BANJARHARJO | 5,903 | 1,921 | 583 | 8,407 |
| LOSARI | 9,489 | 3,828 | 1,382 | 14,699 |
| TANJUNG | 7,323 | 2,799 | 953 | 11,075 |
| KERSANA | 3,597 | 1,564 | 540 | 5,701 |
| BULAKAMBA | 10,744 | 4,128 | 1,636 | 16,508 |
| WANASARI | 10,714 | 4,163 | 1,697 | 16,574 |
| SONGGOM | 4,517 | 2,111 | 846 | 7,474 |
| JATIBARANG | 4,068 | 1,716 | 577 | 6,361 |
| BREBES | 9,257 | 3,966 | 1,623 | 14,846 |
| | 111,511 | 47,073 | 19,511 | 178,095 |

| Nama Kecamatan | Jumlah Anak yang Tidak Bersekolah | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Usia 7-12 tahun | Usia 13-15 tahun | Usia 16-18 tahun | Total |
| SALEM | 281 | 472 | 1,089 | 1,842 |
| BANTARKAWUNG | 736 | 1,017 | 1,830 | 3,583 |
| BUMIAYU | 349 | 304 | 1,333 | 1,986 |
| PAGUYANGAN | 486 | 682 | 2,206 | 3,374 |
| SIRAMPOG | 250 | 249 | 959 | 1,458 |
| TONJONG | 408 | 311 | 1,124 | 1,843 |
| LARANGAN | 1,072 | 1,663 | 3,055 | 5,790 |
| KETANGGUNGAN | 1,275 | 2,009 | 3,581 | 6,865 |
| BANJARHARJO | 846 | 1,618 | 2,705 | 5,169 |
| LOSARI | 808 | 1,479 | 3,289 | 5,526 |
| TANJUNG | 751 | 1,412 | 2,880 | 5,043 |
| KERSANA | 337 | 734 | 1,440 | 2,511 |
| BULAKAMBA | 1,422 | 2,130 | 3,937 | 7,489 |
| WANASARI | 1,326 | 1,865 | 3,834 | 7,025 |
| SONGGOM | 565 | 913 | 1,798 | 3,276 |
| JATIBARANG | 376 | 684 | 1,458 | 2,518 |
| BREBES | 956 | 1,359 | 2,959 | 5,274 |
| | 12,244 | 18,901 | 39,427 | 70,572 |

Kesehatan

Dilihat dari beberapa indikator kesehatan, masih banyak pencapaian yang perlu diperbaiki oleh Kabupaten Brebes karena berada di bawah Provinsi Jawa Tengah seperti Usia Harapan Hidup, Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih dan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup Tahun 2017 di Kabupaten Brebes adalah 68,61 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,08 tahun dan masih lebih rendah juga dari Usia Harapan Hidup Nasional yaitu 71,06 tahun. (Tabel 1.3)

Berdasarkan data yang ada mengenai Prevalensi Stunting, pada Tahun 2013 diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki persentase sebesar 32,7% dan menjadi salah satu dari 100 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam penanganan Stunting di Indonesia. Selain itu diketahui pada tahun 2017 bahwa prevalensi anak gizi buruk di Kabupaten Brebes masih 0,7%. (Tabel 1.3)

Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih di Kabupaten Brebes masih sebesar 90% pada tahun 2017, sedangkan capaian Provinsi sudah 98,4%. Target di dalam RPJMD sudah disebutkan hingga tahun 2022 kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 95%. (Tabel 1.3)

Sedangkan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Brebes tahun 2017 masih 85% sedangkan angka Provinsi sudah mencapai 112,6%, terdapat gap yang cukup jauh di antara keduanya. Sedangkan Kabupaten Brebes sendiri memiliki target pada tahun 2022 pencapaian komplikasi kebidanan mampu mencapai 95%. Selain itu, penduduk dengan keluhan kesehatan berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 adalah 41,61% sedangkan provinsi hanya 33,39%. (Tabel 1.3)

Tabel 1.3 Capaian Indikator Kemiskinan Dimensi Kesehatan

| INDIKATOR | CAPAIAN (%) | CAPAIAN PROVINSI (%) | CAPAIAN NASIONAL (%) |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Usia Harapan Hidup (tahun) Tahun 2017 | 68,61 | 74,08 | 71,06 |
| Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2013 | 43,62 | | |
| Penurunan prevalensi anak gizi buruk (Persentase) Tahun 2017 | 0,7 | 3,00 | 3,80 |
| Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Tahun 2017 | 90 | 98,4 | |
| Persentase komplikasi Kebidanan yang tertangani Tahun 2017 | 85 | 112,6 | |
| Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Tahun 2016 | 41,61 | 33,39 | 28,53 |

Sumber: BPS

Dalam kelompok masyarakat miskin dan rentan (desil 1-4) total jumlah individu penyandang cacat di Kabupaten Brebes yaitu 13.606 jiwa dan paling banyak berasal dari Kecamatan Bulakamba yaitu sebanyak 1.304 jiwa. Jumlah individu penyandang cacat di Kabupaten Brebes paling banyak terdapat pada kelompok usia 15-44 tahun yaitu dari jenis kelamin perempuan terdapat 2.480 jiwa dan laki-laki terdapat 3.105 jiwa. Hal ini perlu dikhawatirkan karena kelompok dari usia tersebut merupakan penduduk yang seharusnya sedang dalam masa yang produktif untuk bekerja. (Tabel 1.4)

Selain itu, jumlah individu penderita penyakit kronis pada kelompok miskin dan rentan di Kabupaten Brebes total sejumlah 26.684 jiwa. Dari total jumlah tersebut, paling banyak terdapat di Kecamatan Brebes yang merupakan wilayah pusat kegiatan dari Kabupaten Brebes sendiri. Hal ini berbeda dari individu penyandang cacat yang berasal paling banyak dari Kabupaten Bulakamba. (Tabel 1.4) Individu penderita penyakit kronis di Kabupaten Brebes dari kelompok miskin dan rentan paling banyak berusia di atas 60 tahun dengan rincian jumlah perempuan 5.695 jiwa dan laki-laki 6.598 jiwa. Sedangkan kelompok usia 15 tahun ke bawah memiliki jumlah paling sedikit yaitu perempuan 520 jiwa dan laki-laki 477 jiwa. (Tabel 1.4)

Tabel 1.4 Kondisi Mikro Kesehatan Penduduk Miskin dan Rentan

| Kecamatan | Jumlah Individu Penyandang Cacat Desil 1-4 *) | | | | | | | | | | Total | |
|--------------|---|-----|------------------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|--------|--|-------|--|
| | Usia dibawah 15 tahun | | Usia 15-44 tahun | | Usia 45-59 tahun | | Usia 60 tahun keatas | | | | | |
| | P | L | P | L | P | L | P | L | | | | |
| SALEM | 12 | 25 | 83 | 102 | 32 | 70 | 87 | 80 | 491 | | | |
| BANTARKAWUNG | 30 | 32 | 111 | 146 | 69 | 81 | 137 | 112 | 718 | | | |
| BUMIAYU | 18 | 36 | 148 | 217 | 75 | 82 | 125 | 113 | 814 | | | |
| PAGUYANGAN | 26 | 23 | 111 | 130 | 56 | 71 | 66 | 79 | 562 | | | |
| SIRAMPOG | 6 | 18 | 72 | 94 | 33 | 47 | 59 | 57 | 386 | | | |
| TONJONG | 29 | 34 | 87 | 129 | 51 | 63 | 95 | 88 | 576 | | | |
| LARANGAN | 42 | 46 | 190 | 206 | 86 | 111 | 192 | 150 | 1.023 | | | |
| KETANGGUNGAN | 31 | 54 | 190 | 207 | 86 | 80 | 243 | 141 | 1.032 | | | |
| BANJARHARJO | 39 | 32 | 171 | 259 | 80 | 90 | 180 | 148 | 999 | | | |
| LOSARI | 41 | 60 | 199 | 224 | 100 | 108 | 198 | 125 | 1.055 | | | |
| TANJUNG | 26 | 36 | 123 | 169 | 67 | 67 | 149 | 93 | 730 | | | |
| KERSANA | 7 | 18 | 54 | 84 | 54 | 57 | 103 | 85 | 462 | | | |
| BULAKAMBA | 46 | 65 | 246 | 305 | 102 | 117 | 242 | 181 | 1.304 | | | |
| WANASARI | 36 | 66 | 208 | 281 | 81 | 107 | 126 | 102 | 1.007 | | | |
| SONGGOM | 18 | 31 | 114 | 111 | 67 | 67 | 99 | 98 | 605 | | | |
| JATIBARANG | 28 | 44 | 178 | 193 | 98 | 86 | 206 | 132 | 965 | | | |
| BREBES | 43 | 41 | 195 | 248 | 82 | 83 | 113 | 72 | 877 | | | |
| | 478 | 661 | 2,480 | 3,105 | 1,219 | 1,387 | 2,420 | 1,856 | 13,606 | | | |

| Kecamatan | Jumlah Individu Penderita Penyakit Kronis Desil 1-4 *) | | | | | | | | | | Total | |
|--------------|--|-----|------------------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|--------|--|-------|--|
| | Usia dibawah 15 tahun | | Usia 15-44 tahun | | Usia 45-59 tahun | | Usia 60 tahun keatas | | | | | |
| | P | L | P | L | P | L | P | L | | | | |
| SALEM | 7 | 10 | 34 | 69 | 91 | 136 | 201 | 209 | 757 | | | |
| BANTARKAWUNG | 23 | 16 | 86 | 140 | 164 | 242 | 312 | 375 | 1.358 | | | |
| BUMIAYU | 30 | 22 | 142 | 181 | 229 | 307 | 407 | 449 | 1.167 | | | |
| PAGUYANGAN | 14 | 21 | 63 | 113 | 120 | 173 | 260 | 244 | 1.008 | | | |
| SIRAMPOG | 14 | 12 | 75 | 113 | 112 | 143 | 216 | 235 | 920 | | | |
| TONJONG | 20 | 17 | 69 | 121 | 147 | 165 | 277 | 297 | 1.113 | | | |
| LARANGAN | 28 | 29 | 142 | 155 | 200 | 249 | 302 | 299 | 1.404 | | | |
| KETANGGUNGAN | 41 | 33 | 201 | 240 | 277 | 311 | 383 | 420 | 1.906 | | | |
| BANJARHARJO | 30 | 23 | 154 | 189 | 257 | 336 | 509 | 549 | 2.047 | | | |
| LOSARI | 20 | 21 | 162 | 206 | 294 | 370 | 433 | 612 | 2.118 | | | |
| TANJUNG | 23 | 29 | 133 | 157 | 234 | 232 | 286 | 345 | 1.439 | | | |
| KERSANA | 39 | 39 | 117 | 137 | 128 | 135 | 194 | 232 | 1.021 | | | |
| BULAKAMBA | 58 | 49 | 187 | 263 | 283 | 404 | 425 | 489 | 2.158 | | | |
| WANASARI | 68 | 45 | 203 | 321 | 267 | 389 | 368 | 402 | 2.063 | | | |
| SONGGOM | 28 | 40 | 143 | 206 | 230 | 284 | 302 | 347 | 1.580 | | | |
| JATIBARANG | 29 | 27 | 116 | 131 | 208 | 256 | 363 | 526 | 1.656 | | | |
| BREBES | 48 | 44 | 214 | 277 | 330 | 431 | 457 | 568 | 2.369 | | | |
| | 520 | 477 | 2,241 | 3,019 | 3,571 | 4,563 | 5,695 | 6,598 | 26,684 | | | |

Infrastruktur Dasar

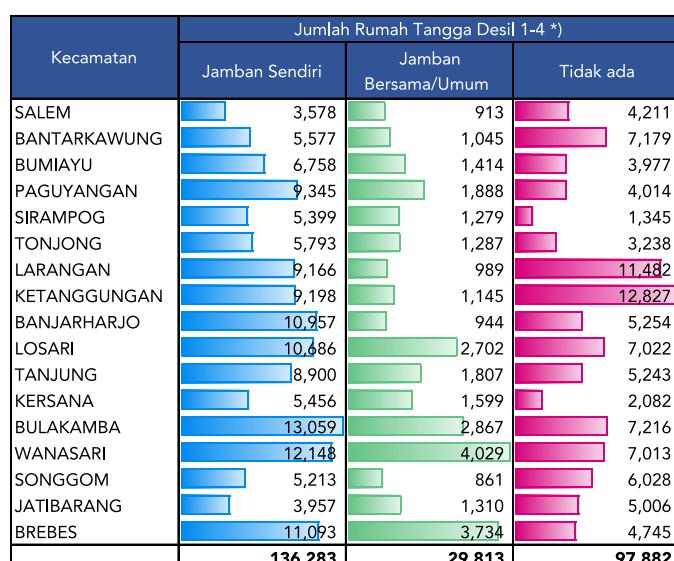
Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Brebes masih rendah, sebesar 65,18% di tahun 2016 dan berada di bawah capaian provinsi yaitu sebesar 70,66%. Indikator infrastruktur lainnya yang masih perlu dikejar oleh Kabupaten Brebes adalah cakupan akses jamban dan rasio jalan baik. Cakupan akses jamban di Kabupaten Brebes masih mencakup 68,6% rumah tangga. Dari angka cakupan tersebut, terdapat 136.283 rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki jamban sendiri dan 29.813 rumah tangga menggunakan jamban Bersama. Kecamatan Bulakamba adalah kecamatan dengan rumah tangga miskin dan rentan yang paling banyak memiliki jamban sendiri yaitu sebanyak 13.059 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Wanasari adalah kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang menggunakan jamban bersama paling banyak yaitu 4.029 rumah tangga. Secara keseluruhan di Kabupaten Brebes masih ada 97.882 rumah tangga dari golongan miskin dan rentan yang tidak memiliki akses terhadap jamban. Rumah Tangga dari golongan miskin dan rentan yang tidak memiliki akses terhadap jamban ini paling banyak terdapat di Kecamatan Ketanggungan yaitu sebanyak 12.827 rumah tangga dan Kecamatan Larangan sebanyak 11.482 rumah tangga. (Tabel 1.5) (Tabel 1.6)

Tabel 1.5 Capaian Indikator Kemiskinan dalam Dimensi Prasarana Dasar

| INDIKATOR | CAPAIAN (%) | CAPAIAN PROVINSI (%) | CAPAIAN NASIONAL (%) |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Tahun 2016 | 65,18 | 70,66 | 67,20 |
| Cakupan Akses Air Minum Layak | 88,35 | 76,30 | 71,14 |
| Cakupan Akses Jamban | 68,6 | | |
| Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) | 100 | | |
| Rasio Jalan Baik tahun 2017 | 60 | | |

Sumber: RPJMD Kab. Brebes 2017-2022 dan BPS

Tabel 1.6 Kepemilikan Jamban pada Rumah Tangga Miskin dan Rentan



Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Brebes pada tahun terakhir seperti yang tertera di RPJMD 2017-2022 adalah 9,06% dan tidak lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi yaitu 4,63%. Sedangkan jumlah angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 821.102 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, tingkat partisipasinya masih 65,35% dan lebih rendah dibandingkan Provinsi sebesar 67,15%. Kabupaten Brebes sendiri memiliki rasio penduduk yang bekerja sebesar 61,11%. (Tabel 1.7)

Sektor ketenagakerjaan ini jika dilihat ke dalam data mikro, diketahui bahwa terdapat 537.049 individu miskin dan rentan yang tidak bekerja. Dari jumlah tersebut lebih dari setengahnya atau 297.474 jiwa merupakan kelompok usia produktif yaitu 15-59 tahun. Sedangkan total individu yang bekerja dari kelompok desil 1 hingga 4 ini adalah sebanyak 425.865 jiwa. Jumlah ini tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah individu yang tidak bekerja. Dari jumlah individu yang bekerja tersebut, paling banyak berasal dari kelompok usia 15-59 tahun yaitu 372.800 jiwa. (Tabel 1.8)

Tabel 1.7 Capaian Indikator Kemiskinan dalam Dimensi Ketenagakerjaan

| INDIKATOR | CAPAIAN (%) | CAPAIAN PROVINSI (%) | CAPAIAN NASIONAL (%) |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 9,06 | 4,63 | |
| Angkatan Kerja (Jiwa) Tahun 2015 | 821.102 | | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 65,35 | 67,15 | |
| Rasio Penduduk yang Bekerja (%) | 61,11 | | |

Sumber: BPS

Tabel 1.8 Status Bekerja Individu Miskin dan Rentan

| Kecamatan | Usia 15-59 tahun | | Usia 60 tahun keatas | | Total | |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Bekerja | Tidak Bekerja | Bekerja | Tidak Bekerja | Bekerja | Tidak Bekerja |
| SALEM | 10,634 | 9,093 | 1,986 | 2,182 | 12,640 | 16,278 |
| BANTARKAWUNG | 19,092 | 15,554 | 3,334 | 3,452 | 22,485 | 28,467 |
| BUMIAYU | 14,913 | 13,725 | 2,752 | 3,080 | 17,678 | 24,987 |
| PAGUYANGAN | 22,261 | 17,350 | 3,875 | 3,262 | 26,177 | 31,481 |
| SIRAMPOG | 12,664 | 7,501 | 2,421 | 1,318 | 15,146 | 14,609 |
| TONJONG | 13,015 | 12,174 | 2,737 | 2,067 | 15,765 | 21,020 |
| LARANGAN | 33,463 | 20,054 | 4,378 | 4,433 | 37,993 | 38,194 |
| KETANGGUNGAN | 34,087 | 24,587 | 4,420 | 5,008 | 38,625 | 43,984 |
| BANJARHARJO | 22,769 | 17,630 | 3,999 | 4,650 | 26,895 | 31,963 |
| LOSARI | 26,664 | 25,872 | 3,180 | 4,514 | 29,910 | 45,407 |
| TANJUNG | 22,775 | 19,370 | 2,723 | 3,334 | 25,569 | 34,426 |
| KERSANA | 12,847 | 8,693 | 1,852 | 1,845 | 14,720 | 16,340 |
| BULAKAMBA | 35,229 | 27,229 | 3,447 | 5,164 | 38,806 | 49,884 |
| WANASARI | 37,067 | 27,597 | 3,599 | 4,460 | 40,761 | 49,607 |
| SONGGOM | 15,705 | 13,551 | 2,412 | 2,801 | 18,185 | 23,931 |
| JATIBARANG | 12,455 | 12,180 | 1,882 | 3,100 | 14,351 | 21,816 |
| BREBES | 27,160 | 25,314 | 2,905 | 4,528 | 30,159 | 44,655 |
| | 372,800 | 297,474 | 51,902 | 59,198 | 425,865 | 537,049 |

1.3 DAYA DUKUNG FISKAL

Seiring dengan terus menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes dari tahun 2010 hingga tahun 2016, terjadi dinamika yang cukup fluktuatif dengan kondisi fiskal di Kabupaten Brebes tersebut. Ketika tahun 2010 persentase penduduk miskin di Brebes adalah sebesar 23,01%, pada saat itu Derajat Otonomi Fiskal (DOF) hanya 6,35% dan Ruang Fiskal pun hanya 15,77%. Namun, seiring dengan berjalananya waktu, persentase penduduk miskin semakin berkurang hingga mencapai 19,47% pada tahun 2016. DOF juga cenderung terus naik hingga mencapai 11,87% setelah sebelumnya turun dari tahun 2015. Ruang fiskal Kabupaten Brebes juga secara umum mengalami kenaikan hingga mencapai 30,33% pada tahun 2016 meskipun sebelumnya Ruang Fiskal ini sempat mengalami naik dan turun pada tahun-tahun tertentu. (Gambar 1.7)

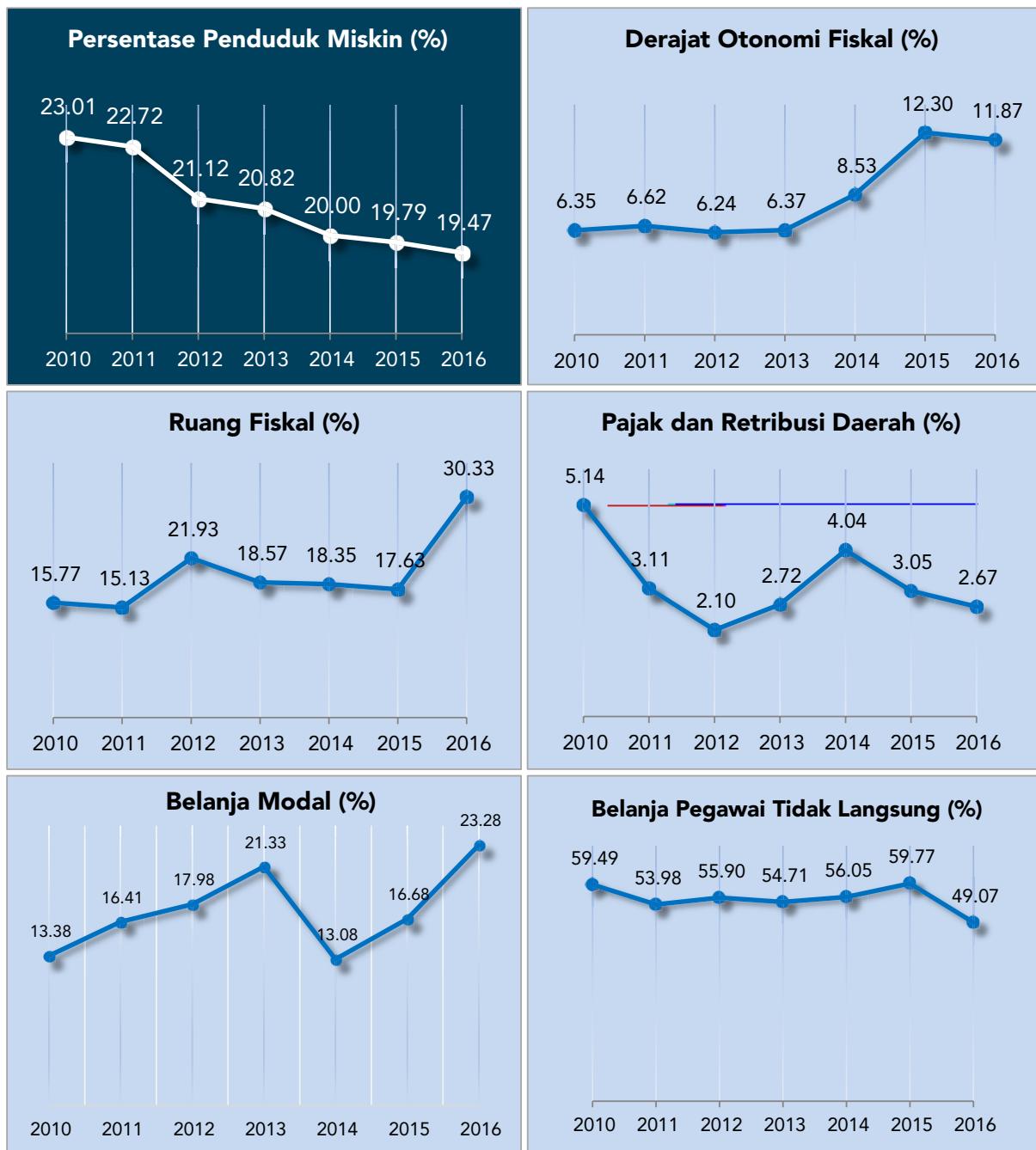
Memiliki pola fluktuasi yang berbeda dengan DOF dan Ruang Fiskal, Pajak dan Retribusi Daerah cenderung menurun hingga saat 2016 hanya mencapai 2,67%. Pajak dan Retribusi Daerah tersebut sempat mengalami kenaikan hanya pada tahun 2013 dan tahun 2014. Namun selama kurun waktu 2010 hingga 2016, tidak pernah lagi mencapai angka tertinggi selain pada tahun 2010 yaitu 5,14%. (Gambar 1.7)

Belanja Modal mengalami kecenderungan yang terus naik walaupun pernah sekali mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan mengalami angka yang paling rendah selama kurun waktu 2010 hingga 2016. Dimulai dari tahun 2010 di mana belanja modal Kabupaten Brebes masih 13,38% kemudian terus naik hingga tahun 2013 dan turun cukup drastis di tahun berikutnya. Namun berhasil naik kembali hingga tahun 2016 menjadi 23,28% dan menjadi angka tertinggi selama kurun waktu 7 tahun terakhir. Pola yang cukup berbeda dari kondisi fiskal lainnya, Belanja Pegawai Tidak Langsung cenderung stagnan. Selama kurun waktu antara tahun 2010 hingga 2015, persentase Belanja Pegawai Tidak Langsung terus berada di seputar angka 50%. Namun kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 menjadi 49,07%. (Gambar 1.7)

Gambar 1.7 Persentase Penduduk Miskin dan Kondisi Fiskal di Kabupaten Brebes

Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kab. Brebes, Prov. Jawa Tengah, Tahun 2010-2016

Sumber :BPS (Susenas)

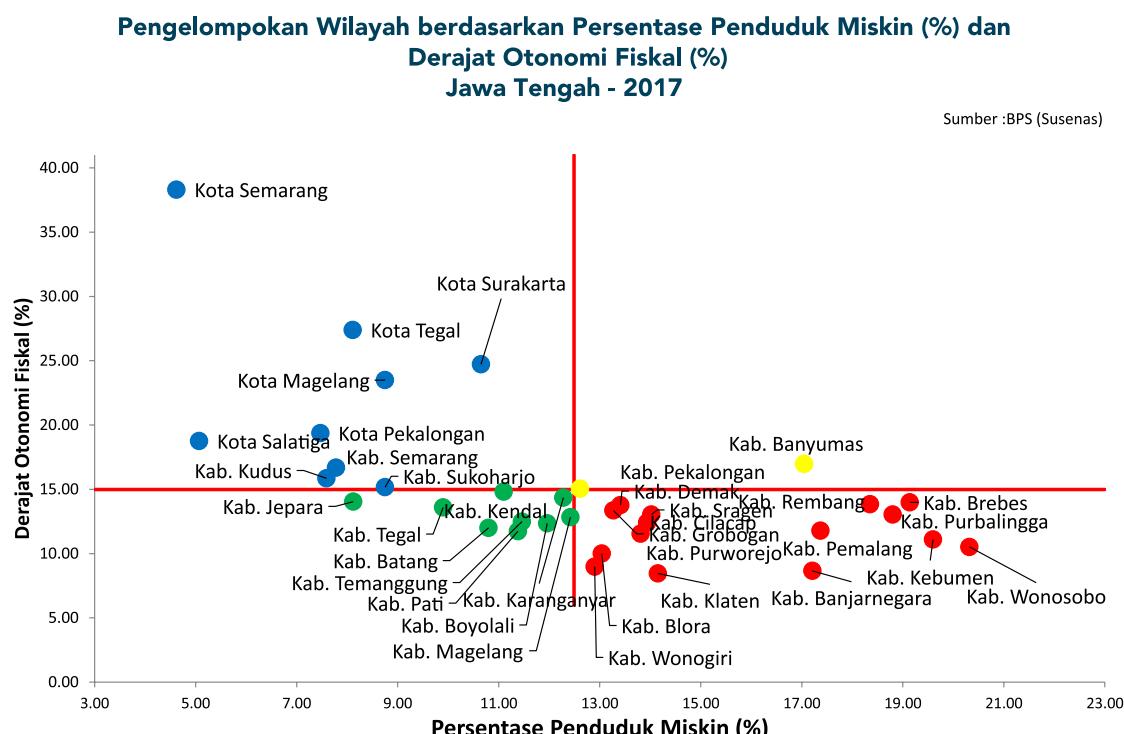


Derajat Otonomi Fiskal

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yang rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu ditambah dengan kondisi kemiskinan yang masih tinggi. DOF Kabupaten Brebes yang masih dibawah rata-rata provinsi yaitu hanya sebesar 11,87% pada tahun 2016, dibebankan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi yaitu 19,47% sehingga Kabupaten Brebes salah satu yang tergolong prioritas pertama (berwarna merah). (Gambar 1.8)

Prioritas yang dimaksud jika dilihat dari sudut pandang prioritas intervensi yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Selain itu, bagi Pemerintah Kabupaten Brebes sendiri, ini menjadi perhatian khusus dalam penanganan kemiskinan di mana sulitnya keleluasan dalam pengalokasian anggaran, kecuali dengan cara meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak untuk menaikkan DOF. (Gambar 1.8)

Gambar 1.8 Derajat Otonomi Fiskal dan Kemiskinan

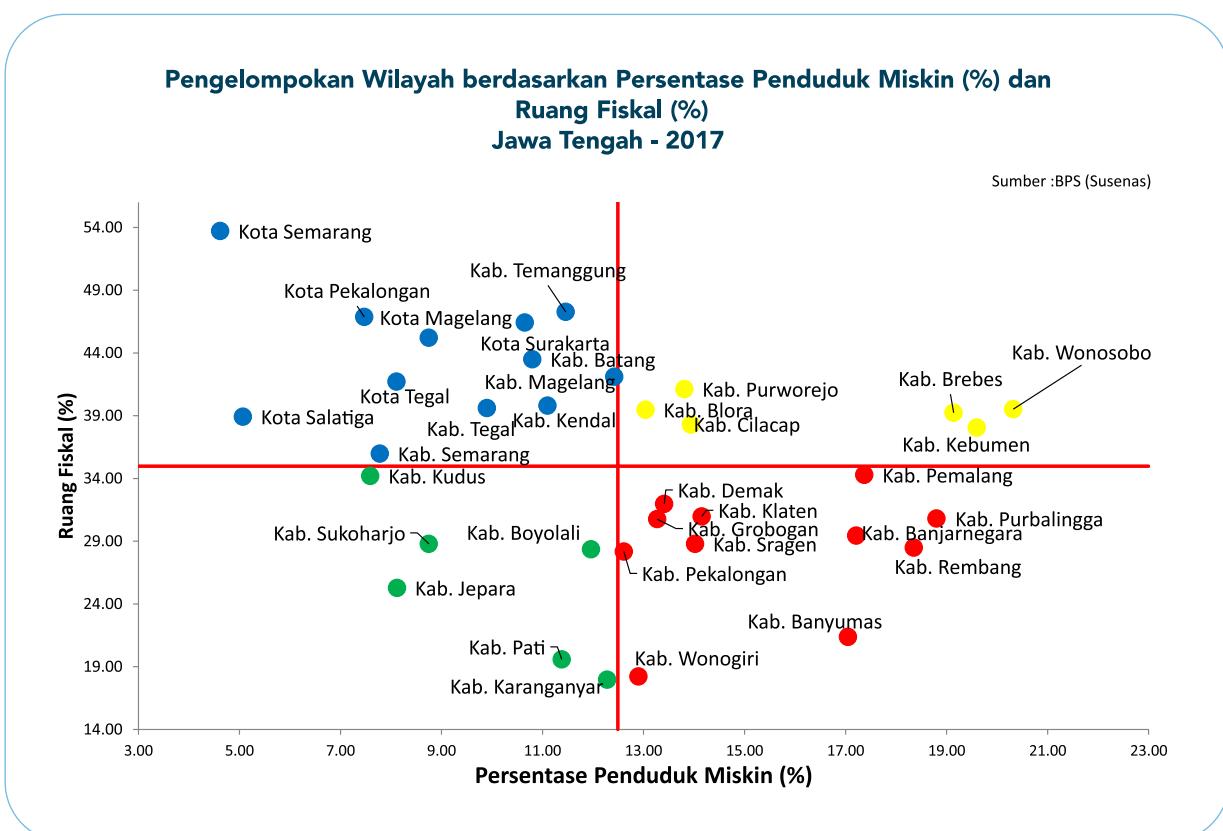


Ruang Fiskal

Sedikit lebih baik kondisinya dari DOF, Ruang Fiskal di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Tengah tergolong masuk kelompok kuning (prioritas II).

Ruang Fiskal di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 adalah 39,23%. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yaitu 30,33%. Memiliki pola yang terbalik namun positif, Angka Kemiskinan di Kabupaten Brebes menurun dari tahun sebelumnya yaitu 19,47% ke 19,14%. Dengan kondisi positif tersebut Kabupaten Brebes menjadi prioritas II untuk diberikan intervensi dalam penurunan angka kemiskinan dengan memanfaatkan ruang fiskal yang ada. (Gambar 1.9)

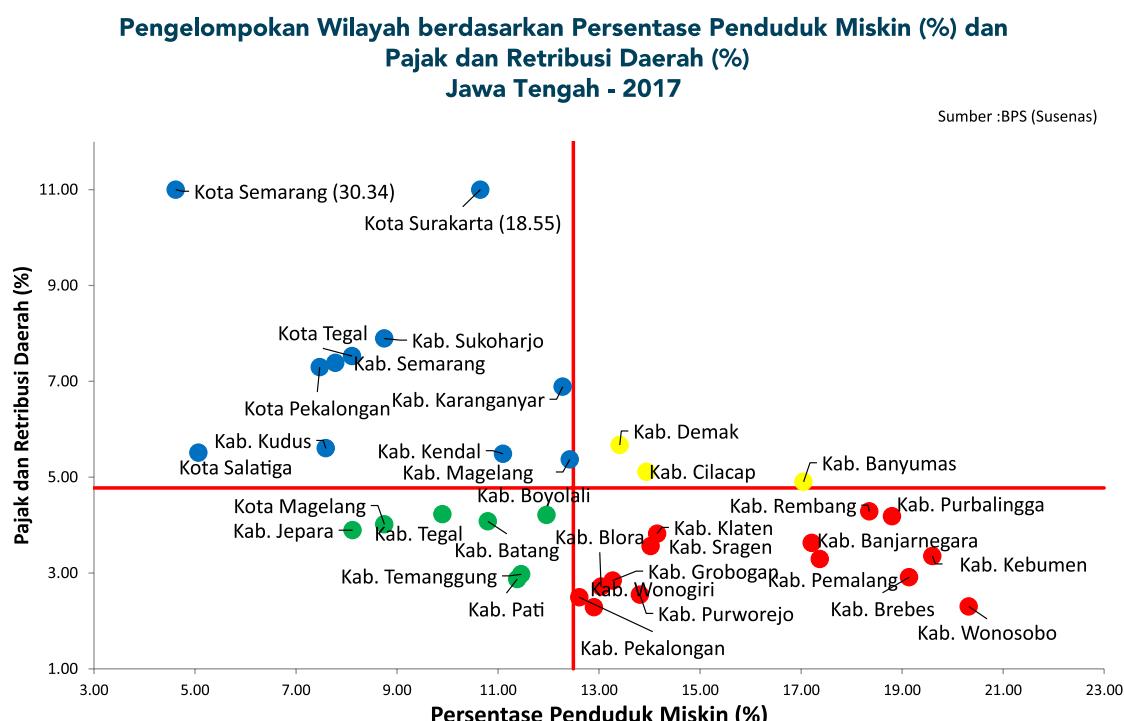
Gambar 1.9 Ruang Fiskal dan Kemiskinan



Pajak dan Retribusi Daerah

Sama halnya dengan Derajat Otonomi Fiskal, Rasio Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan prioritas pertama untuk ditingkatkan di Kabupaten Brebes guna mencapai peluang lebih besar dalam pengalokasian anggaran. Pada tahun 2017, disaat Angka Kemiskinan Kabupaten Brebes turun menjadi 19,14%, Rasio Pajak dan Retribusi Daerah naik menjadi 2,91% dari sebelumnya 2,67%. Kenaikan tersebut dinilai tidak cukup signifikan. (Gambar 1.10)

Gambar 1.10 Rasio Pajak & Retribusi Daerah dan Kemiskinan



Persentase Belanja Modal

Kondisi yang tidak lebih baik dari pada daya dukung fiskal lainnya, dialami oleh Persentase Belanja Modal Kabupaten Brebes yang menjadi prioritas II. Pada tahun 2017, persentase belanja modal turun menjadi 18,31% dari tahun sebelumnya sebesar 20,64%. Menurunnya persentase belanja modal tersebut membuat Kabupaten Brebes menjadi daerah yang hanya berada di garis rata-rata di antara daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Jika sedikit saja Belanja Modal dikurangi lagi, maka akan menjadi prioritas I untuk diintervensi. Kondisi Belanja Modal di Kabupaten Brebes sendiri mirip dengan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Demak dan Banjarnegara. (Gambar 1.11)

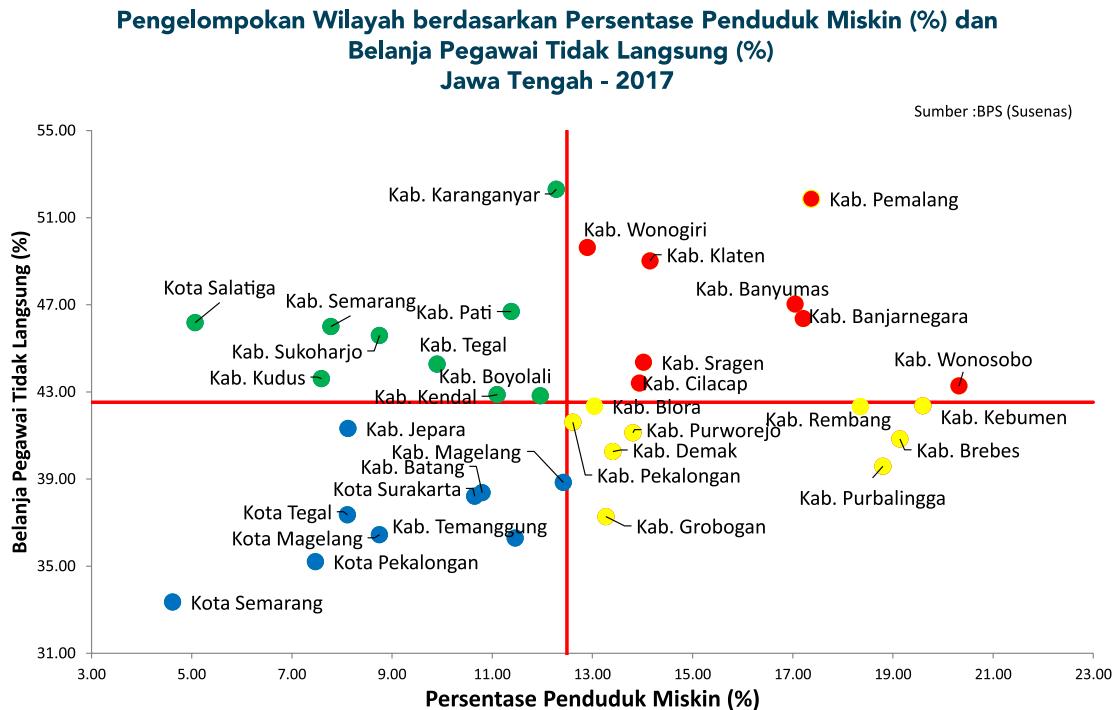
Gambar 1.11 Belanja Modal dan Kemiskinan



Persentase Belanja Pegawai Tidak Langsung

Persentase Belanja Pegawai Tidak Langsung di Kabupaten Brebes lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modalnya pada tahun 2017. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Brebes adalah 40,84% yang nilainya tidak jauh dengan rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu 42,53%. (Gambar 1.12)

Gambar 1.12 Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Kemiskinan



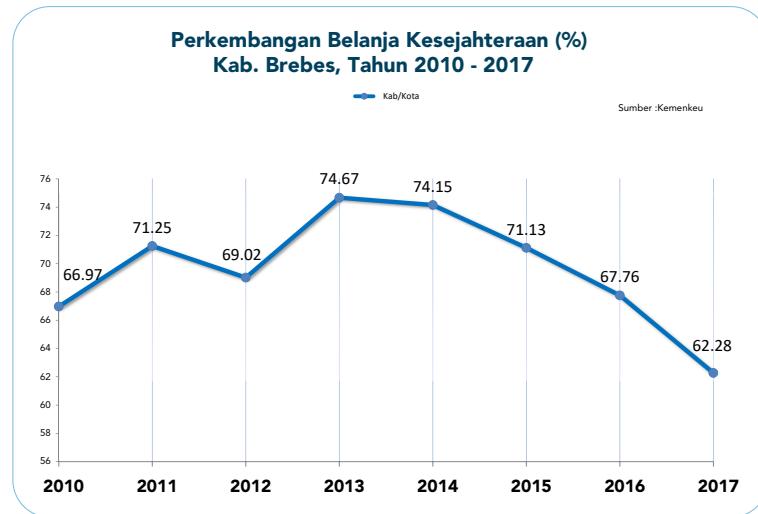
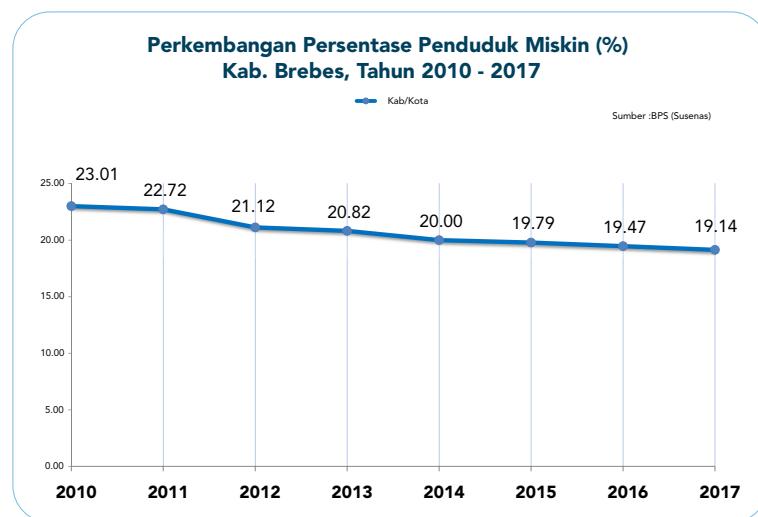
1.4 BELANJA FUNGSI TERKAIT PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Belanja Kesejahteraan

Persentase Belanja Kesejahteraan Kabupaten Brebes selama 8 tahun terakhir mengalami kecenderungan yang terus menurun. Namun, pola penurunan tersebut cukup berbeda dengan pola penurunan persentase penduduk miskin yang sangat landai. Dimulai pada tahun 2010 di mana Belanja Kesejahteraan Kabupaten Brebes sebesar 66,97%, sempat naik di tahun 2011 menjadi 71,25% kemudian turun lagi di tahun 2012 dan kemudian naik lagi di tahun 2013 (yang merupakan pencapaian tertinggi selama kurun waktu 8 tahun terakhir, yaitu mencapai 74,67%). Kemudian, setelah tahun 2013 tersebut Belanja Kesejahteraan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 62,28% pada tahun 2017. (Gambar 1.13)

Jika dilihat secara keseluruhan daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah, proporsi Belanja Kesehatan Kabupaten Brebes di atas sedikit garis rata-rata yaitu 60,23%. Dengan persentase penduduk miskin yang cukup tinggi, Kabupaten Brebes tergolong ke dalam prioritas II di antara daerah lainnya di Provinsi Jawa tengah. (Gambar 1.13)

Gambar 1.13 Belanja Kesejahteraan dan Persentase Penduduk Miskin



**Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Belanja Kesejahteraan (%)
Jawa Tengah - 2017**

Sumber :BPS (Susenas)



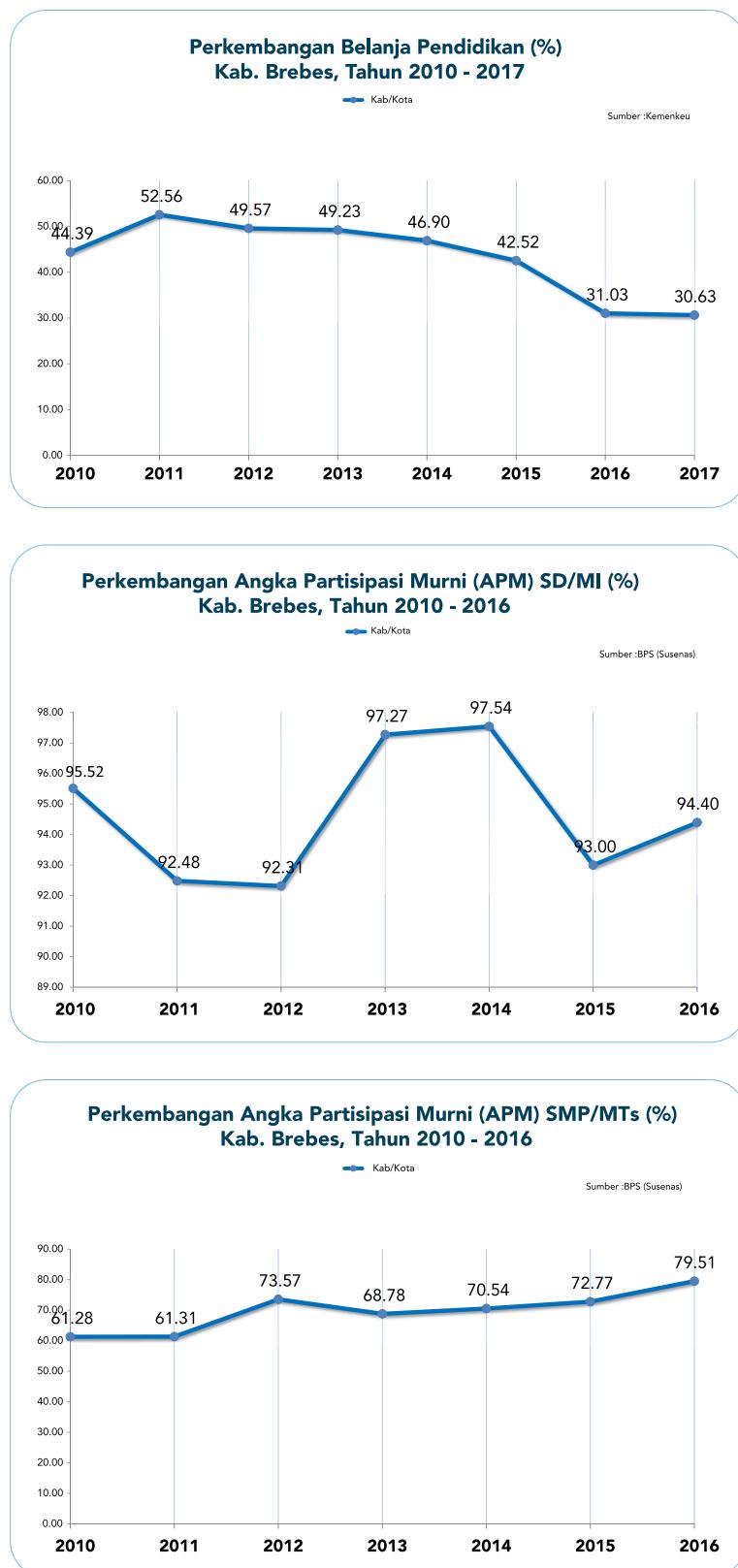
Belanja Fungsi Pendidikan

Selama 8 tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, persentase belanja Pendidikan terhadap APBD Kabupaten Brebes memiliki kecenderungan terus menurun. Pada tahun 2010, belanja Pendidikan sebesar 44,39% kemudian sempat naik pada tahun 2011 menjadi 52,56% (merupakan persentase tertinggi selama 8 tahun terakhir). Namun, setelah tahun 2011 tren yang terjadi adalah terus menurunnya persentase belanja Pendidikan hingga hanya 30,63% di tahun 2017. (Gambar 1.14)

Semakin berkurangnya proporsi dana untuk Pendidikan di Kabupaten Brebes seharusnya bisa mempengaruhi kondisi Pendidikan itu sendiri yang dinilai dari indikator-indikator Pendidikan. Namun, pola indikator khususnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD hingga SMA menunjukkan pola yang berbeda-beda. (Gambar 1.14)

APM SD/MI memiliki pola yang cukup besar fluktuasinya dari tahun ke tahun dan berujung mencapai angka 94,40% pada tahun 2017 setelah mengalami naik dan turun di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan APM SMP/MTs dan SMA/MA mengalami pola yang sama yaitu terus meningkat landai dari tahun 2010 hingga 2017. APM SMP/MTs mencapai angka 79,51% dan APM SMA/MA mencapai 51,88% pada tahun 2017. Di sini dapat terlihat bahwa semakin anggaran Pendidikan diturunkan, tidak akan mempengaruhi pencapaian APM karena pencapaian APM tetap naik. (Gambar 1.14)

Gambar 1.14 Belanja Fungsi Pendidikan dan Indikator Bidang Pendidikan



**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Kab. Brebes, Tahun 2010 - 2017**

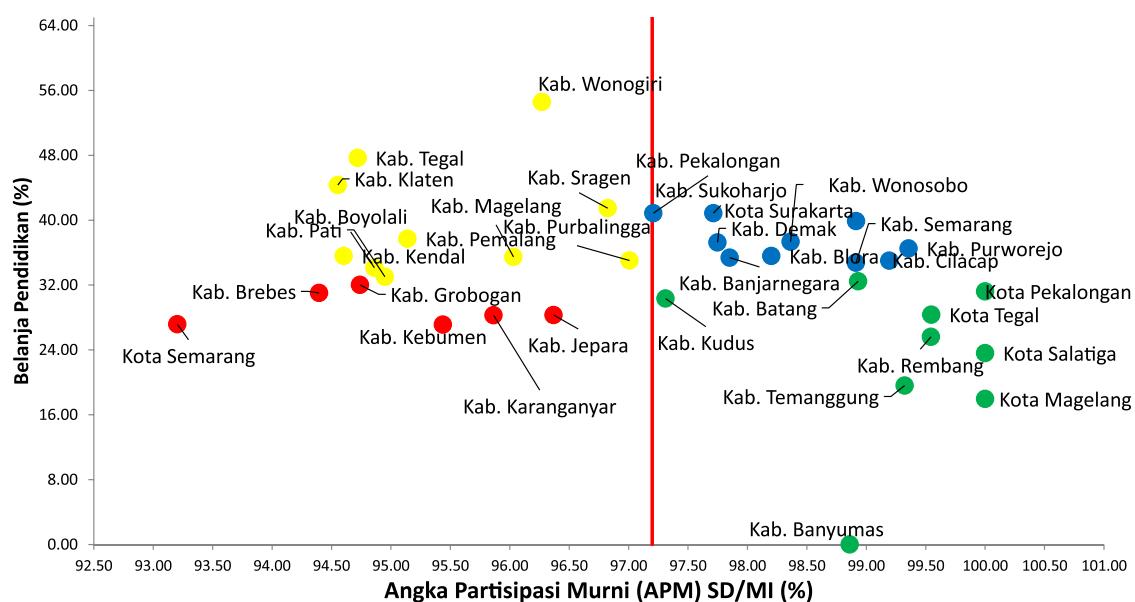
Kab/Kota

Sumber :BPS (Susenas)



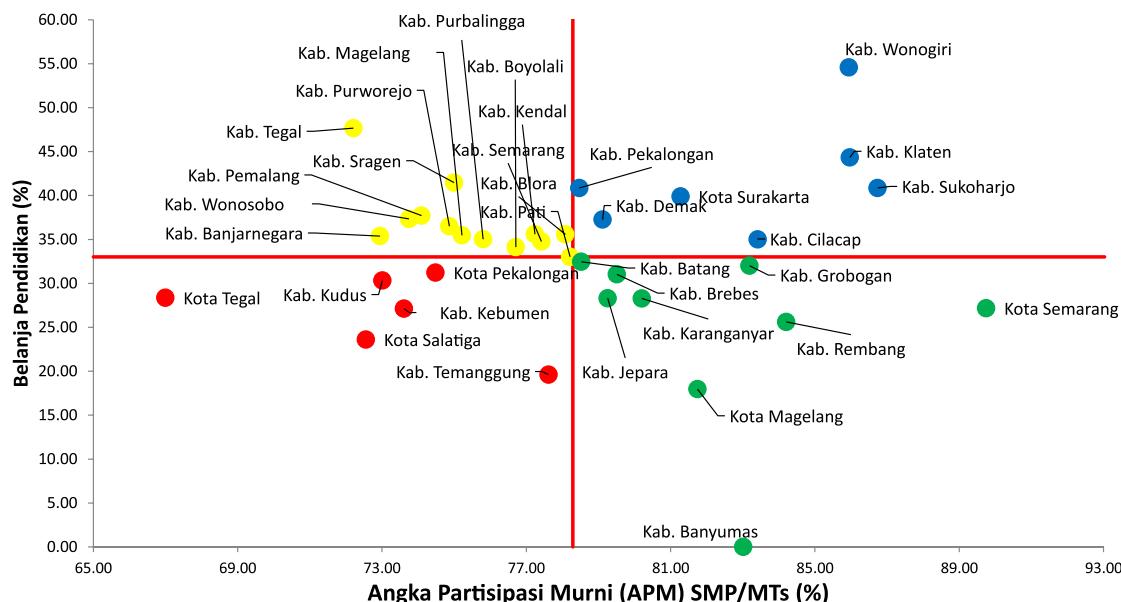
**Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan
Belanja Pendidikan (%)
Jawa Tengah - 2016**

Sumber :BPS (Susenas)



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Belanja Pendidikan (%) Jawa Tengah - 2016

Sumber :BPS (Susenas)



Belanja Fungsi Kesehatan

Berbeda dengan belanja Pendidikan, belanja Kesehatan Kabupaten Brebes terus mengalami pola peningkatan. Selama kurun waktu 2010 hingga 2017, proporsi belanja Pendidikan hanya pernah mengalami satu kali penurunan yaitu di tahun 2011 menjadi 9,39%. Angka tersebut merupakan angka yang paling rendah selama 8 tahun terakhir. Kemudian tren terus meningkat dari tahun ke tahun setelah tahun 2011 tersebut hingga mencapai persentase tertinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 17,31%. (Gambar 1.15)

Pada dasarnya, jika berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap kinerja program, setiap adanya penambahan anggaran mampu meningkatkan kualitas program yang diukur berdasarkan indikator. Sedangkan untuk sektor kesehatan di Kabupaten Brebes sendiri jika dilihat dari indikator perkembangan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan, baru menunjukkan tren penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 sendiri penurunan mencapai angka 41,61%. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip efektivitas penggunaan anggaran. (Gambar 1.15)

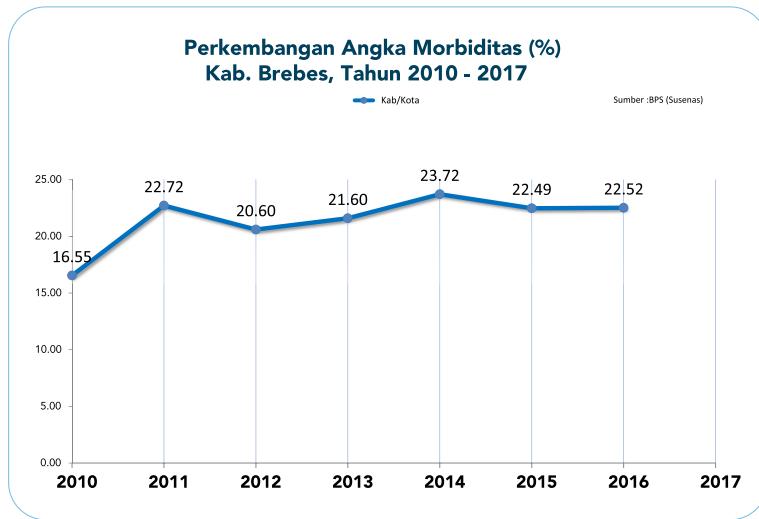
Selain itu, indikator Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih juga menunjukkan tren peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun, namun terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu menjadi 98,66% setelah sebelumnya di tahun 2015 menjadi pencapaian tertinggi yaitu 99,17%. (Gambar 1.15)

Lain hal nya dengan dua indikator kesehatan di atas, meskipun terjadi kenaikan belanja kesehatan, perkembangan Angka Morbiditas di Kabupaten Brebes cenderung tidak menunjukkan penurunan

yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Morbiditas Kabupaten Brebes adalah 22,52%. Angka tersebut tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan pada tahun 2011 dan 2014 terjadi peningkatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian karena dapat menjadi indikasi ketidaktepatan sasaran anggaran kesehatan untuk menekan Angka Morbiditas. (Gambar 1.15)

Gambar 1.15 Belanja Fungsi Kesehatan dan Indikator Bidang Kesehatan





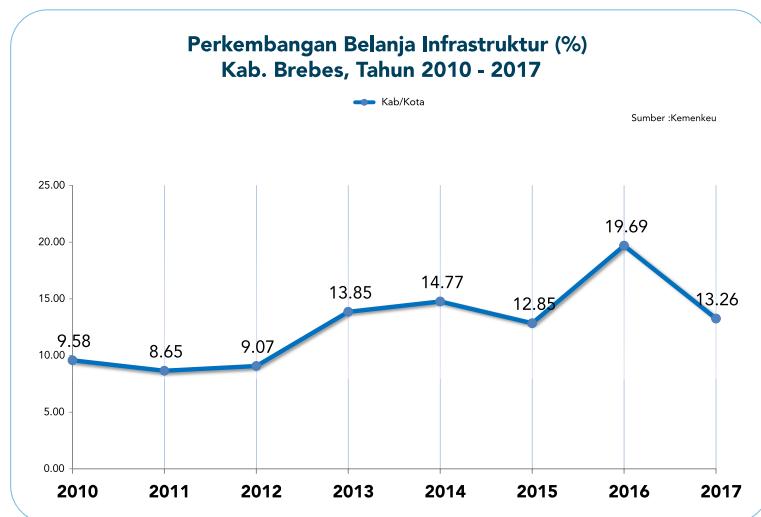
Belanja Fungsi Fasum dan Perumahan

Walaupun kecenderungan belanja infrastruktur di Kabupaten Brebes naik selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2017, namun penurunan cukup signifikan terjadi di tahun terakhir yaitu menjadi 13,26%. Angka tersebut merupakan angka yang turun dari tahun sebelumnya yaitu 19,69% yang merupakan persentase tertinggi selama 8 tahun terakhir. (Gambar 1.16)

Jika dilihat dari implikasi tren belanja infrastruktur tersebut terhadap indikator fasilitas umum dan perumahan tidak menunjukkan pengaruhnya. Salah satu indikator yang dilihat adalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak yang terus saja meningkat dari tahun ke tahun, meskipun ada pengurangan proporsi belanja. Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 65,18% yang merupakan pencapaian tertinggi selama 6 tahun sebelumnya. (Gambar 1.16)

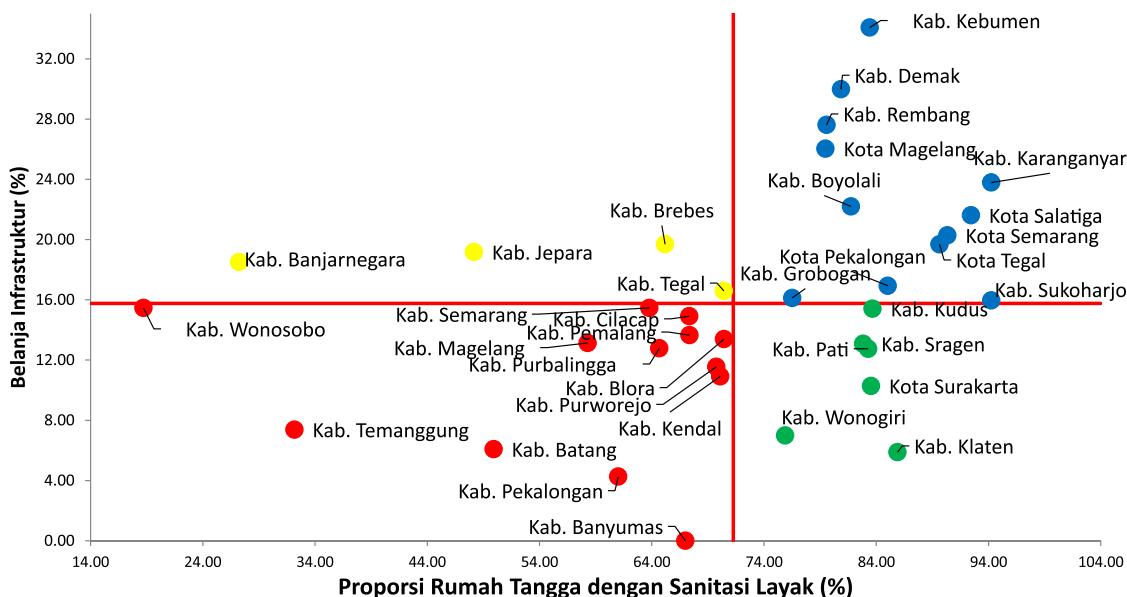
Begitupun dengan indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2016. Pencapaian indikator ini bahkan telah memenuhi seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Brebes, yaitu 100%. Ini artinya pengurangan belanja infrastruktur tidak mempengaruhi pelayanan listrik rumah tangga. (Gambar 1.16)

Gambar 1.16 Belanja Fungsi Fasilitas Umum & Perumahan dan Indikator Bidang Infrastruktur Dasar



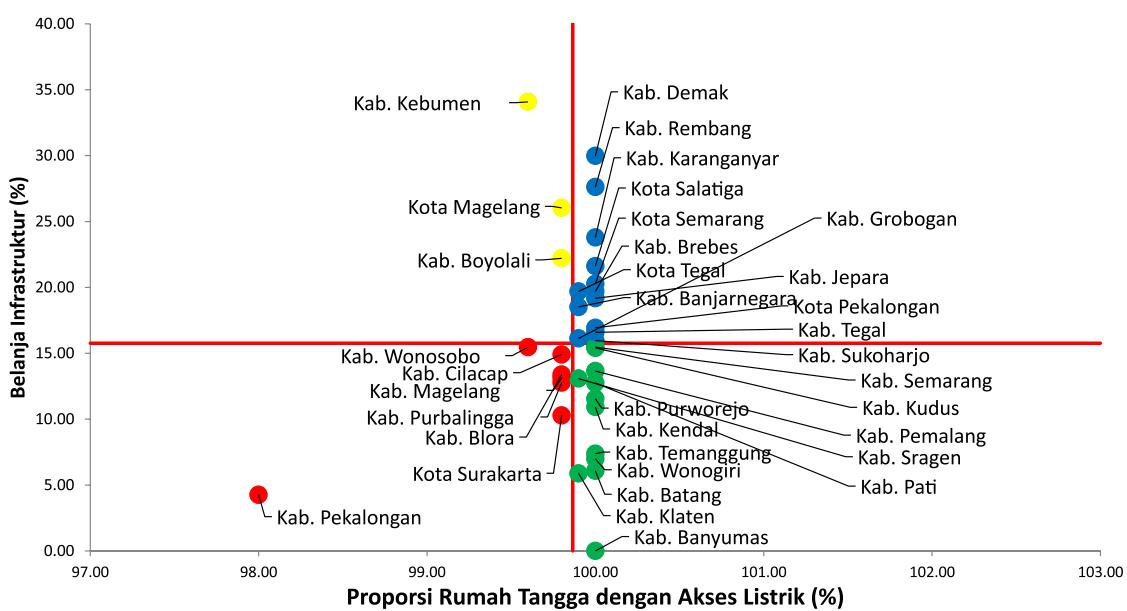
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Belanja Infrastruktur (%) Jawa Tengah - 2016

Sumber :BPS (Susenas)



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Belanja Infrastruktur (%) Jawa Tengah - 2016

Sumber :BPS (Susenas)





BAB 2

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN UTAMA DI KABUPATEN BREBES

2.1 ISU STRATEGIS SEKTOR PERTANIAN

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu isu pembangunan Kabupaten Brebes, karena Pembangunan pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Brebes. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui: salah satu lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sentra bawang merah nasional, penyerap tenaga kerja terbesar, sumber pendapatan penduduk dan PDRB terbesar (40% lebih) serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dan Ketahanan Pangan dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Kabupaten Brebes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan di Brebes adalah isu utama dalam pembangunan di Brebes. Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas penduduk miskin di Brebes adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, berpendidikan rendah, dan usia yang semakin menua. Petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (1) pendapatan per kapita; (2) tingkat kemiskinan dan (3) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian.

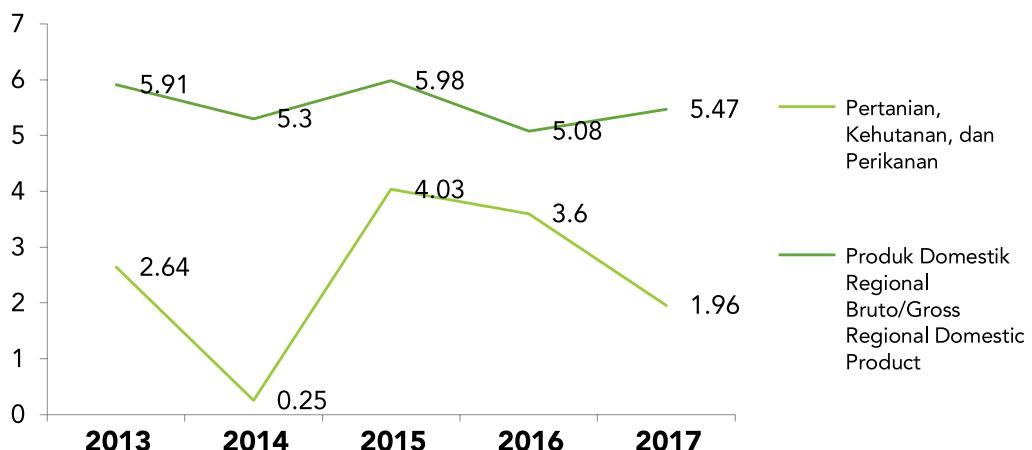
Kesejahteraan petani yang diukur dengan pendapatan/kapita diperoleh dengan menghitung nilai produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian dan jumlah penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian. Data yang tersedia di tingkat Kabupaten untuk pertanian jumlah rumah tangga di masing-masing kategori, jumlah anggota rumah tangga (diasumsikan jumlah anggota rumah tangga adalah empat orang).

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017

| Lapangan Usaha/Industry | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,64 | 0,25 | 4,03 | 3,60 | 1,96 |
| Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product | 5,91 | 5,30 | 5,98 | 5,08 | 5,47 |

Sumber: BPS

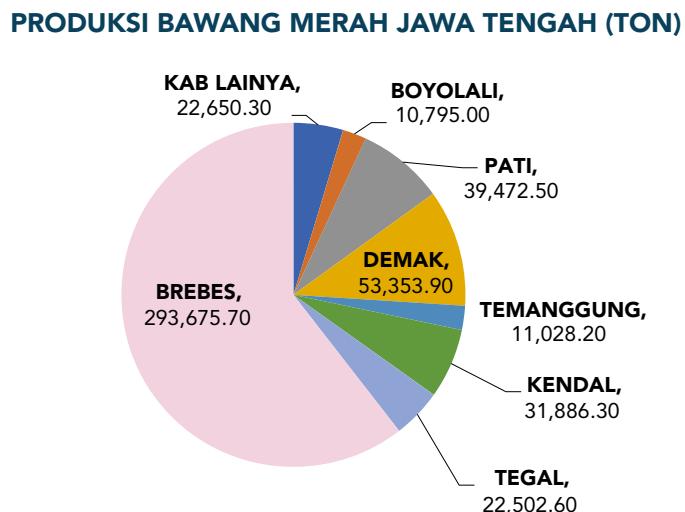
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017



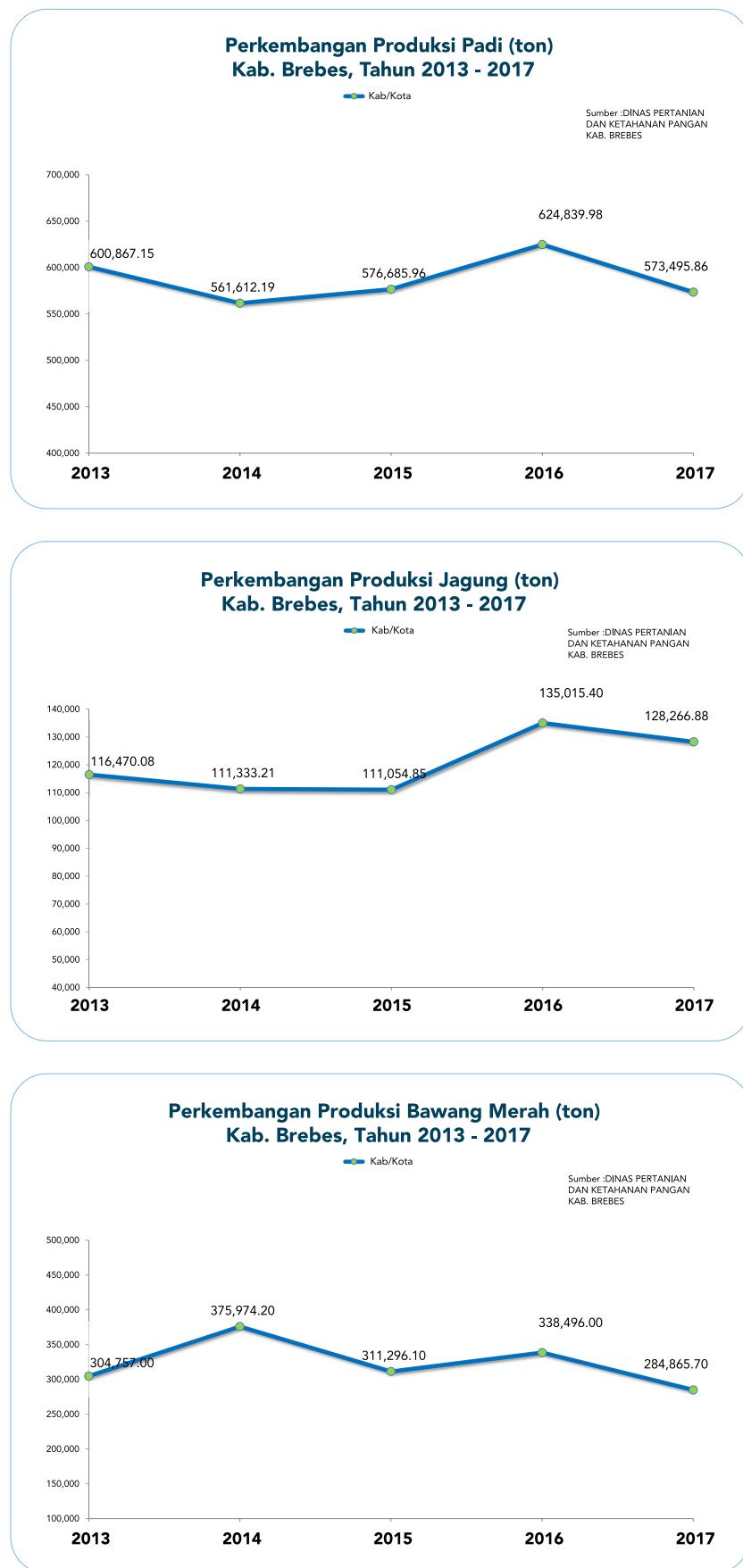
Sumber: BPS Kab. Brebes

Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian selama 5 tahun mengalami fluktuasi dan berada di bawah garis laju pertumbuhan PDRB keseluruhan Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017, laju PDRB sektor pertanian adalah 1,96 yang merupakan angka terendah selama tiga tahun terakhir. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes sendiri tahun 2017 adalah 5,47 yang sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peran sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2017 adalah 38,42%. Angka tersebut adalah hasil yang terus menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 41,98 %. Salah satu penyebab menurunnya peran Pertanian dalam PDRB adalah penurunan produksi. Kemudian, lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha pertanian dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peran lapangan usaha Pertanian. Peningkatan produksi, produktivitas dan harga komoditas utama Kabupaten Brebes adalah bawang merah, padi dan jagung menjadi salah satu dalam meningkatkan laju pertumbuhan PDRD, dan indikator kesejahteraan petani. (Gambar 2.1)

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2013-2017



**Gambar 2.3 Perkembangan Produksi Padi, Jagung, dan Bawang Merah (Ton)
Kabupaten Brebes**



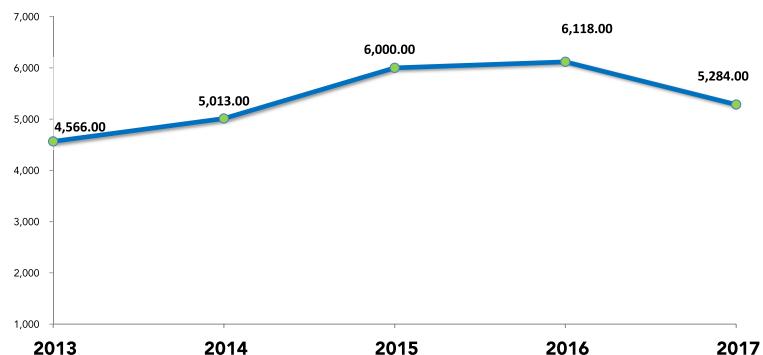
**Gambar 2.4 Perkembangan Produktivitas dan Harga Jual Padi, Jagung, dan Bawang Merah (Ton)
Kabupaten Brebes**



**Perkembangan Harga Jual Jagung Pipilan (rata-rata tahunan) (Rp/Kg)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

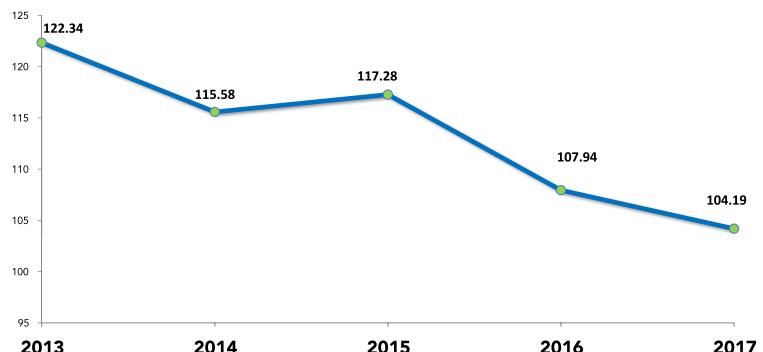
Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

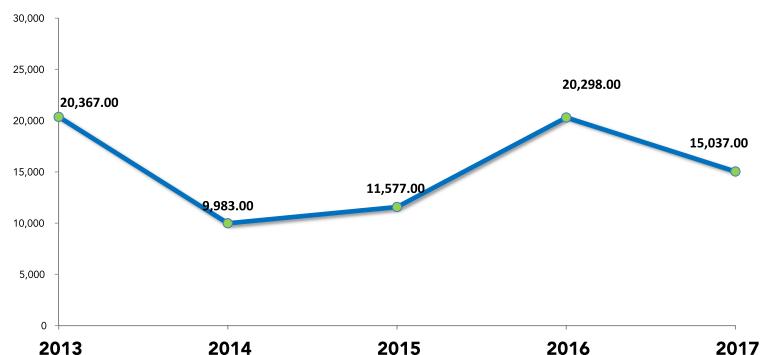
Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Harga Jual Bawang Merah Tingkat Petani
(rata-rata tahunan)(Rp/Kg)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES

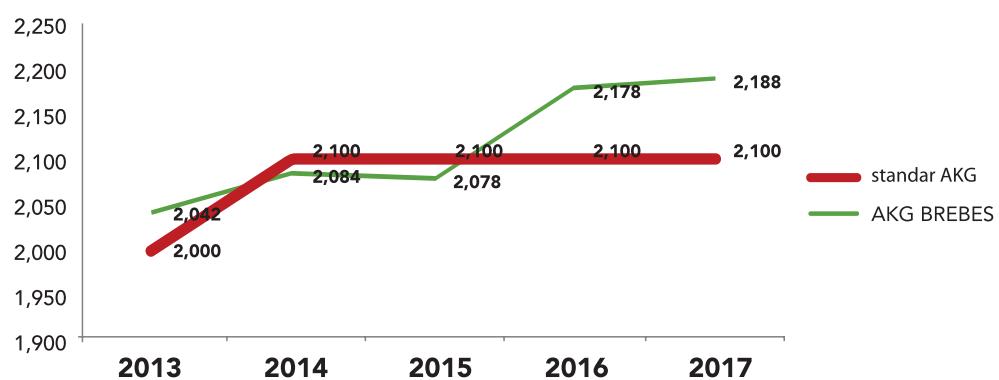


Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.100 kkal/hari. Jika konsumsi perkapita adalah kurang atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90% dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90% dari AKG termasuk katagori tahan pangan. (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017

| No. | Kelompok Bahan Pangan | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----|-----------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Energi (Kalori)* | % AKG |
| 1. | Padi-padian | 1.048 | 52,4 | 1.160,7 | 52,8 | 1.159,7 | 55,2 | 1.133,7 | 52,7 | 1.140,2 | 53,0 |
| 2. | Umbi-umbian | 61 | 3,1 | 59,9 | 2,7 | 62,3 | 3,0 | 78,9 | 3,7 | 78,3 | 3,6 |
| 3. | Pangan Hewani | 206 | 10,3 | 186,2 | 8,5 | 186,0 | 8,9 | 225,1 | 10,5 | 221,8 | 10,3 |
| 4. | Minyak dan Lemak | 294 | 14,7 | 260,0 | 11,8 | 258,7 | 12,3 | 336,6 | 15,7 | 343,2 | 16,0 |
| 5. | Buah/biji bermanfaat | 11 | 0,6 | 12,9 | 0,6 | 12,6 | 0,6 | 9,3 | 0,4 | 9,3 | 0,4 |
| 6. | Kacang-kacangan | 266 | 13,3 | 188,5 | 8,6 | 185,0 | 8,8 | 168,8 | 7,9 | 166,6 | 7,7 |
| 7. | Gula | 45 | 2,2 | 100,9 | 4,6 | 99,2 | 4,7 | 113,6 | 5,3 | 116,1 | 5,4 |
| 8. | Sayuran dan buah | 100 | 5,0 | 103,6 | 4,7 | 103,1 | 4,9 | 96,9 | 4,5 | 97,5 | 4,5 |
| 9. | Lain-lain | 11 | 0,5 | 11,7 | | 11,4 | 0,5 | 14,7 | 0,7 | 15,4 | 0,7 |
| | Jumlah | 2.042 | 102,1 | 2.084 | 94,2 | 2.078 | 99,0 | 2.178 | 101,3 | 2.188 | 101,8 |

Gambar 2.5 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017



Angka Kecukupan Gizi (AKG) di Kabupaten Brebes sudah di atas 90% kategori Tahan pangan.

Artinya, Kabupaten Brebes adalah daerah yang termasuk dengan kategori tahan pangan. Namun dari segi kelompok makanan masih didominasi dari sumber-sumber karbohidrat (50%), sedangkan dari protein/pangan hewani masih sangat kecil (10%).

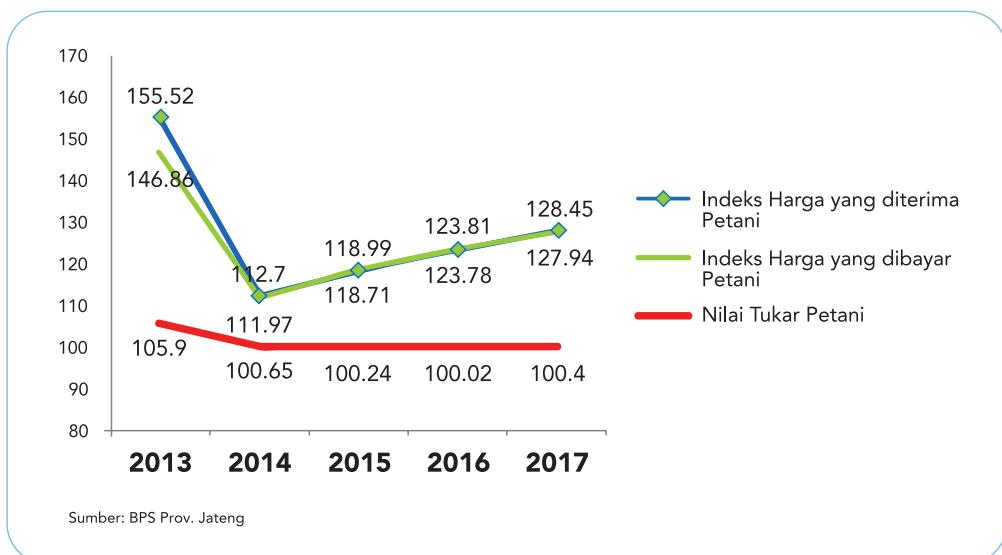
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Di mana It menunjukkan fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang dikonsumsi petani termasuk barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur daya tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani. Namun demikian, sebagai alat ukur kesejahteraan petani, penggunaan asumsi tingkat produksi yang tetap dinilai kurang relevan, karena kuantitas tetap berarti NTP tidak mengakomodasi kemajuan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi dan pembangunan. Karena itu NTP cukup diposisikan sebagai alat ukur untuk menghitung daya beli penerimaan petani terhadap pengeluaran petani.

NTP bukanlah mutlak sebagai ukuran kesejahteraan petani. Meskipun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir dapat menggambarkan bahwa secara umum (tidak mutlak) dapat menggambarkan kesejahteraan petani.

Tabel 2.3 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Tengah

| TAHUN | Indeks Harga yang diterima Petani | Indeks Harga yang dibayar Petani | Nilai Tukar Petani |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2013 | 155,52 | 146,86 | 105,9 |
| 2014 | 112,7 | 111,97 | 100,65 |
| 2015 | 118,99 | 118,71 | 100,24 |
| 2016 | 123,81 | 123,78 | 100,02 |
| 2017 | 128,45 | 127,94 | 100,4 |

Gambar 2.6 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Brebes Tahun 2013-2017



Tabel 2.4 Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Jawa Tengah

| Kelompok & Sub Kelompok Komoditas | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sep | Okt | Nov | Des | Jan |
| Indeks Harga Yang Diterima | 125,90 | 124,97 | 124,27 | 124,50 | 126,85 | 127,94 | 128,64 | 129,78 | 130,92 | 131,48 | 132,50 | 133,63 | 134,50 |
| Tanaman Pangan | 121,29 | 118,70 | 117,70 | 119,42 | 122,89 | 124,46 | 124,77 | 126,75 | 129,44 | 132,23 | 133,76 | 136,53 | 140,62 |
| Hortikultura | 126,85 | 127,76 | 127,17 | 126,94 | 129,04 | 129,66 | 131,49 | 131,53 | 130,92 | 128,68 | 129,30 | 129,94 | 129,02 |
| Perkebunan Rakyat | 137,96 | 136,05 | 136,18 | 134,37 | 137,31 | 139,27 | 138,99 | 139,68 | 142,27 | 145,12 | 147,94 | 147,96 | 146,46 |
| Peternakan | 123,18 | 123,12 | 122,05 | 122,20 | 123,22 | 123,55 | 124,39 | 125,89 | 125,76 | 124,83 | 124,58 | 124,73 | 124,67 |
| Perikanan | 127,85 | 128,30 | 128,78 | 127,81 | 127,97 | 129,92 | 129,74 | 129,62 | 130,76 | 129,60 | 129,37 | 130,93 | 131,42 |
| Indeks Harga Yang Dibayar | 127,20 | 127,50 | 127,46 | 127,28 | 128,52 | 128,53 | 128,36 | 127,82 | 127,65 | 127,70 | 128,11 | 129,14 | 130,58 |
| Tanaman Pangan | 130,50 | 130,88 | 130,77 | 130,51 | 131,96 | 131,90 | 131,67 | 131,01 | 130,68 | 130,66 | 131,16 | 132,38 | 133,97 |
| Hortikultura | 128,74 | 129,10 | 129,10 | 128,75 | 130,16 | 130,10 | 129,94 | 129,24 | 128,90 | 128,91 | 129,46 | 130,55 | 131,83 |
| Perkebunan Rakyat | 127,93 | 128,20 | 128,26 | 128,16 | 129,37 | 129,49 | 129,31 | 128,82 | 128,72 | 128,71 | 129,01 | 130,15 | 131,73 |
| Peternakan | 121,31 | 121,45 | 121,42 | 121,48 | 122,35 | 122,42 | 122,34 | 122,08 | 122,21 | 122,42 | 122,67 | 123,31 | 124,70 |
| Perikanan | 126,22 | 126,53 | 126,18 | 125,83 | 126,87 | 126,82 | 126,71 | 126,12 | 125,84 | 125,76 | 126,36 | 127,40 | 128,31 |
| Nilai Tukar Petani (NTP) | 98,98 | 98,02 | 97,50 | 97,81 | 98,70 | 99,55 | 100,22 | 101,53 | 102,56 | 102,97 | 103,43 | 103,48 | 103,00 |
| Tanaman Pangan | 92,95 | 90,60 | 90,00 | 91,51 | 93,13 | 94,36 | 94,76 | 96,75 | 99,05 | 101,20 | 101,98 | 103,14 | 104,96 |
| Hortikultura | 98,53 | 98,97 | 98,50 | 98,60 | 99,14 | 99,66 | 101,19 | 101,75 | 101,57 | 99,82 | 99,88 | 99,54 | 97,87 |
| Perkebunan Rakyat | 107,84 | 106,12 | 106,18 | 104,85 | 104,14 | 107,55 | 107,49 | 108,43 | 110,49 | 112,75 | 114,68 | 113,68 | 111,18 |
| Peternakan | 101,54 | 101,38 | 100,52 | 100,60 | 100,71 | 100,92 | 101,68 | 103,12 | 102,90 | 101,96 | 101,56 | 101,15 | 99,97 |
| Perikanan | 101,29 | 101,40 | 102,06 | 101,57 | 100,87 | 102,44 | 102,39 | 102,78 | 103,91 | 103,06 | 102,68 | 102,77 | 102,43 |

Gambar 2.7 Permasalahan dan Tantangan Pertanian di Kabupaten Brebes



Porsi belanja urusan pertanian yang masih kecil di Kabupaten Brebes belum mampu menjadi motor penggerak dalam rangka pengentasan kemiskinan dari sektor pertanian. Padahal pertanian masih menjadi sektor penyumbang terbesar PDRB di Brebes (40%) dengan tren menurun dan masih menjadi pekerjaan utama masyarakat Brebes. Belanja urusan pertanian dari APBD Kabupaten Brebes yang kecil sangat terbantu dengan adanya anggaran dari kementerian melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Pertanian, APBN Tugas Pembantuan, dan bantuan langsung alat mesin pertanian dan sarana lainnya.

2.2 PRIORITAS INTERVENSI SEKTOR PERTANIAN

Logika program (Theory of Change) yang disusun oleh tim teknis TKPK Kabupaten Brebes memiliki tujuan (goal/final outcome) yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dapat di ukur dengan paket efisiensi biaya produksi, peningkatkan produksi dan harga jual bawang merah, padi, jagung dan Cabai di atas BEP/Break Even Point. Efisiensi biaya produksi jika pengeluaran petani produksi lebih rendah dibanding harga komoditas per Kg atau Ha diperhitungan dalam peningkatan kesejahteraan petani. Efisiensi biaya produksi dan peningkatan produksi (ton) dapat didorong dengan beberapa faktor dengan perbaikan infrastruktur mekanisasi pertanian, peningkatan SDM/budidaya dan teknologi. (Gambar 2.8)

Sasaran dari peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatnya pendapatan petani, meskipun peningkatan pendapatan petani tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan karena tergantung pula dari tingkat pengeluaran dan faktor-faktor non finansial (sosial). Namun pendapatan petani merupakan indikator yang secara langsung terkait dengan tugas pokok dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga indikator dari sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah besaran pendapatan rumah tangga petani. Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir dari pembangunan pertanian secara menyeluruh.

Oleh karena itu kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan petani merupakan resultant dari kebijakan dan program yang dilakukan. Dengan demikian langkah operasional untuk mencapai target sasaran peningkatan kesejahteraan petani adalah melalui peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, daya saing. Dalam upaya peningkatan pendapatan petani, tidak saja melalui peningkatan produktivitas hasil pertaniannya tapi juga melalui peningkatan produktivitas per petani.

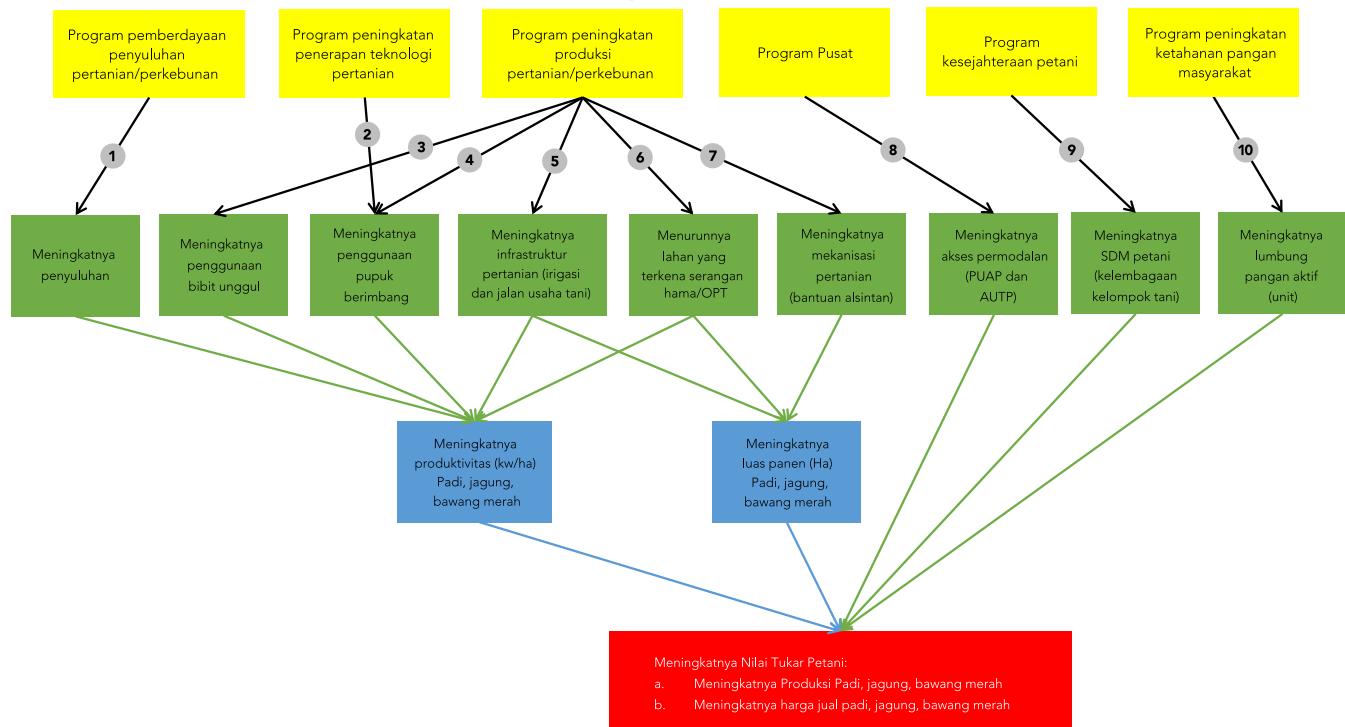
Peningkatan produksi komoditas pertanian dapat didukung dengan peningkatan sumber daya petani melalui penyuluhan, penggunaan bibit/benih unggul, penggunaan pupuk yang berimbang, perbaikan infrastruktur pertanian, mitigasi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT, mekanisasi pertanian, permodalan, pemanfaatan pekarangan dan lumbung pangan. Indikator dari sub-determinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyuluhan pertanian: jumlah penyuluhan pertanian (orang)
2. Meningkatnya penggunaan bibit unggul: luasan lahan yang sudah menggunakan bibit unggul bersertifikat baik benih inhibrida dan hibrida
3. Meningkatnya penggunaan pupuk berimbang: jumlah serapan pupuk subsidi dan komposisi jenis pupuk yang terserap antara pupuk anorganik dan organik
4. Meningkatnya infrastruktur pertanian: jumlah luasan sawah irigasi terbangun (ha) dan panjang jalan usaha tani yang terbangun (km)
5. Menurunnya jumlah lahan yang terkena serangan organisme pengganggu tanaman: jumlah lahan yang puso (ha)
6. Meningkatnya mekanisasi pertanian: jumlah bantuan alat dan mesin pertanian (unit)

7. Meningkatnya akses permodalan: jumlah penerima bantuan pengembangan usaha agribisnis perdesan (PUAP) dan jumlah luasan lahan yang di asuransi pertanian (ha)
8. Meningkatnya SDM petani: jumlah pelatihan dan bantuan sarana pengolahan hasil pertanian (kelompok tani)
9. Meningkatnya jumlah lumbung pangan: jumlah kelompok tani yang memiliki lumbung pangan
10. Meningkatnya pemanfaatan pekarangan: jumlah lahan pekarangan yang dimanfaatkan (ha)

Gambar 2.8 Theory of Change Peningkatan Produksi Pertanian Unggulan

Kabupaten Brebes



KETERANGAN (KEGIATAN PROGRAM)

1. a. Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan;
b. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
2. a. Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija;
b. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan;
c. Kegiatan Pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan biofarmata.
3. a. Kegiatan Pengawasan peredaran pestisida dan pupuk; b. Fasilitasi Peningkatan Produksi Pupuk Organik Berbasis Kearifan Lokal
4. a. Kegiatan Peningkatan Kesuburan Tanah/ Reklamasi Lahan
5. a. Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian;
b. Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian (DAK);
c. Kegiatan Penunjang Program/Kegiatan Dana Pusat/ Propinsi
6. a. Kegiatan Pengendalian hama terpadu;
b. Kegiatan Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan;
c. Kegiatan Perlindungan Tanaman dan Pengamatan OPT
7. a. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan;
b. Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Produksi

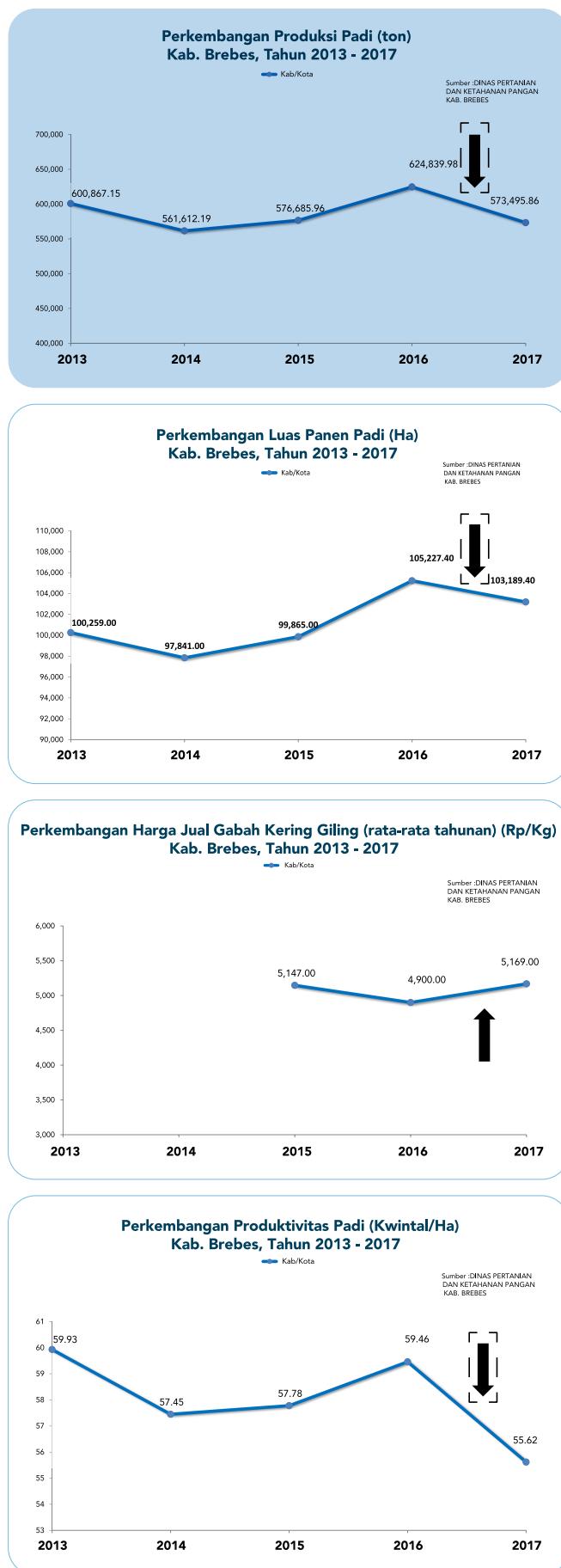
8. a. Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan; b. Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi
9. a. Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis; b. Peningkatan kemampuan lembaga petani; kegiatan Revitalisasi Kelompok Tani
10. a. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Prioritas Intervensi Peningkatan Produksi dan Harga

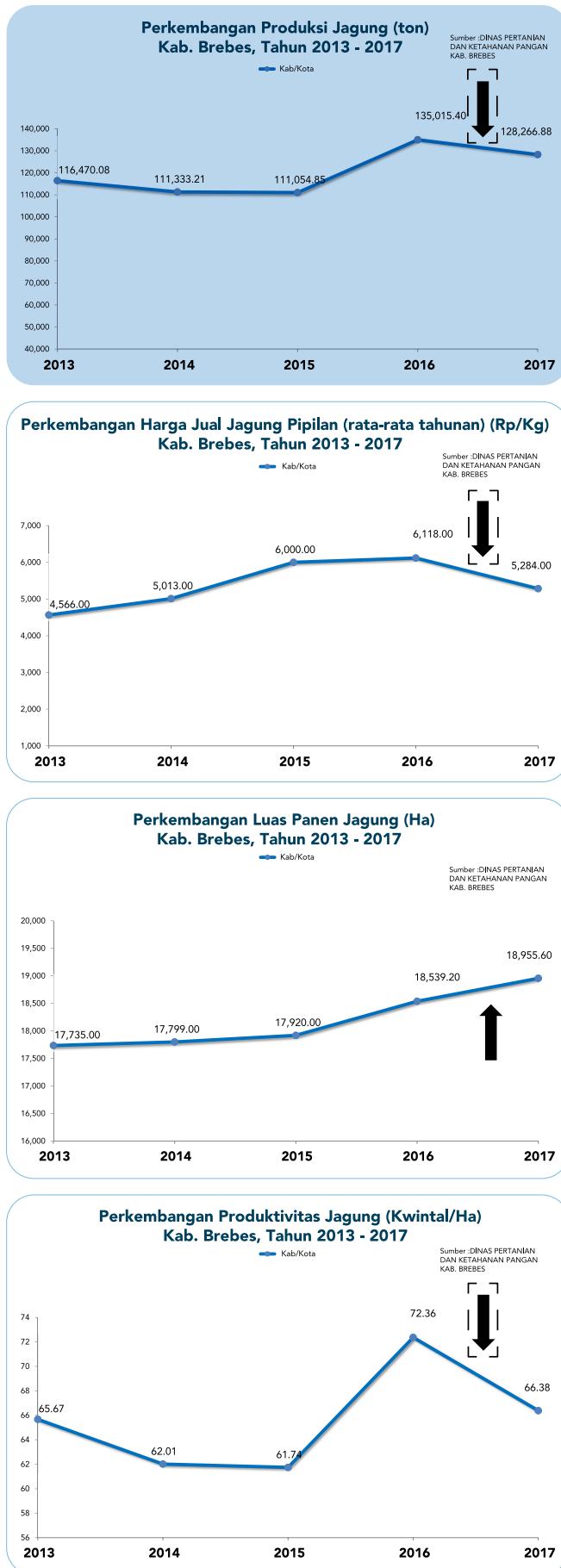
Analisis keterkaitan guna peningkatan kesejahteraan petani antara indikator utama yaitu produksi dan harga jual padi, jagung, dan bawang merah terhadap indikator-indikator pendukungnya menunjukkan kemungkinan kuat bahwa:

- Meningkatnya penyuluhan pertanian akan terjadi jika: penyuluhan pertanian meningkat
- Meningkatnya penggunaan bibit unggul akan terjadi jika: lahan yang menggunakan bibit unggul bersertifikat baik benih inhibrida dan hibrida meningkat
- Meningkatnya penggunaan pupuk berimbang akan terjadi jika: serapan pupuk subsidi dan komposisi jenis pupuk yang terserap antara pupuk anorganik dan organik meningkat dan berimbang
- Meningkatnya infrastruktur pertanian akan terjadi jika: luasan sawah irigasi meningkat dan panjang jalan usaha tani meningkat
- Menurunnya jumlah lahan yang terkena serangan organisme penggangu tanaman akan terjadi jika: lahan yang puso menurun
- Meningkatnya mekanisasi pertanian akan terjadi jika: alat dan mesin pertanian meningkat
- Meningkatnya akses permodalan akan terjadi jika: 1. penerima bantuan pengembangan usaha agribisnis perdesan (PUAP) meningkat dan luasan lahan yang di asuransi pertanian meningkat
- Meningkatnya SDM petani akan terjadi jika: pelatihan dan bantuan sarana pengolahan hasil pertanian meningkat
- Meningkatnya jumlah lumbung pangan akan terjadi jika: kelompok tani yang memiliki lumbung pangan meningkat
- Meningkatnya pemanfaatan pekarangan akan terjadi jika: lahan pekarangan yang dimanfaatkan (ha) meningkat

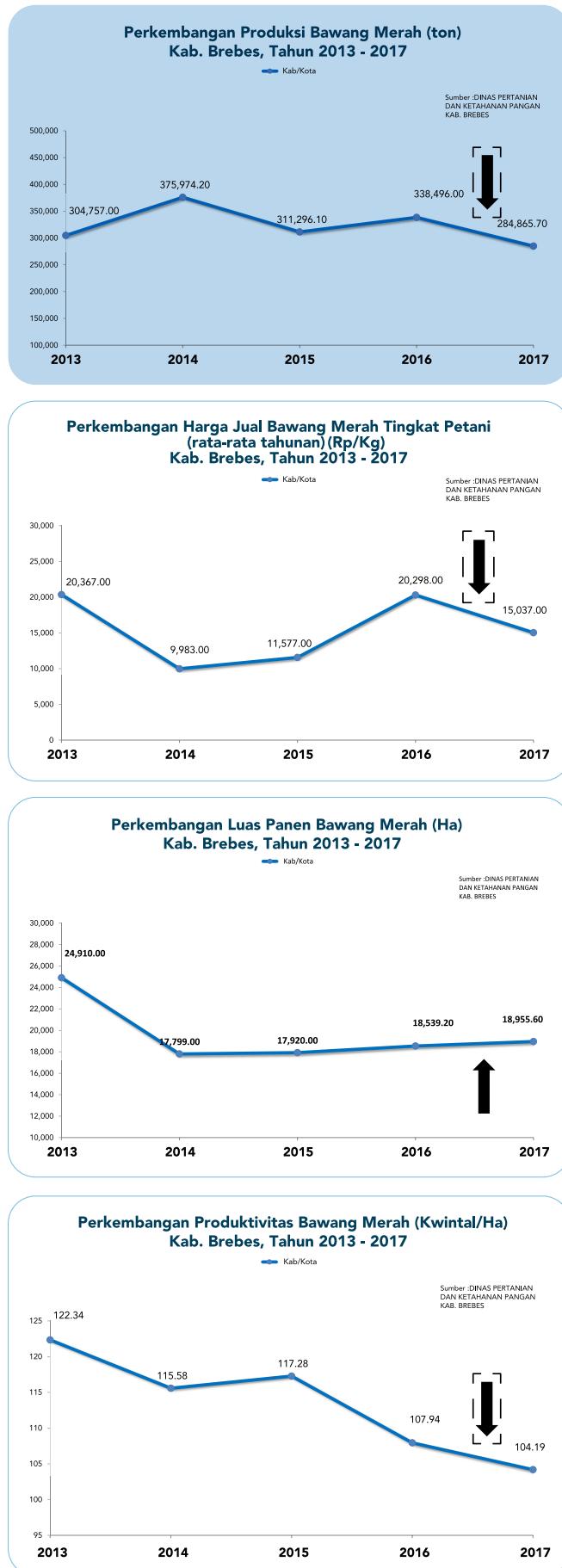
Gambar 2.9 Analisis Keterkaitan Produksi Padi terhadap Sasaran Jangka Menengah



Gambar 2.10 Analisis Keterkaitan Produksi Jagung terhadap Sasaran Jangka Menengah



Gambar 2.11 Analisis Keterkaitan Produksi Bawang Merah terhadap Sasaran Jangka Menengah



Dilihat dari grafik tersebut diatas produksi tanaman unggulan Brebes yaitu padi, jagung dan kedelai selama lima tahun mengalami kenaikan walaupun jika antar tahun terjadi fluktuasi hal ini di pengaruhi campaian produktivitas (kw/ha) dan luas panen (ha).

DILEMA PENGGUNAAN PESTISIDA TERHADAP KESEHATAN

Demi mencapai tujuan meningkatnya produksi tanaman unggulan di Kabupaten Brebes, dianggap perlu untuk menurunkan lahan yang terserang hama/ OPT. Dilemanya, penggunaan pestisida di Kabupaten Brebes sudah cukup lama menjadi isu yang harus diperhatikan untuk menurunkan lahan OPT. Hal ini karena Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah lumbung pangan nasional. Tentunya penggunaan pestisida secara kontemporer terus diperlukan dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, dampak penggunaan pestisida itu sendiri seringkali menimbulkan terganggunya beberapa fungsi kesehatan akibat tercemarnya lingkungan oleh pestisida tersebut.

Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2013 tentang Faktor Lingkungan dan Perilaku yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Siswa SD di Wilayah Pertanian (Penelitian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes) yang ditulis oleh Utami, dkk menjelaskan bahwa pertumbuhan fisik berhubungan dengan genetik dan faktor lingkungan.

Menurut penelitian tersebut, mengingat banyaknya intensitas penggunaan pestisida, maka faktor penyebab lain yang sangat mungkin menyebabkan kejadian stunting adalah bahan kimia di lingkungan (*xenobiotics*). Pengaruh pestisida meningkatkan insiden bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, serta keterlambatan pertumbuhan di dalam kandungan. Kesepuluh penelitian yang dilaporkan di Amerika dan Eropa, ternyata pestisida akan mengganggu pertumbuhan janin. Tujuh diantaranya menunjukkan hubungan yang cukup bermakna antara penggunaan pestisida di lahan pertanian dengan gangguan pertumbuhan janin.

Kelenjar dan Hormon Tiroid

Salah satu fungsi hormon yang dapat terganggu akibat pajanan pestisida adalah fungsi hormon tiroid. Kelenjar hormon tiroid (gondok) berfungsi menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid diperlukan oleh tubuh dalam proses metabolisme untuk terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Pembesaran kelenjar tiroid disebut sebagai goiter atau gondok. Penelitian membuktikan bahwa wanita yang terpajan pestisida mempunyai risiko 3 kali untuk menderita kekurangan hormon tiroid.

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Brebes, 2018

Dampak Kekurangan Hormon Tiroid

Pada Ibu Hamil:

- Keguguran (*abortus*)
- Gangguan tumbuh-kembang janin
- Lahir sebelum waktunya (*premature*)
- Berat badan lahir rendah
- Bayi lahir cacat

Pada Anak:

- Gangguan tumbuh Kembang
- Anak lambat berbicara
- Tinggi badan tidak sesuai umur (pendek/stunting)
- Gangguan kecerdasaan, prestasi belajar kurang

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Brebes

Dampak Penggunaan Pestisida

- Paparan pestisida kategori 'tinggi' (paparan saat hamil, bayi/balita, usia sekolah) terbukti sebagai faktor kejadian stunting adjOR=3,3 (95% CI=1,2-9,2) (Kartini 2017)
- Hasil penelitian terakhir (Mei 2017) di SD Dukuhlo 01 bahwa Prevalensi hipotiroidisme pada siswa kelas 3 dan 4 mencapai 36,4%
- Riwayat pajanan pestisida merupakan faktor risiko terjadinya stunting pada siswa OR 2,625 (95% CI=1,139-6,051) (Rudi P. Utami, 2013)

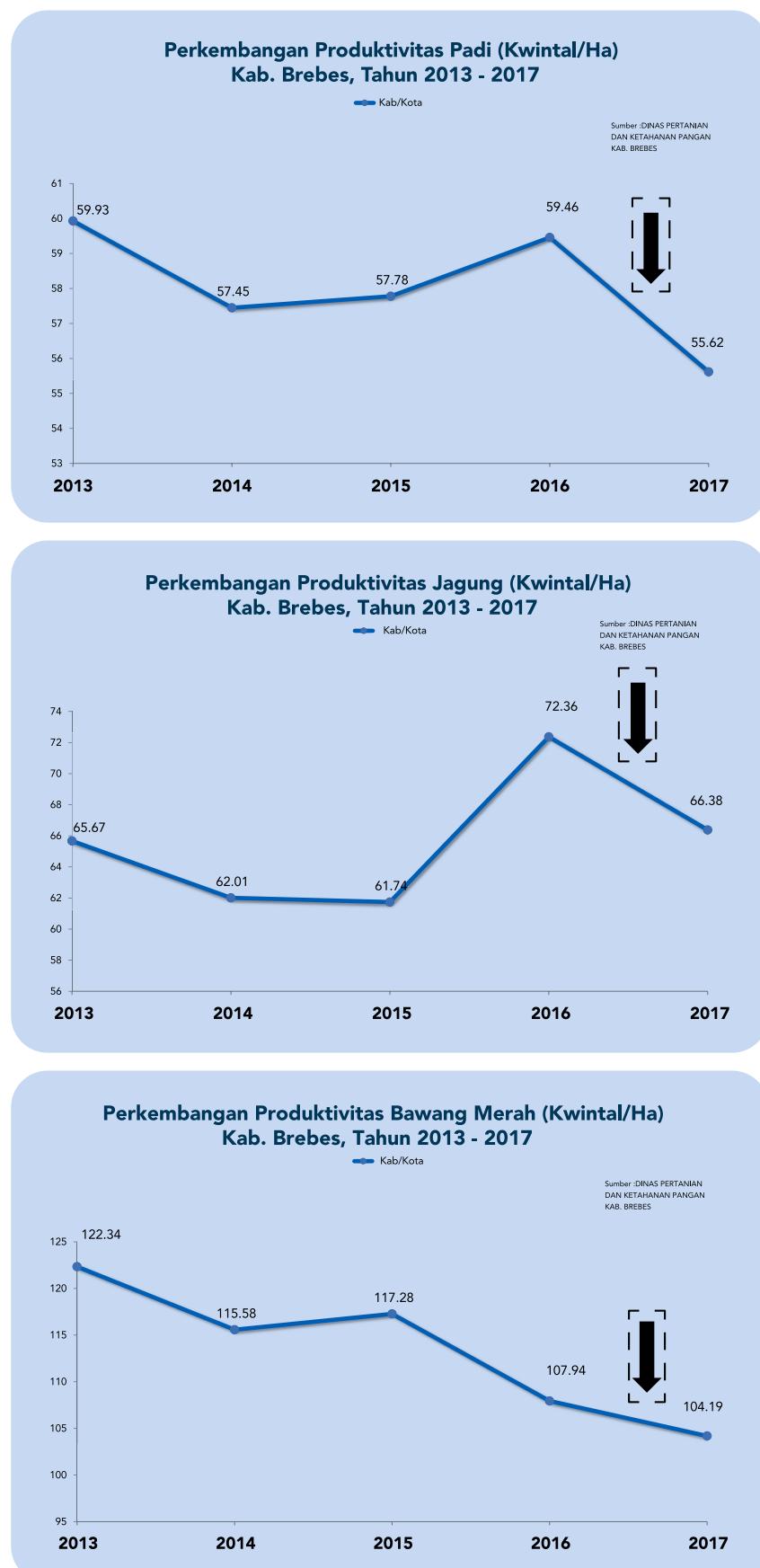
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Brebes

Sejak tahun 2009/2010 Tim UNDIP melakukan riset tentang dampak pestisida terhadap fungsi tiroid dan tumbuh kembang:

- Prevalensi hipotiroidisme pada WUS 22,2% dan pada bumil 9,7% (Suhartono, dkk, 2010)
- WUS dengan riwayat pajanan pestisida mempunyai risiko 3,3 kali untuk menderita hipotiroidisme adj-95% (Suhartono, dkk., 2010)
- Anak dengan riwayat pajanan pestisida mempunyai risiko 6,8 kali untuk menderita gondok (Rasipin, dkk., 2011)

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Brebes

Gambar 2.12 Analisis Keterkaitan Produktivitas Tanaman Unggulan terhadap Sasaran Jangka Pendek



**Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian (orang)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

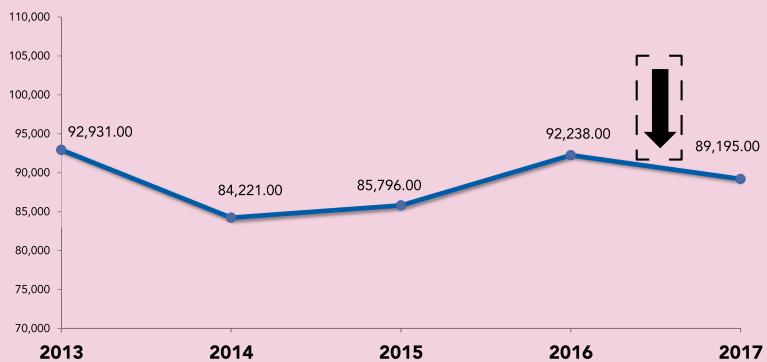
Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (ton)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KAB.
BREBES



**Perkembangan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Luas Lahan Puso (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

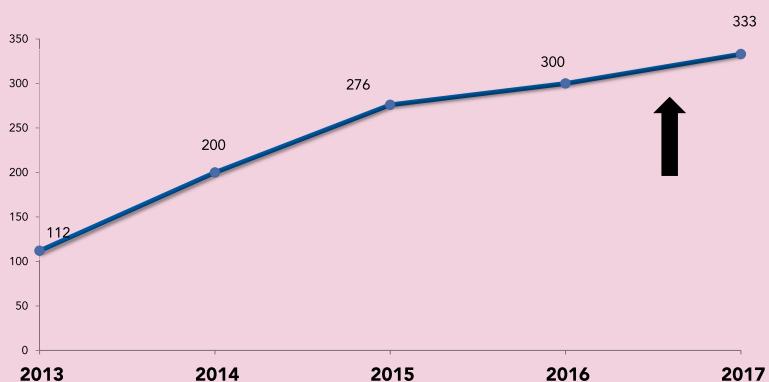
Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

— Kab/Kota

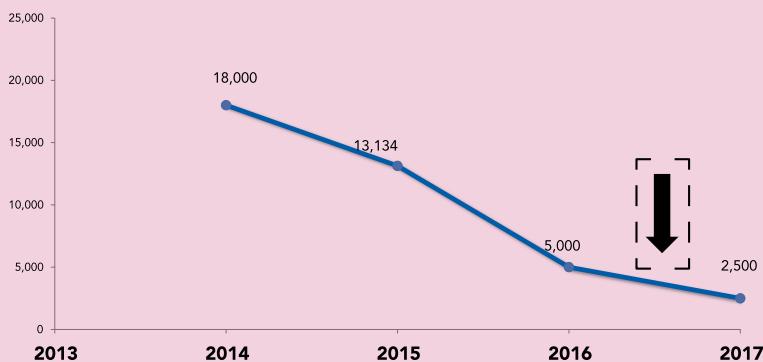
Sumber : DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Fasilitasi Benih/Saprodi Budidaya Padi (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

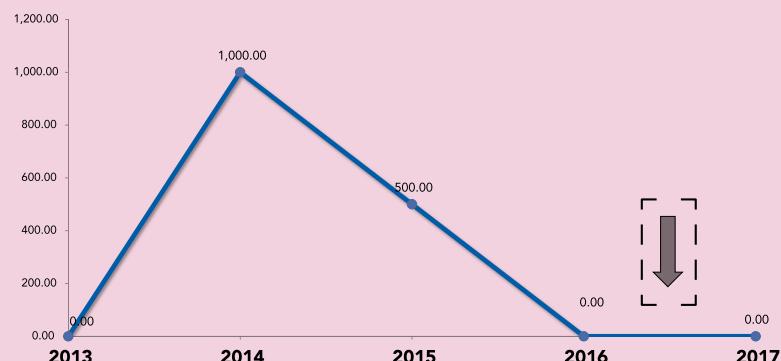
Sumber :DPKP BREBES



**Perkembangan Fasilitasi Benih/Saprodi Budidaya Jagung (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

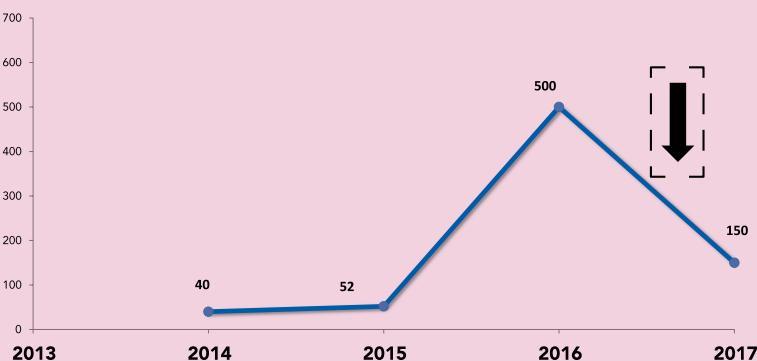
Sumber :DPKP BREBES



**Perkembangan Fasilitasi Bibit/Saprodi Bawang Merah (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

■ Kab/Kota

Sumber :0.00



Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai ditopang oleh peningkatan produktivitas dan luas panen. Jika dilihat dari grafik produktivitas di atas selama lima tahun terjadi penurunan Produktifitas tanaman unggulan di Brebes selama 5 tahun, tanaman padi mengalami penurunan 2-4 kwintal per Ha, produktivitas jagung yang fluktuatif dan produktivitas bawang merah sebesar 1,5 ton per ha, penyebab terjadinya penurunan produktivitas tersebut adalah: (Gambar 2.12)

1. Terjadinya fenomena perubahan iklim/dampak perubahan iklim/DPI selama lima tahun terakhir sangat berpengaruh pada sektor pertanian seperti terjadinya kondisi/kelembaban optimum untuk berkembang biaknya organisme pengganggu tanaman/OPT hal ini menyebabkan meningkatnya serangan, ledakan OPT seperti WBC/ werang batang Coklat pada padi, Virus kuning/bulai pada jagung, ulat bawang/Spodoptera Exigua dan sejenisnya pada bawang merah menyebabkan penurunan produktivitas.
2. Dampak perubahan iklim/DPI kekeringan dan banjir/genangan air yang lama serta fasilitasi irigasi yang berkurang, pada tahun 2017 terjadi banjir besar di Brebes telah menyebabkan lebih dari 3.500 ha lahan pertanian tergenang dan terjadi kemarau panjang dari Mei sd Oktober 2017 menyebabkan kekeringan, kekurangan pasokan atau kelebihan pasokan air berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, menyebabkan penurunan produktivitas dan tanaman puso/tidak menghasilkan/gagal panen.
3. Penggunaan benih padi yang terus menerus tidak ganti varietas, selama lima tahun terakhir banyak di gunakan varietas ciherang dan situbagendit seharusnya ada pergantian varietas. Berkurangnya bantuan benih padi, bawang merah berdampak pada penggunaan benih yang terus menerus produksi sendiri bukan dari penangkar benih yang berlabel.
4. Penggunaan jagung hibrida telah mampu menaikan produktivitas jagung namun kondisi tahun 2017 namun faktor serangan OPT dan kekeringan cukup berperan menyebabkan fluktuasi produktivitas.
5. Penggunaan lahan yang terus menerus guna meningkatkan luas tanam baik padi, jagung dan bawang merah tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk yang berimbang (penggunaan urea, NPK, SP36, KCl yang tidak sesuai dengan rekomendasi penggunaan per ha) dan kurangnya penggunaan pupuk organik menyebabkan penurunan kesuburan lahan sehingga berdampak terhadap penurunan produktivitas.

Gambar 2.13 Analisis Keterkaitan Perkembangan Luas Panen terhadap Sasaran Jangka Pendek



**Perkembangan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

Kab/Kota

Sumber :DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES



**Perkembangan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

Kab/Kota

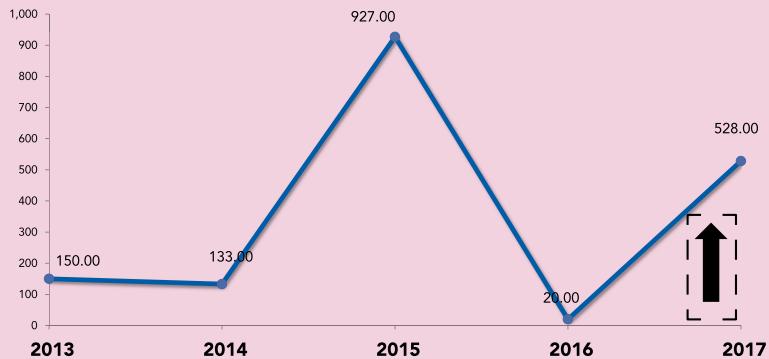
Sumber :DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES

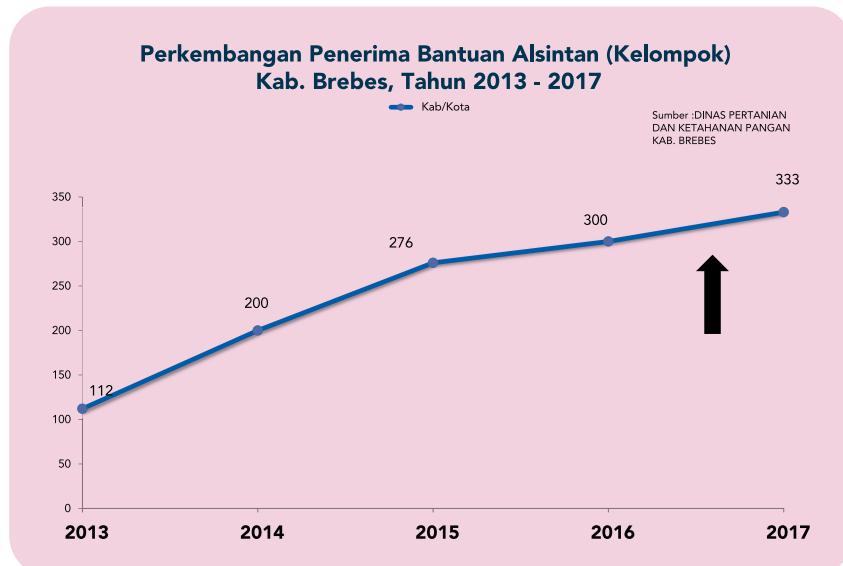


**Perkembangan Luas Lahan Puso (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

Kab/Kota

Sumber :DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. BREBES





Selama 5 tahun, luas panen komoditas padi, jagung dan bawang merah mengalami peningkatan, hal ini disebabkan fasilitasi penyediaan air irigasi melalui pembangunan, rehabilitasi irigasi dan sumber air. Namun pada tahun 2017, komoditas padi mengalami penurunan karena di awal tahun 2017 curah hujan tinggi menyebabkan lahan tergenang/banjir dan di akhir tahun yaitu April hingga dengan November terjadi kemarau panjang menyebabkan penurunan luas panen dan peningkatan puso. Kemudian, tahun 2017 sejak bulan Agustus hingga September terjadinya pembangunan irigasi primer pemali hilir sehingga dilakukan pengeringan total irigasi yang mengairi sawah di 7 kecamatan wilayah pantai utara dengan luas lahan lebih 26.000 ha ini menyebabkan lahan tersebut tidak bisa ditanami padi yang merupakan tanaman butuh air banyak tetapi masih bisa ditanami jagung dan bawang merah dengan memanfaatkan irigasi tanah dangkal (sumur) yang merupakan fasilitasi irigasi tahun 2016. (Gambar 2.13)

Gambar 2.14 Analisis Keterkaitan Harga Jual Tanaman Unggulan terhadap Sasaran Jangka Pendek

**Perkembangan Harga Jual Gabah Kering Giling (rata-rata tahunan) (Rp/Kg)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**



**Perkembangan Harga Jual Jagung Pipilan (rata-rata tahunan) (Rp/Kg)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**



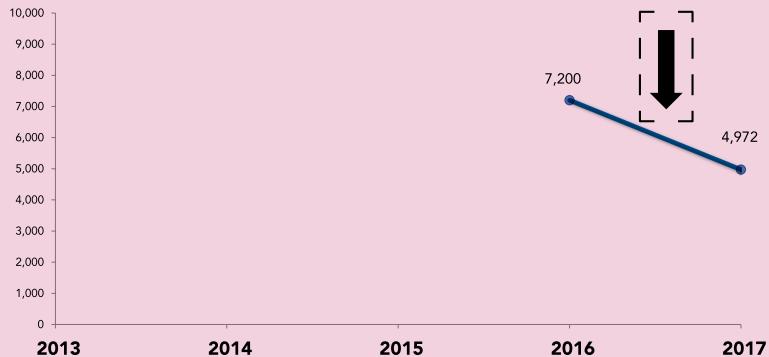
**Perkembangan Harga Jual Bawang Merah Tingkat Petani (rata-rata tahunan) (Rp/Kg)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**



**Perkembangan Luas Lahan Pertanian yang diasuransikan (Ha)
Kab. Brebes, Tahun 2013 - 2017**

Kab/Kota

Sumber :0.00



Peningkatan harga jual komoditas utama Brebes sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani yang akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, peningkatan harga jual komoditas juga sangat berdampak terhadap semangat petani untuk menambah luas panen dan rajinnya petani memelihara tanaman dari serangan OPT, pemupukan yang lebih baik dan penyediaan air yang cukup dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas (kw/ha).

2.3 PRIORITAS WILAYAH SEKTOR PERTANIAN

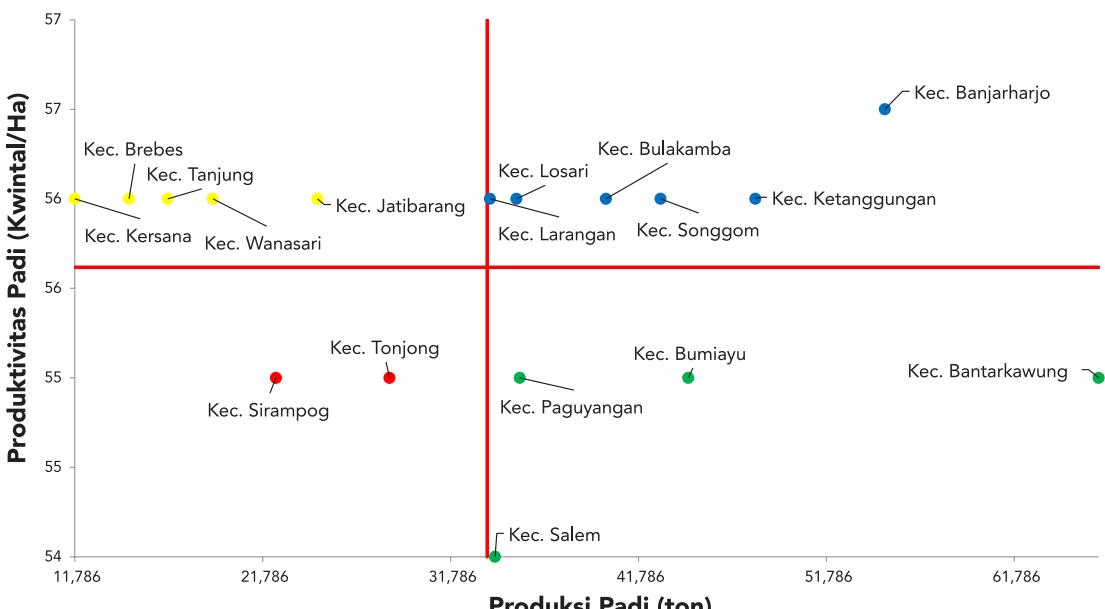
Analisis kuadran menghasilkan empat kelompok prioritas wilayah kecamatan bagi setiap prioritas intervensi. Masing masing prioritas wilayah tersebut dijelaskan di bawah ini. Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan penyuluhan pertanian, kelompok yang menjadi prioritas pertama adalah sebagai berikut: (Gambar 2.15)

- Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Paguyangan melalui peningkatan produktivitas padi.
- Kecamatan Wanasari dan Bulakamba melalui peningkatan luas panen jagung
- Kecamatan Songgom, Jatibarang, dan Bantarkawung melalui peningkatan luas panen bawang merah

Gambar 2.15 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan

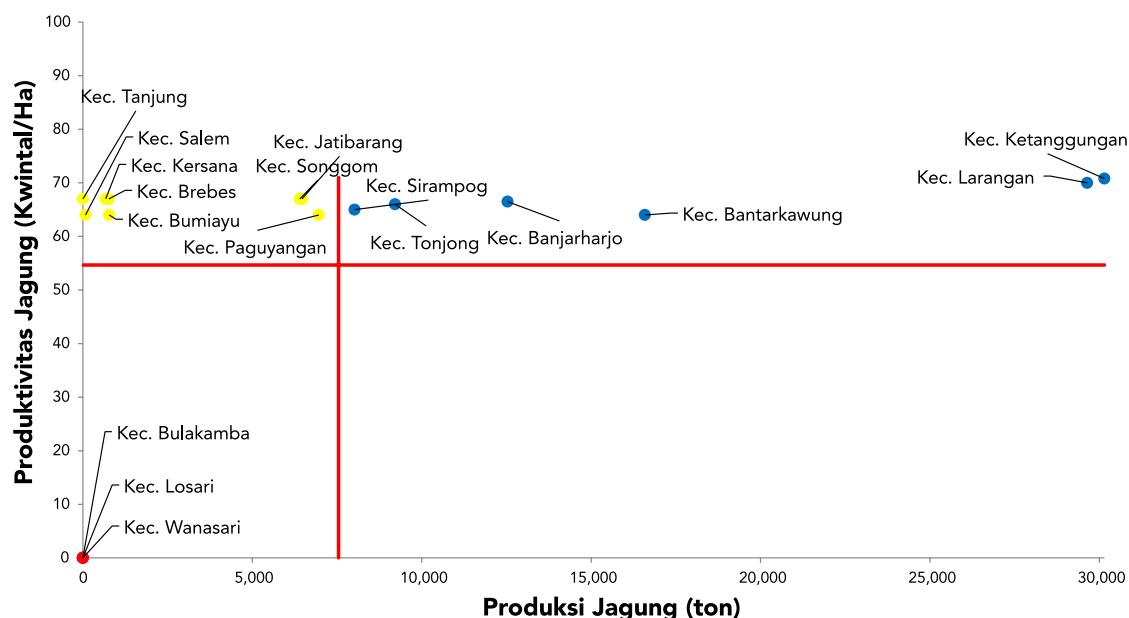
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Padi (ton) dan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



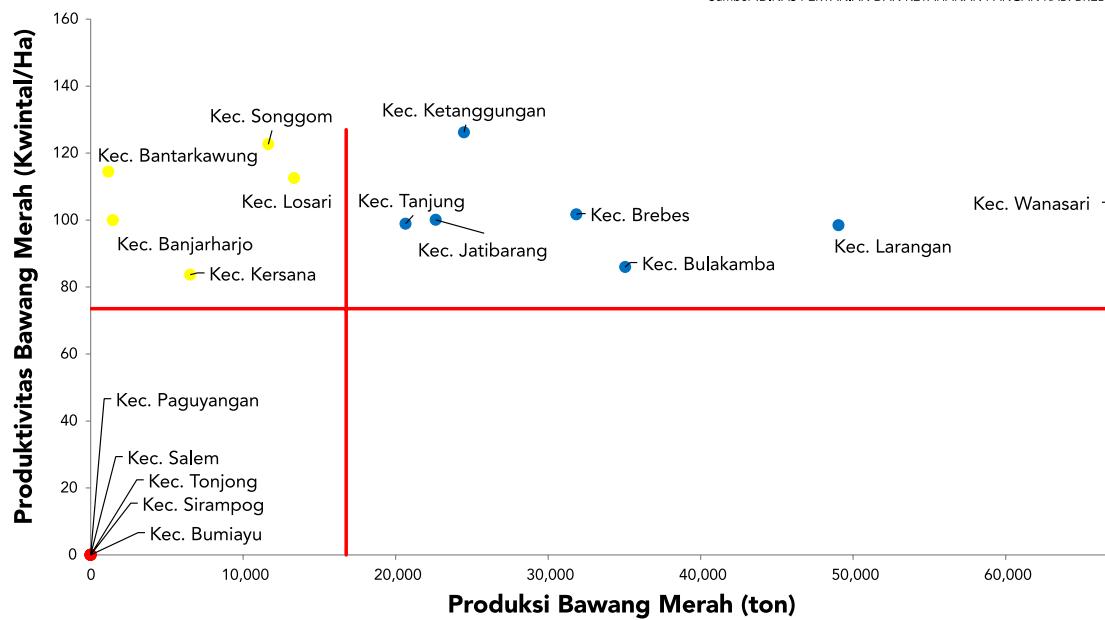
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Jagung (ton) dan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Bawang Merah (ton) dan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) Kab. Brebes - 2017

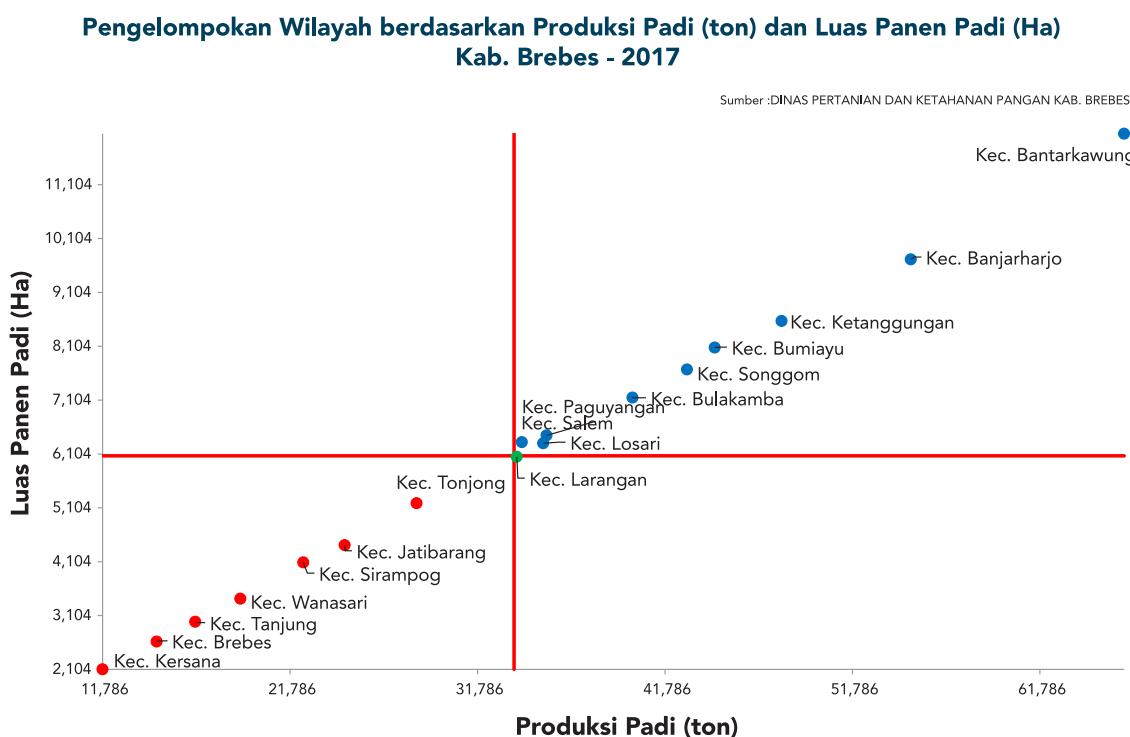
Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari produktivitas (Kwintal/Ha) untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: (Gambar 2.15)

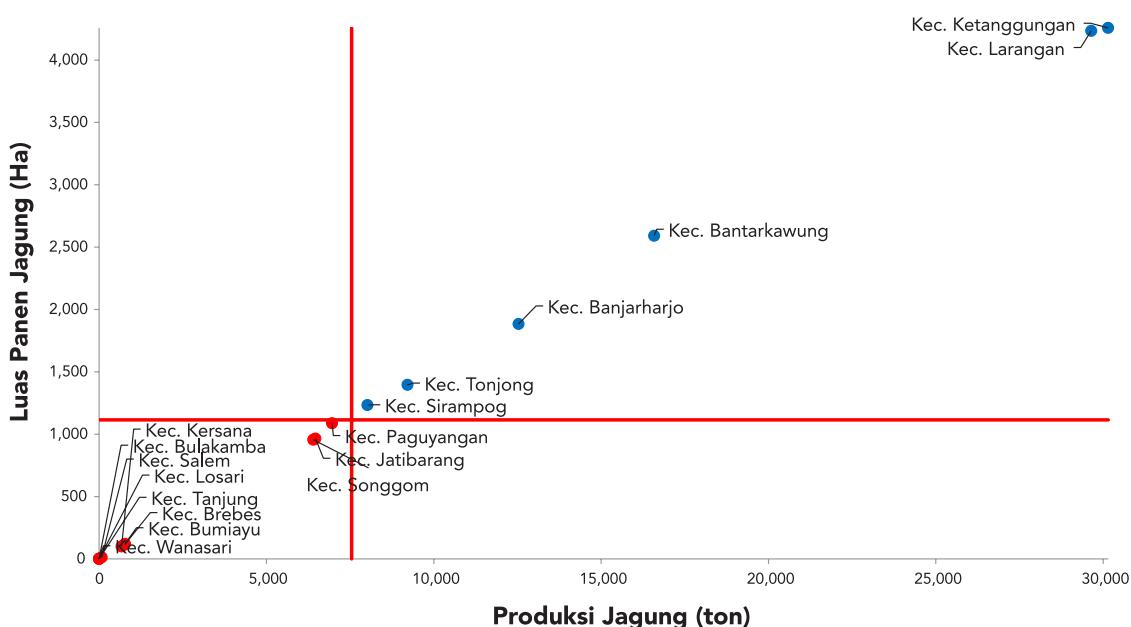
1. Peningkatan produksi padi melalui intervensi peningkatan produktivitas, prioritas wilayahnya yang pertama adalah Kecamatan Sirampog dan Tonjong, sedangkan prioritas kedua adalah Kecamatan Kersana, Brebes, Tanjung, Wanasari dan Jatibarang. Sedangkan untuk kecamatan yang produksinya sudah tinggi agar tetap dipertahankan tingkat produktivitasnya
2. Peningkatan produksi jagung melalui intervensi peningkatan produktivitas, prioritas wilayahnya adalah kecamatan-kecamatan yang memang merupakan kawasan produksi utama jagung, dengan mempertahankan dan mengupayakan peningkatan produktivitasnya. Wilayahnya adalah Kecamatan Sirampog, Tonjong, Banjarharjo, Bantarkawung, Larangan dan Ketanggungan (Brebes bagian tengah dan selatan)
3. Peningkatan produksi bawang merah melalui intervensi peningkatan produktivitas, prioritas wilayahnya adalah di kecamatan-kecamatan yang merupakan kawasan produksi bawang merah utama (di Brebes bagian utara dan tengah) yaitu Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Larangan dan Ketanggungan. Sedangkan untuk Brebes bagian selatan tidak perlu diintervensi karena karakteristik wilayah tersebut yang memang tidak cocok untuk budidaya bawang merah.

Gambar 2.16 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Luas Panen untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan



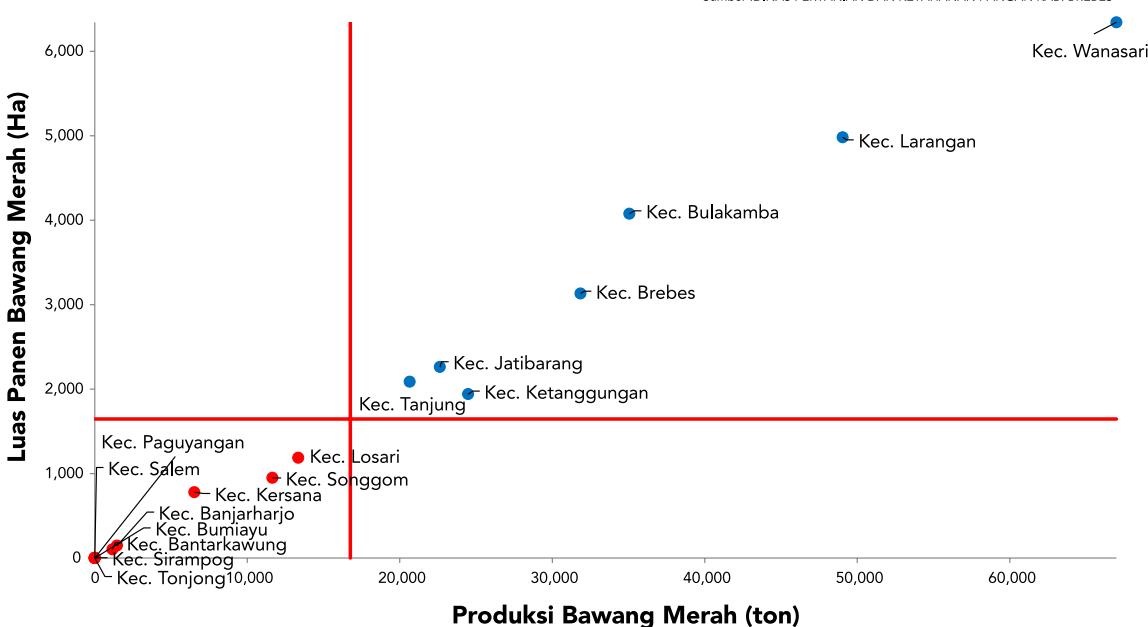
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Jagung (ton) dan Luas Panen Jagung (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Bawang Merah (ton) dan Luas Panen Bawang Merah (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari luas panen (Ha) untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: (Gambar 2.16)

1. Peningkatan produksi padi melalui intervensi peningkatan luas panen (ha), prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Kersana, Brebes, Wanasi, Tanjung, Sirampog, Jatibarang, dan Tonjong. Peningkatan luas tanam dapat dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) yaitu berapa kali lahan dapat ditanam dalam satu tahun. Sedangkan untuk wilayah yang luas tanamnya sudah tinggi harus dipertahankan melalui pengawasan alih fungsi lahan.
2. Peningkatan produksi jagung melalui intervensi peningkatan luas tanam, prioritas wilayahnya adalah tiga kecamatan di kudran merah yaitu Songgom, Jatibarang dan Paguyangan (sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya di kudran merah memang bukan merupakan area utama pertanaman jagung), karena wilayah tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan luas panennya melalui peningkatan indeks pertanaman. Sedangkan untuk wilayah dengan luas panen jagung tinggi harus dipertahankan
3. Peningkatan produksi bawang merah melalui intervensi peningkatan luas panen, prioritas wilayahnya adalah tiga kecamatan di kuadran merah yaitu Kersana, Songgom dan Losari (kecamatan lainnya dalam kuadran merah/Brebes daerah tidak cocok untuk budidaya bawang). Sedangkan untuk wilayah dengan luas panen yang sudah tinggi harus dipertahankan luas panennya.

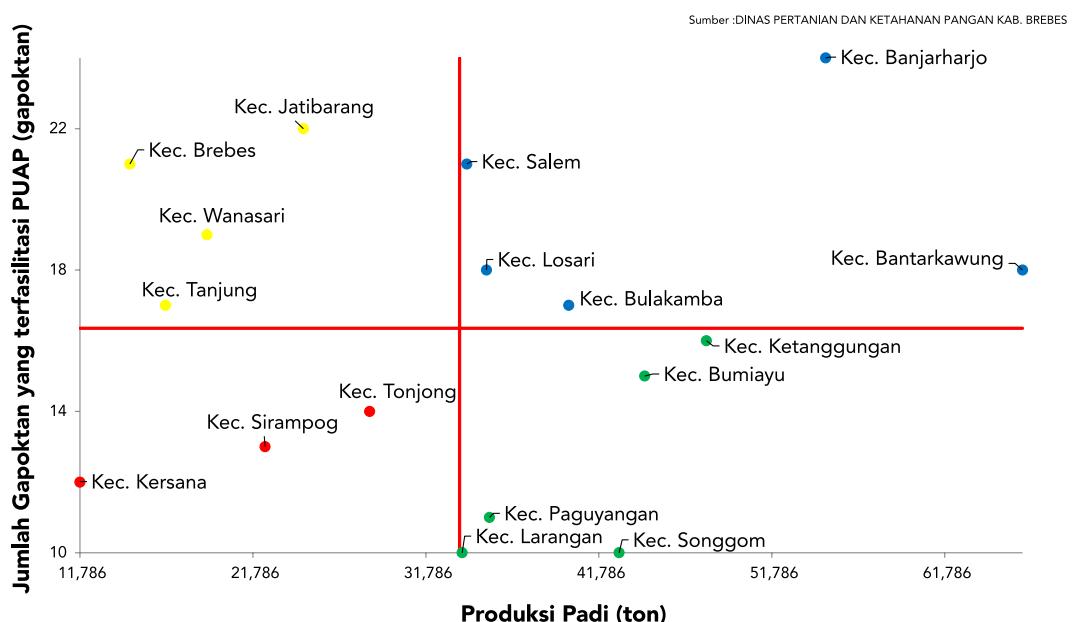
Peningkatan lumbung pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan masyarakat, fungsi lumbung pangan sebagai tempat menyimpan gabah pada saat panen raya padi mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi pertama stabilisasi harga di mana jika panen raya harga gabah/padi jatuh sehingga petani akan menyimpan dulu di lumbung tidak dijual terlebih dahulu menunggu harga naik.
2. Fungsi ke dua sebagian petani selain sebagai produsen beras juga konsumen beras, dengan adanya lumbung jika terjadi musim paceklik maka cadangan pangan dilumbung dapat di keluarkan di pinjamkan ke petani dibayar kembali saat panen, ini menghindari petani untuk beli beras berdampak mengurangi pengeluaran petani untuk membeli beras dan hutang ke pihak rentenir karena dapat meminjam gabah ke lumbung
3. Fungsi ke tiga, lumbung yang dilengkapi RMU/Rice Milling Unit maka petani tidak akan menjual gabah tapi akan menjual dalam bentuk beras sehingga meningkatkan nilai jual.

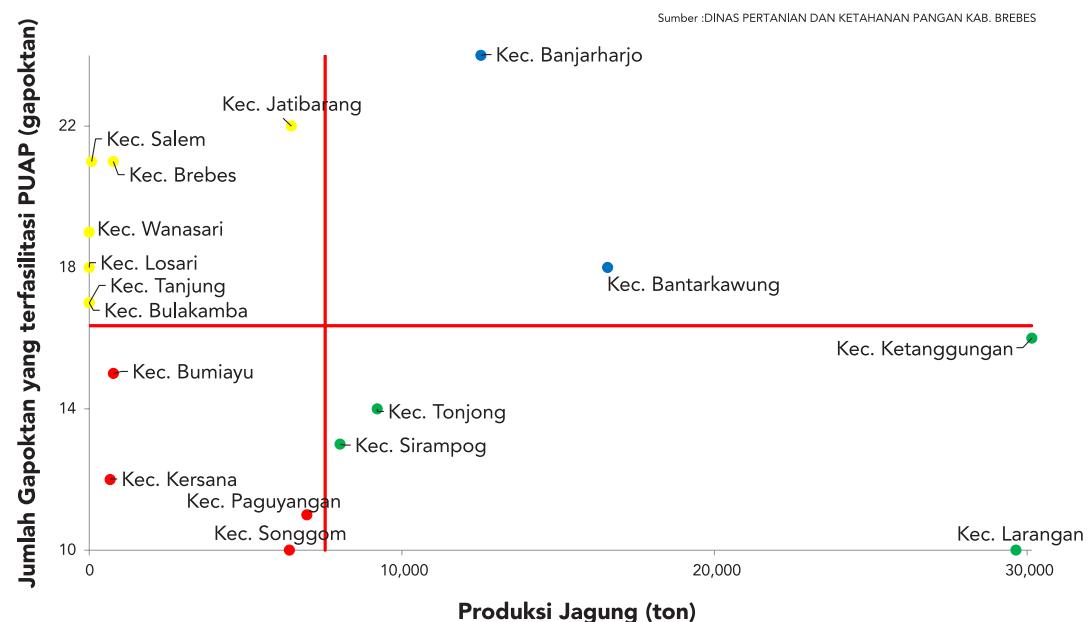
Peningkatan pemanfaatan pekarangan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, dengan memanfaatkan pekarangan dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan hidup karena dapat dipenuhi dari pekarangan dan meningkatkan pendapat.

Gambar 2.17 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Permodalan untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Padi (ton) dan Jumlah Gapoktan yang terfasilitasi PUAP (gapoktan) Kab. Brebes - 2017

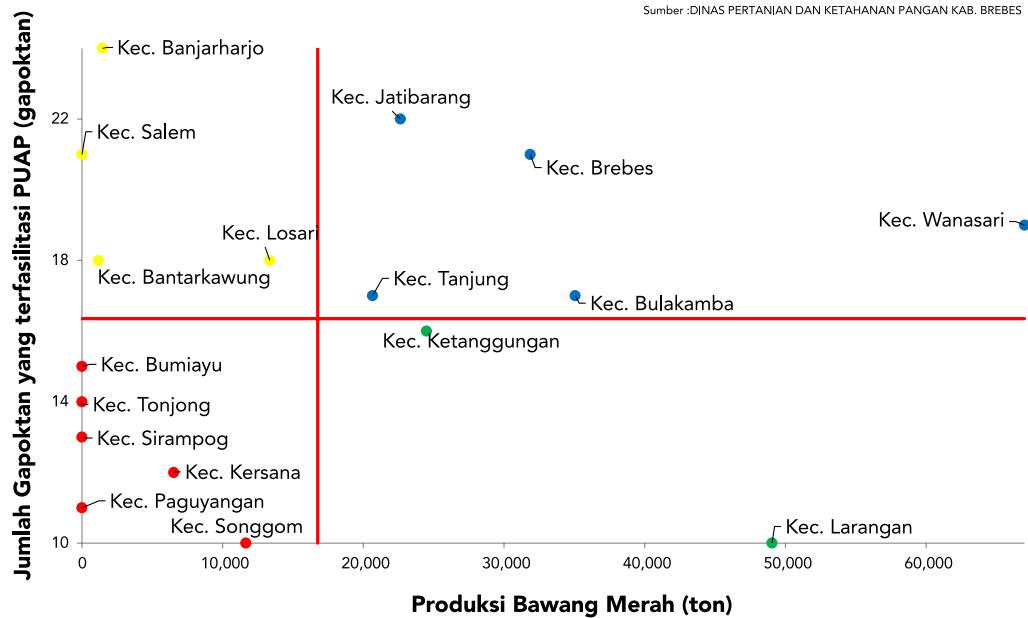


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Jagung (ton) dan Jumlah Gapoktan yang terfasilitasi PUAP (gapoktan) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Bawang Merah (ton) dan Jumlah Gapoktan yang terfasilitasi PUAP (gapoktan) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

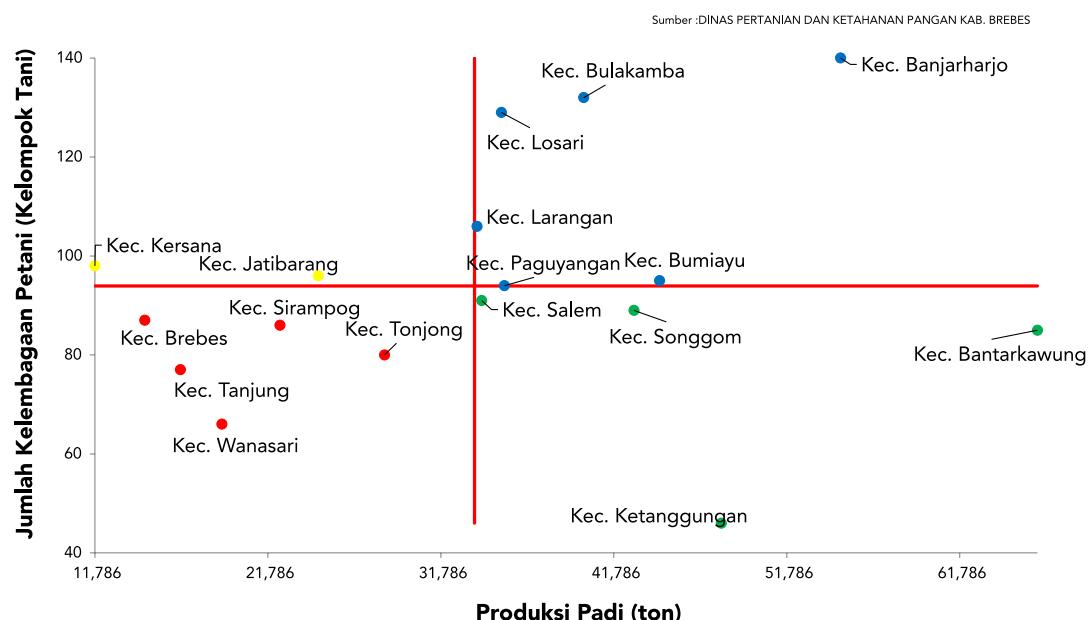


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari Peningkatan Akses Permodalan melalui Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: (Gambar 2.17)

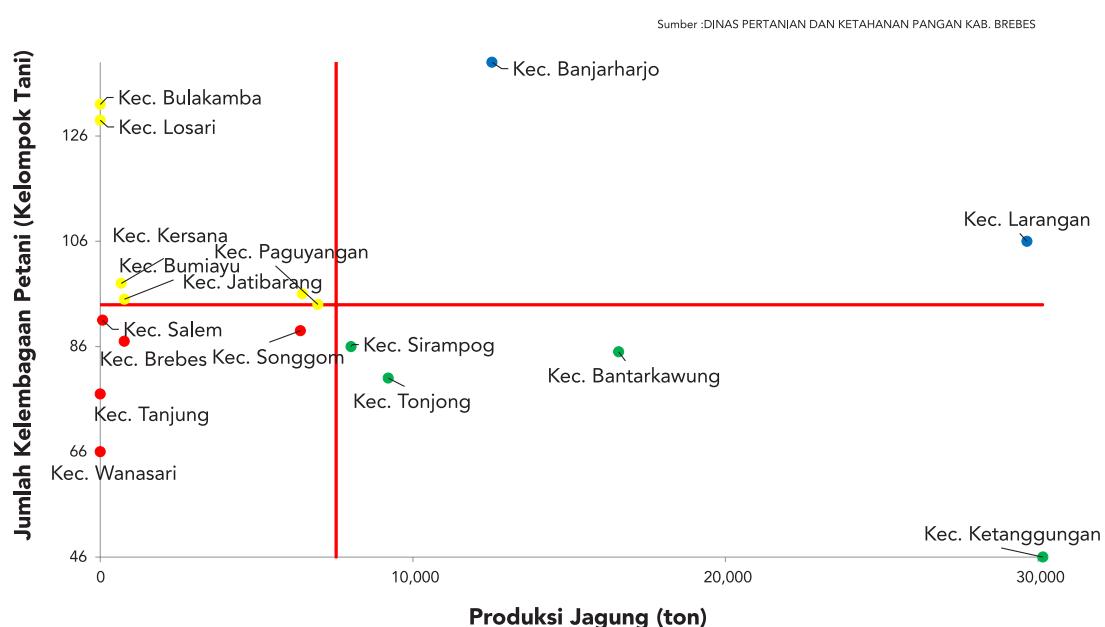
1. Peningkatan produksi padi melalui peningkatan akses permodalan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), prioritas pertamanya adalah kecamatan Sirampog dan Tanjung. Sedangkan prioritas kedua adalah kecamatan Larangan, Paguyangan, Songgom, Bumiayu dan Ketanggungan
2. Peningkatan produksi jagung melalui peningkatan akses permodalan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), prioritas pertamanya adalah kecamatan Songgom dan Paguyangan. Sedangkan prioritas kedua adalah kecamatan Sirampog, Tanjung, Ketanggungan dan Larangan
3. Peningkatan produksi padi melalui peningkatan akses permodalan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), prioritas pertamanya adalah kecamatan Kersana dan Songgom. Sedangkan prioritas kedua adalah kecamatan Ketanggungan dan Larangan

Gambar 2.18 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan SDM Petani untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Ungulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Padi (ton) dan Jumlah Kelembagaan Petani (Kelompok Tani) Kab. Brebes - 2017

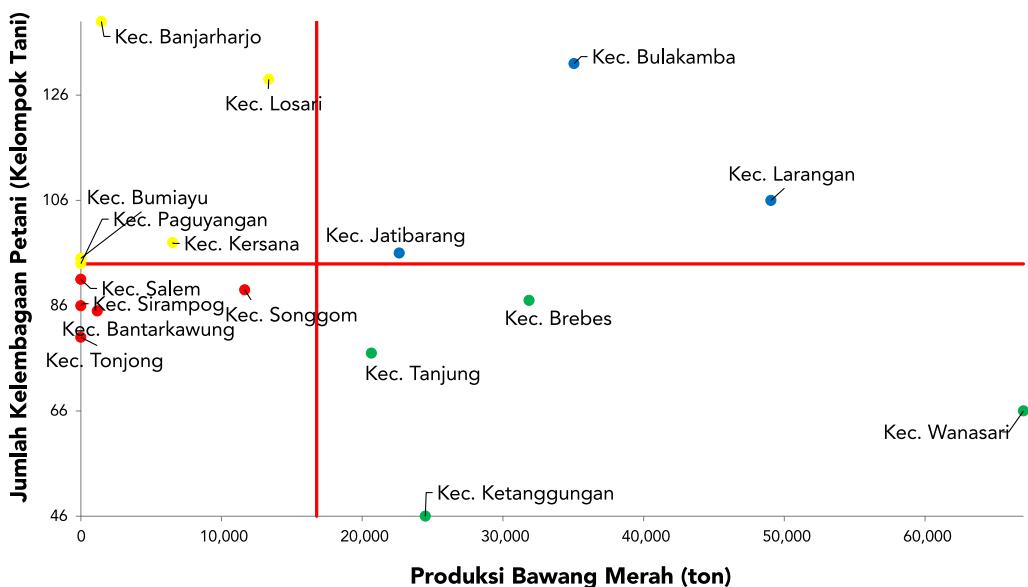


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Jagung (ton) dan Jumlah Kelembagaan Petani (Kelompok Tani) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Bawang Merah (ton) dan Jumlah Kelembagaan Petani (Kelompok Tani) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



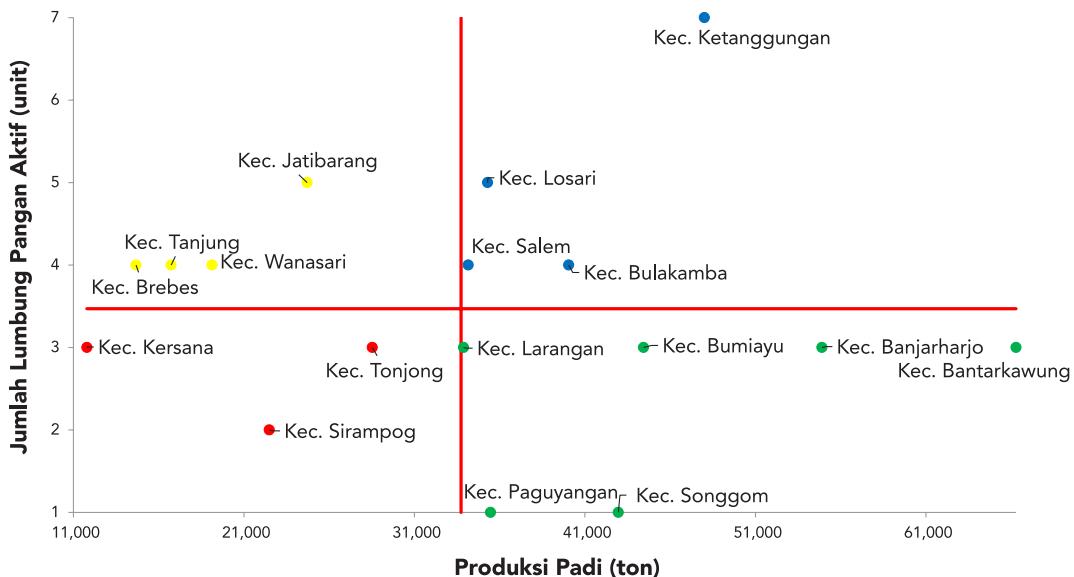
Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari Kelembagaan Petani (Jumlah Kelompok Tani yang aktif) untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: (Gambar 2.18)

1. Peningkatan produksi padi melalui peningkatan jumlah kelembagaan petani (kelompok tani), prioritas pertamanya adalah kecamatan Sirampog dan Tonjong. Dengan peningkatan jumlah kelembagaan petani di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi. Sedangkan prioritas kedua adalah kecamatan Salem, Songgom, Ketanggungan dan Bantarkawung. Diperlukan peningkatan jumlah kelembagaan petani di wilayah tersebut untuk dapat mempertahankan produksi padi.
2. Peningkatan produksi jagung melalui peningkatan jumlah kelembagaan petani, prioritas wilayahnya adalah kecamatan Songgom, Sirampog, Tonjong dan Bantarkawung. Peningkatan jumlah kelembagaan petani di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan SDM pertanian sehingga dapat mendorong peningkatan produksi jagung.
3. Peningkatan produksi bawang merah melalui peningkatan jumlah kelembagaan petani, prioritas wilayahnya adalah kecamatan Songgom, Tanjung, Brebes, Ketanggungan dan Wanásari. Peningkatan jumlah kelembagaan petani di wilayah tersebut diharapkan mampu meningkatkan SDM pertanian sehingga dapat mendorong peningkatan produksi bawang merah.

Gambar 2.19 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Lumbung Pangan Aktif untuk Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Padi (ton) dan Jumlah Lumbung Pangan Aktif (unit) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

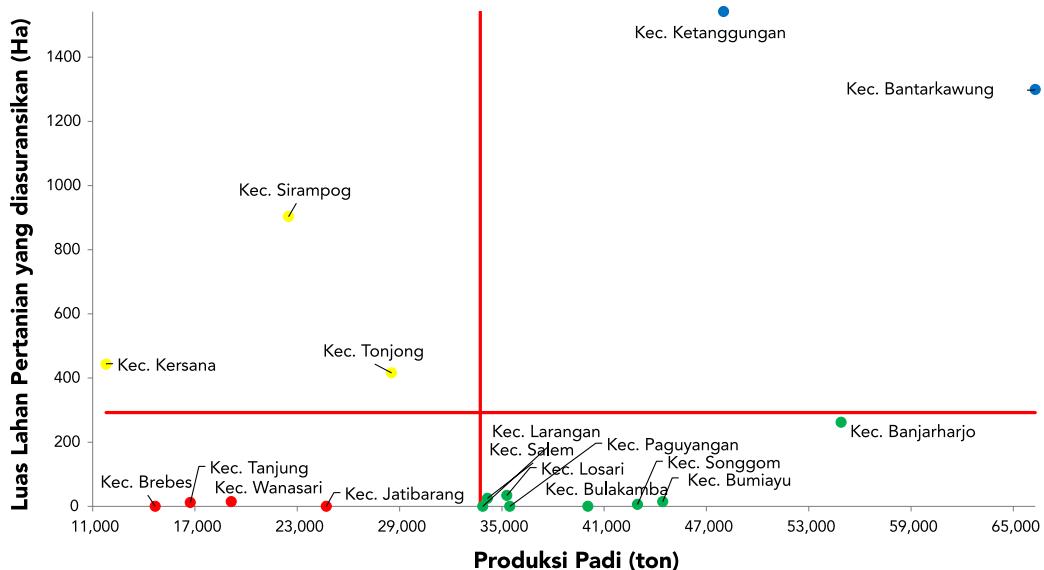


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari Jumlah Lumbung Pangan Aktif (Unit) untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: Peningkatan produksi padi dengan intervensi jumlah lumbung pangan aktif, prioritas utamanya adalah wilayah dengan produksi padi tinggi namun masih sedikit jumlah lumbung pangan yang aktif, yaitu kecamatan Larangan, Paguyangan, Bumiayu, Songgom, Banjarharjo dan Bantarkawung. Dengan meningkatkan jumlah lumbung pangan di wilayah tersebut diharapkan dapat semakin banyak menampung gabah pada saat panen raya sehingga dapat meningkatkan cadangan pangan. (Gambar 2.19)

Gambar 2.20 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Asuransi Lahan untuk Meningkatkan Produksi Padi

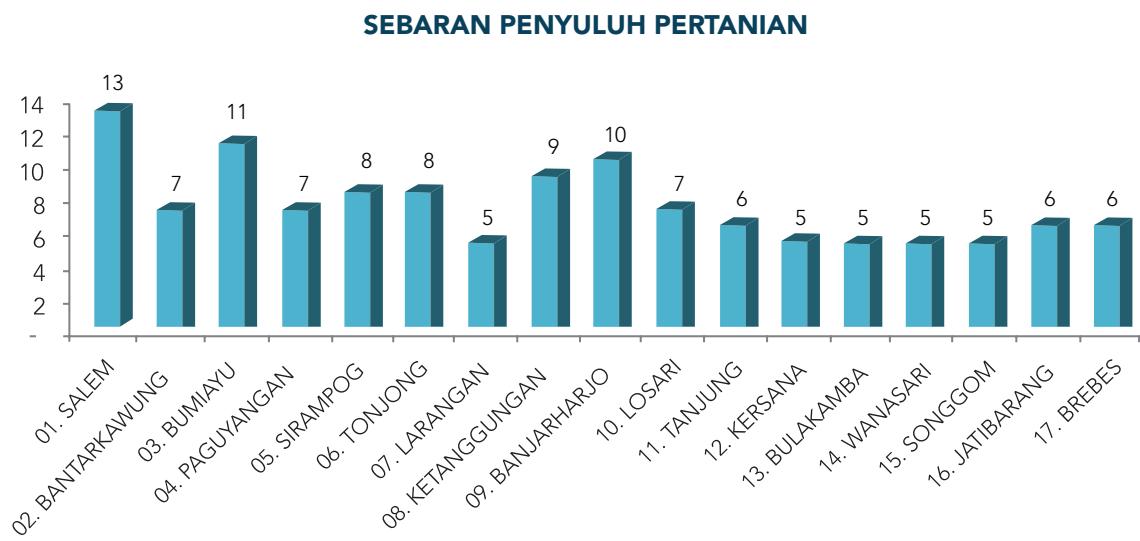
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produksi Padi (ton) dan Luas Lahan Pertanian yang diasuransikan (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

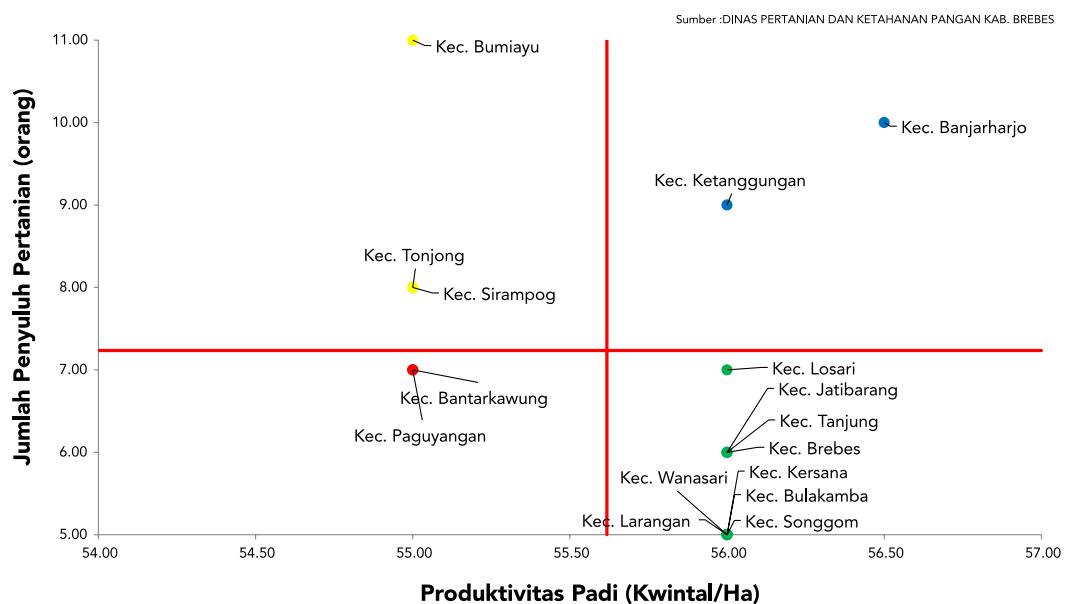


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan adalah: Peningkatan produksi padi dengan intervensi pemberian asuransi lahan pertanian, prioritas utamanya adalah wilayah dengan produksi padi tinggi namun belum ada lahan pertanian yang diasuransikan yaitu Kecamatan Salem, Larangan, Losari, Bulakamba, Paguyangan, Songgom, Bumiayu, dan Banjarharjo. Di kecamatan-kecamatan tersebut diharapkan adanya asuransi lahan pertanian agar dapat menjamin petani meskipun adanya gagal panen untuk peningkatan produksi padi kedepannya. (Gambar 2.20)

Gambar 2.21 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Penyuluhan untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan

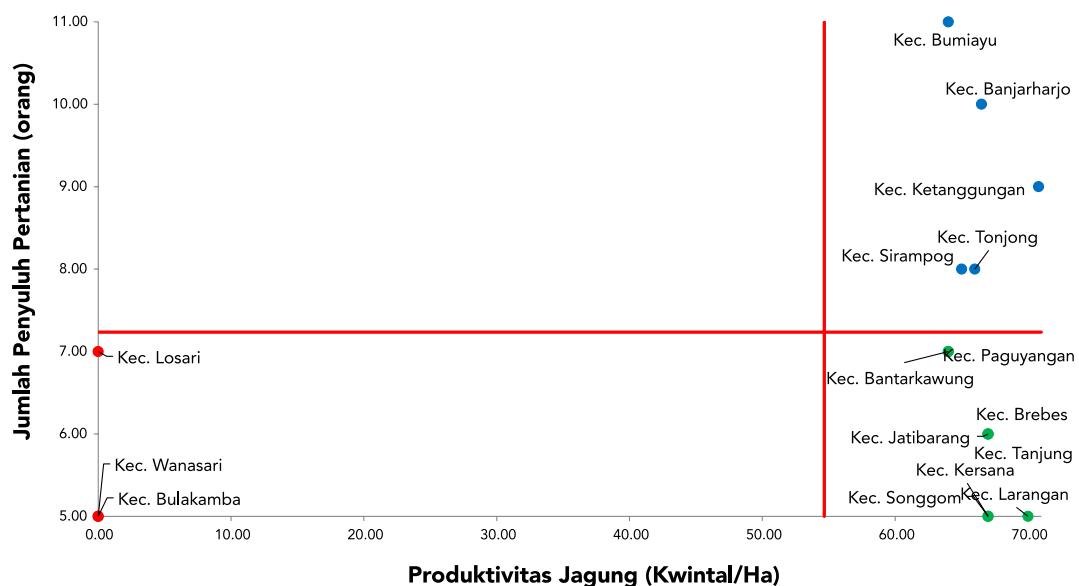


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Jumlah Penyuluhan Pertanian (orang)
Kab. Brebes - 2017



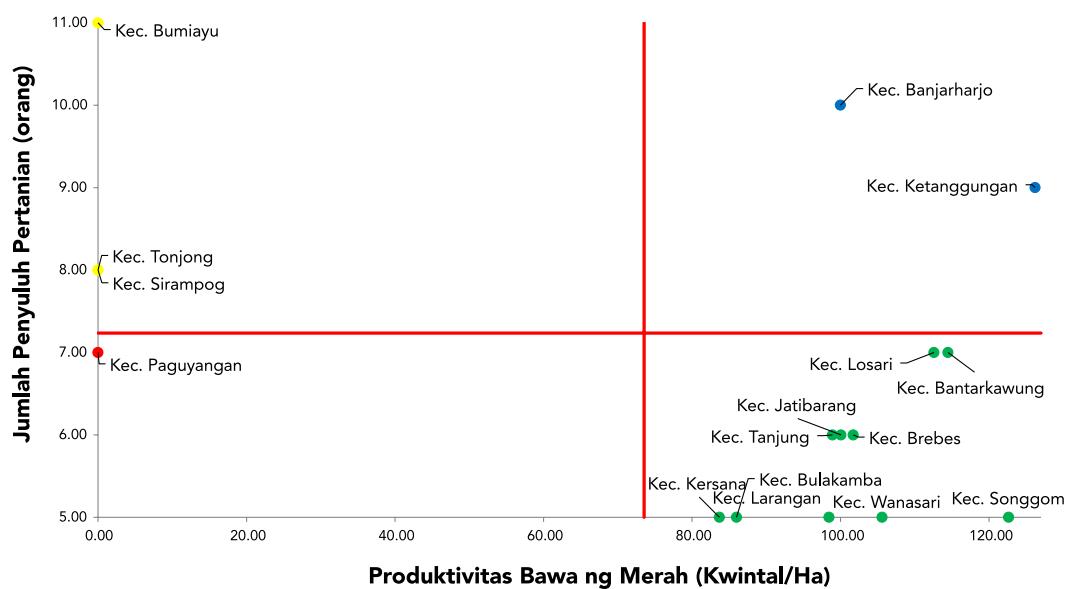
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) dan Jumlah Penyuluhan Pertanian (orang) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Jumlah Penyuluhan Pertanian (orang) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

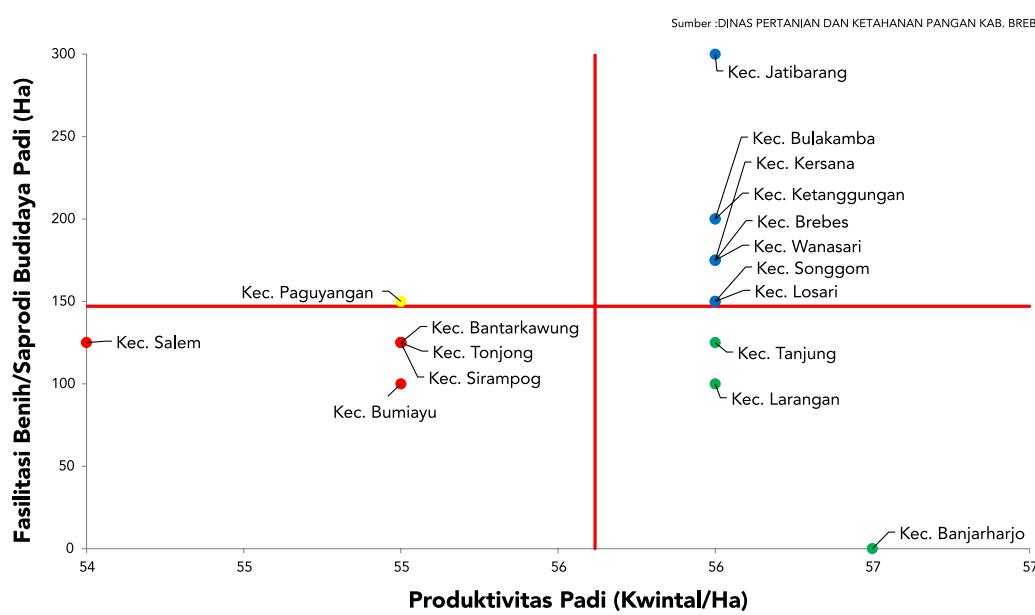


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas (kwintal/ha) adalah: (Gambar 2.21)

1. Tanaman padi melalui peningkatan penyuluhan pertanian, prioritas wilayahnya yang pertama adalah di Kecamatan Bantarkawung dan Paguyangan. Perlu penambahan tenaga penyuluhan agar diharapkan dapat memacu peningkatan produktivitas di wilayah tersebut. Prioritas kedua adalah di Kecamatan Bumiayu, Tonjong dan Sirampog, di mana diperlukan upaya penyuluhan yang lebih intensif untuk meningkatkan produktivitas padi
2. Tanaman jagung melalui peningkatan penyuluhan pertanian, prioritas wilayahnya adalah di kuadran hijau (Kecamatan Paguyangan, Bantarkawung, Brebes, Jatibarang, Tanjung, Kersana, Songgom, Larangan) yaitu kecamatan dengan produktivitas jagung tinggi namun tenaga penyuluhannya sedikit. Sedangkan pada kuadran merah tidak perlu diintervensi karena wilayah tersebut memang bukan sentra jagung.
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi penyuluhan pertanian, prioritas wilayahnya adalah di kuadran hijau (Kecamatan Kersana, Larangan, Bulakamba, Tanjung, Jatibarang, Brebes, Wanasari, Bantarkawung, Songgom) yaitu wilayah dengan produktivitas bawang tinggi namun tenaga penyuluhannya sedikit.

Gambar 2.22 Analisis Prioritas Wilayah Penggunaan Bibit Unggul untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan

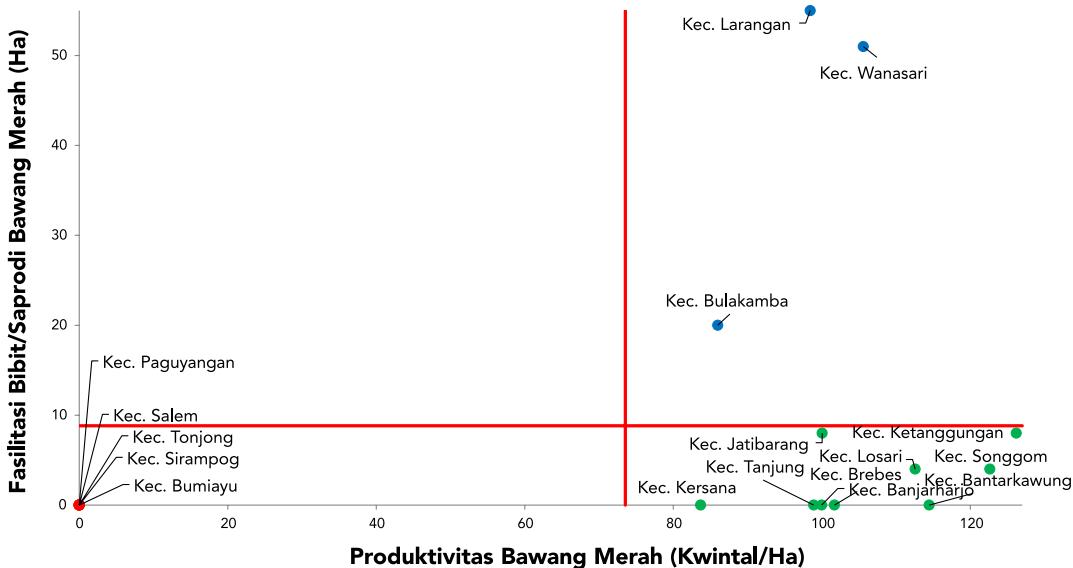
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Fasilitasi Benih/Saprodi Budidaya Padi (Ha) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Fasilitasi Bibit/Saprodi Bawang Merah (Ha)

Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

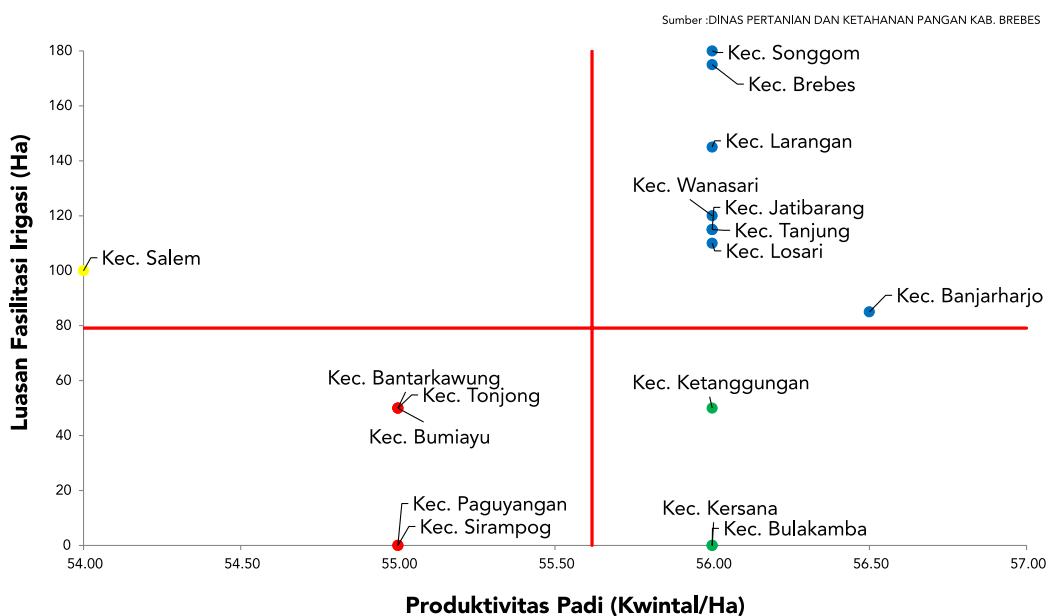


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari penggunaan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas (kuwintal/ha) adalah: (Gambar 2.22)

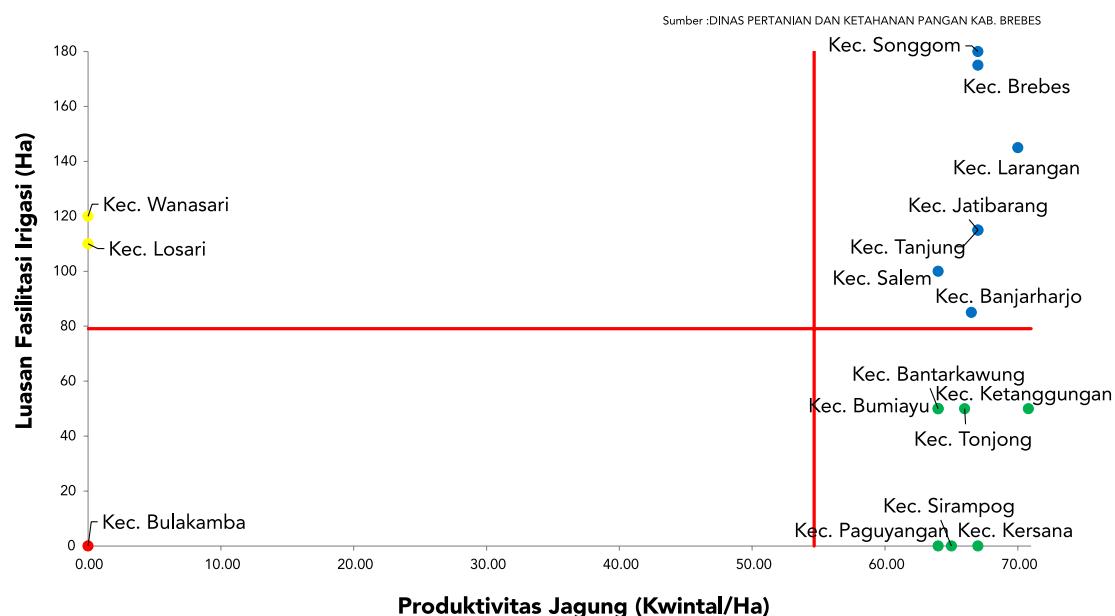
1. Tanaman padi melalui intervensi peningkatkan fasilitasi benih/saprodi padi adalah di Kecamatan Bumiayu, Bantarkawung, Tonjong dan Sirampog). Pada wilayah tersebut masih memerlukan peningkatan fasilitasi benih/saprodi untuk meningkatkan produktivitas padi
2. Tanaman jagung pada tahun 2017 yang perlu mendapat fasilitasi benih/saprodi padi di wilayah Larangan, Banjarharjo, Tonjong, Bumiayu dan Bantarkawung
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi peningkatan fasilitasi benih/saprodi bawang merah adalah di Kecamatan Kersana, Tanjung, Jatibarang, Losari, Brebes, Banjarharjo, Ketanggungan, Songgom dan Bantarkawung. Di wilayah tersebut tingkat produktivitas bawang merah tinggi namun fasilitasi benih dan saprodi bawang merahnya masih rendah

Gambar 2.23 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Irigasi untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017

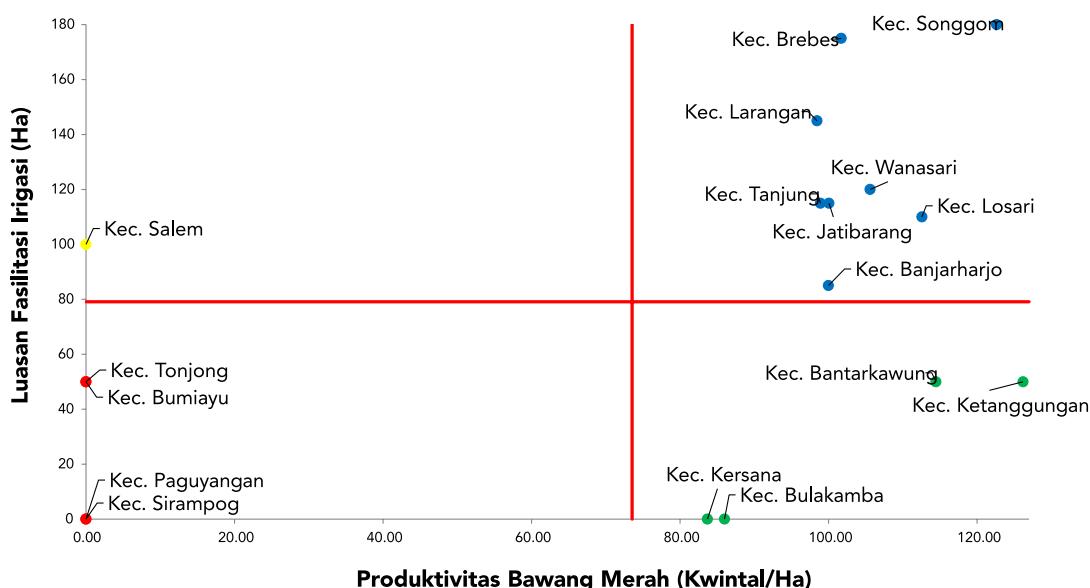


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

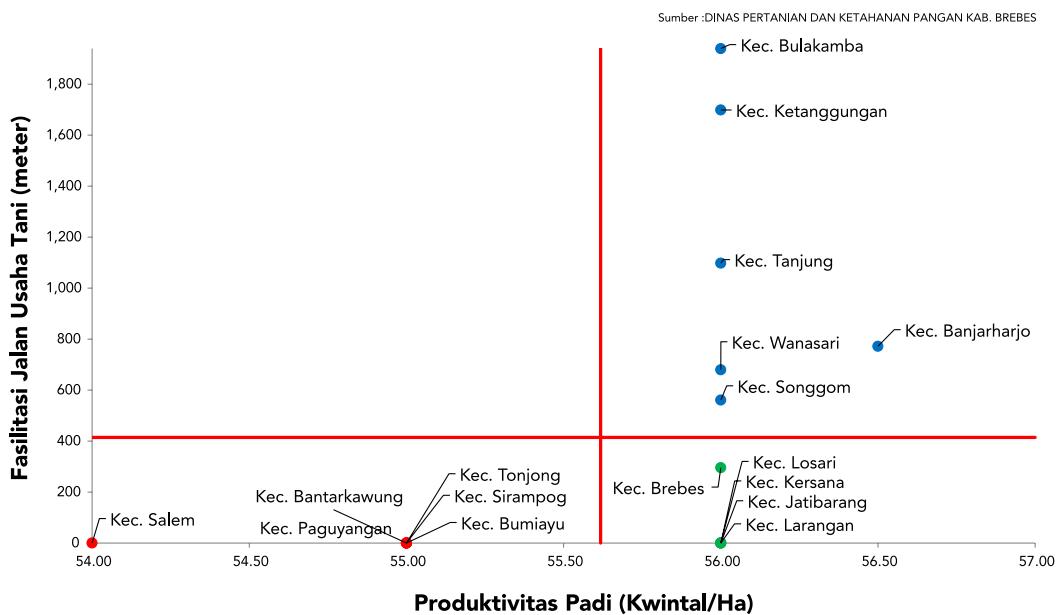


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari fasilitasi irigasi untuk meningkatkan produktivitas (kwintal/ha) adalah: (Gambar 2.23)

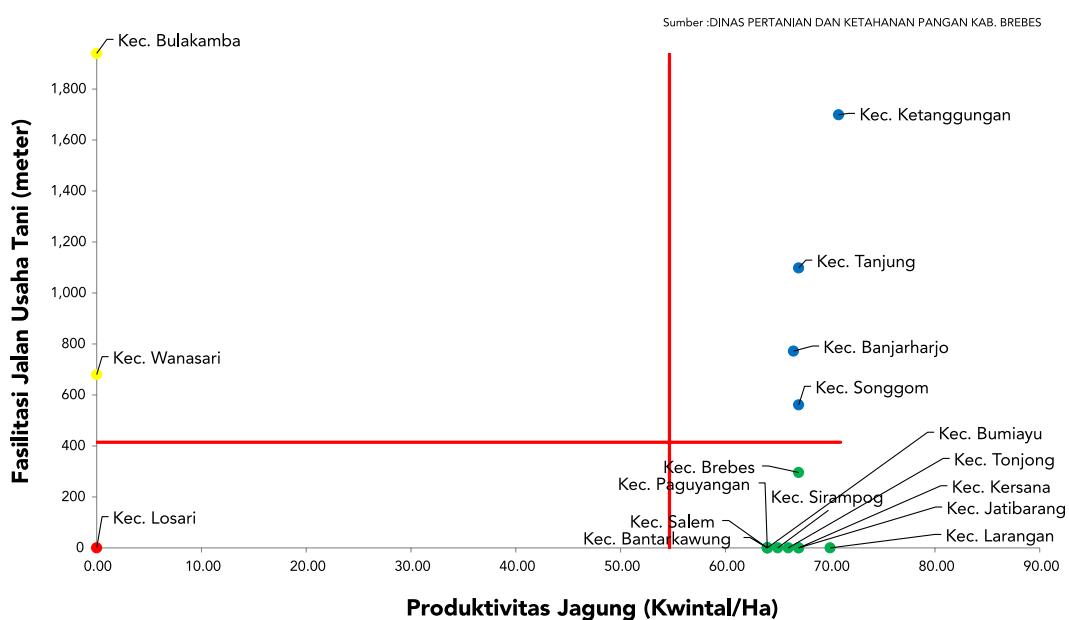
1. Tanaman padi melalui intervensi fasilitasi irigasi, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Bantarkawung, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan dan Sirampog. Kecamatan tersebut tingkat produktivitasnya rendah (masih memungkinkan untuk ditingkatkan) sehingga diperlukan upaya peningkatan fasilitasi irigasi
2. Tanaman jagung melalui intervensi fasilitasi irigasi, prioritasnya adalah Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, Ketanggungan, Sirampog, Paguyangan dan Kersana. Kecamatan tersebut memiliki produktivitas jagung yang tinggi namun masih minim fasilitasi irigasi, sehingga diperlukan peningkatan fasilitasi irigasi
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi fasilitasi irigasi, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Kersana, Bulakamba, Ketanggungan dan Bantarkawung. Kecamatan tersebut memiliki produktivitas tinggi namun masih minim fasilitasi irigasi, sehingga perlu peningkatan fasilitasi irigasi untuk menjaga tingkat produktivitasnya.

Gambar 2.24 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Jalan Usaha Tani untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Ungulan

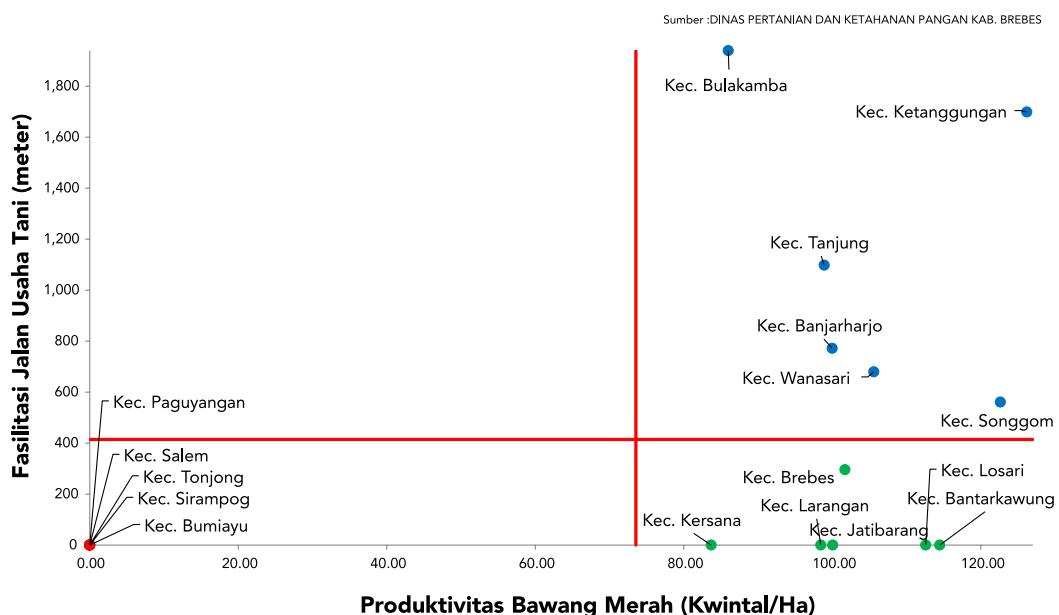
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017

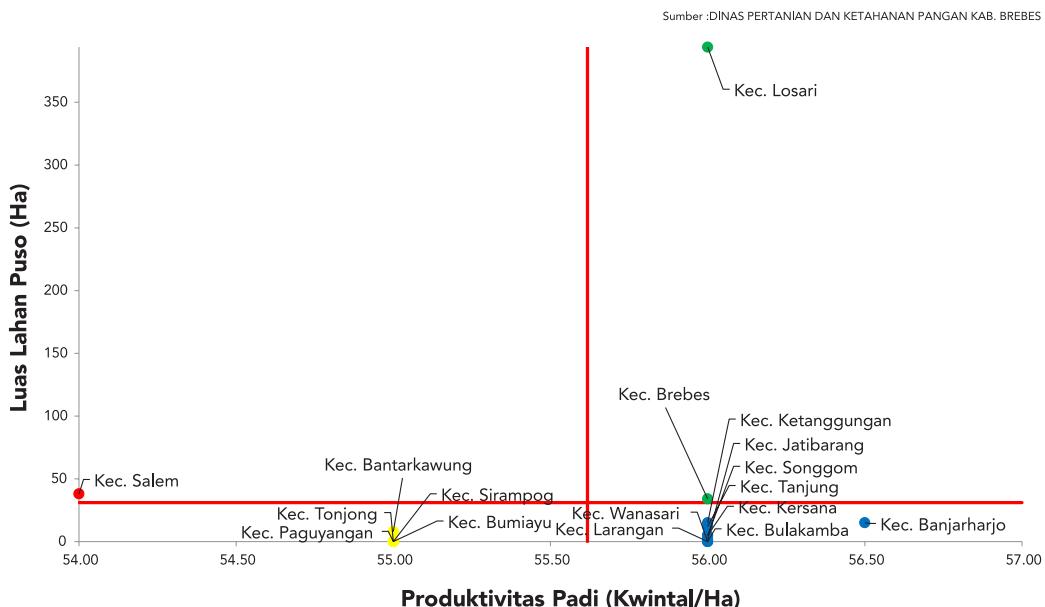


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari jalan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas (kwintal/ha), dengan adanya sarana jalan usaha tani memudahkan mobilisasi sarana produksi seperti pupuk, alat mesin pertanian dan hasil produksi adalah: (Gambar 2.24)

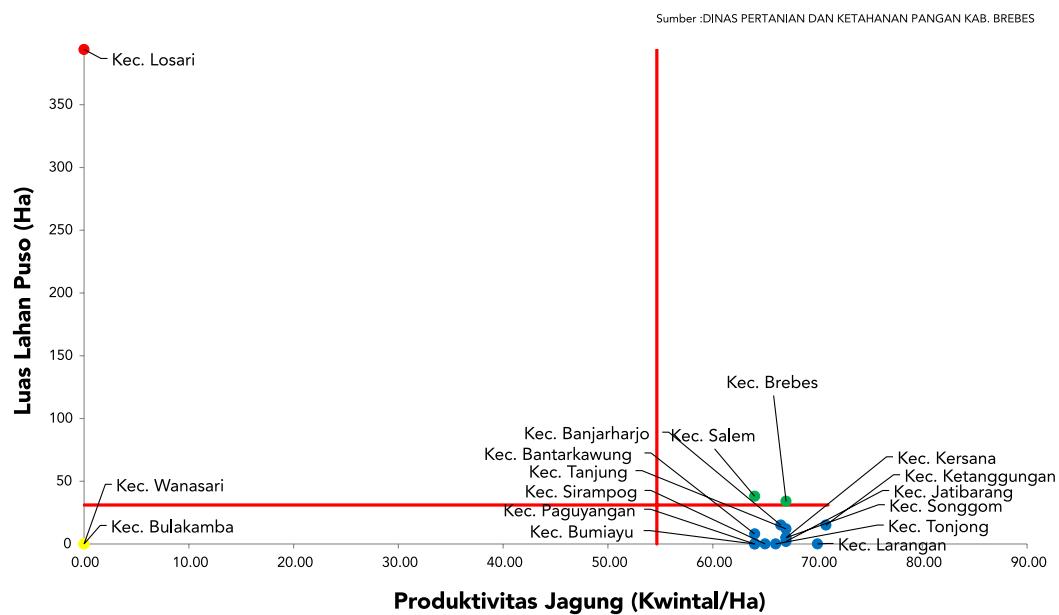
1. Tanaman padi melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Bantarkawung, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan dan Sirampog. Kecamatan tersebut tingkat produktivitasnya rendah (masih memungkinkan untuk ditingkatkan) sehingga diperlukan upaya peningkatan jalan usaha tani
2. Tanaman jagung melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Bantarkawung, Ketanggungan dan Larangan. Kecamatan tersebut tingkat produktivitasnya rendah (masih memungkinkan untuk ditingkatkan) sehingga diperlukan upaya peningkatan jalan usaha tani
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Bantarkawung, Larangan, Brebes, Wanasar dan Bulakamba. Kecamatan tersebut tingkat produktivitasnya rendah (masih memungkinkan untuk ditingkatkan) sehingga diperlukan upaya peningkatan jalan usaha tani

Gambar 2.25 Analisis Prioritas Wilayah Penurunan Lahan Puso untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Ungulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017

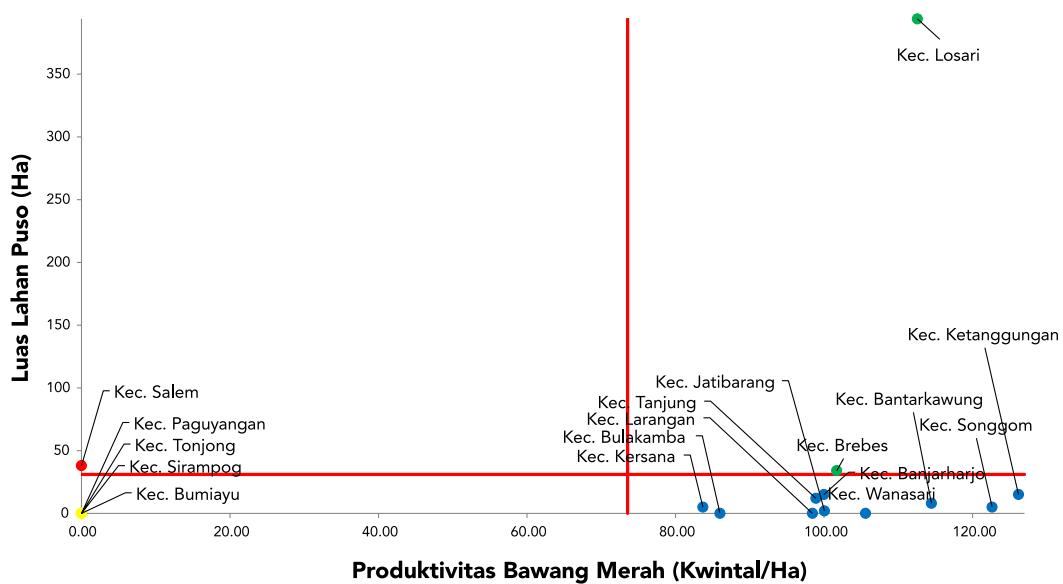


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017

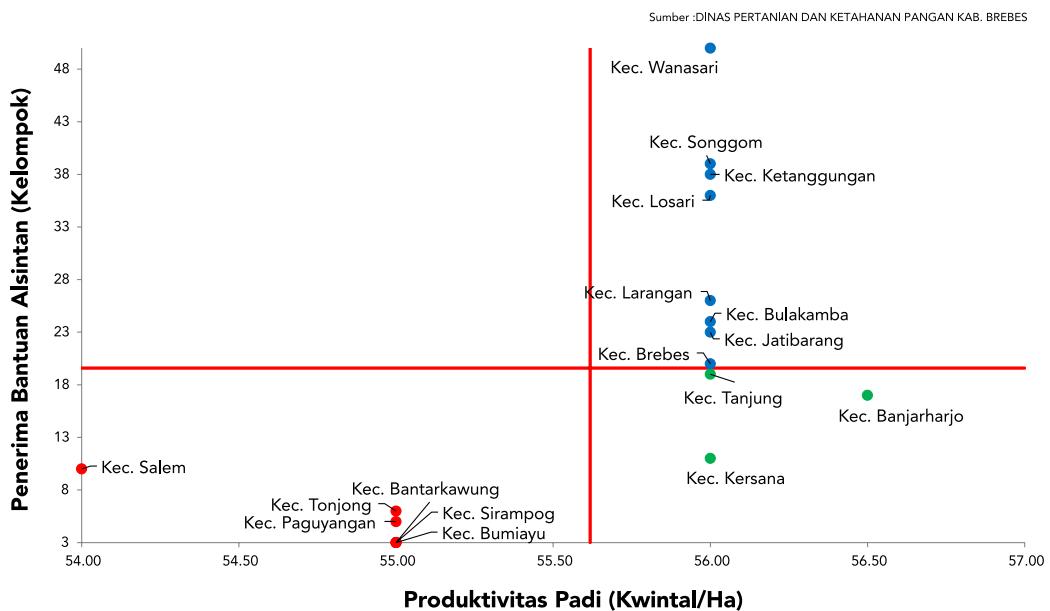
Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



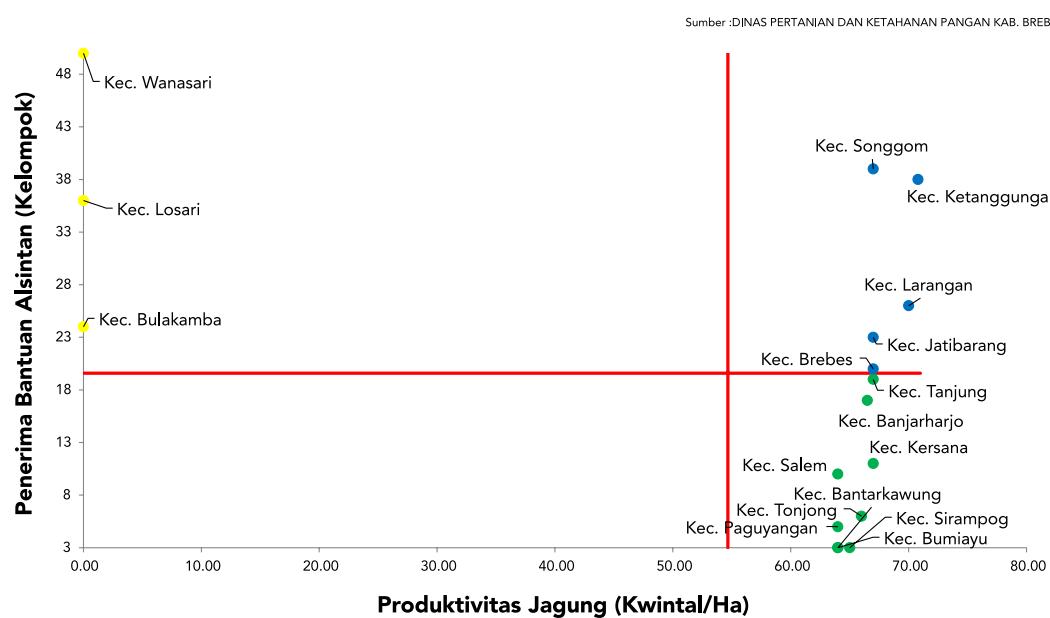
Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari lahan puso untuk meningkatkan produktivitas (kwintal/ha), dengan penanganan wilayah-wilayah yang pusonya tinggi agar berkurang atau tidak ada yang puso adalah: Untuk meningkatkan produktivitas padi, bawang dan jagung melalui penurunan areal lahan puso, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Losari, Wanasari, Bulakamba dan Brebes, di mana kecamatan tersebut rawan terkena puso yang diakibatkan oleh banjir karena meluapnya sungai utama di Kabupaten Brebes, yang sering terjadi di bulan September sedang puso karena organisme pengganggu tanaman untuk padi daerah Bantarkawung, Losari dan Bulakamba. (Gambar 2.25)

Gambar 2.26 Analisis Prioritas Wilayah Bantuan Alsintan untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Unggulan

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Padi (Kwintal/Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017

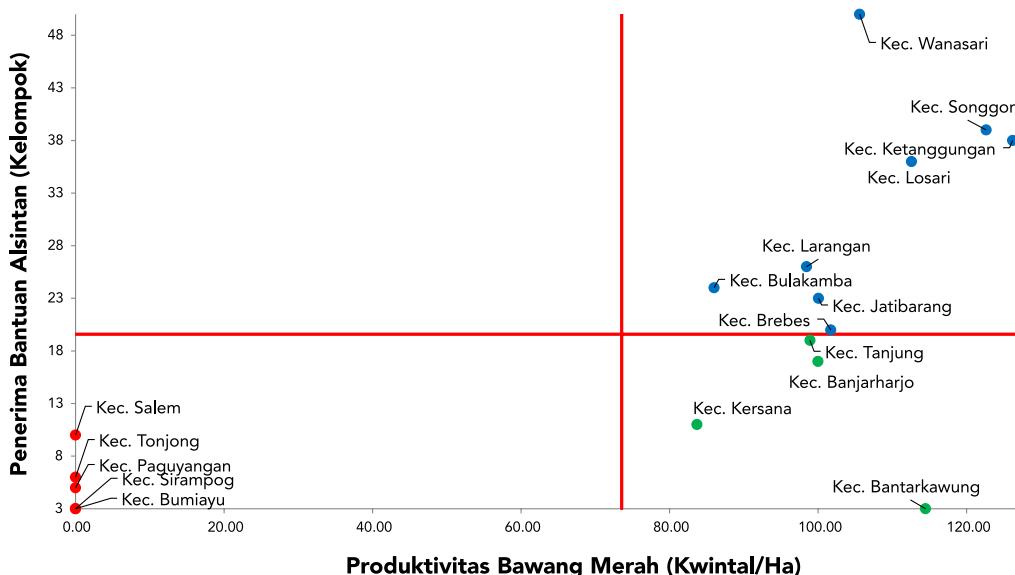


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Jagung (Kwintal/Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Produktivitas Bawang Merah (Kwintal/Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



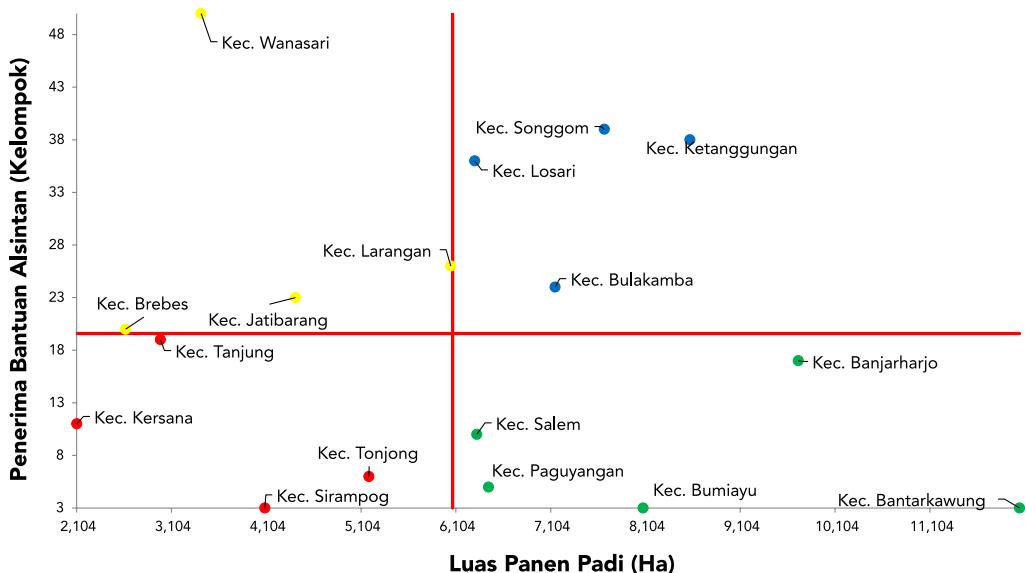
Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari bantuan alat dan mesin untuk meningkatkan produktivitas (kuwintal/ha), dengan penanganan wilayah-wilayah yang mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin masih kurang adalah (Gambar 2.26):

1. Tanaman padi melalui intervensi fasilitasi alat mesin pertanian, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Salem, Paguyangan, Tonjong, Bantarkawung, Sirampog dan Bumiayu. Kecamatan-kecamatan tersebut masih memungkinkan dinaikkan produktivitasnya melalui upaya peningkatan fasilitasi alat mesin pertanian.
2. Tanaman jagung melalui intervensi fasilitasi alat mesin pertanian, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Tonjong, Banjarharjo, Kersana, Salem, Bantarkawung, Tonjong, Paguyangan, Sirampog dan Bumiayu. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki produktivitas jagung tinggi namun masih minim fasilitasi alat mesin pertanian.
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi alat mesin pertanian, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung, Banjarharjo, Kersana dan Bantarkawung. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki produktivitas bawang yang tinggi namun masih minim.

Gambar 2.27 Analisis Prioritas Wilayah Bantuan Alsintan untuk Meningkatkan Luas Panen

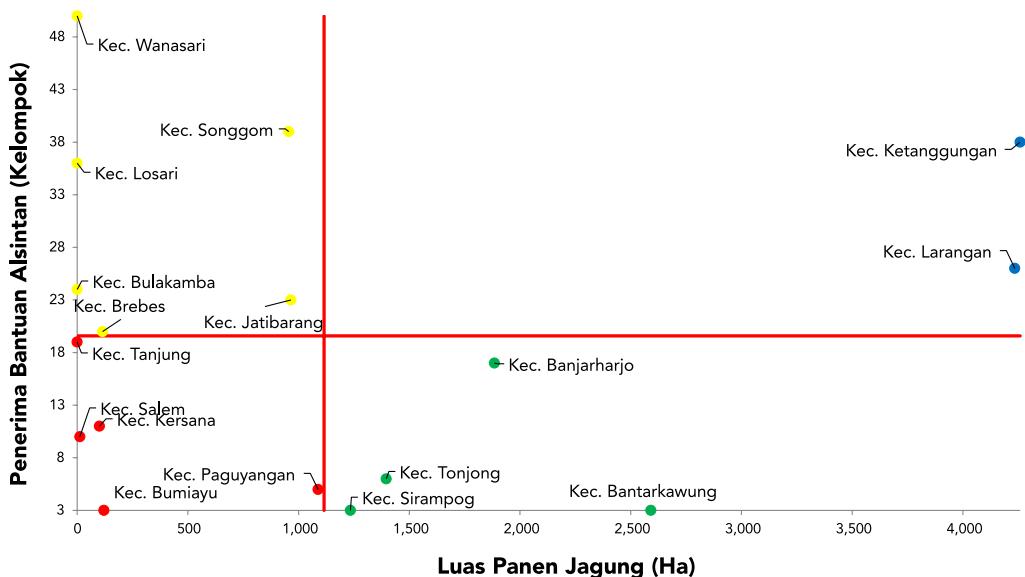
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Padi (Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



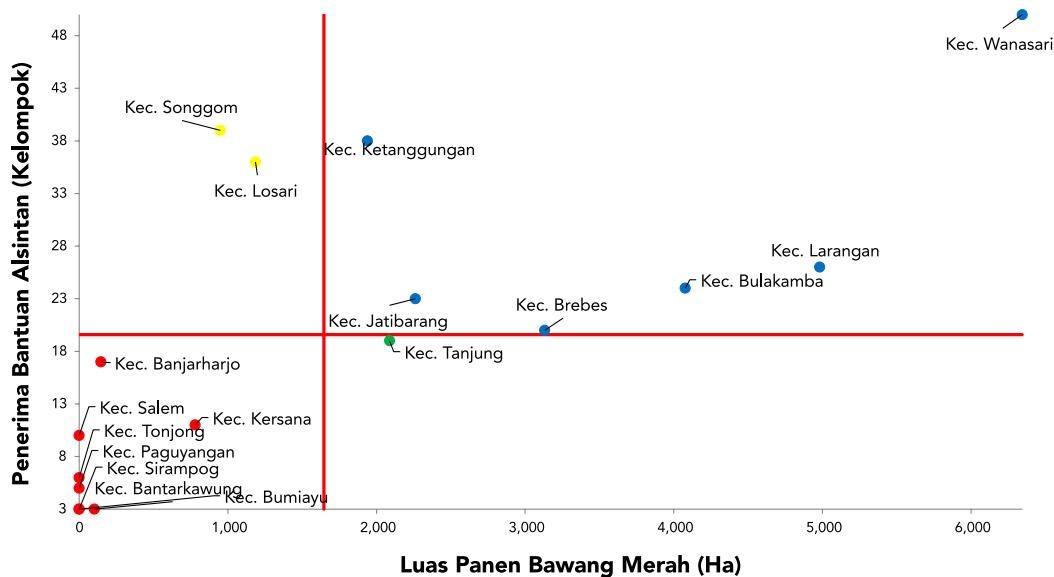
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Jagung (Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Bawang Merah (Ha) dan Penerima Bantuan Alsintan (Kelompok) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



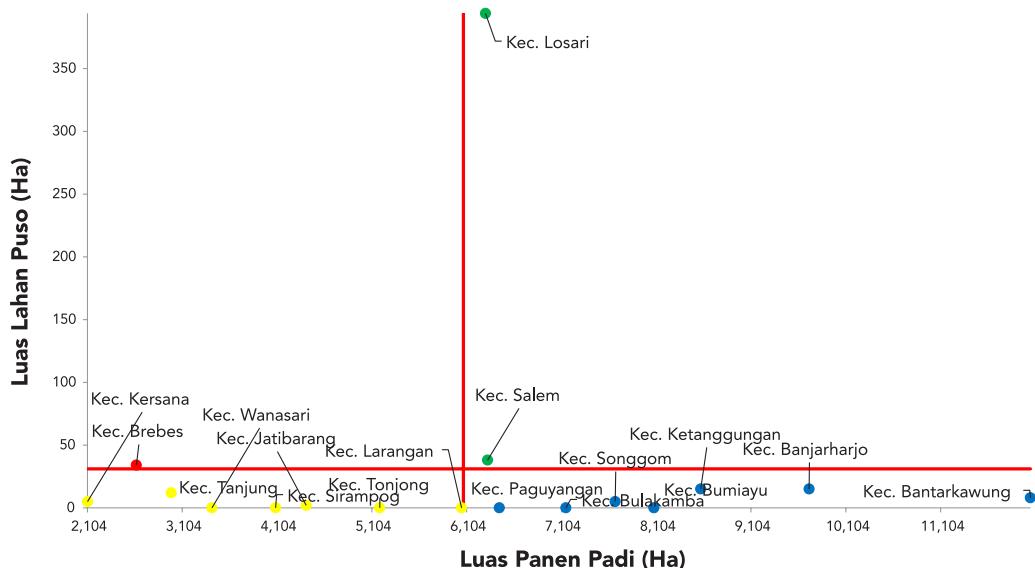
Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari bantuan alat dan mesin untuk meningkatkan luas panen (ha) dengan penanganan wilayah –wilayah yang mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin masih kurang adalah: (Gambar 2.27)

1. Tanaman padi padi melalui intervensi fasilitasi alat mesin pertanian, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Kersana, Tanjung, Sirampog dan Tonjong.
2. Tanaman jagung melalui intervensi fasilitasi alat mesin pertanian, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung, Salem, Kersana, Bumiayu dan Paguyangan. Kecamatan-kecamatan tersebut memerlukan peningkatan fasilitasi alsintan untuk dapat meningkatkan luas panen.
3. Tanaman bawang merah melalui intervensi fasilitasi alsintan, prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Banjarharjo dan Kersana (kecamatan lainnya dalam kuadran yang sama bukan sentra produksi bawang).

Gambar 2.28 Analisis Prioritas Wilayah penurunan Lahan Puso untuk Meningkatkan Luas Panen

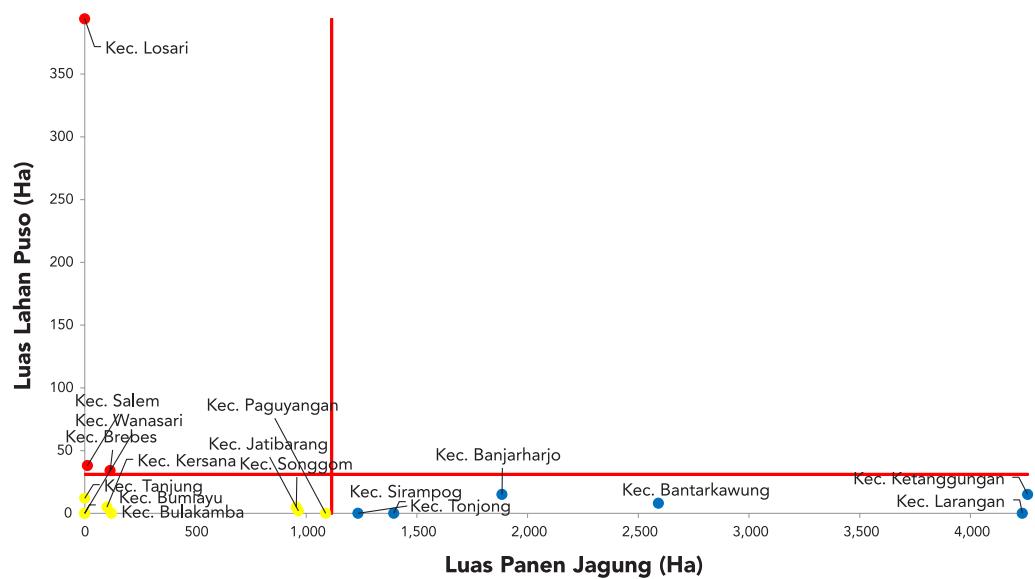
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Padi (Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



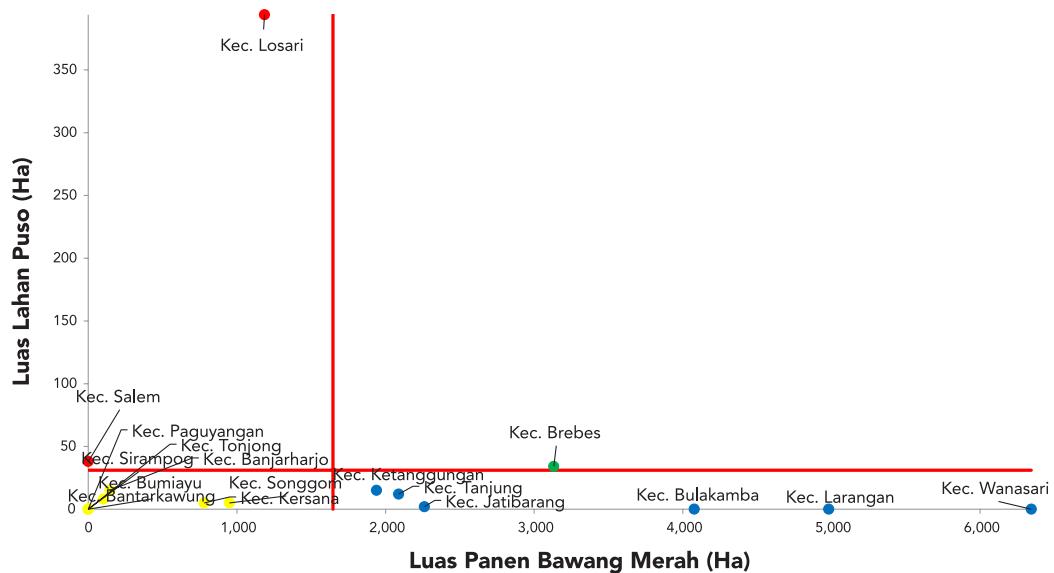
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Jagung (Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber :DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Bawang Merah (Ha) dan Luas Lahan Puso (Ha) Kab. Brebes - 2017

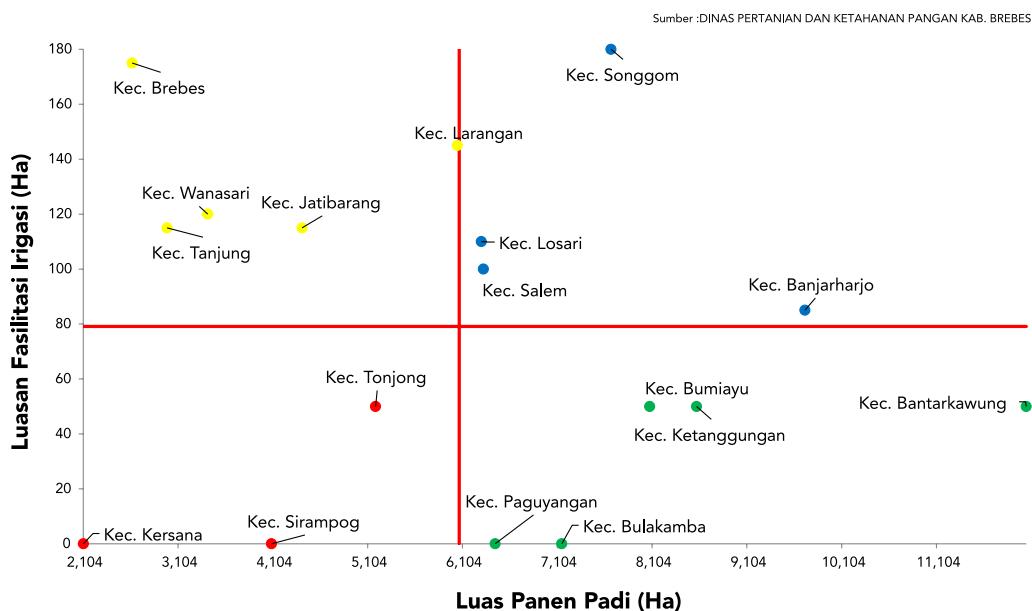
Sumber:DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES



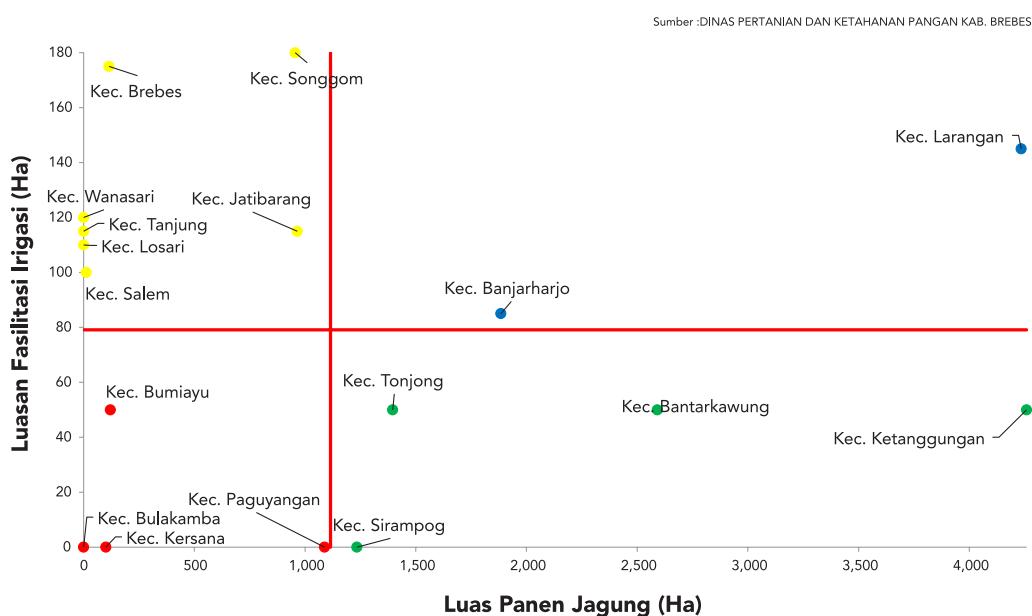
Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari puso untuk meningkatkan luas panen (ha) dengan penanganan Wilayah-wilayah sering terkena puso agar puso berkurang/tidak ada sehingga mampu meningkatkan luas panen adalah prioritas wilayahnya adalah Kecamatan Losari, Wanásari, Jatibarang dan Brebes. Empat kecamatan tersebut rawan terkena puso yang diakibatkan oleh banjir di puncak musim penghujan (Februari). (Gambar 2.28)

Gambar 2.29 Analisis Prioritas Wilayah Fasilitasi Irigasi untuk Meningkatkan Luas Panen

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Padi (Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017

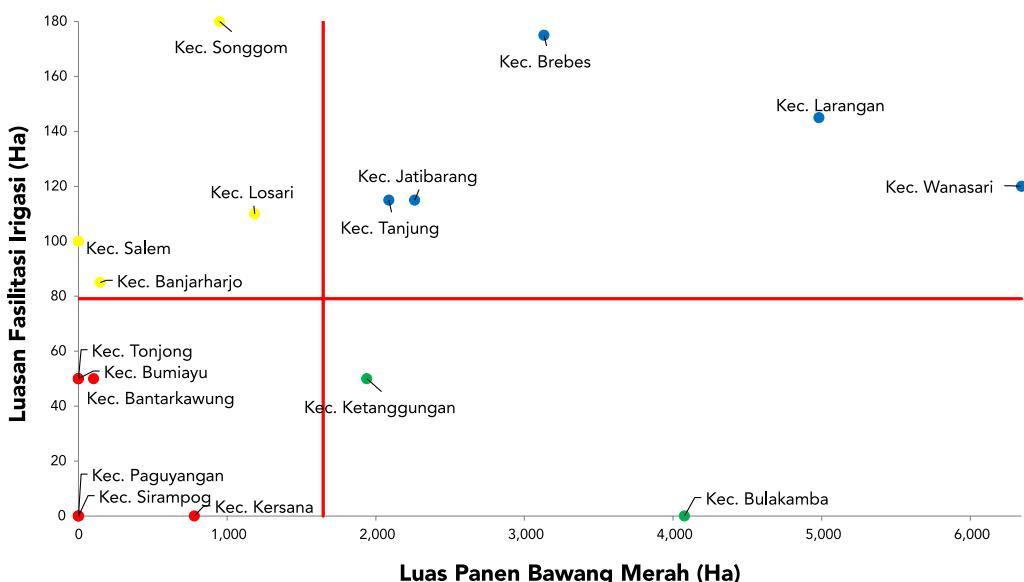


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Jagung (Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Bawang Merah (Ha) dan Luasan Fasilitasi Irigasi (Ha) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

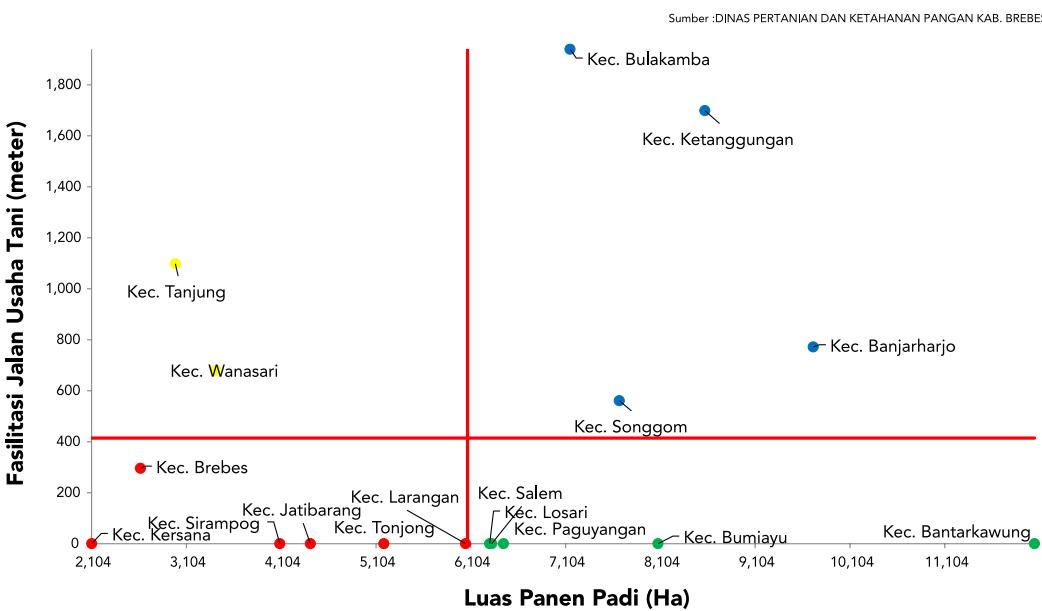


Wilayah-wilayah yang perlu dilakukan intervensi dari fasilitasi irigasi untuk meningkatkan luas panen (ha) dengan intervensi irigasi maka ketersediaan air meningkat sehingga terjadinya indeks pertanaman (IP) yang tadinya tanam 1 kali (IP 100) menjadi tanam 2 kali atau 3 kali (IP 200 atau 300) adalah: (Gambar 2.29)

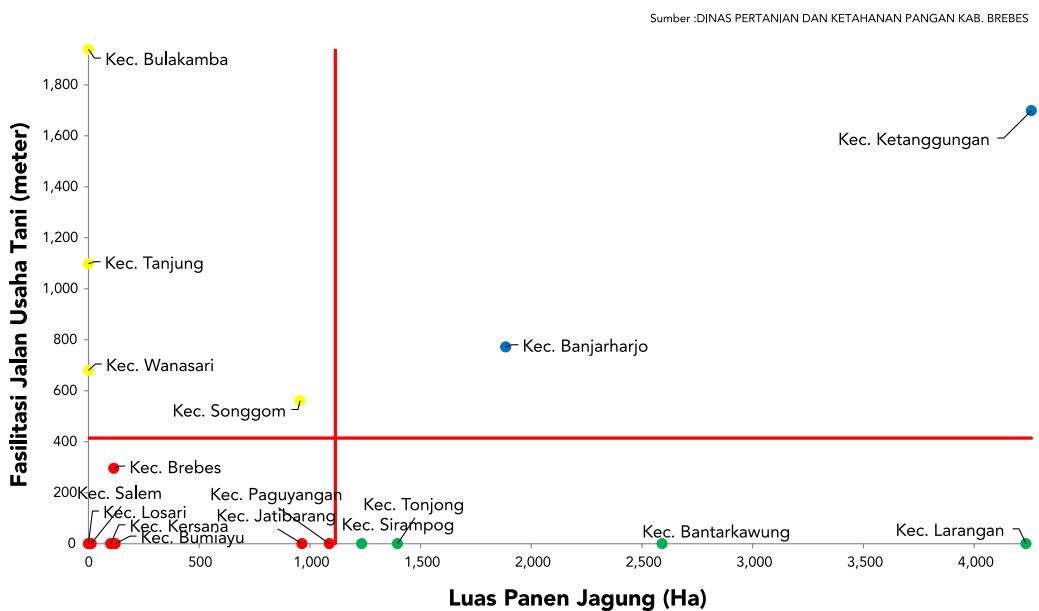
1. Tanaman padi melalui intervensi fasilitasi irigasi, prioritas intervensi wilayahnya adalah di Kecamatan Kersana, Sirampog dan Tonjong. Dengan meningkatkan fasilitasi irigasi di kecamatan tersebut diharapkan indeks pertanaman (IP) akan meningkat sehingga luas panen akan ikut meningkat. Sedangkan untuk Kecamatan Paguyangan, Bumiayu, Bulakamba, Ketanggungan dan Bantarkawung, fasilitasi irigasi perlu ditingkatkan untuk dapat mempertahankan luas panennya
2. Untuk meningkatkan luas panen jagung melalui intervensi fasilitasi irigasi, prioritas intervensi wilayahnya adalah di Kecamatan Bulakamba, Bumiayu, Larangan, dan Paguyangan.
3. Untuk meningkatkan luas panen bawang merah melalui fasilitasi irigasi, prioritas wilayahnya adalah di Kecamatan Ketanggungan, Larangan dan Bulakamba. Kecamatan tersebut merupakan bagian wilayah areal pertanaman bawang merah namun masih minim fasilitasi irigasi (kudran merah adalah kecamatan yang tidak diperuntukkan untuk budidaya bawang merah sehingga tidak memerlukan intervensi).

Gambar 2.30 Analisis Prioritas Wilayah Peningkatan Jalan Usaha Tani untuk Meningkatkan Luas Panen

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Padi (Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017

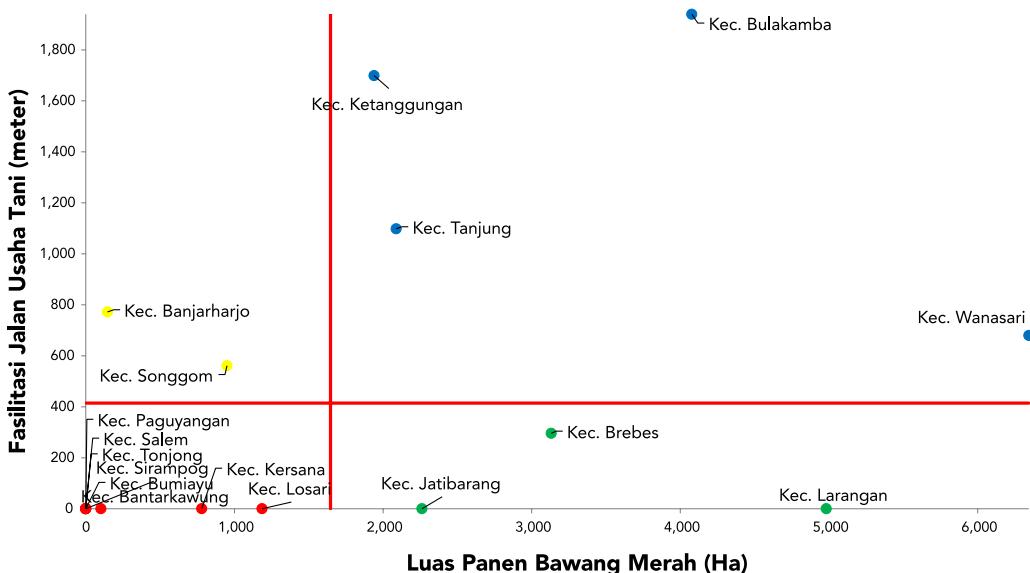


Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Jagung (Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017



Pengelompokan Wilayah berdasarkan Luas Panen Jagung (Ha) dan Fasilitasi Jalan Usaha Tani (meter) Kab. Brebes - 2017

Sumber : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. BREBES

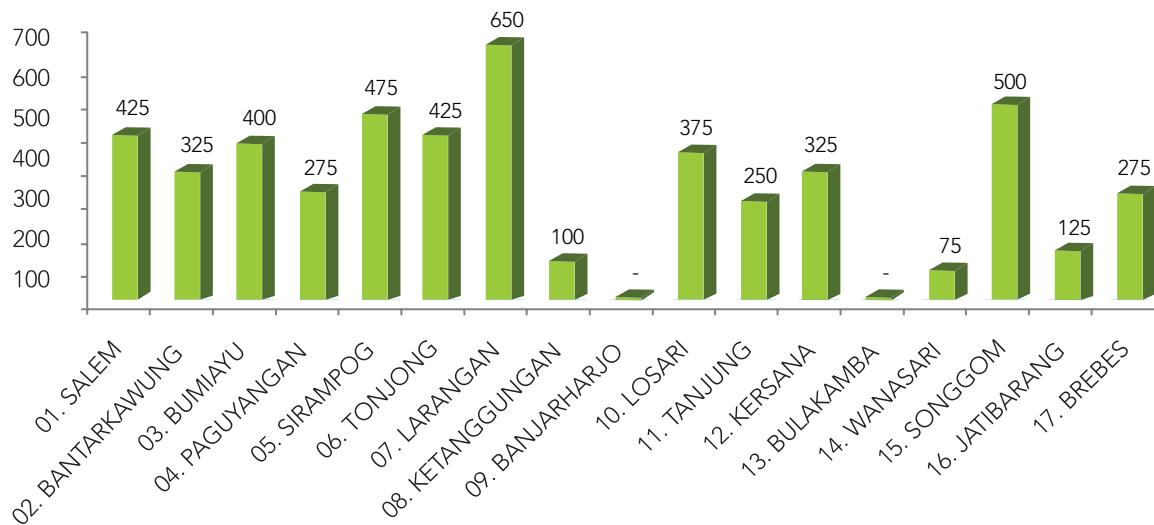


Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) akan mempermudah akses dan mobilisasi baik sarana produksi, alat mesin pertanian, maupun hasil produksi dengan pembangunan JUT maka biaya yang dikeluarkan petani akan turun. (Gambar 2.30)

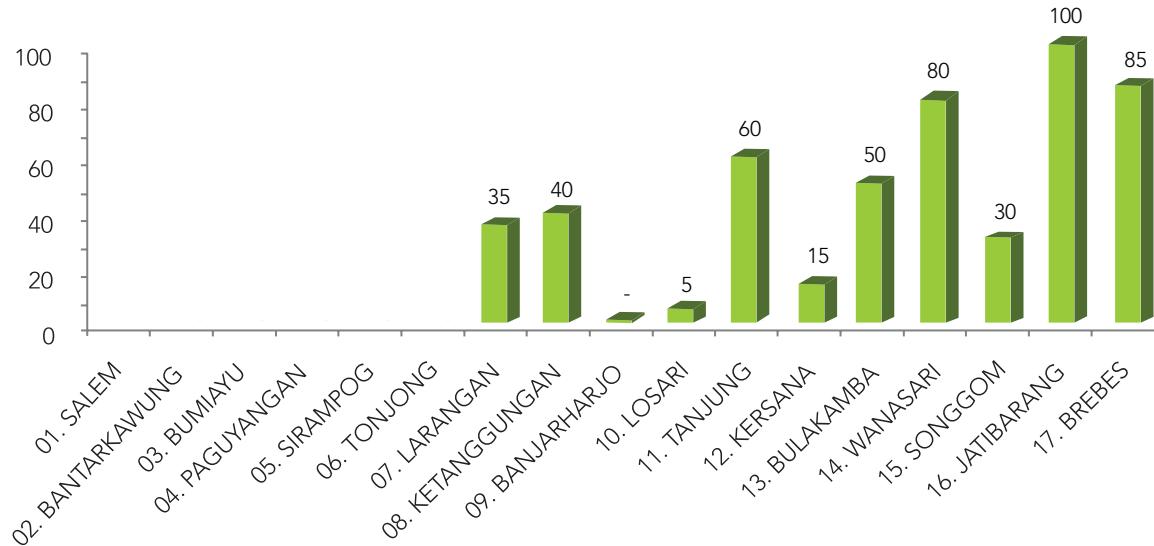
1. Tanaman padi melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, diharapkan prioritas wilayahnya adalah kecamatan Sirampog, Jatibarang, Larangan dan Tonjong (kecamatan lain dalam kuadran yang sama bukan merupakan areal utama pertanaman padi). Sementara itu di wilayah dengan luas panen padi tinggi namun fasilitasi jalan usaha tani masih minim yaitu kecamatan Salem, Losari, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung maka perlu ditingkatkan untuk memperlancar transportasi pertanian di wilayah tersebut.
2. Untuk meningkatkan luas panen jagung melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, prioritas wilayahnya adalah kecamatan Jatibarang dan Paguyangan (kecamatan lain dalam kuadran yang sama bukan merupakan areal utama pertanaman jagung). Sementara itu di wilayah dengan luas panen jagung yang tinggi namun fasilitasi jalan usaha tani masih minim yaitu Kecamatantonjong, Sirampog, Bantarkawung, Larangan maka perlu ditingkatkan untuk memperlancar transportasi pertanian di wilayah tersebut.
3. Untuk meningkatkan luas panen bawang merah melalui intervensi fasilitasi jalan usaha tani, prioritas wilayahnya adalah kecamatan Kersana dan Losari (kecamatan lain dalam kuadran yang sama bukan merupakan areal pertamanan bawang merah). Sementara itu di wilayah dengan luas panen bawang merah yang tinggi namun fasilitasi jalan usaha tani masih minim yaitu kecamatan Jatibarang, Brebes, Larangan maka perlu ditingkatkan untuk memperlancar transportasi pertanian di wilayah tersebut.

**Gambar 2.31 Fasilitasi Benih/ Saprodi Budidaya Padi dan Bawang Merah (Ha)
per Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2016**

FASILITASI BANTUAN BENIH PADI



FASILITASI BANTUAN BENIH BAWANG MERAH



2.4 MODUS OPERANDI SEKTOR PERTANIAN

Capaian Kinerja selama dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018 dalam mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Unggulan Padi, Jagung, dan Bawang Merah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Evaluasi Fokus Program dan Kegiatan Urusan Pertanian di Kabupaten Brebes dalam Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Unggulan

| SASARAN | PRIORITAS INTERVENSI | INDIKATOR PENDUKUNG | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|--|---|--|--|
| Meningkatnya Produksi Padi, Jagung, Bawang Merah (ton) | Meningkatnya produktivitas padi, jagung, bawang merah | 1. Meningkatnya penyuluhan pertanian (%) | Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan 2. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan |
| | | 2. Meningkatnya penggunaan bibit unggul (ha) | Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 2. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan |
| | | 3. Meningkatnya penggunaan pupuk berimbang (ton) | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Pengawasan dan peredaran pestisida dan pupuk |
| | | 4. Meningkatnya infrastruktur pertanian irigasi (ha) dan JUT (meter) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Infrastruktur peningkatan produktivitas dan sarana prasarana pertanian |
| | | 5. Menurunnya lahan yang terkena serangan hama/OPT (%) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengendalian hama terpadu 2. Perlindungan tanaman dan pengamatan OPT 3. Peningkatan dan pengamanan produksi pangan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 6. Meningkatnya mekanisasi pertanian (bantuan alsintan) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan sarana produksi pertanian |
| | Meningkatnya luas panen padi, jagung, bawang merah | 1. Meningkatnya infrastruktur pertanian irigasi (ha) dan JUT (meter) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan sarana produksi pertanian |
| | | 2. Menurunnya lahan yang terkena serangan hama/OPT (%) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengendalian hama terpadu 2. Perlindungan tanaman dan pengamatan OPT 3. Peningkatan dan pengamanan produksi pangan |
| | | 3. Meningkatnya mekanisasi pertanian (bantuan alsintan) | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan sarana produksi pertanian |
| | Meningkatnya harga jual padi, jagung, bawang merah | 1. Meningkatnya asuransi pertanian | |
| | | 2. Meningkatnya pelatihan pasca panen dan pemasaran produk pertanian | Program peningkatan ketahanan pangan 1. Penanganan pasca panen dan pengolahan produk pertanian |

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja dibidang pertanian. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana atau instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit kurang lebih 0,25 ha dan usia petani yang rata rata di atas 50 tahun dengan pendidikan hanya pendidikan dasar (SD), maka petani Brebes termasuk petani gurem dengan produksi komoditas utama padi, jagung dan bawang merah belum cukup meningkatkan kesejahteraan petani. Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih rendah daripada sektor industri dan jasa menjadi faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati. Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung meruakan gambaran pemulihian sebagian petani yang tidak menghendaki generasi penerusnya untuk menjadi petani juga. Kondisi ini diperparah dengan besarnya konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Perlunya program atau kegiatan dalam TOC seperti:

- Program kegiatan pertanian khusus bagi petani gurem/rumah tangga miskin sektor pertanian secara terintgrasi.
- Kegiatan pertanian korporasi dan berorentasi agribisinis di mana petani-petani yang memiliki lahan sempit dalam satu kawasan disatukan dalam budidaya dan pengelolaan dengan lebih modern dikelola beberapa petani, sedang petani yang lain dapat bekerja di sektor pertanian seperti beternak, pada saat pasca panen atau non pertanian.
- Perlunya program atau kegiatan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan.
- Perlunya program atau kegiatan meningkatkan generasi muda mau menjadi petani dengan SDM yang lebih baik.
- Perlunya peningkatan SDM generasi muda yang lebih baik di bidang pertanian.

2.5 PENERIMA PROGRAM SEKTOR PERTANIAN

Penentuan Calon Lokasi Calon Penerima (CPCL) dari setiap program dan kegiatan melalui mekanisme usulan dari tingkat lapangan. Mekanisme tersebut diusulkan oleh petugas lapangan (PPL/mantri tani) yaitu kelompok tani/poktan, gabungan kelompok tani (gapoktan) yang menjadi binaan Dinas di mana secara aturan kelompok tani atau gabungan kelompok tani sudah terdaftar di Dinas dan secara organisasi sudah berjalan. Setiap usulan disesuaikan dengan ketersedian anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan yang ada dan skala prioritas menyesuaikan kemampuan anggaran. Penentuan CPCL kelompok tani, gabungan kelompok tani belum mengarah secara khusus masyarakat miskin dan masyarakat miskin dan rentan dalam bidang pertanian.

Program yang merupakan program utama untuk mewujudkan sasaran kinerja yaitu program

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Program tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang berperan dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian (alat mesin pertanian), pembangunan infrastruktur pertanian, baik irigasi (rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi air tanah dangkal, irigasi air permukaan, embung, dam parit) maupun jalan usaha tani untuk mendukung transportasi usaha pertanian. Fasilitasi benih/bibit, pupuk. Khusus untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur irigasi pertanian mendapatkan porsi paling besar di antara kegiatan-kegiatan lainnya karena mendapat dukungan anggaran dari DAK pertanian dan APBN.

Penyesuaian/modifikasi terhadap program dan kegiatan diharapkan dapat lebih efektif adalah dengan cara:

1. Program dan kegiatan dilakukan harus berbasis kawasan pertanian yang merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan menjawab permasalahan yang ada.
2. Penajaman sasaran program kegiatan ke kelompok petani dan gapoktan yang masuk kriteria miskin atau rentan.
3. Pelaksanaan program/kegiatan harus sejalan dengan renstra yang telah ditetapkan (RPJMD Kab Brebes 2017-2022) agar capaian kinerja dapat terukur
4. Program bersifat inovasi dan terintegrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam
5. Setiap program kegiatan harus jelas yang akan dicapai mulai *input/masukan, output/keluaran, outcome/hasil, benefit/manfaat, impact/dampak* harus jelas, terukur secara kuantitatif.

Mekanisme penentuan penerima manfaat program dan kegiatan, sebagai berikut:

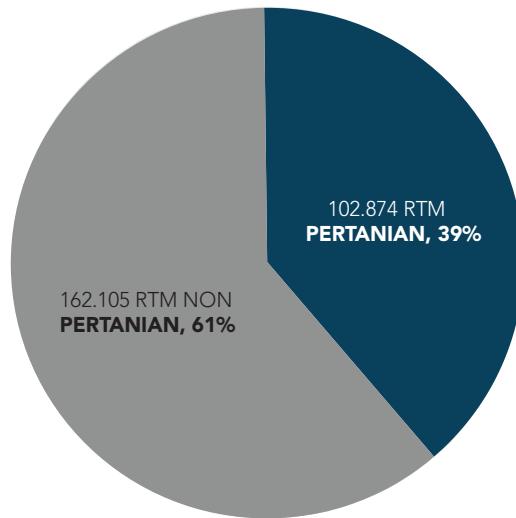
1. APBD (DAU murni OPD): calon lokasi calon penerima/CPCL dijaring melalui usulan dari tiap-tiap kecamatan melalui kordinator program yang selanjutnya diajukan ke dinas dan akan diverifikasi kelayakannya, melalui tahapan musrenbang tingkat desa, kecamatan dan musrenbang kabupaten (dinas).
2. APBD (pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten): setiap anggota dewan memiliki dana aspirasi yang digunakan untuk memenuhi aspirasi dari konstituen dan pelaksaaan kegiatan diserahkan dinas sesuai tupoksi dinas.
3. APBD (DAK): usulan anggaran dan CPCL diajukan ke pusat sesuai dengan menu program dan kegiatan kementerian pertanian.
4. APBN (Tugas Pembantuan): usulan anggaran dan CPCL diusulkan melalui aplikasi e-proposal pertanian

PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (#BEKERJA)

Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA) diluncurkan di tahun 2018 dalam rangka mengurangi rumah tangga miskin pertanian di seluruh Indonesia. Salah satu lokasi program #bekerja adalah Kabupaten Brebes. Sesuai dengan data dari Kementerian Sosial tahun 2015 kondisi rumah tangga miskin (RTM) adalah:

Gambar 2.32 Perbaningan RTM Pertanian dan Non Pertanian di Kabupaten Brebes

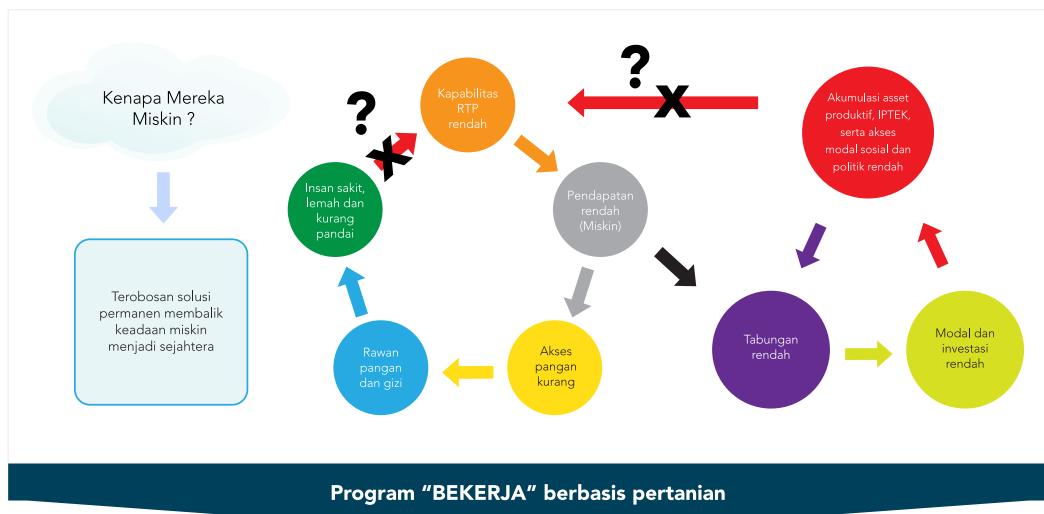
263.979 RUMAH TANGGA MISKIN / RTM BREBES



Sumber: Kementerian Sosial Tahun 2015

Dari RTM pertanian tersebut yang menjadi target sasaran program #bekerja tahun anggaran 2018 sebesar 29.927 RTM (29%) tersebar di 4 Kecamatan dan 75 Desa yang masuk kategori wilayah stunting. (Gambar 2.32)

Gambar 2.33 Program BEKERJA Berbasis Pertanian Memutus Perangkap Lingkaran Kemiskinan



TUJUAN

- Menyuguhkan solusi permanen membalik keadaan miskin menjadi sejahtera
 - Memberikan lapangan usaha baru sebagai sumber pendapatan
- PROGRAM AKSI 2018, berupa pengembangan :
- Lahan pekarangan untuk produksi Sayuran
 - Usaha peternakan rumah tangga : Ayam/itik, Kambing, dan Aneka ternak.
 - Tanaman hortikultura dan tahunan : pisang, mangga, manggis, kopi, duku, melinjo dan kelapa dalam
 - Kelembagaan usaha tani secara berkelompok : kebun bibit, pembibitan ayam, dan pengolahan hasil

PENDEKATAN PROGRAM

- Sesuai kondisi agroklimat, sosial ekonomi, budaya, dan dukungan pemda
- Sesuai dengan **keunggulan komparatif komoditas**
- Pendekatan Rumah Tangga Miskin (diprioritaskan Kab. dengan RT miskin terbanyak)
- Pendekatan RTM, Kelompok, **cluster** → **cluster = 1 Kecamatan**

LOKASI :

Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan NTB.

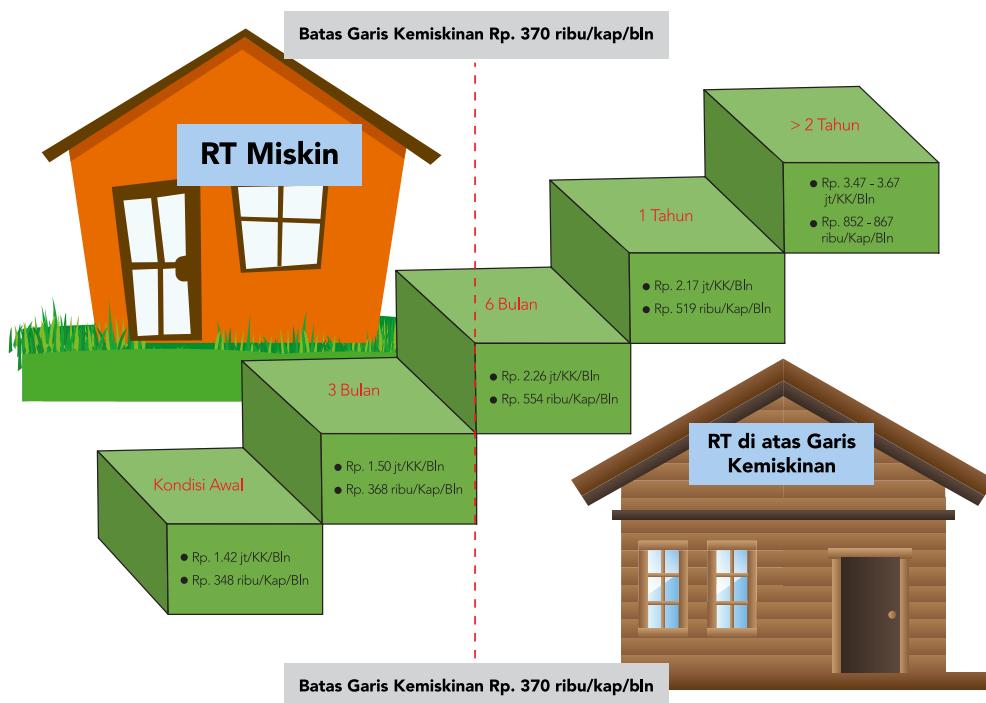
TARGET :

- 200.000 RTM
- 2018-2019 Kesejahteraan RTM Meningkat

PROYEKSI PENDAPATAN RTM DENGAN BANTUAN UTAMA 50 EKOR AYAM/ITIK

Komponen Paket Bantuan :

50 ayam/itik + sayuran + 5pisang atau 3 batang Tanaman Tahunan (Mangga, Manggis, Kopi, Duku, Melinjo dan Kelapa dalam)



Tabel 2.6 Lokasi Belanja Program dan Kegiatan Terkait Prioritas Wilayah Intervensi dalam Rangka Meningkatkan Produksi Tanaman Unggulan

| SASARAN | PRIORITAS INTERVENSI | PRIORITAS WILAYAH (PRIORITAS PERTAMA) | WILAYAH PENGALOKASIAN ANGGARAN (APBD) |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Produktivitas Tanaman Unggulan | Peningkatan Penyuluhan Pertanian | Padi: Bantarkawung, Paguyangan (pertama). Bumiayu, tonjong dan sirampog (kedua) Jagung: Paguyangan, Bantarkawung, Brebes, Jatibarang, Tanjung, Kersana, Songgom, Larangan Bawang Merah: Kersana, Bulakamba, Tanjung, Jatibarang, Brebes, Wanasaari, Songgom | 17 Kecamatan se-Kabupaten Brebes 17 Kecamatan se-Kabupaten Brebes 17 Kecamatan se-Kabupaten Brebes |
| | Peningkatan Penggunaan Bibit Unggul | Padi: Bumiayu, Bantarkawung, Tonjong, Sirampog Jagung: Larangan, Banjarharjo, Tonjong, Bumiayu, Bantarkawung Bawang Merah: Kersana, Tanjung, Jatibarang, Losari, Brebes, Banjarharjo, Ketanggungan, Songgom, Bantarkawung | Semua Kecamatan di Kabupaten Brebes kecuali Banjarharjo Tahun 2017 tidak ada fasilitasi untuk benih jagung Larangan, Ketanggungan, Tanjung, Bulakamba, Wanasaari, Songgom, Jatibarang |
| | Peningkatan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | | |
| | Peningkatan Infrastruktur Pertanian (IRIGASI) | Padi: Bantarkawung, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan dan Sirampog Jagung: Bantarkwung, Bumiayu, Tonjong, Ketanggungan, Sirampog, Paguyangan dan Kersana Bawang Merah: Kersana, Bulakamba, Ketanggungan, Bantarkawung | Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Wanasaari, Songgom, Jatibarang, Brebes (untuk padi/jagung/bawang merah) |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Peningkatan Infrastruktur Pertanian (JUT) | <p>Padi: Bantarkawung, Tonjong, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog</p> <p>Jagung: Bantarkawung, Ketanggungan, Larangan</p> <p>Bawang Merah: Bantarkawung, Larangan, Brebes, Wanasari, Bulakamba</p> | Ketanggungan, Banjarharjo, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Brebes (untuk padi/jagung/bawang merah) |
| | Penurunan Lahan yang Terkena Serangan Hama/OPT | <p>Padi: Losari, Wanasari, Bulakamba dan Brebes</p> | 17 Kecamatan se Kabupaten Brebes |
| | Peningkatan Mekanisasi Pertanian (Alsintan) | <p>Padi: Salem, Paguyangan, Tonjong, Bantarkawung, Sirampog, Bumiayu</p> <p>Jagung: Tonjong, Banjarharjo, Kersana, Salem, Bantarkawung, Tonjong, Paguyangan</p> <p>Bawang Merah: Tanjung, Banjarharjo, Kersana, Bantarkawung</p> | 17 Kecamatan se Kabupaten Brebes |
| Meningkatnya Luas Panen Tanaman Unggulan | Peningkatan Infrastruktur Pertanian (IRIGASI) | <p>Padi: Kersana, Sirampog, Tonjong (pertama). Paguyangan, Bumiayu, Ketanggungan, Bantarkawung (kedua)</p> <p>Jagung: Bulakamba, Bumiayu, Larangan, Paguyangan</p> <p>Bawang Merah: Ketanggungan, Larangan, Paguyangan</p> | Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Wanasari, Songgom, Jatibarang, Brebes (untuk padi/jagung/bawang merah) |
| | Peningkatan Infrastruktur Pertanian (JUT) | <p>Padi: Sirampog, Jatibarang, Larangan, Tonjong (pertama). Salem, Losari, Paguyangan, Bumiayu, Bantarkawung (kedua)</p> <p>Jagung: Jatibarang, Paguyangan (pertama). Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, Larangan (kedua)</p> <p>Bawang Merah: Kersana, Losari (pertama). Jatibarang, Brebes, Larangan</p> | Ketanggungan, Banjarharjo, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Brebes (untuk padi/jagung/bawang merah) |
| | Penurunan Lahan yang Terkena Serangan Hama/OPT | <p>Padi: Losari dan Brebes</p> | 17 Kecamatan se-Kabupaten Brebes |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Peningkatan Mekanisasi Pertanian (Alsintan) | | |
| Meningkatnya Harga Jual Tanaman Unggulan | Peningkatan Akses Permodalan (Asuransi Lahan Pertanian) | | Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Sirampog, Tonjong, Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Kersana, Wanasisari, Songgom |
| Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan | Pemanfaatan Pekarangan (Unit) | | Salem, Tonjong, Losari, Tanjung |

2.6 KECUKUPAN ANGGARAN SEKTOR PERTANIAN

Kondisi fiskal kabupaten Brebes dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari segi pendapatan dan pengeluaran. Anggaran APBD Kabupaten Brebes masih tergantung dari sumber-sumber Dana Perimbangan pemerintah pusat kurang lebih sebesar 82%, pendapatan daerah yang sah sebesar kurang lebih 6,4% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,6% sedangkan dari segi pengeluaran belanja tidak langsung sebesar kisaran 56-57% dan belanja langsung sebesar 43-44%. Kondisi anggaran urusan wajib ketahanan pangan dan pilihan pertanian di Kabupaten Brebes selama 3 (tiga) tahun adalah: (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Belanja Langsung Dinas Pertanian dan Kabupaten Brebes Tahun 2015-2017

| KETERANGAN | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Belanja langsung dinas Pertanian (dalam juta) | 45.988.556 | 31.898.128 | 18.921.186 |
| Belanja langsung kabupaten (dalam juta) | 1.033.879.990 | 1.340.116.342 | 1.250.473.604 |
| % belanja pertanian dibanding kabupaten | 4,4% | 2,4% | 1,5% |

Anggaran sektor pertanian selain diperoleh dari anggaran APBD Kabupaten Brebes juga sumber-sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, bantuan gubernur, APBN Tugas Pembantuan. Selain bentuk pendanaan di atas terdapat juga bantuan –bantuan berupa barang baik subsidi pupuk, alat mesin pertanian, benih dari APBN.

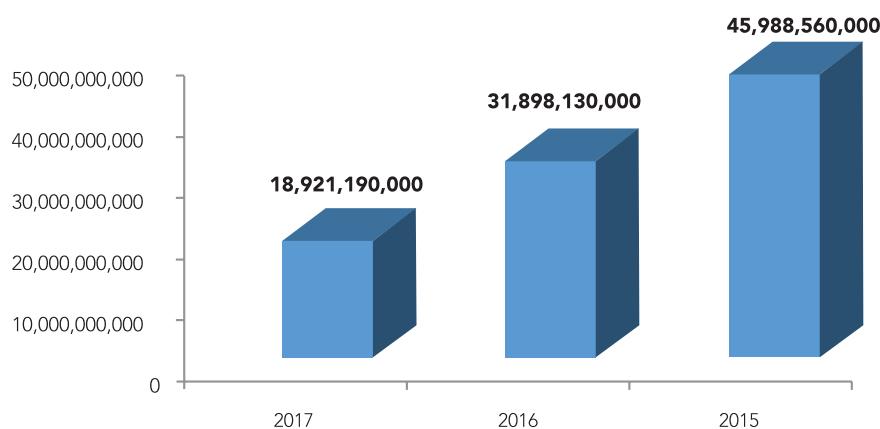
**Tabel 2.8 Belanja Langsung dan Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian
Tahun 2015-2017**

| KETERANGAN | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Belanja Langsung Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan | 45.988.556.000 | 31.898.128.000 | 18.921.186.000 |
| DAK REGULER | 6.518.990.000 | 7.417.000.000 | 4.129.463.000 |
| DAK TAMBAHAN P3K2 | 27.748.900.000 | 15.263.374.000 | |
| SILPA DAK | 353.456.000 | 305.531.000 | |
| BANKEU GUBERNUR | 125.000.000 | | |
| APBD | 11.242.210.000 | 8.912.223.000 | 14.791.723.000 |
| PENDAMPINGAN DAK | 1.037.526.000 | | |
| PENDAMPINGAN BANKEU | 44.560.000 | | |
| DANA APBN TUGAS PEMBANTUAN | 1.478.000.000 | 22.222.640.000 | 10.780.680.000 |

Alokasi anggaran pertanian dalam APBD Kabupaten Brebes selama 3 tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan terjadinya penurunan Dana Alokasi Khusus Pertanian dari Kementerian Pertanian, DAK Pertanian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian baik irigasi, jalan usaha tani dan pembangunan lumbung pangan, gedung dan sarana prasarana balai penyuluhan pertanian di kecamatan.

Gambar 2.34 Belanja Langsung APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

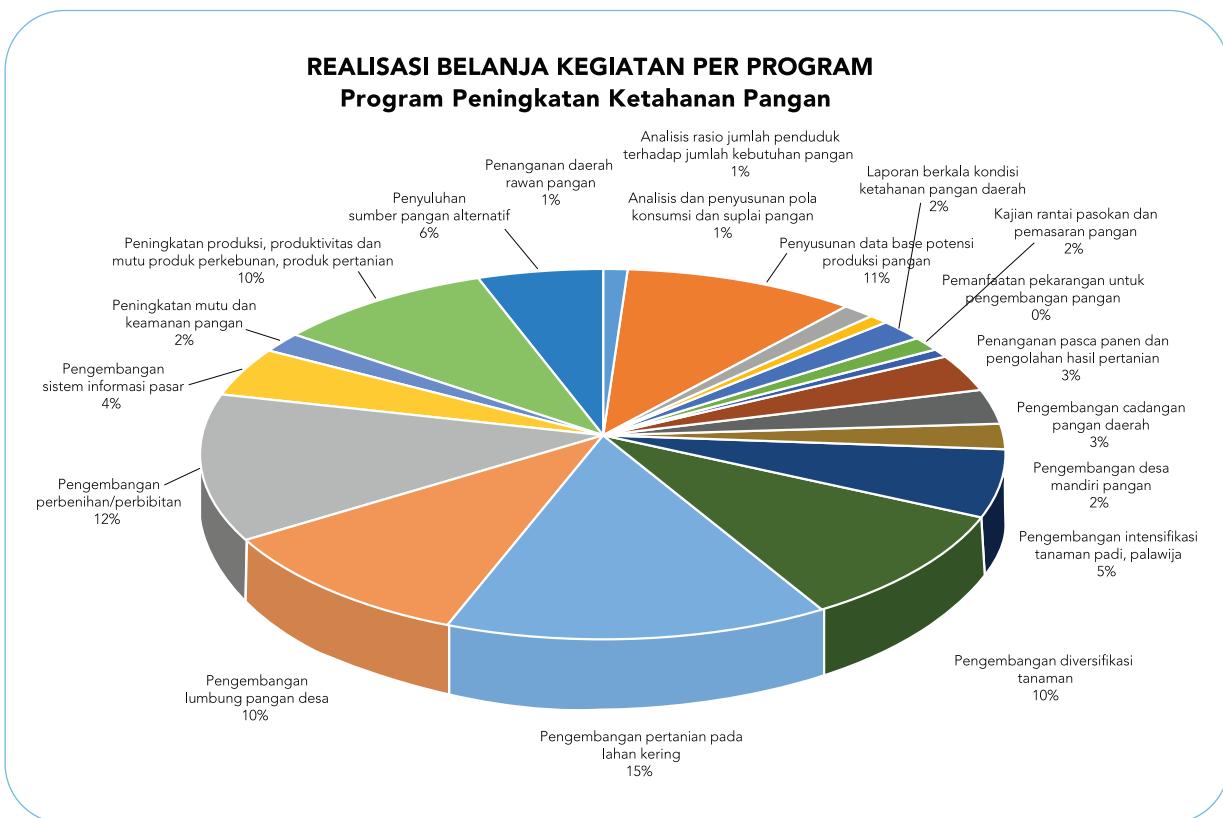
Belanja Langsung APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Tabel 2.9 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PERSENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|--|---------------|------------|--|
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | 1,760,397,570 | 94.86% | |
| Penanganan daerah rawan pangan | 20,810,000 | 99.04% | |
| Penyusunan data base potensi produksi pangan | 191,790,060 | 97.94% | |
| Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan | 23,569,700 | 98.41% | |
| Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan | 12,650,000 | 98.44% | |
| Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah | 33,731,558 | 98.06% | |
| Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan | 25,799,500 | 99.77% | |
| Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan | 6,571,450 | 98.15% | Meningkatnya Pekarangan Pangan |
| Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian | 55,539,000 | 94.65% | Meningkatnya SDM Petani |
| Pengembangan cadangan pangan daerah | 47,484,250 | 98.93% | |
| Pengembangan desa mandiri pangan | 38,297,700 | 96.86% | |
| Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija | 92,981,600 | 93.64% | Meningkatnya Penggunaan Bibit Unggul/Fasilitasi Saprodi Tanaman Pangan |
| Pengembangan diversifikasi tanaman | 169,573,250 | 96.73% | |
| Pengembangan pertanian pada lahan kering | 270,593,350 | 95.21% | |
| Pengembangan lumbung pangan desa | 183,177,077 | 99.61% | Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan |
| Pengembangan perbenihan/perbibitan | 206,884,700 | 84.19% | |
| Pengembangan sistem informasi pasar | 70,820,650 | 91.23% | |
| Peningkatan mutu dan keamanan pangan | 31,075,000 | 92.75% | |
| Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian | 171,892,000 | 95.10% | |
| Penyaluran sumber pangan alternatif | 107,156,725 | 98.56% | |

Gambar 2.35 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Ketahanan Pangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017



Salah satu program yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman pangan khususnya pada produk unggulan di Kabupaten Brebes yaitu Padi, Jagung dan Bawang Merah adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan di dalam urusan pertanian. Program tersebut pada APBD Tahun 2017 memiliki realisasi anggaran sebesar Rp1,760,397,570 dengan persentase realisasi sebesar 94.86%. Di dalam Program ini terdapat beberapa kegiatan yang mampu mempengaruhi produksi tanaman unggulan, yaitu kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija, dan pengembangan lumbung pangan desa. (Tabel 2.9) (Gambar 2.35)

Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan realisasi anggarannya hanya sebesar 6,571,450. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian sebesar 55,539,000. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija sebesar 92,981,600 dan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa sebesar 183,177,077. (Tabel 2.9) (Gambar 2.35)

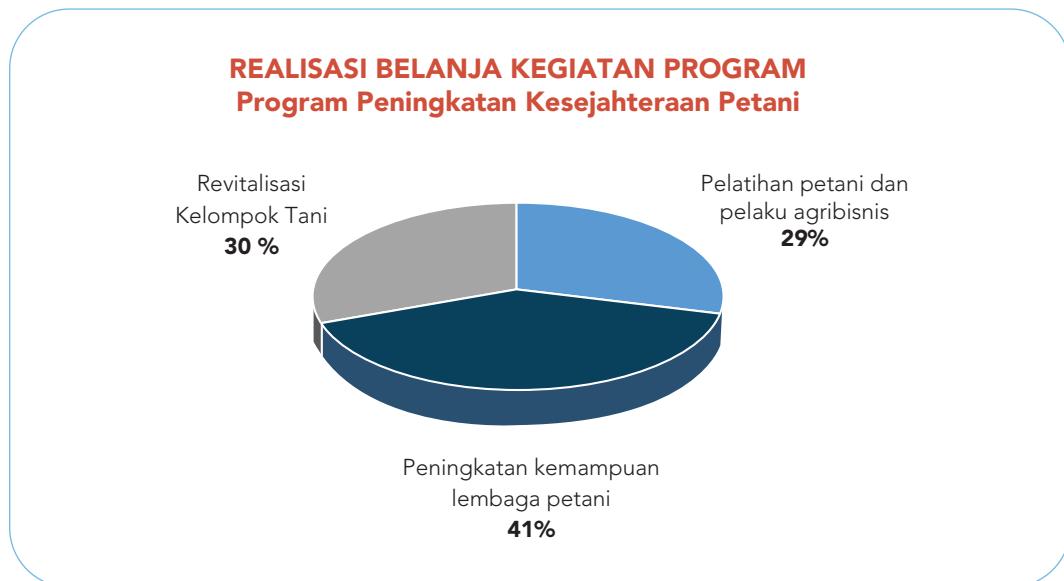
Pengembangan pertanian pada lahan kering merupakan kegiatan dengan anggaran paling besar. Realisasi dari anggaran tersebut mencapai 270,593,350. Kegiatan lain dengan anggaran paling besar adalah Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan realisasi sebesar 206,884,700. (Tabel 2.9) (Gambar 2.35)

Dalam dukungannya terhadap produksi tanaman unggulan (kaitannya dengan TOC), program ini justru menganggarkan paling sedikit dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Contohnya kegiatan Pengembangan Pangan realisasi anggarannya hanya sebesar 6,571,450. Padahal produksi tanaman unggulan seperti padi, jagung, dan bawang merah selalu perlu dukungan yang lebih besar. Total realisasi kegiatan yang mendukung produksi tanaman unggulan adalah sebesar 338,269,127 atau hanya sebesar 24% dari total realisasi pada program ini khususnya dalam mencapai sasaran jangka pendek/menengah di dalam TOC yaitu Meningkatnya Pekarangan Pangan, Meningkatnya SDM Petani, Meningkatnya Penggunaan Bibit Unggul/Fasilitasi Saprodi Tanaman Pangan dan Meningkatnya Jumlah Lumbung Pangan. (Tabel 2.9) (Gambar 2.35)

Tabel 2.10 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|--|-------------|------------|--|
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 345,210,006 | 98.26% | |
| Pelatihan petani dan pelaku agribisnis | 99,280,906 | 99.29% | Meningkatnya SDM Petani |
| Peningkatan kemampuan lembaga petani | 141,099,500 | 96.75% | Meningkatnya SDM Petani |
| Revitalisasi Kelompok Tani | 104,829,600 | 99.36% | Meningkatnya SDM Petani |

Gambar 2.36 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017



Program Peningkatan Kesejahteraan Petani memiliki tiga kegiatan yang masing-masing berkontribusi terhadap peningkatan produksi tanaman unggulan. Program ini pada tahun 2017 memiliki realisasi sebesar 345,210,006 dengan kegiatan yang paling dominan adalah Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani yaitu memiliki porsi 41% dari total realisasi program ini atau setara dengan 141,099,500. Kemudian Revitalisasi Kelompok Tani memiliki realisasi sebesar 104,829,600 dan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis sebesar 99,280,906. Artinya, pada program ini sebesar 345,210,006 dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan produksi padi, jagung, dan bawang merah di Kabupaten Brebes. Ketiga kegiatan di dalam program ini masing-masing berkontribusi kepada sasaran di dalam TOC yaitu meningkatnya SDM Petani. (Tabel 2.10) (Gambar 2.36).

Tabel 2.11 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

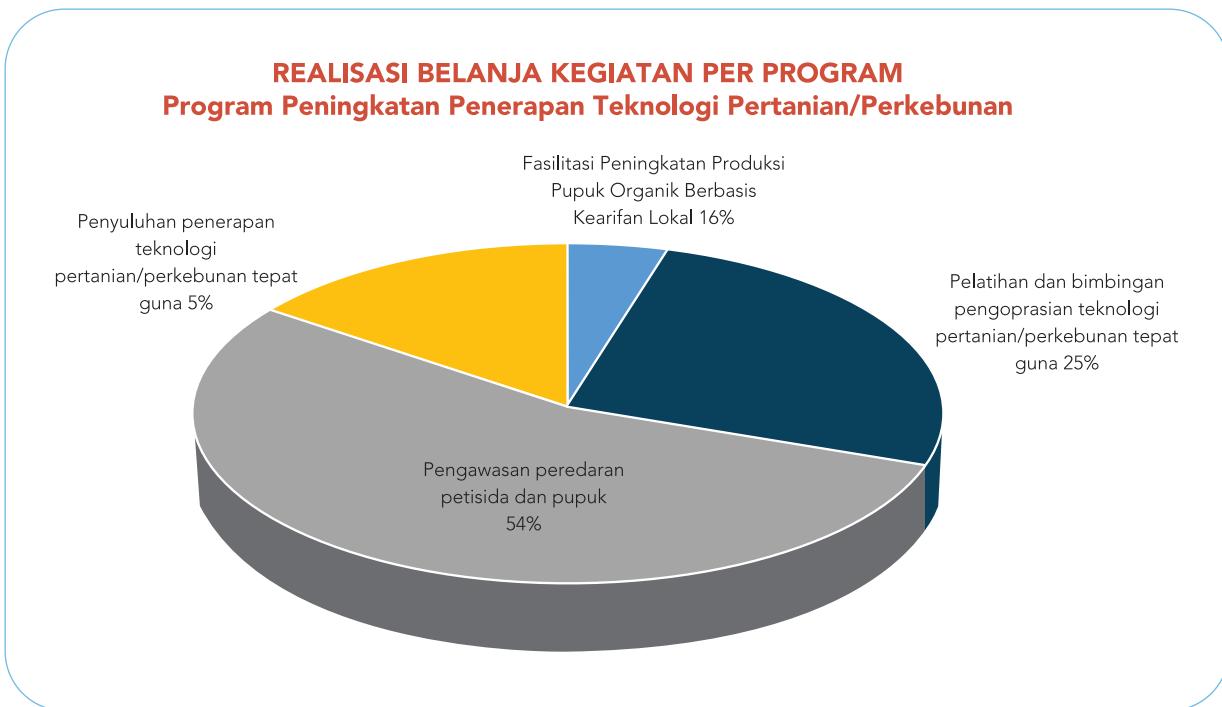
| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|--|-------------|------------|--|
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 410,629,587 | 93.88% | |
| Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer | 37,179,650 | 95.77% | |
| Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah | 373,449,937 | 93.70% | |

Sedangkan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan baik langsung dan tidak langsung tidak memiliki kegiatan yang mampu untuk meningkatkan produksi pertanian unggulan khususnya padi, jagung, dan bawang merah. Total realisasi anggaran program ini adalah sebesar Rp410,629,587 dengan persentase realisasi dibandingkan dengan alokasi anggaran adalah 93,88%. (Tabel 2.11)

Tabel 2.12 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|---|-------------|------------|---|
| Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 502,869,072 | 86.54% | |
| Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 23,460,400 | 93.84% | Meningkatnya SDM Petani |
| Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | 128,945,338 | 96.85% | Meningkatnya SDM Petani |
| Pengawasan peredaran petisida dan pupuk | 270,012,979 | 94.89% | Meningkatnya Penggunaan Pupuk Berimbang |
| Fasilitasi Peningkatan Produksi Pupuk Organik Berbasis Kearifan Lokal | 80,450,355 | 58.14% | Meningkatnya Penggunaan Pupuk Berimbang |

Gambar 2.37 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

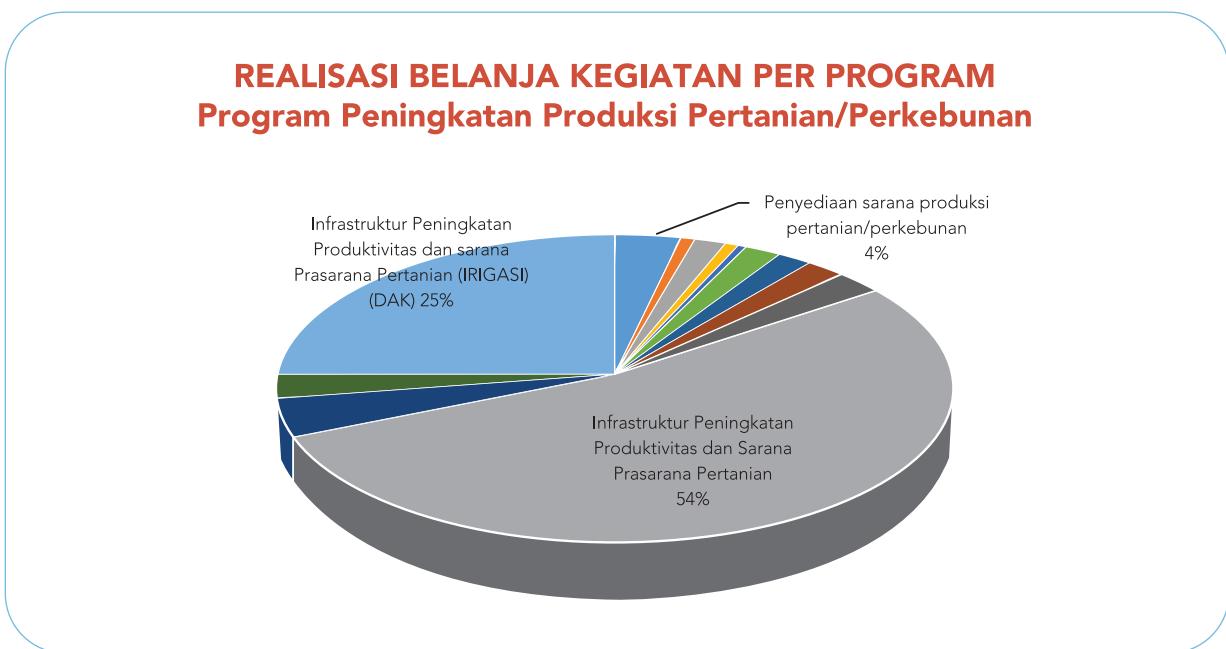


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan pada tahun 2017 memiliki realisasi anggaran sebesar Rp502,869,072 dan anggaran terserah sebesar 86.54%. Program tersebut memiliki 4 kegiatan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produksi tanaman unggulan terutama dalam menyangsar sasaran jangka pendek/menengah Meningkatnya SDM Petani dan Meningkatnya Penggunaan Pupuk Berimbang. Dari 4 kegiatan tersebut, kegiatan Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk memiliki anggaran terbesar yaitu 270,012,979 dengan persentase realisasi 94.89%. Anggaran kegiatan paling kecil pada program ini adalah Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna dengan realisasi hanya Rp23,460,400. (Tabel 2.12) (Gambar 2.37)

Tabel 2.13 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|--|---------------|------------|---|
| Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan | 7,555,782,335 | 75.65% | |
| Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan | 290,256,125 | 98.08% | Meningkatnya Mekanisasi Pertanian |
| Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan | 37,682,550 | 79.00% | Meningkatnya Penggunaan Bibit Unggul/ Fasilitasi Saprodi Tanaman Pangan |
| Peningkatan Kesuburan Tanah/ Reklamasi Lahan | 154,201,838 | 98.16% | Meningkatnya Penggunaan Pupuk Berimbang |
| Pengendalian hama terpadu | 39,070,000 | 86.82% | Menurunnya Lahan yang terkena serangan OPT/ Puso |
| Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Produksi | 37,901,250 | 78.47% | |
| Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan | 159,477,700 | 94.09% | Menurunnya Lahan yang terkena serangan OPT/ Puso |
| Fasilitasi dan pengembangan kawasan hortikultura | 137,460,400 | 83.87% | |
| Pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan biofarmata | 158,164,000 | 98.61% | Meningkatnya Penggunaan Bibit Unggul/ Fasilitasi Saprodi Tanaman Pangan |
| Pemberdayaan lahan tidur/terlantar/kritis dalam rangka peningkatan produksi pangan | 166,105,000 | 80.54% | |
| Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian | 4,049,930,000 | 98.32% | Meningkatnya Infrastruktur Pertanian |
| Perlindungan Tanaman dan Pengamatan OPT | 259,156,852 | 99.21% | Menurunnya Lahan yang terkena serangan OPT/ Puso |
| Penunjang Program/Kegiatan Dana Pusat/ Propinsi | 181,830,895 | 99.01% | Meningkatnya Infrastruktur Pertanian |
| Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian (IRIGASI) (DAK) | 1,884,545,725 | 45.64% | Meningkatnya Infrastruktur Pertanian |

Gambar 2.38 Komposisi Realisasi Anggaran Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017



Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan menjadi salah satu program dengan alokasi dan realisasi anggaran terbesar yang berkontribusi dalam peningkatan produksi tanaman unggulan khususnya Padi, Jagung, dan Bawang Merah di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2017, total realisasi pada program ini mencapai Rp7,555,782,335 dengan persentase penyerapan sebesar 75.65%. Dari total realisasi anggaran Program pada tahun 2017 tersebut, terdapat banyak kegiatan yang mampu meningkatkan produksi tanaman unggulan. Adapun kegiatan-kegiatan dengan proporsi terbesar dalam peningkatan produksi tanaman unggulan yaitu Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian dengan realisasi Rp4,049,930,000 dan persentase penyerapan sebesar 98,32%. Selain itu kegiatan lain dalam kontribusinya terhadap peningkatan infrastruktur pertanian adalah Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Produktivitas dan Sarana Prasarana Pertanian (irigasi) (DAK) dengan besar Realisasi sebesar Rp1,884,545,725 dengan realisasi sebesar 45.64%. (Tabel 2.13) (Gambar 2.38)

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya mekanisasi pertanian, adalah dengan menyelenggarakan Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan. Kegiatan tersebut memiliki realisasi anggaran sebesar Rp290,256,125. Selain itu untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penggunaan Bibit Unggul/Fasilitasi Saprodi Tanaman Pangan, dengan cara mengadakan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan dengan realisasi sebesar Rp37,682,550 dan kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan, hortikultura dan biofarmata dengan realisasi Rp158,164,000. (Tabel 2.13) (Gambar 2.38)

Menurunnya lahan yang terkena serangan OPT/puso dapat dicapai dengan Kegiatan Pengendalian Hama Terpadu, Peningkatan dan Pengamanan Produksi Pangan, dan Perlindungan Tanaman dan Pengamatan OPT. Total realisasi anggaran dari ketiga kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran pengurangan lahan yang terkena serangan OPT adalah Rp457,704,552. (Tabel 2.13) (Gambar 2.38)

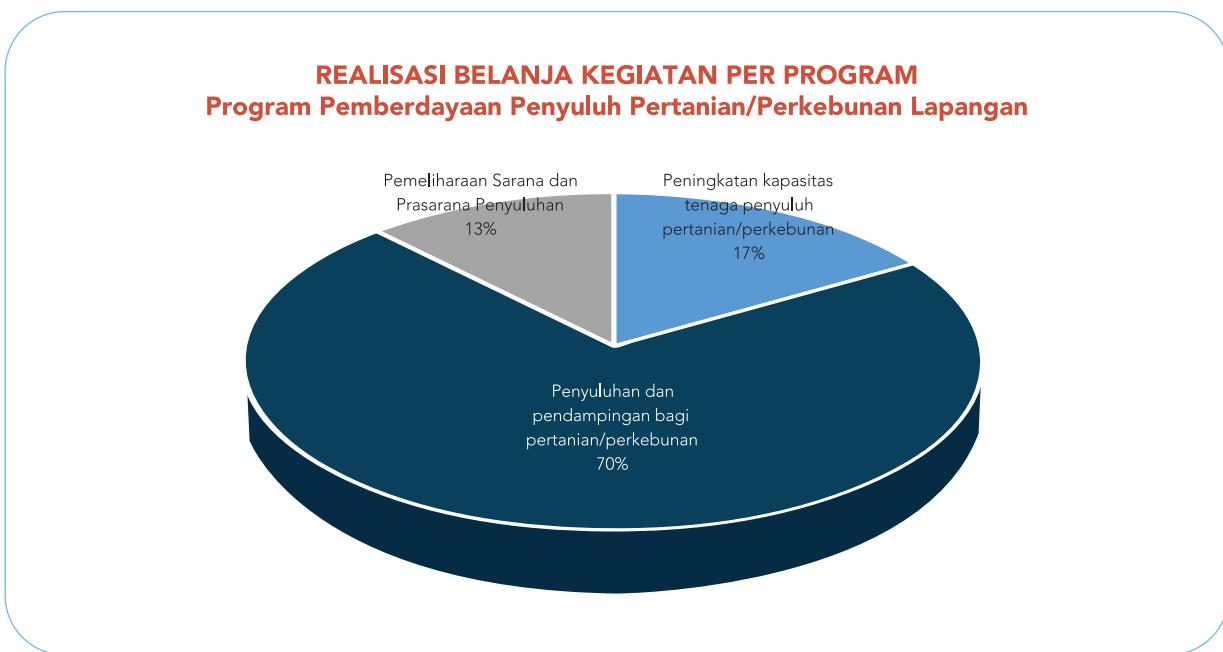
Intinya, pada program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dana sebesar Rp7,214,315,685 atau 95.48% dari total realisasi anggaran program telah terealisasi pada tahun 2017 dalam rangka mendukung sasaran-sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan produksi tanaman unggulan khususnya padi, jagung, dan bawang merah. Program ini menjadi salah satu program yang harus diprioritaskan di tahun anggaran berikutnya demi tercapainya tujuan jangka panjang peningkatan produksi tersebut. (Tabel 2.13) (Gambar 2.38)

Jika dievaluasi, maka program ini adalah program yang memang memiliki anggaran dengan porsi paling besar di Dinas Pertanian sendiri. Artinya sesuai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, bahwa produksi tanaman padi, jagung, dan bawang merah selalu diprioritaskan untuk mendukung Kabupaten Brebes sebagai lumbung pertanian nasional. (Tabel 2.13) (Gambar 2.38)

Tabel 2.14 Komposisi Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017

| PROGRAM/KEGIATAN | REALISASI | PRESENTASE | KETERANGAN DUKUNGAN DALAM KOMPONEN TOC |
|---|-------------|------------|--|
| Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan | 911,259,272 | 95.89% | |
| Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan | 154,054,450 | 99.57% | Meningkatnya Penyuluhan Pertanian |
| Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan | 641,402,075 | 95.65% | Meningkatnya Penyuluhan Pertanian |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan | 115,802,747 | 92.64% | |

Gambar 2.39 Komposisi Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan per Kegiatan dalam APBD Tahun 2017



Pada tahun 2017, Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan memiliki realisasi anggaran Rp911,259,272 atau 95,89% dari total yang dianggarkan dalam program ini. Program ini memiliki dua kegiatan yang mampu meningkatkan penyuluhan pertanian sebagai salah satu upaya dalam mencapai sasaran jangka Panjang produksi. Kegiatan tersebut antara lain Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan dan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan. Total realisasi anggaran kegiatan untuk mendukung sasaran jangka panjang tersebut adalah sebesar Rp795,456,525 atau senilai 87.29% dari total realisasi anggaran program.

Penyuluhan Pertanian dinilai sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian unggulan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini dikarenakan produksi masih sangat ditentukan oleh pola perilaku petani pada saat menanam dan merawat tanaman dan hasil tanam mereka. Tanaman padi, jagung, dan bawang merah yang baik berasal dari bibit yang baik, pola tanam yang tepat, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang cukup dan tidak berlebihan. Semua edukasi mengenai hal tersebut harus diberikan kepada petani karena banyak petani yang tidak faham dan mengambil tindakan sendiri akibatnya hasil panen justru gagal. Jika terjadi kegagalan panen, maka harga komoditas unggulan akan tinggi dan akan semakin mempersulit masyarakat yang khususnya dari golongan kesejahteraan paling rendah. (Tabel 2.14) (Gambar 2.39)

2.7 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN

Keberhasilan pencapaian bidang pertanian dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian komoditas utama (padi, jagung, bawang merah). Peningkatan hasil produksi pertanian harus dicapai untuk mencukupi kebutuhan pangan di wilayah lokal, regional maupun nasional, mengingat kebutuhan pangan yang selalu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan produksi diharapkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani. Dengan meningkatnya kesejahteraan petani maka akan ikut serta dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Beberapa rekomendasi terkait bidang pertanian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis TOC bidang pertanian yang telah dibuat, perlu ada prioritas dalam membagi pagu anggaran. Pagu yang ada sebaiknya difokuskan untuk program dan kegiatan yang secara langsung mendukung tujuan dari bidang pertanian (tergambar dalam TOC), yaitu meningkatnya produksi komoditas utama serta meningkatnya pendapatan petani.
2. Dalam menentukan wilayah pelaksanaan kegiatan, sebaiknya mengacu kepada prioritas wilayah sesuai dengan kebutuhannya. Agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Disamping itu pula, penentuan wilayah juga harus dapat merata di tiap-tiap wilayah yang membutuhkan, agar tidak terjadi ketimpangan.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan harus benar-benar mengikuti rencana strategis lima tahunan (renstra) yang telah ditetapkan, agar hasil pencapaian dari sebuah program dan kegiatan dapat terukur dan dapat terevaluasi dengan baik. Rincian/komponen dalam sebuah kegiatan harus dapat menghasilkan output tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan di dalam renstra.
4. Perlu adanya perhatian khusus dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang pertanian, khususnya dalam membagi anggaran untuk bidang pertanian. Selama tiga tahun terakhir, porsi anggaran bidang pertanian masih kurang dari 5% dari total APBD Kabupaten. Mengingat Kabupaten Brebes merupakan salah satu lumbung pangan tingkat provinsi dan mata pencaharian terbesar masyarakat Kabupaten Brebes adalah bekerja di sektor pertanian. Dengan adanya dukungan yang lebih dari APBD Kabupaten maka upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan produksi pertanian dapat lebih maksimal.
5. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dapat membantu mengurangi biaya produksi petani. Biaya produksi dapat dikurangi dengan memberikan pelayanan irigasi yang baik, bantuan benih/bibit, pupuk, pestisida dll. Dengan pengurangan biaya produksi maka diharapkan akan menggairahkan petani.
6. Terkait fluktuasi harga komoditas pertanian, khususnya pada saat harga anjlok, pemerintah kabupaten memang tidak dapat mengatasi harga secara berarti karena memang harga dikendalikan oleh pasar. Untuk itu perlu ada upaya khusus dari pemerintah pusat untuk dapat menjamin harga di saat anjlok, sehingga petani tidak menanggung kerugian yang besar.



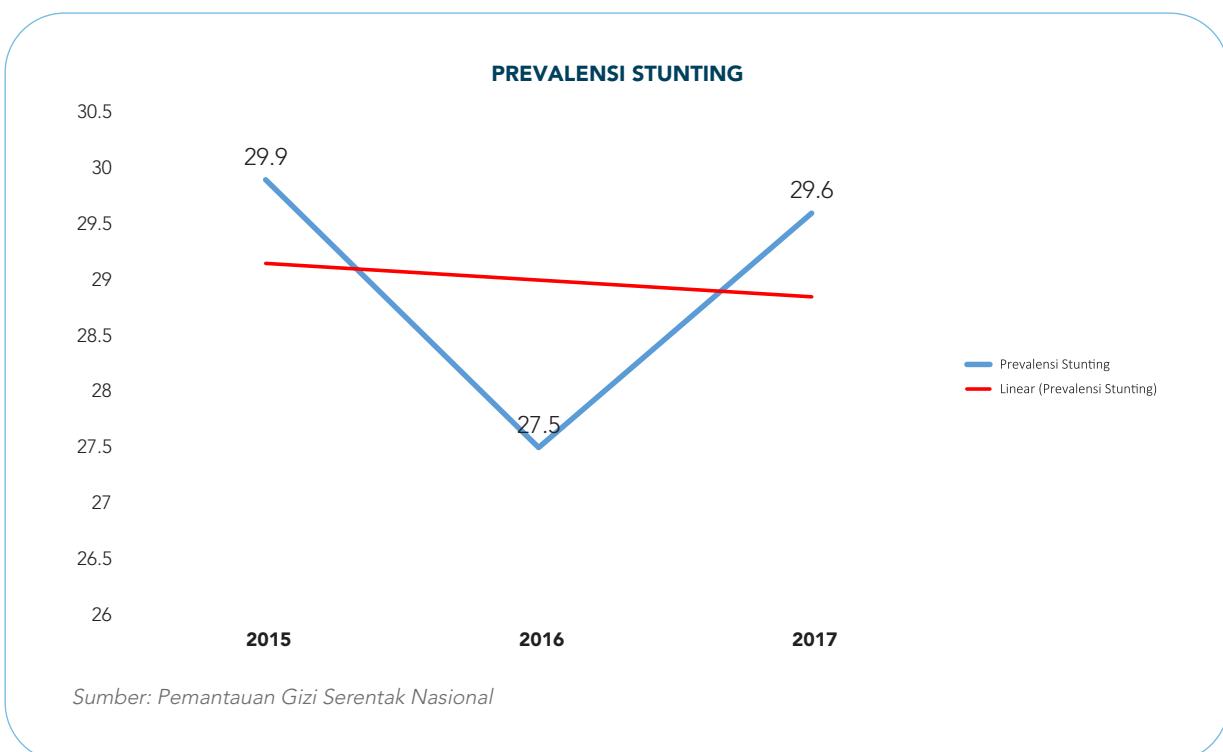
BAB 3

ANALISIS BELANJA PUBLIK UNTUK PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BREBES

3.1 ISU STRATEGIS SEKTOR KESEHATAN

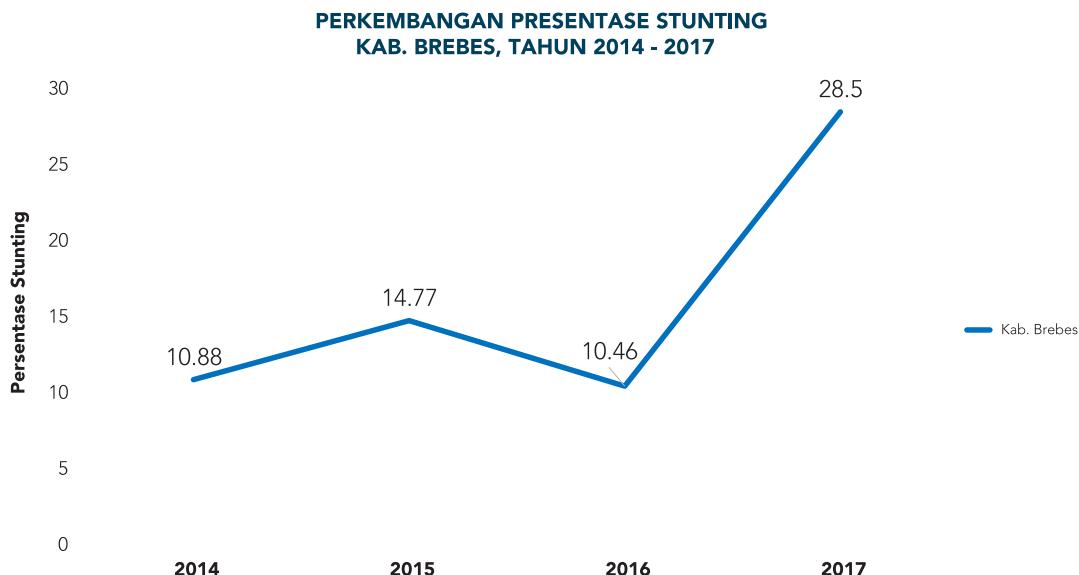
Di dalam RPJMN 2015-2019, ada empat kelompok isu utama pembangunan nasional di bidang kesehatan, yaitu status gizi; kesehatan ibu dan anak; pengendalian penyakit; dan fasilitas pelayanan kesehatan. Masalah status gizi dapat ditunjukkan oleh fluktuatifnya prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir, di mana berdasarkan data pemantauan status gizi pada tahun 2015 prevalensi stunting pada anak balita usia 0-59 bulan mencapai 29,90% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sampai 27,50% akan tetapi pada tahun 2017 kembali naik menjadi 29,60%. Selain itu juga terjadi kesenjangan antar-daerah di mana prevalensi stunting terendah ada di Kepulauan Riau yaitu 4,70% dan tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur yaitu 40,3%. (Gambar 3.1)

Gambar 3.1 Perkembangan Stunting di Indonesia



Prevalensi stunting di Kabupaten Brebes tergolong tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Di antara berbagai indikator pembangunan kesehatan, stunting merupakan indikator yang dapat menunjukkan permasalahan kesehatan di Kabupaten Brebes. Meskipun stunting di Kabupaten Brebes masih lebih baik jika dibandingkan stunting secara nasional yaitu 29,6%, stunting di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 sudah menyamai angka stunting Provinsi Jawa Tengah yaitu 28,5%. WHO menyebutkan bahwa stunting dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat, apabila memiliki prevalensi di atas 20%. Angka stunting di Kabupaten Brebes berdasarkan tren selama 4 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 10,88 % pada tahun 2014 menjadi 28,5 % pada tahun 2017. Sehingga stunting di Kabupaten Brebes sudah dapat dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat. (Gambar 3.2)

Gambar 3.2 Tren Stunting Balita Di Kabupaten Brebes Tahun 2014 - 2017

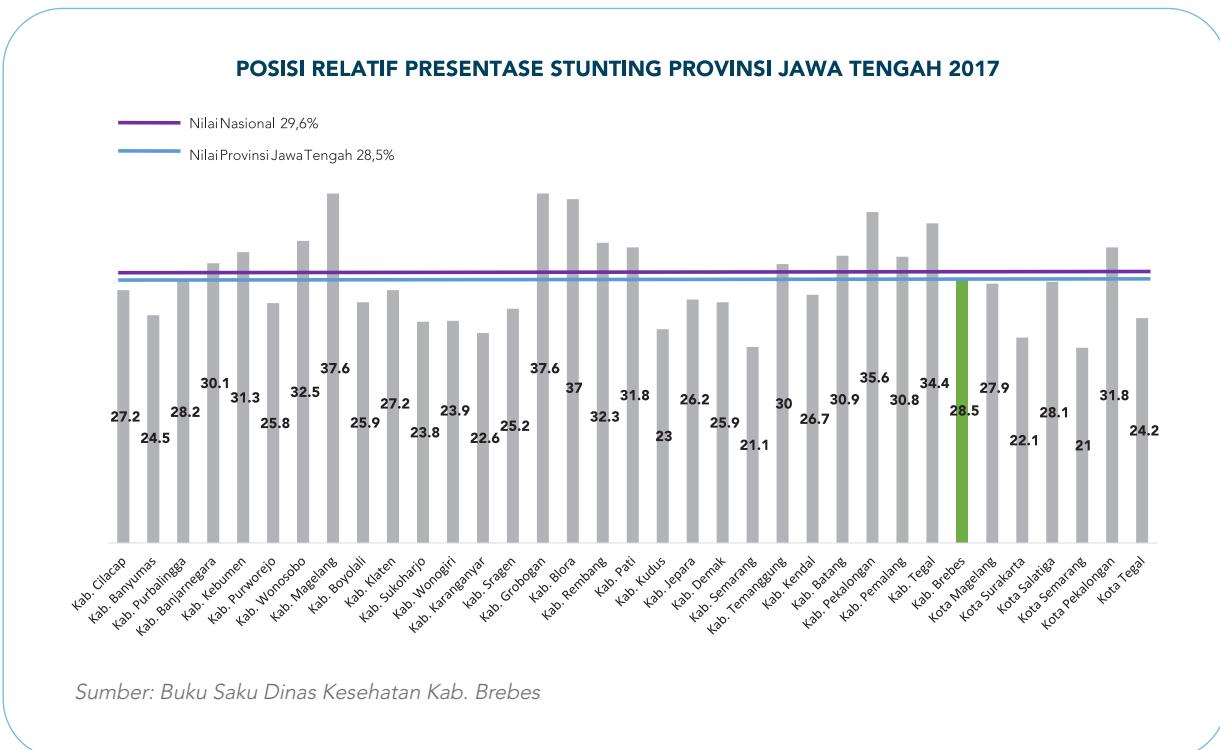


Sumber: Buku Saku Dinas Kesehatan Kab. Brebes

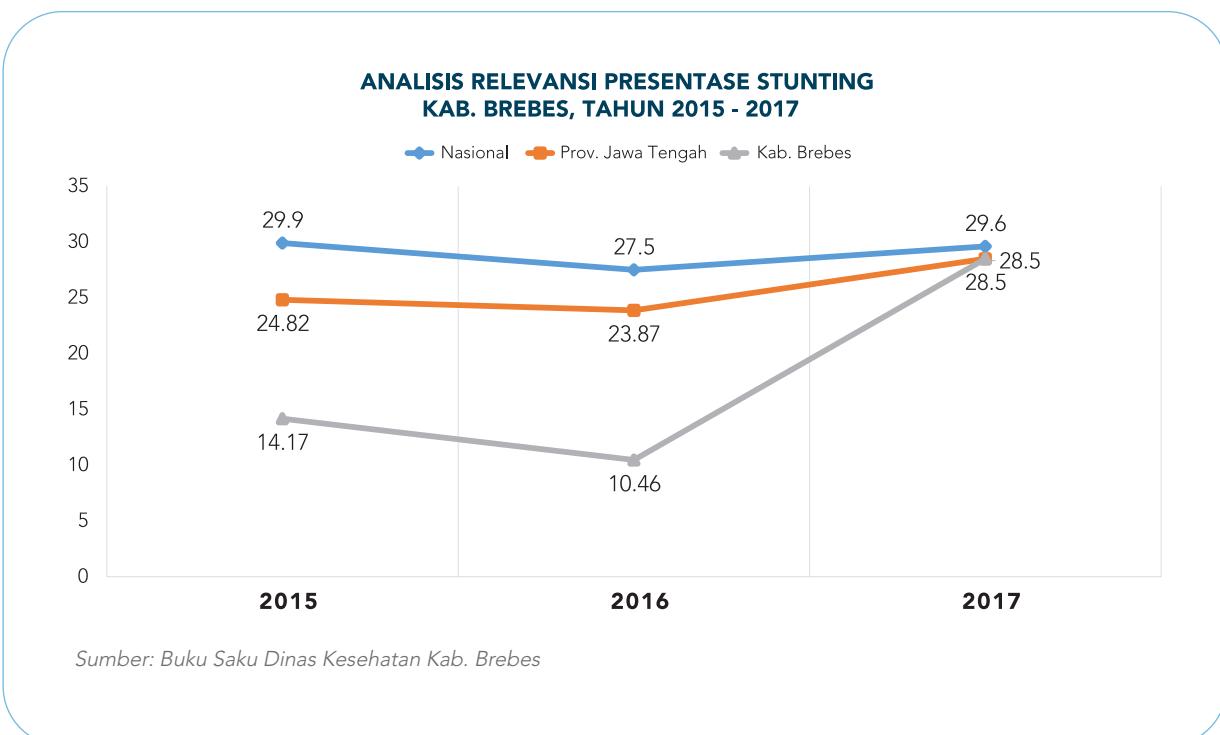
Meskipun stunting di beberapa Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Jawa Tengah memiliki angka yang lebih tinggi dari Kabupaten Brebes, namun angka stunting di Kabupaten Brebes sama dengan angka stunting Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 28,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting juga dialami oleh Kabupaten dan Kota lain di Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan angka stunting di Kabupaten Brebes masih di bawah angka Nasional yaitu 29,6%. (Gambar 3.3)

Angka stunting Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes memiliki tren yang sama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan tren tersebut belum menunjukkan kecenderungan membaik, di mana mengalami penurunan di tahun 2016 namun kembali meningkat di tahun 2017. (Gambar 3.4)

Gambar 3.3 Posisi Relatif Stunting Kabupaten Brebes Terhadap Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3.4 Analisis Relevansi Angka Stunting antara Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2015 - 2017

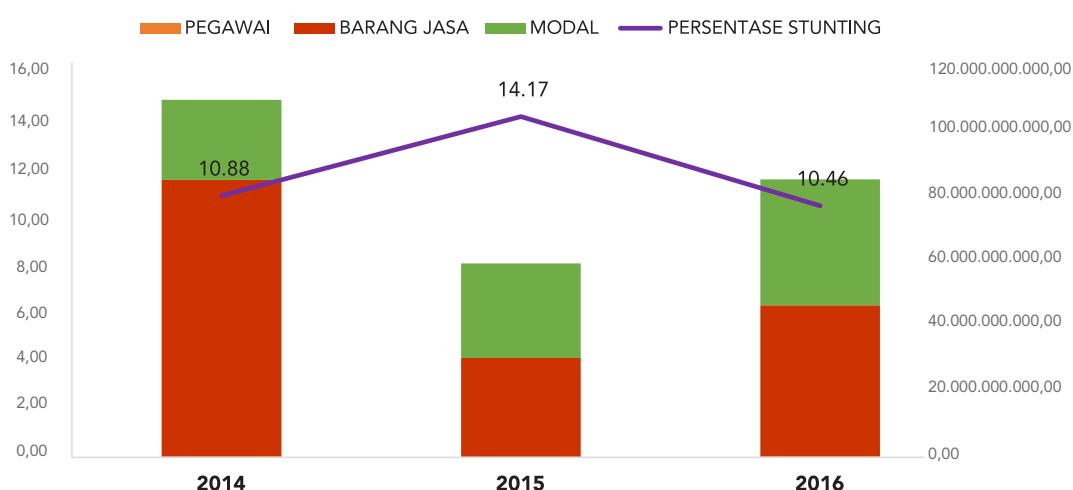


Penanganan masalah stunting telah menjadi prioritas kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes. Dalam beberapa tahun belakangan isu tentang stunting telah dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Brebes, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMD baru Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Secara spesifik di dalam dokumen rencana strategis disebutkan bahwa penurunan prevalensi stunting merupakan indikator kinerja dari program kesehatan masyarakat.

Penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Brebes telah menjadi fokus pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah untuk penanganan stunting pada tiga tahun terakhir, meskipun besarnya masih fluktuatif. Kenaikan dan penurunan anggaran kesehatan di Kabupaten Brebes sejalan dengan pola persentase stunting, di mana pada tahun 2015 anggaran kesehatan mengalami penurunan sedangkan persentase stunting justru mengalami peningkatan. (Gambar 3.5)

Gambar 3.5 Analisis Relevansi Total Anggaran Kesehatan dengan Persentase Stunting

Analisis Relevansi Anggaran dan Capaian Indikator Program Kesehatan terhadap Persentase Stunting Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2016

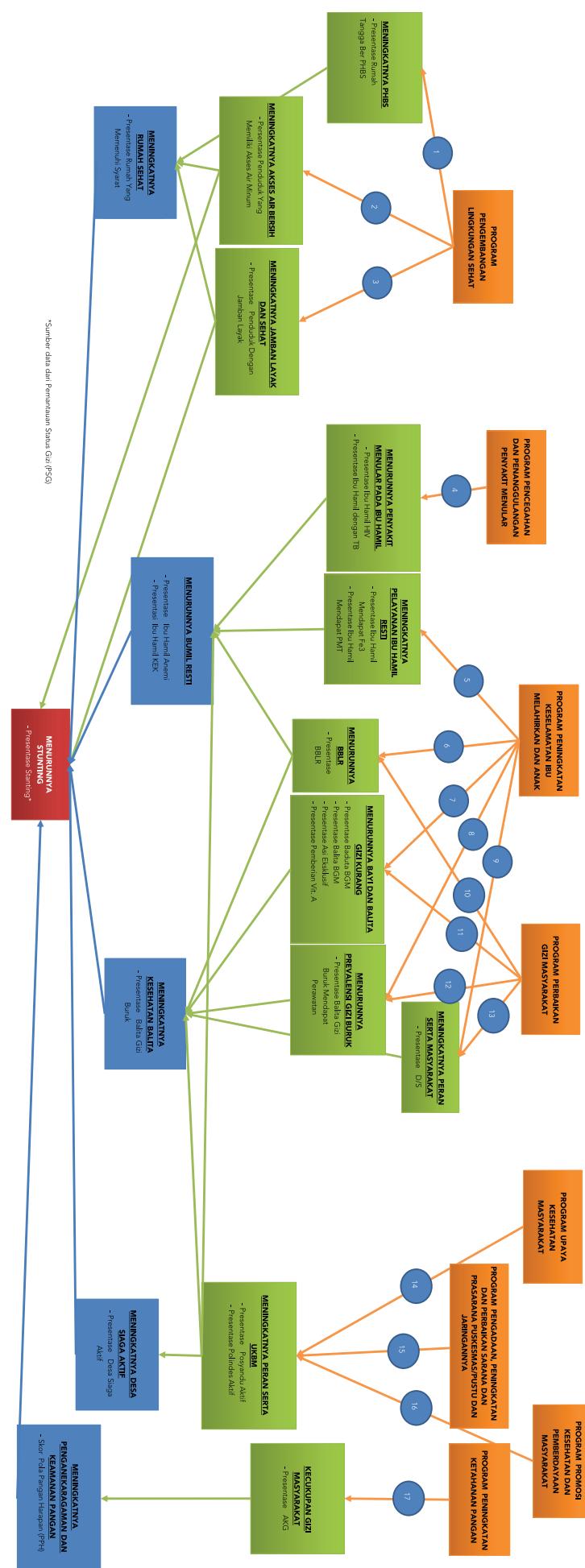


3.2 PRIORITAS INTERVENSI SEKTOR KESEHATAN

Theory of change (TOC) yang disusun oleh Tim teknis TKPK Kabupaten Brebes memperlihatkan bahwa penurunan stunting memiliki lima determinan kunci, yaitu meningkatnya persentase rumah sehat (Indikator: Persentase rumah yang memenuhi syarat), Menurunnya persentase bumil resti (Indikator: persentase ibu hamil anemi dan persentase ibu hamil KEK), Meningkatnya kesehatan balita (Indikator: Persentase balita gizi buruk), Meningkatnya desa siaga aktif (Indikator: Persentase desa siaga aktif), dan meningkatnya keanekaragaman dan keamanan pangan (Indikator: Skor pola pangan harapan / PPH). Sub-determinan dari masing-masing determinan kunci ini adalah sebagai berikut: (Gambar 3.6)

- Meningkatnya persentase rumah sehat akan dipengaruhi oleh faktor meningkatnya persentase PHBS (Indikator: Persentase rumah tangga ber PHBS), Meningkatnya akses air bersih (Indikator: persentase penduduk yang memiliki akses air minum), Meningkatnya persentase jamban layak dan sehat (indikator: persentase penduduk dengan jamban layak)
- Menurunnya persentase bumil resti akan dipengaruhi oleh faktor menurunnya penyakit menular pada ibu hamil (Indikator: persentase ibu hamil TB dan HIV), Meningkatnya pelayanan ibu hamil resti (Indikator: persentase ibu hamil mendapat FE3 dan PMT), Menurunnya persentase BBLR (Indikator: persentase BBLR), meningkatnya peran serta UKBM (indikator: Persentase posyandu dan polindes aktif).
- Meningkatnya kesehatan balita ditentukan oleh faktor menurunnya persentase BBLR (Indikator: persentase BBLR), Menurunnya persentase bayi dan balita gizi kurang (Indikator: Persentase baduta dan balita BGM, Persentase ASI eksklusif dan persentase pemberian vitamin A), menurunnya prevalensi gizi buruk (Indikator: Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan), Meningkatnya peran serta masyarakat (Indikator: Persentase D/S), meningkatnya peran serta UKBM (indikator: Persentase posyandu dan polindes aktif).
- Meningkatnya desa siaga aktif akan bergantung pada faktor meningkatnya peran serta UKBM (indikator: Persentase posyandu dan polindes aktif)
- Meningkatnya keanekaragaman dan keamanan pangan dipengaruhi oleh kecukupan gizi masyarakat (Indikator: Persentase AKG).

Gambar 3.6 TOC stunting

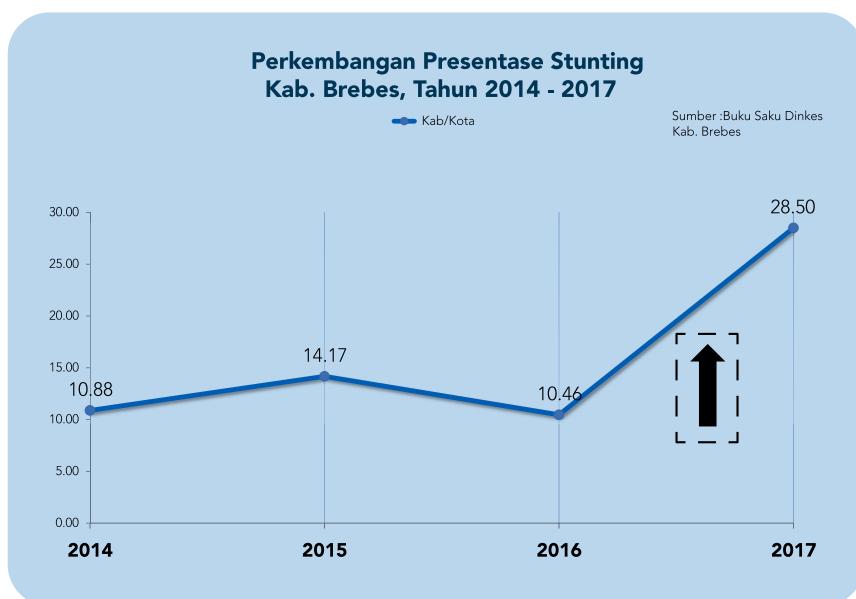


KETERANGAN (KEGIATAN PROGRAM)

1. Sosialisasi, kebijakan lingkungan sehat
2. Pendampingan Pamsimas
3. Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Lingkungan
4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
5. Peningkatan Kesehatan Ibu
6. Peningkatan Kesehatan Anak
7. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
8. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
9. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
10. Peningkatan Kesehatan Anak
11. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
12. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
13. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
14. Peningkatan kesehatan masyarakat
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
16. Pengembangan Desa Siaga
17. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan (*casual relationship*) antara indikator utama (Persentase Stunting) dan indikator-indikator pendukung atau determinannya yang mengacu pada *Theory of change* (TOC) yang disusun oleh Tim teknis TKPK Kabupaten Brebes membuktikan bahwa tidak semua indikator determinan menyebabkan peningkatan persentase stunting di Kabupaten Brebes. Hasil analisis menyatakan hanya ada empat indikator determinan yang dapat mempengaruhi persentase stunting, yaitu (1) Persentase Ibu Anemi, (2) Persentase Ibu Hamil KEK, (3) Persentase Balita Gizi Buruk, (4) Persentase Desa Siaga Aktif, (5) Skor Pola Pangan Harapan. (Gambar 3.7)

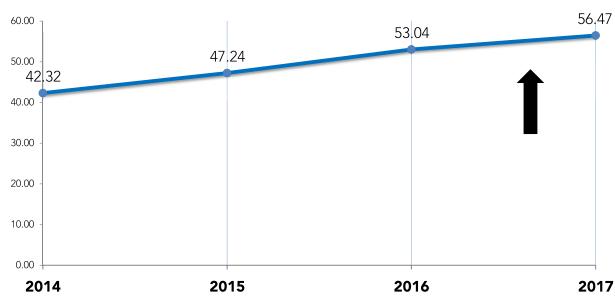
Gambar 3.7 Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Persentase Stunting



**Perkembangan Presentase Rumah Yang Memenuhi Syarat
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

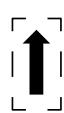
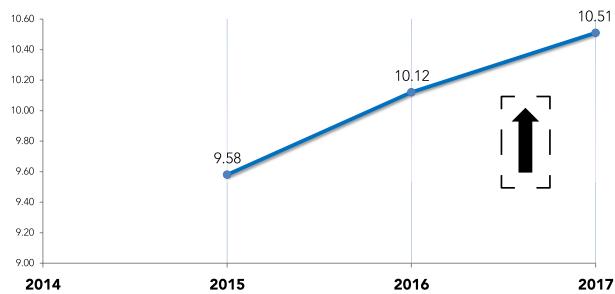
Sumber : Dinas Kesehatan



**Perkembangan Presentase Ibu Hamil KEK
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

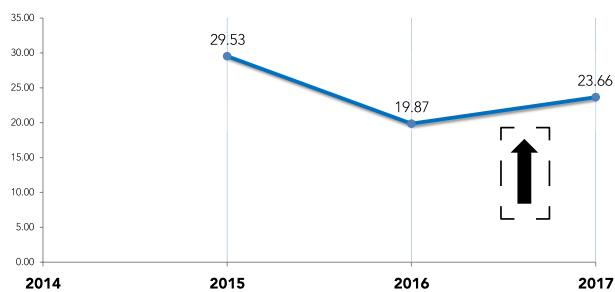
Sumber : Dinas Kesehatan



**Perkembangan Presentase Ibu Anemi
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

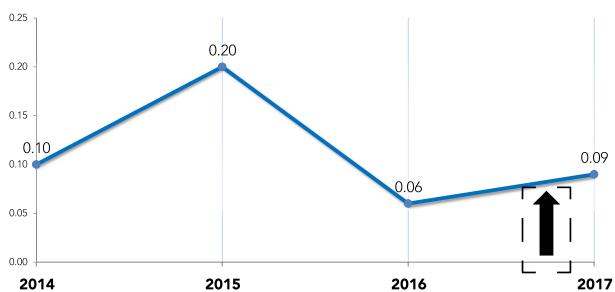
Sumber : Dinas Kesehatan

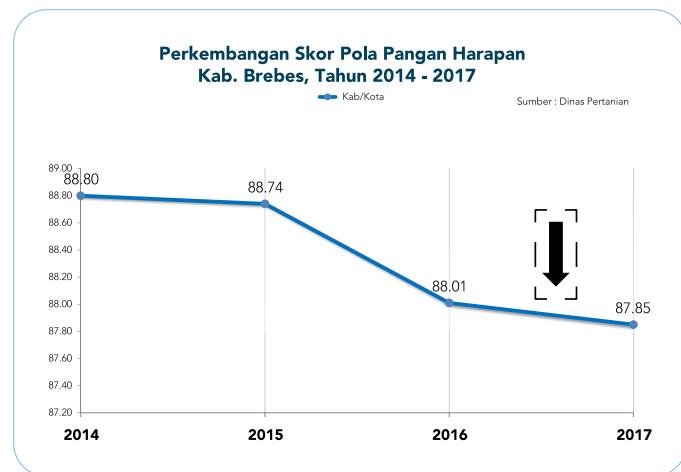
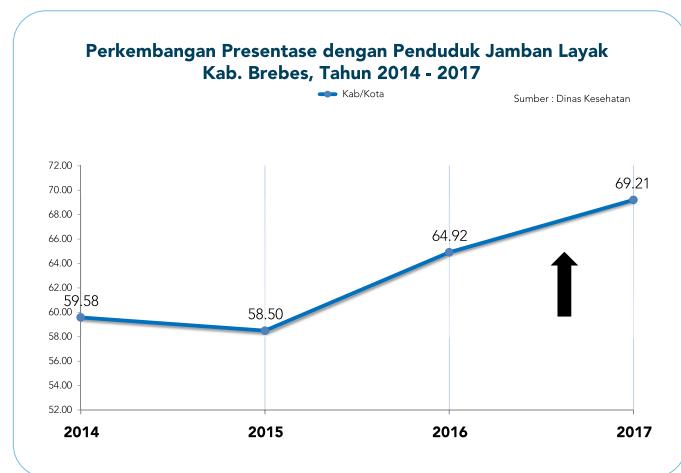
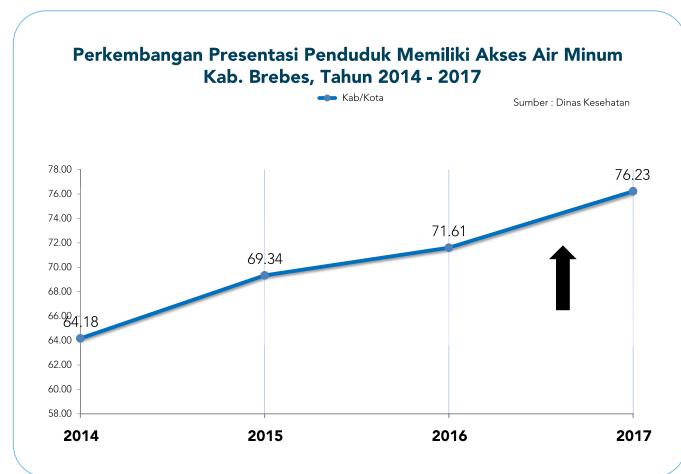
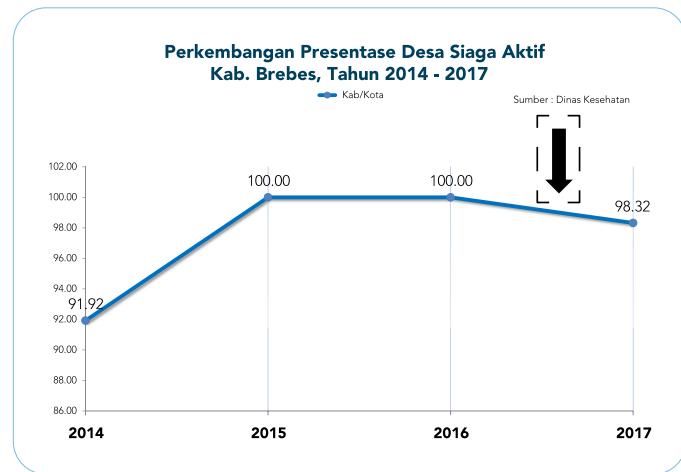


**Perkembangan Presentase Balita Gizi Buruk
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

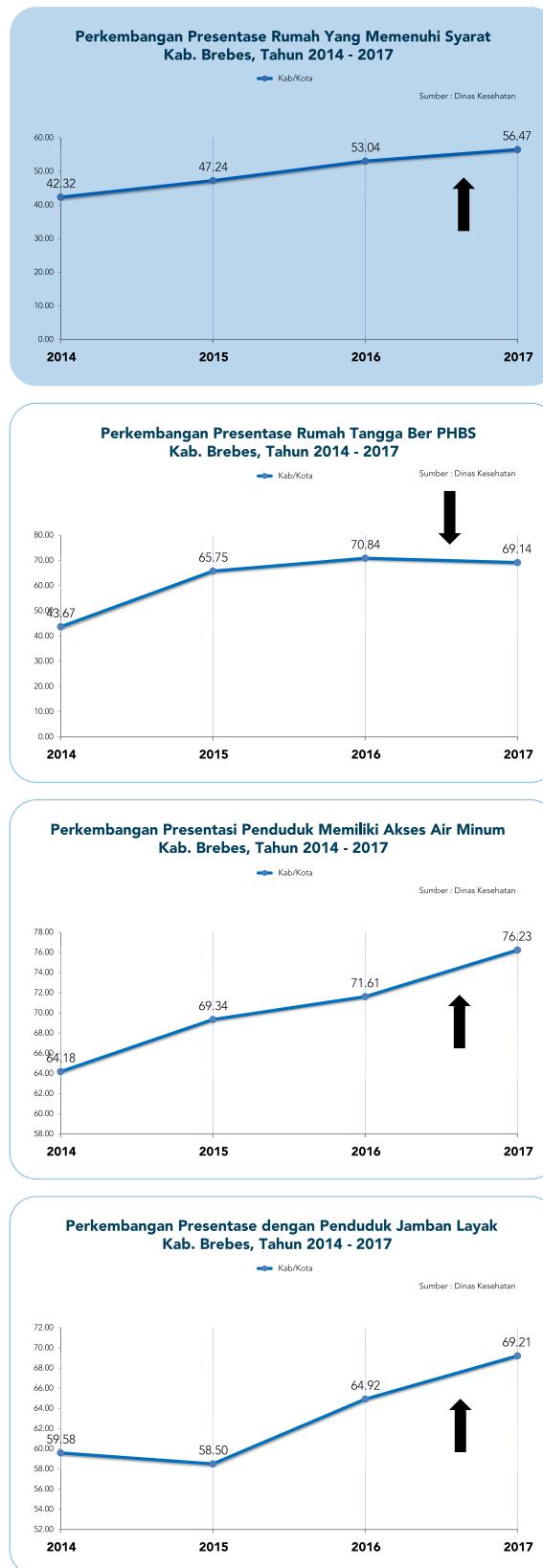
Sumber : Dinas Kesehatan





Analisis indikator determinan dengan faktor penyebabnya dapat menghasilkan informasi tentang akar-akar masalah yang seharusnya bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah prioritas intervensi kebijakan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (Gambar 3.8)

Gambar 3.8 Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Peningkatan Rumah Sehat



Faktor Lingkungan dan Perilaku yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting

Anak-anak yang terpajan pestisida mempunyai resiko 2,6 kali untuk kejadian stunting dibanding dengan yang tidak terpajan pestisida. Sedangkan 6 variabel yang lain (riwayat pajanan asap rokok, riwayat pajanan obat nyamuk bakar, riwayat penggunaan wadah plastic untuk makanan panas, kadar iodium urin, kadar tiosianat urin, anemia) hasil uji Chi-Square nya tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kejadian Stunting. Berdasarkan teori, pajanan pestisida dapat menyebabkan stunting melalui beberapa jalur, yaitu jalur gangguan tiroid, dengan penurunan kadar IGF-1, jalur pembentukan sulfhemoglobin dan methemoglobin dalam sel darah merah yang menyebabkan anemia. Hasil studi ini, menyimpulkan bahwa:

- Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat pajanan pestisida dengan terjadinya stunting pada siswa SD di wilayah Puskesmas Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes
- Riwayat pajanan pestisida merupakan faktor risiko terhadap terjadinya stunting pada siswa

Sumber: Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 2013 oleh Rudi Pangarsaning Utami dkk

Gambar 3.9 Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Penurunan Ibu Hamil dengan Resiko Tinggi

**Perkembangan Presentase Ibu Anemi
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan



**Perkembangan Presentase Ibu Hamil KEK
Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017**

Kab/Kota

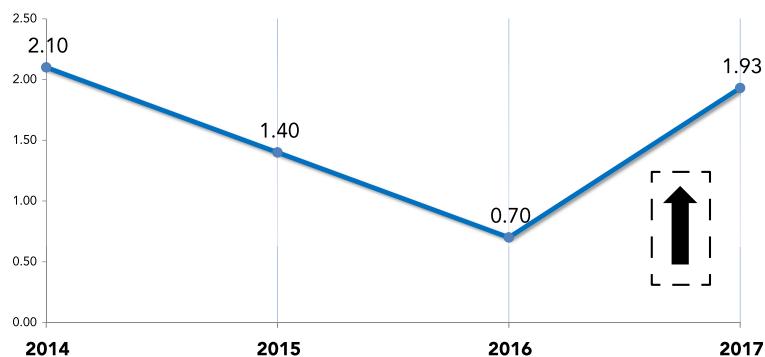
Sumber : Dinas Kesehatan



Perkembangan Presentase Ibu Hamil Dengan HIV (+) Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017

Kab/Kota

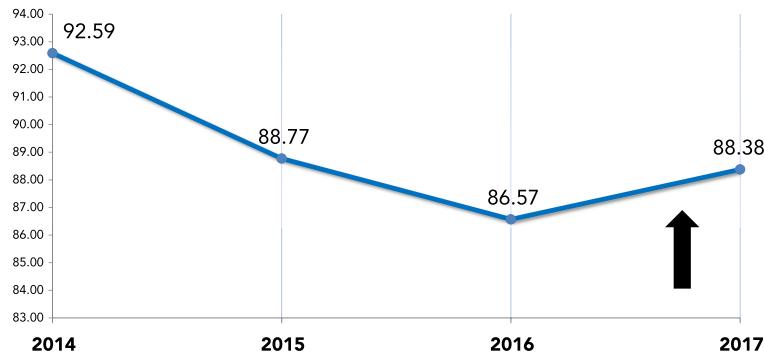
Sumber : Dinas Kesehatan



Perkembangan Presentase Ibu Hamil Mendapat Fe3 Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017

Kab/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan



Perkembangan Presentase Ibu Hamil Mendapat PMT Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017

Kab/Kota

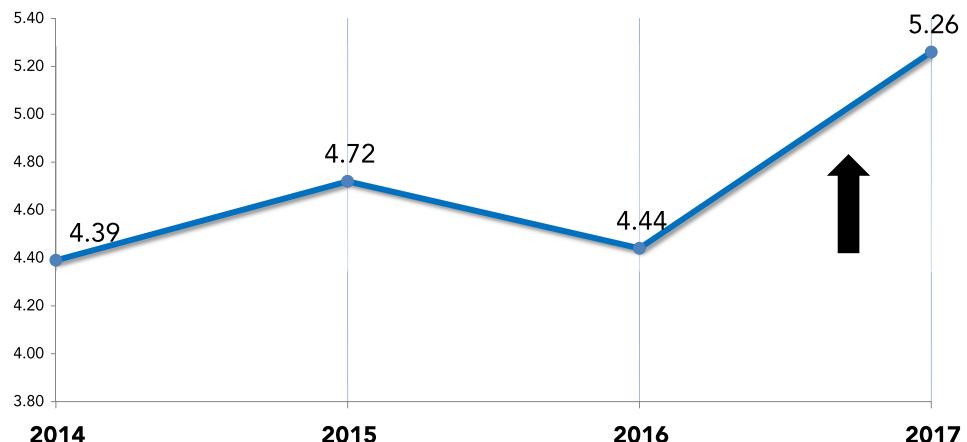
Sumber : Dinas Kesehatan



Perkembangan Presentase BBLR Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017

Kab/Kota

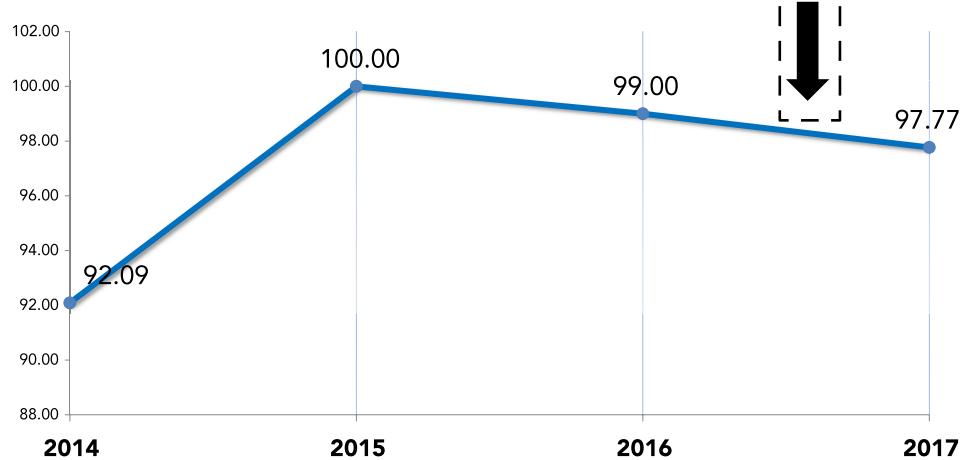
Sumber : Dinas Kesehatan



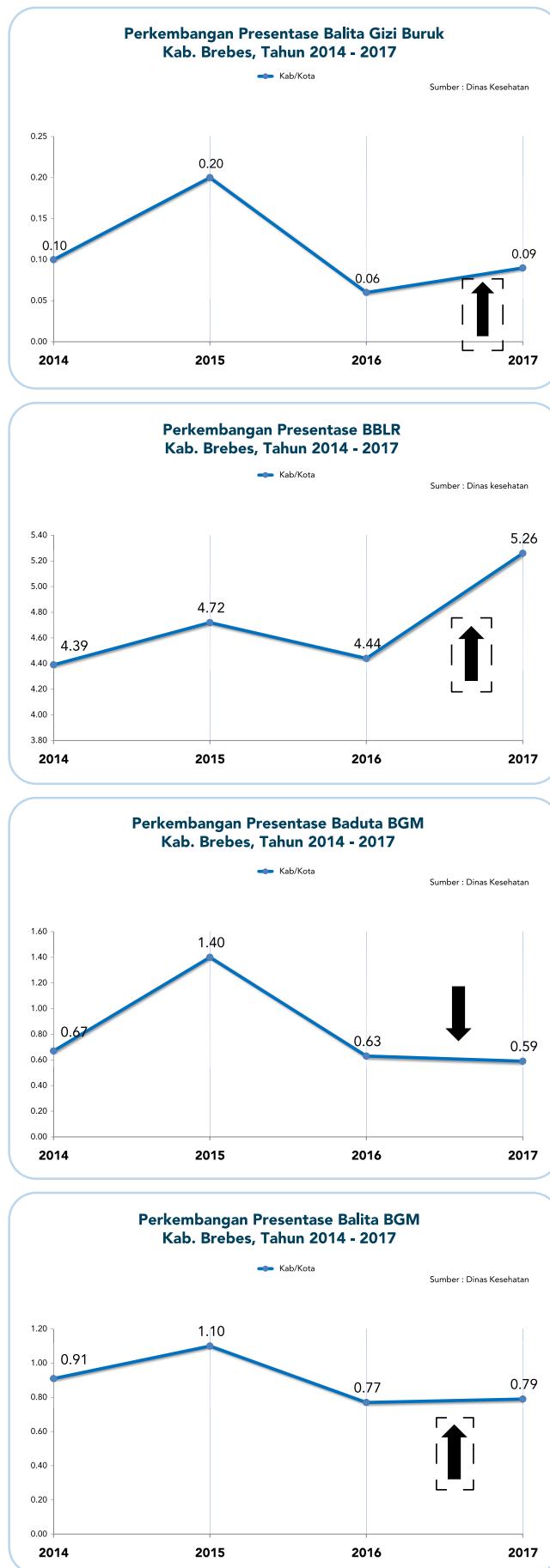
Perkembangan Presentase Posyandu Aktif Kab. Brebes, Tahun 2014 - 2017

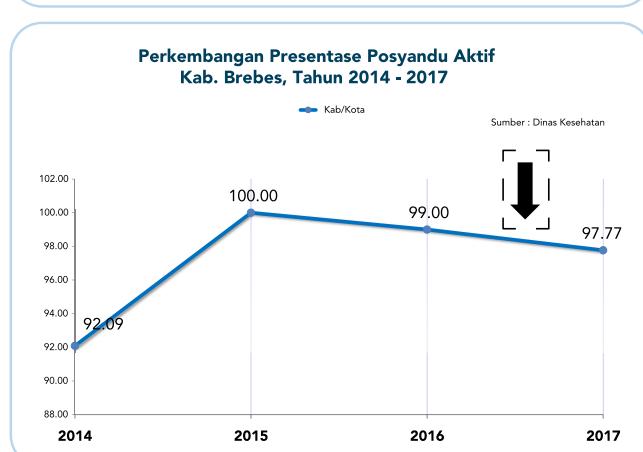
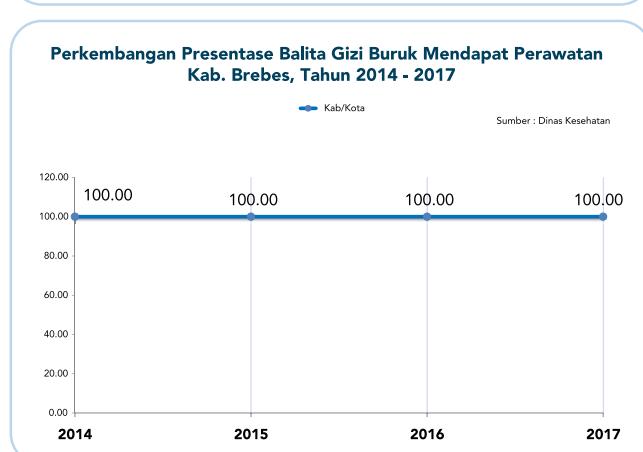
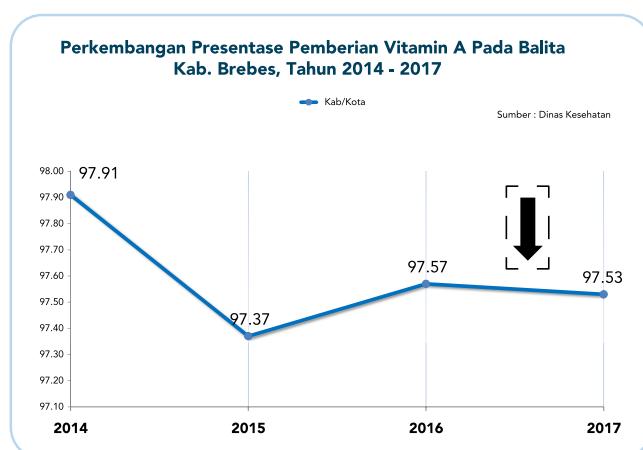
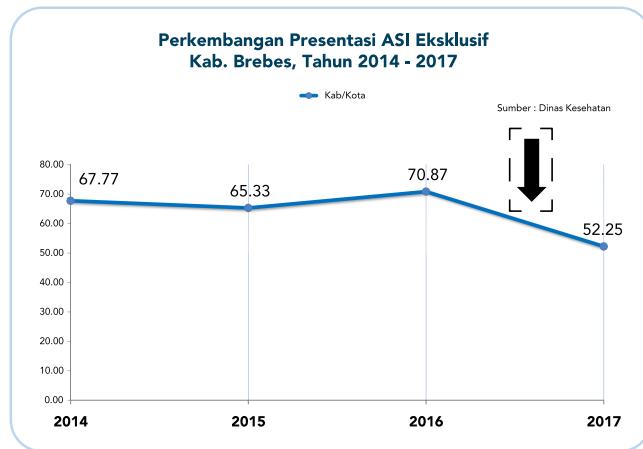
Kab/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan



Gambar 3.10 Analisis Keterkaitan Indikator Pendukung terhadap Peningkatan Kesehatan Balita





Beberapa hal yang menjelaskan mengenai fenomena indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: (Gambar 3.9) (Gambar 3.10)

- Meningkatnya persentase ibu anemi dan ibu hamil KEK terjadi karena (1) persentase ibu hamil dengan HIV (+) yang terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, dan (2) persentase posyandu aktif di Kabupaten Brebes yang mengalami penurunan.
- Menurunnya desa siaga aktif yang ada di Kabupaten Brebes dapat disebabkan karena (1) persentase posyandu aktif di Kabupaten Brebes yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
- Menurunnya skor pola pangan harapan Kabupaten Brebes tidak menunjukkan korelasi positif dengan faktor penyebabnya yaitu persentase angka kecukupan gizi. Hal ini dapat ditunjukkan pada saat tahun 2017, skor pola harapan mengalami penurunan sebesar 0,16%, akan tetapi persentase angka kecukupan gizi malah mengalami peningkatan sebesar 0,5%.
- Meningkatnya persentase balita gizi buruk terjadi karena (1) Peningkatan persentase BBLR, (2) Meningkatnya persentase balita BGM, (3) Menurunnya persentase pemberian ASI eksklusif, (4) Menurunnya persentase pemberian vitamin A pada balita, (5) Meningkatnya persentase balita ditimbang (D/S), akan tetapi faktor determinan D/S ini bernilai positif, maksudnya adalah semakin tinggi capaian D/S menunjukkan semakin tingginya peran serta masyarakat dalam menemukan para balita gizi buruk.

Berdasarkan analisis di atas, upaya untuk menurunkan persentase stunting dapat dilakukan dengan beberapa intervensi oleh pemerintah daerah, di antaranya:

1. Menyebarluaskan informasi tentang bahaya, pencegahan dan penanganan penyakit HIV/AIDS kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes yang beresiko terpapar penyakit HIV/AIDS.
2. Pembuatan dan atau penerapan peraturan yang berkaitan dengan penutupan atau pengaturan terhadap tempat-tempat lokalisasi yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menjadi penggerak atau kader posyandu di tiap-tiap desa atau kelurahan.
4. Menerapkan sistem cost sharing dengan pemerintah desa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan desa atau kelurahan.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di setiap fasilitas kesehatan.
6. Meningkatkan dan menyebarluaskan promosi kesehatan.

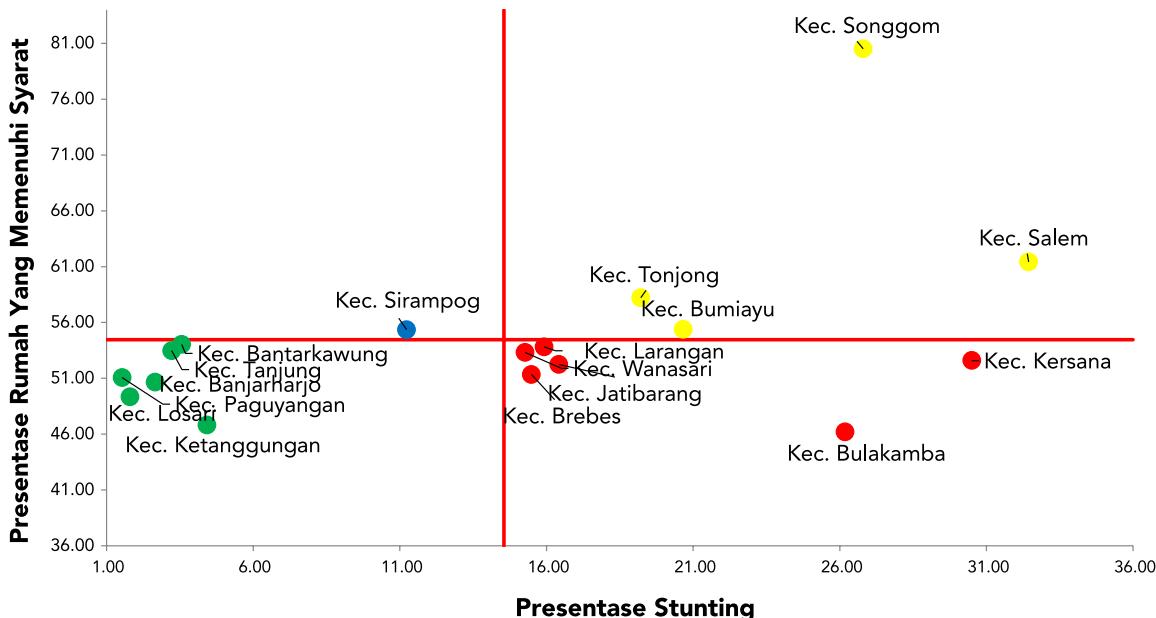
3.3 PRIORITAS WILAYAH SEKTOR KESEHATAN

1. PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

Gambar 3.11 Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Sehat untuk Menurunkan Stunting

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Stunting (%) dan Presentase Rumah Yang Memenuhi Syarat (%) Kab. Brebes - 2016

Sumber :Buku Saku Dinkes Kab. Brebes

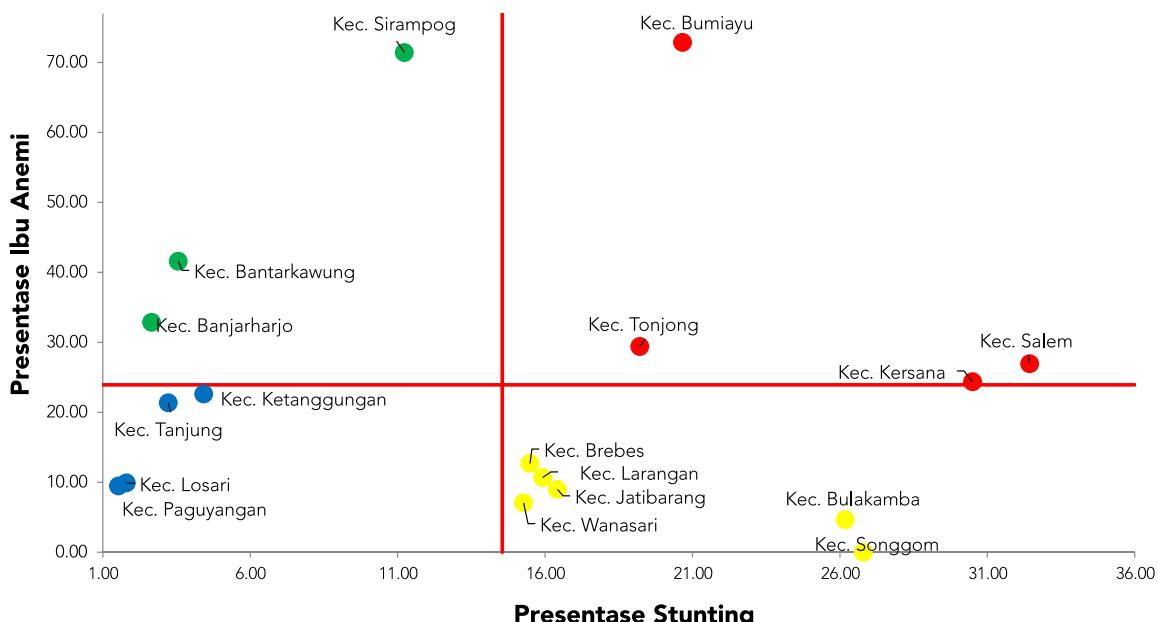


Kondisi rumah yang sehat sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan penghuninya, terutama bagi balita karena terkait dengan sanitasi lingkungan yang sehat. Adapun wilayah prioritas intervensi dalam mencegah stunting dengan kondisi rumah yang sehat adalah Kecamatan Kersana, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, dan Kecamatan Larangan. Kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan persentase balita stunting yang tinggi, serta persentase rumah yang memenuhi syarat yang rendah. (Gambar 3.11)

Gambar 3.12 Prioritas Wilayah Penurunan Ibu Hamil Resiko Tinggi (Anemi) untuk Menurunkan Stunting

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Stunting dan Presentase Ibu Anemi Kab. Brebes - 2016

Sumber :Buku Saku Dinkes Kab. Brebes

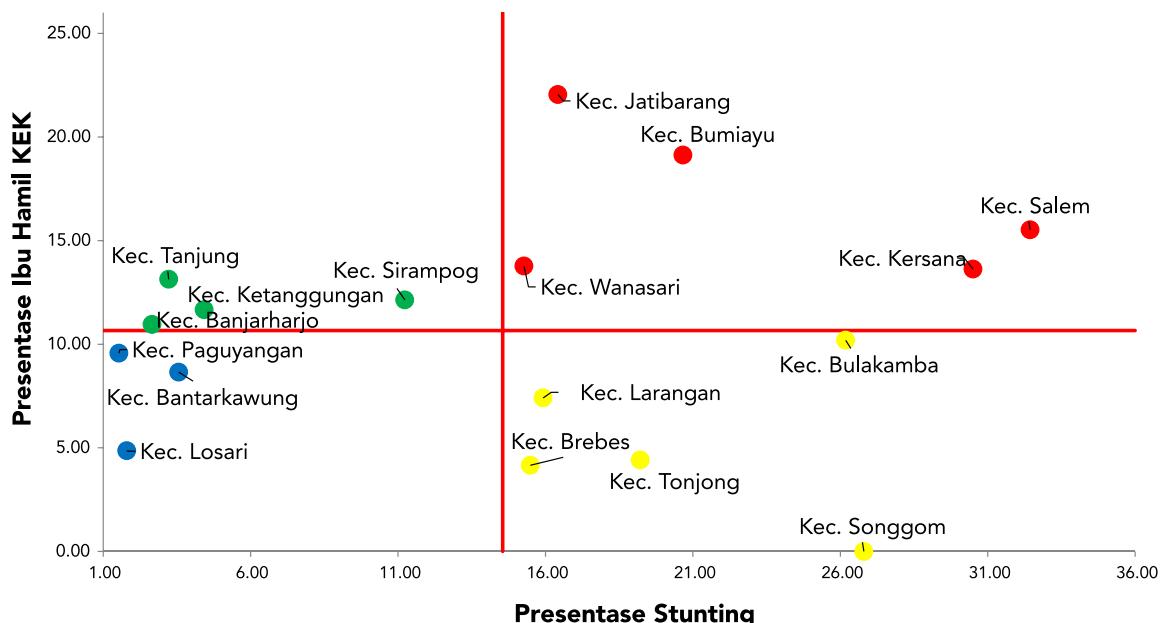


Salah satu upaya pencegahan stunting adalah dengan menjaga kondisi kesehatan ibu hamil, untuk itu perlu upaya pencegahan ibu hamil dengan anemi. Prioritas wilayah intervensi dalam mencegah stunting dengan menurunkan persentase ibu hamil anemi adalah di Kecamatan Salem, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Tonjong, dikarenakan kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan persentase balita stunting yang tinggi, serta persentase ibu hamil dengan anemi yang tinggi. (Gambar 3.12)

Gambar 3.13 Prioritas Wilayah Penurunan Ibu Hamil Resiko Tinggi (KEK) untuk Menurunkan Stunting

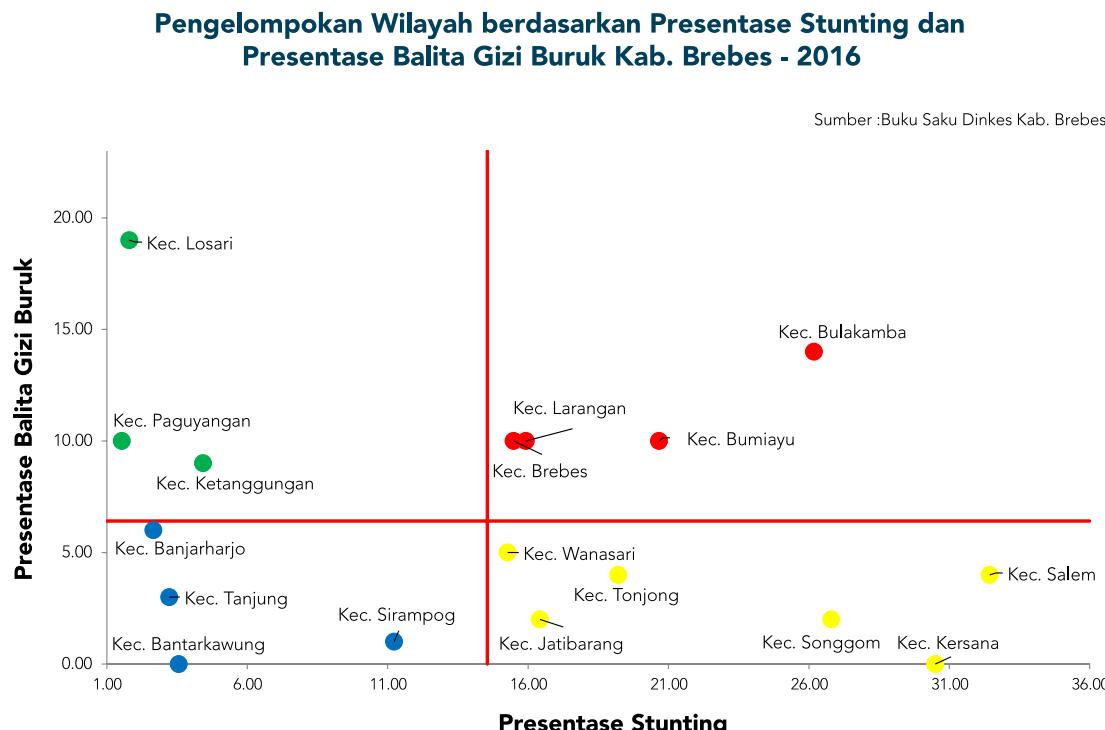
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Stunting dan Presentase Ibu Hamil KEK Kab. Brebes - 2016

Sumber :Buku Saku Dinkes Kab. Brebes



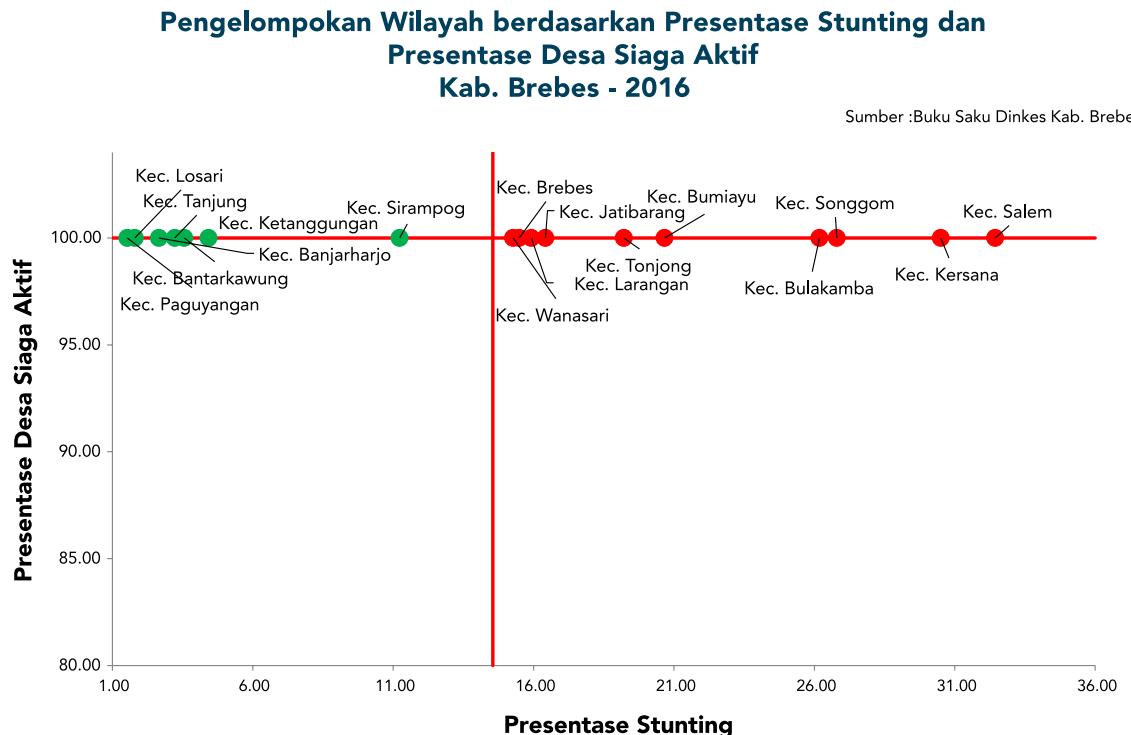
Salah satu upaya pencegahan stunting adalah dengan menjaga kondisi kesehatan ibu hamil sampai melahirkan, untuk itu perlu upaya pencegahan ibu hamil KEK (kekurangan energi kronik). Prioritas wilayah intervensi dalam mencegah stunting dengan menurunkan persentase ibu hamil KEK adalah di Kecamatan Salem, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Wanasari, dikarenakan kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan persentase balita stunting yang tinggi, serta persentase ibu hamil dengan KEK yang tinggi. (Gambar 3.13)

Gambar 3.14 Prioritas Wilayah Penurunan Balita Gizi Buruk untuk Menurunkan Stunting



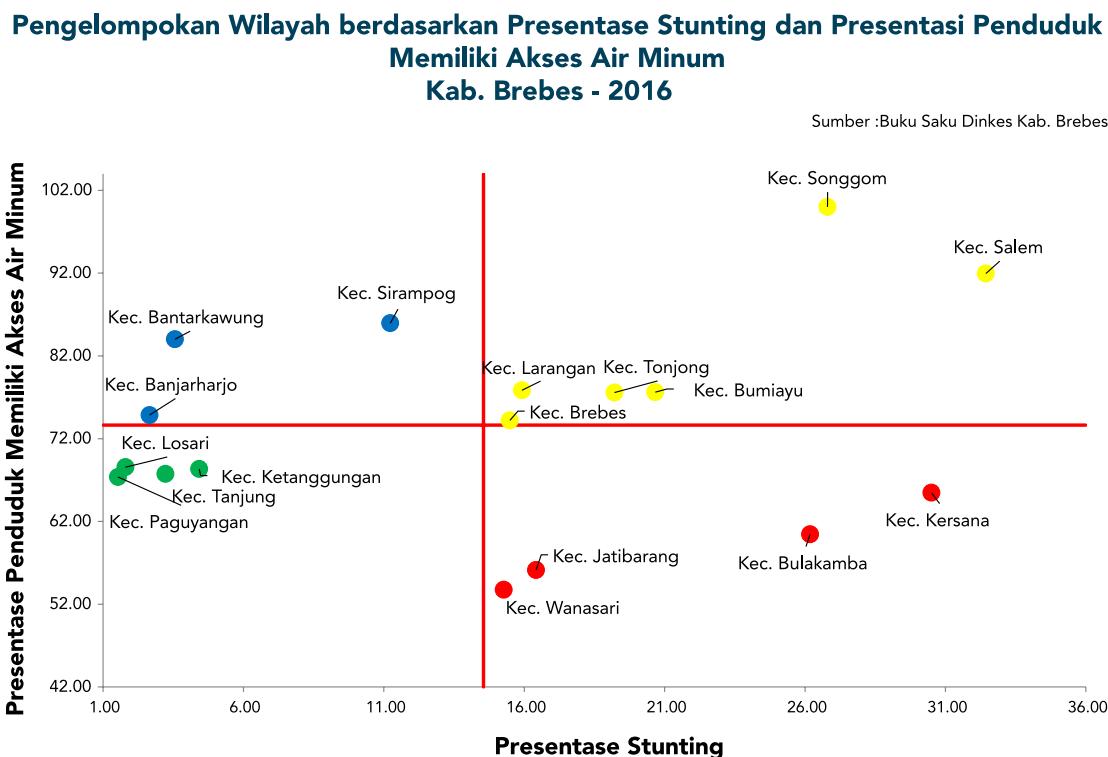
Salah satu upaya pencegahan stunting adalah dengan meningkatkan asupan gizi balita terutama baduta, karena masih dalam tahapan 1000 hari pertama kehidupan. Prioritas wilayah intervensi dalam mencegah stunting dengan menurunkan persentase balita gizi buruk adalah di Kecamatan Brebes, Kecamatan Larangan, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Bulakamba, dikarenakan kecamatan-kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan persentase balita stunting yang tinggi, serta persentase balita gizi buruk yang tinggi. (Gambar 3.14)

Gambar 3.15 Prioritas Wilayah Peningkatan Desa Siaga Aktif untuk Menurunkan Stunting



Dilihat dari persentase desa siaga aktif di Kabupaten Brebes pada tahun 2016, sudah semua kecamatan mencapai 100%, hal ini diharapkan dapat mencegah peningkatan balita stunting. (Gambar 3.15)

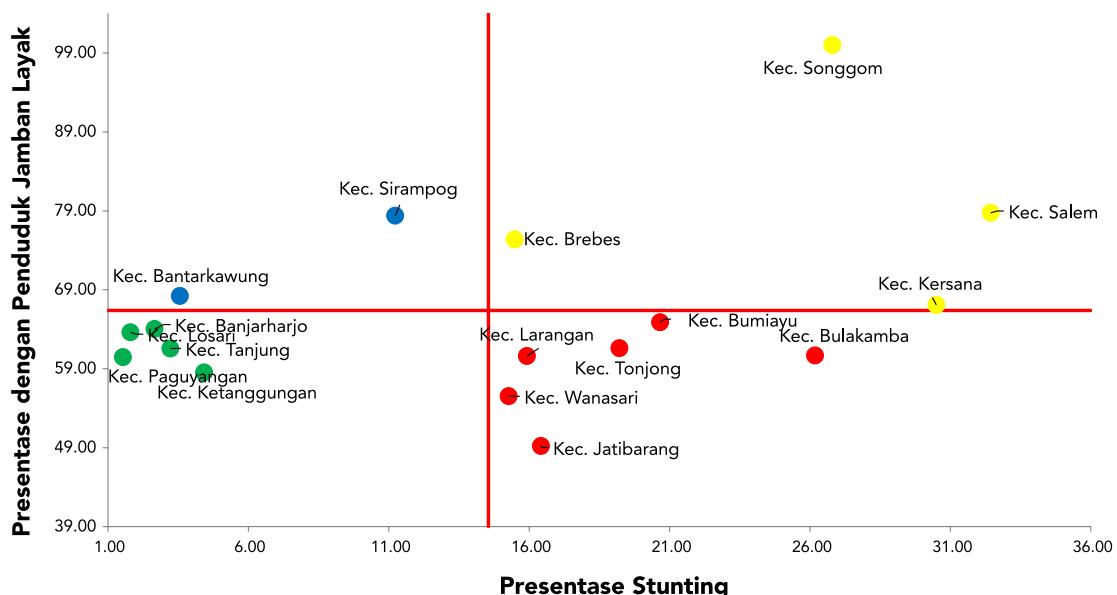
Gambar 3.16 Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Air Minum Layak untuk Menurunkan Stunting



Gambar 3.17 Prioritas Wilayah Peningkatan Akses Jamban Layak untuk Menurunkan Stunting

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Stunting dan Presentase dengan Penduduk Jamban Layak Kab. Brebes - 2016

Sumber :Buku Saku Dinkes Kab. Brebes



Dalam menekan angka Balita yang mengalami Stunting di Kabupaten Brebes, dengan melakukan intervensi berupa peningkatan akses air minum layak maka ada beberapa Kecamatan yang perlu diprioritaskan pertama kali, yaitu Kecamatan Kersana, Bulakamba, Jatibarang, dan Wanasari. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki persentase Balita Stunting tinggi dan akses air minum yang kurang layak. (Gambar 3.16)

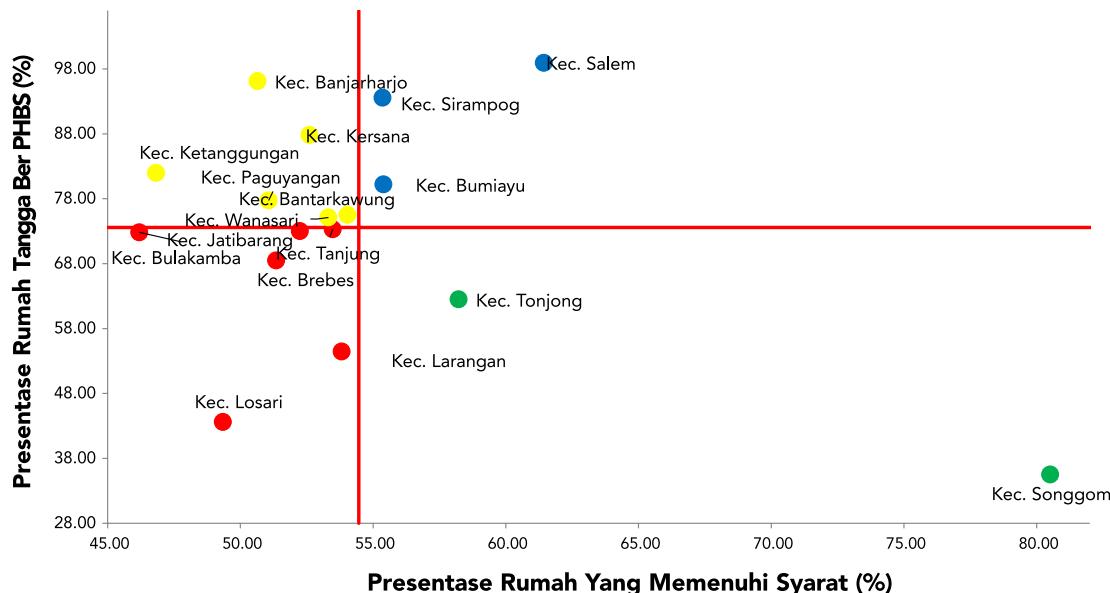
Kemudian, untuk menekan angka Balita Stunting dengan memberikan akses jamban yang layak di Kabupaten Brebes perlu diprioritaskan adalah Kecamatan Bulakamba, Bumiayu, Tonjong, Larangan, Wanasari, dan Jatibarang. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki persentase Balita Stunting tinggi dan akses jamban yang sulit. (Gambar 3.17)

2. PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI PENINGKATAN RUMAH SEHAT

Gambar 3.18 Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Tangga PHBS untuk Meningkatkan Rumah Sehat

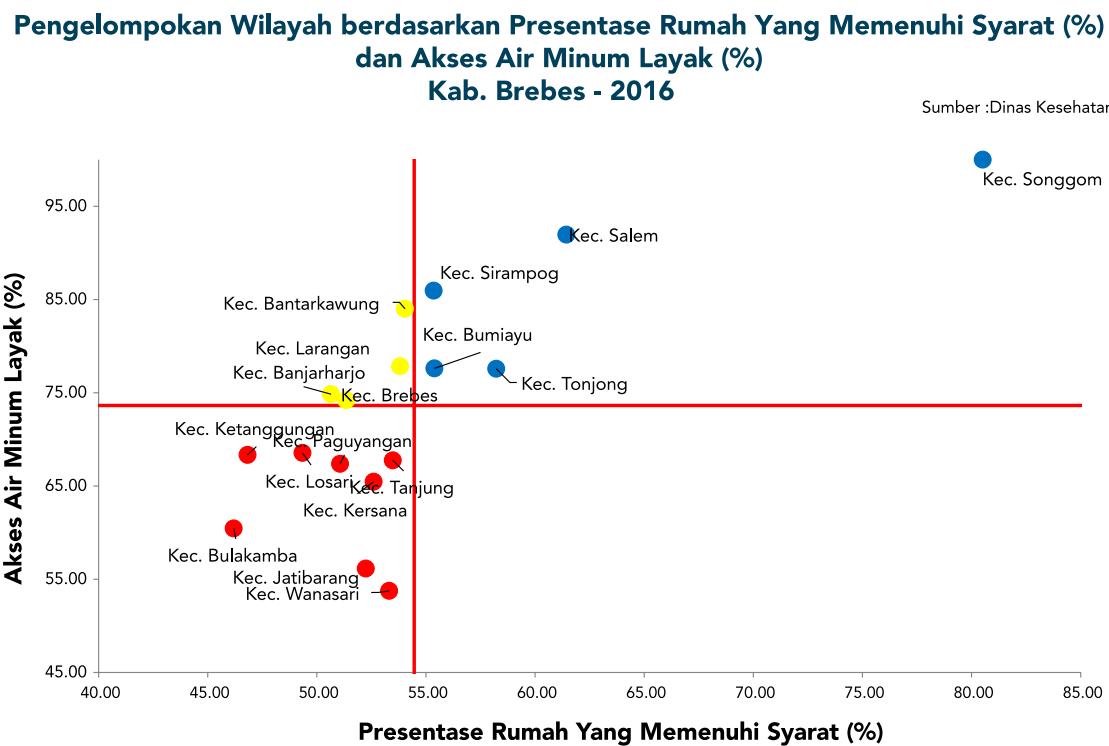
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Rumah Yang Memenuhi Syarat (%) dan Presentase Rumah Tangga Ber PHBS (%) Kab. Brebes - 2016

Sumber :Dinas Kesehatan



Salah satu upaya untuk meningkatkan kondisi rumah yang memenuhi syarat adalah dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan rumah yang memenuhi syarat dengan meningkatkan persentase rumah tangga ber PHBS adalah di Kecamatan Losari, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Bulakamba. (Gambar 3.18)

Gambar 3.19 Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Akses Air Minum Layak untuk Meningkatkan Rumah Sehat

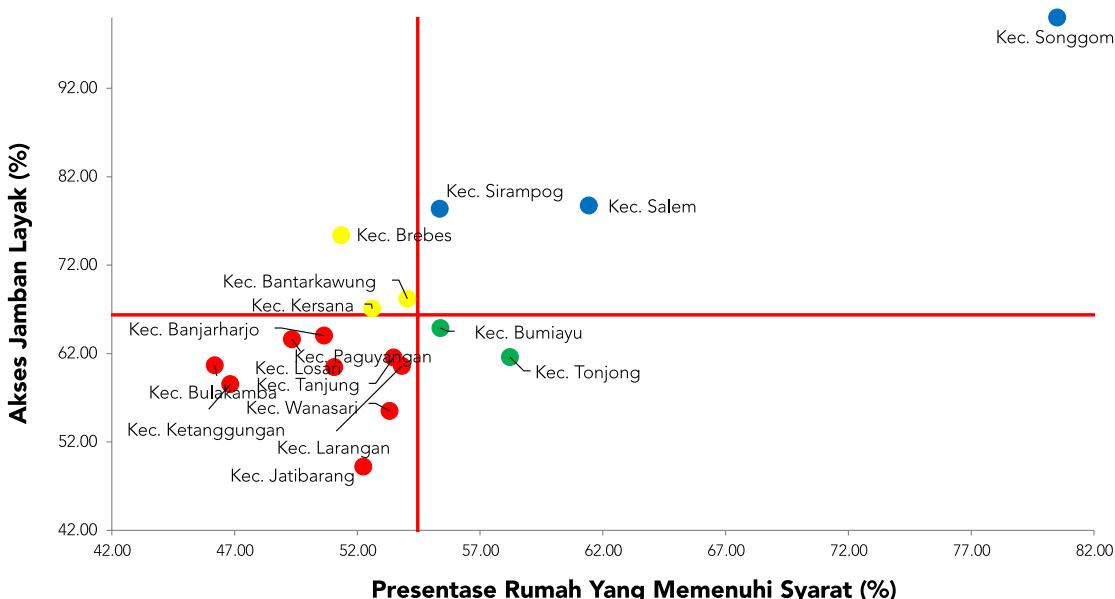


Salah faktor yang dapat meningkatkan kondisi rumah yang memenuhi syarat adalah dengan meningkatkan akses air minum bagi penduduk. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan rumah yang memenuhi syarat dengan meningkatkan persentase penduduk memiliki akses air minum adalah di Kecamatan Wanasari, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Kersana, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Losari. (Gambar 3.19)

Gambar 3.20 Prioritas Wilayah Peningkatan Rumah Akses Jamban Layak untuk Meningkatkan Rumah Sehat

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Rumah Yang Memenuhi Syarat (%) dan Akses Jamban Layak (%) Kab. Brebes - 2016

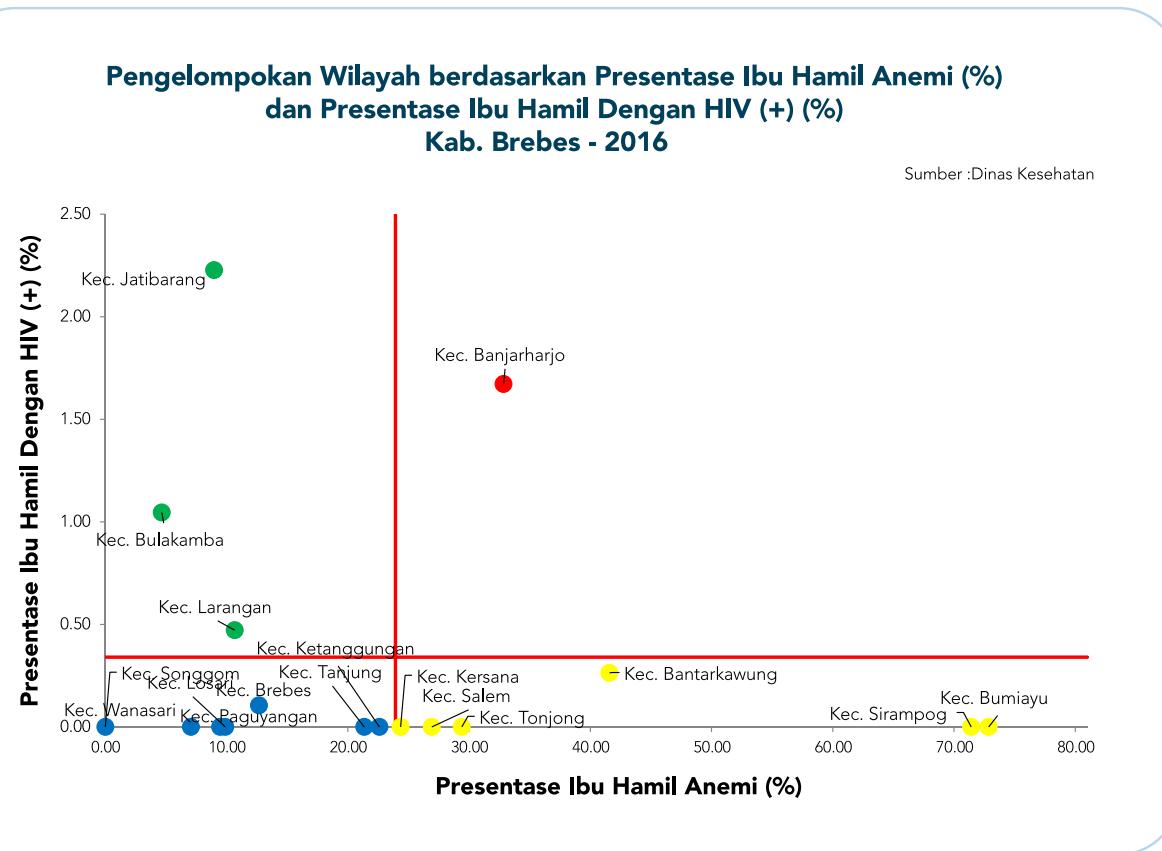
Sumber :Dinas Kesehatan



Salah faktor yang dapat meningkatkan kondisi rumah yang memenuhi syarat adalah dengan meningkatkan penduduk dengan jamban yang layak. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan rumah yang memenuhi syarat dengan meningkatkan kepemilikan jamban layak adalah di Kecamatan Wanarsari, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Ketanggungan. (Gambar 3.20)

3. PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI PENURUNAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI

Gambar 3.21 Prioritas Wilayah Intervensi Ibu Hamil Anemi dan Ibu Hamil dengan HIV (+)

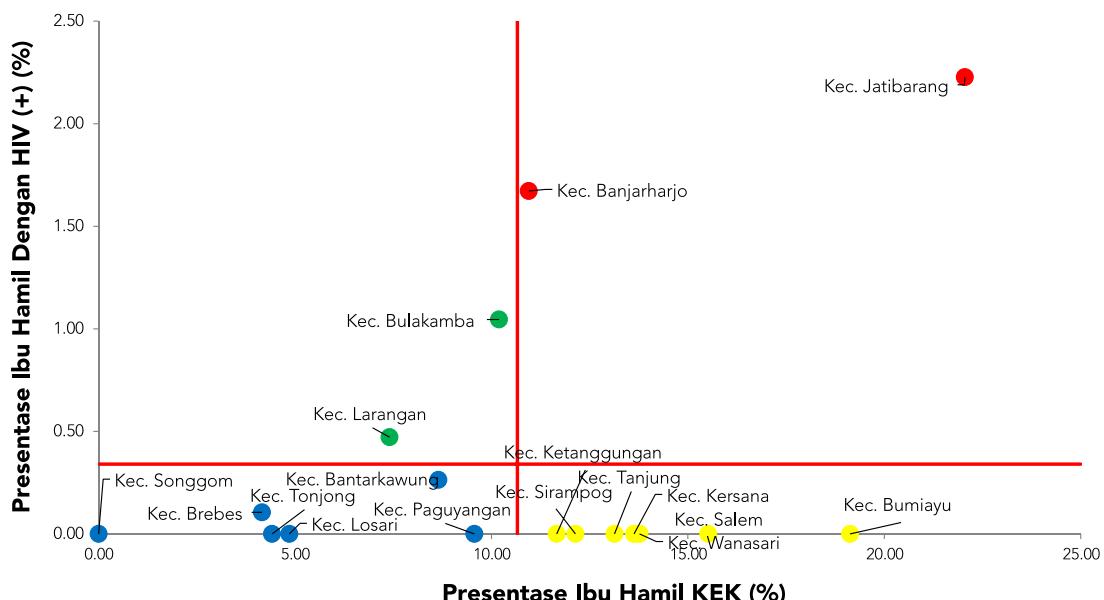


Ibu hamil dengan HIV (+) dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya ibu hamil anemi. Prioritas intervensi wilayah untuk menurunkan persentase ibu hamil anemi dengan menurunkan persentase ibu hamil dengan HIV (+) di Kecamatan Banjarharjo. (Gambar 3.21)

Gambar 3.22 Prioritas Wilayah Intervensi Persentase Ibu Hamil KEK dan Ibu Hamil dengan HIV (+)

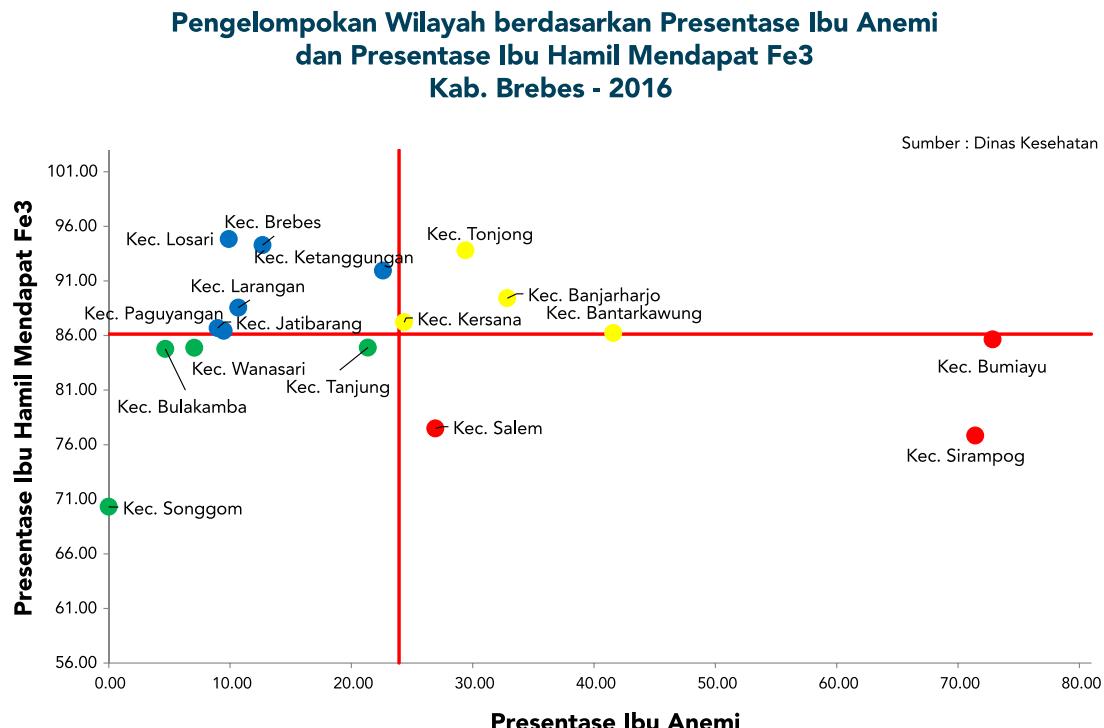
Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Ibu Hamil KEK (%) dan Presentase Ibu Hamil Dengan HIV (+) (%) Kab. Brebes - 2016

Sumber :Dinas Kesehatan



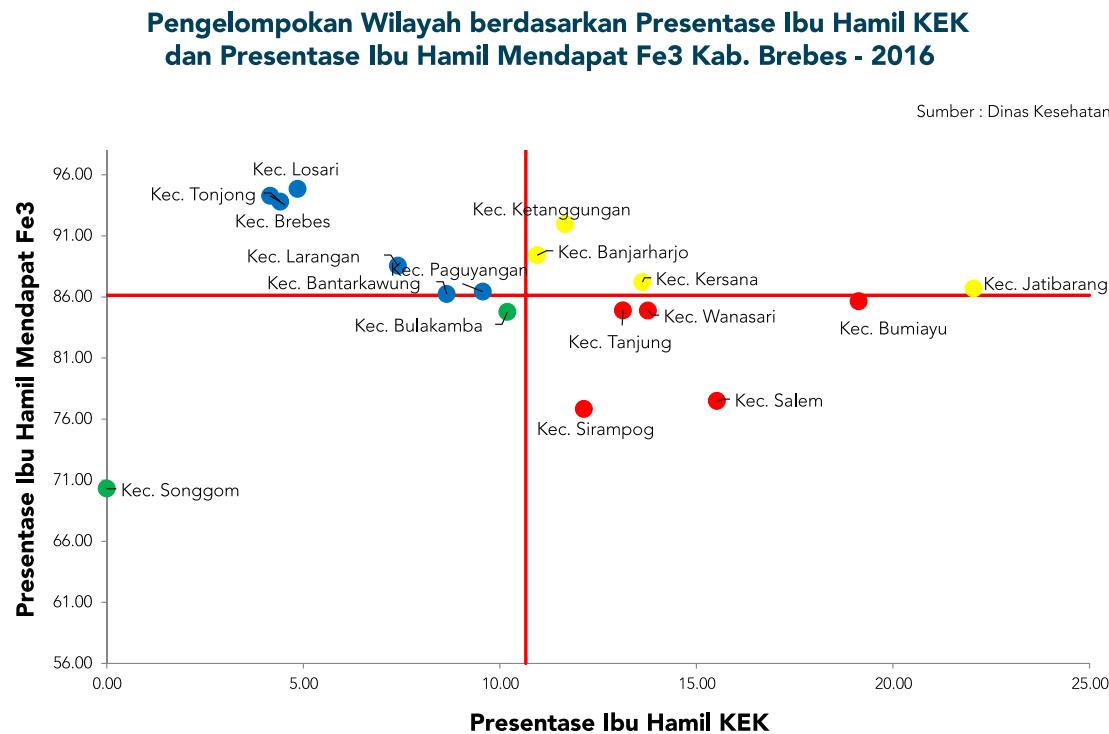
Ibu hamil dengan HIV (+) dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya ibu hamil KEK. Prioritas intervensi wilayah untuk menurunkan persentase ibu hamil KEK dengan menurunkan persentase ibu hamil dengan HIV (+) di Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Jatibarang. (Gambar 3.22)

Gambar 3.23 Prioritas Wilayah Intervensi Ibu Anemi dan Ibu Hamil Mendapat Fe 3



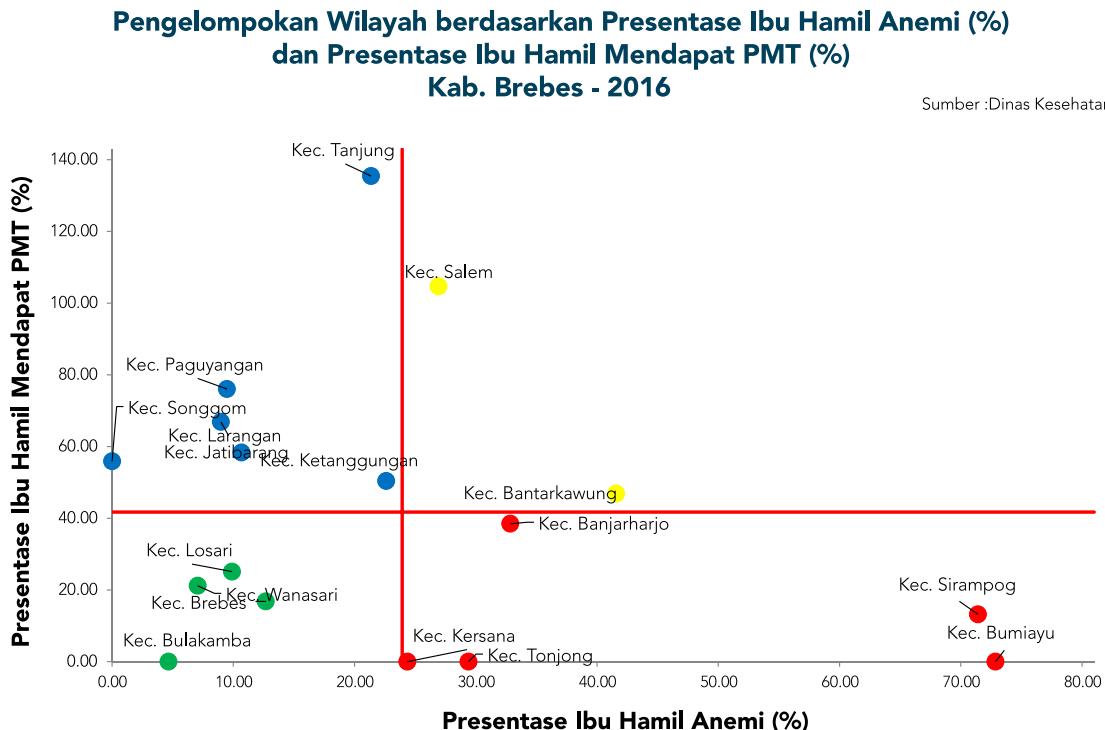
Pemberian tablet Fe3 pada ibu hamil menjadi salah satu cara untuk mencegah ibu hamil mengalami anemi selama masa kehamilan. Prioritas wilayah intervensi penurunan persentase ibu hamil anemi dapat dilakukan dengan peningkatan persentase ibu hamil mendapat Fe3 di Kecamatan Salem, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.23)

Gambar 3.24 Prioritas Wilayah Intervensi Mengurangi Ibu Hamil KE dengan Pemberian Tablet Fe3



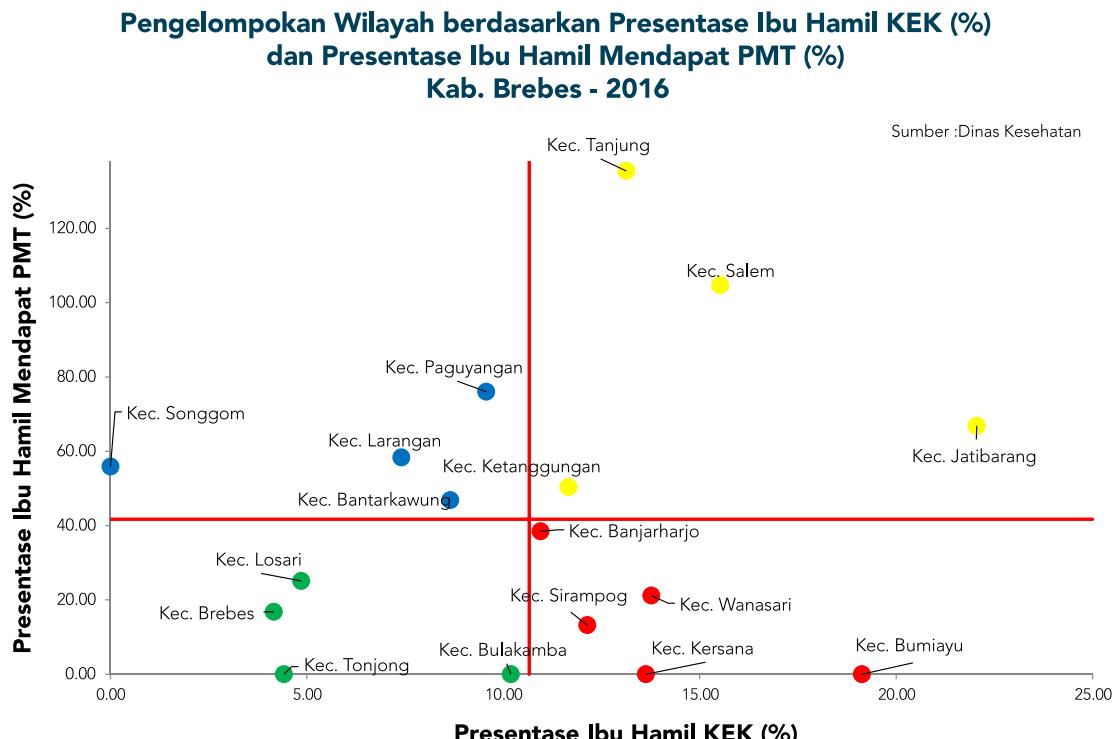
Konsumsi tablet Fe3 pada ibu hamil menjadi salah satu upaya untuk mencegah ibu hamil mengalami KEK. Prioritas wilayah intervensi penurunan ibu hamil KEK dapat dilakukan dengan peningkatan pemberian tablet Fe3 pada ibu hamil di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Salem. (Gambar 3.24)

Gambar 3.25 Prioritas Wilayah Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Mengurangi Ibu Anemi



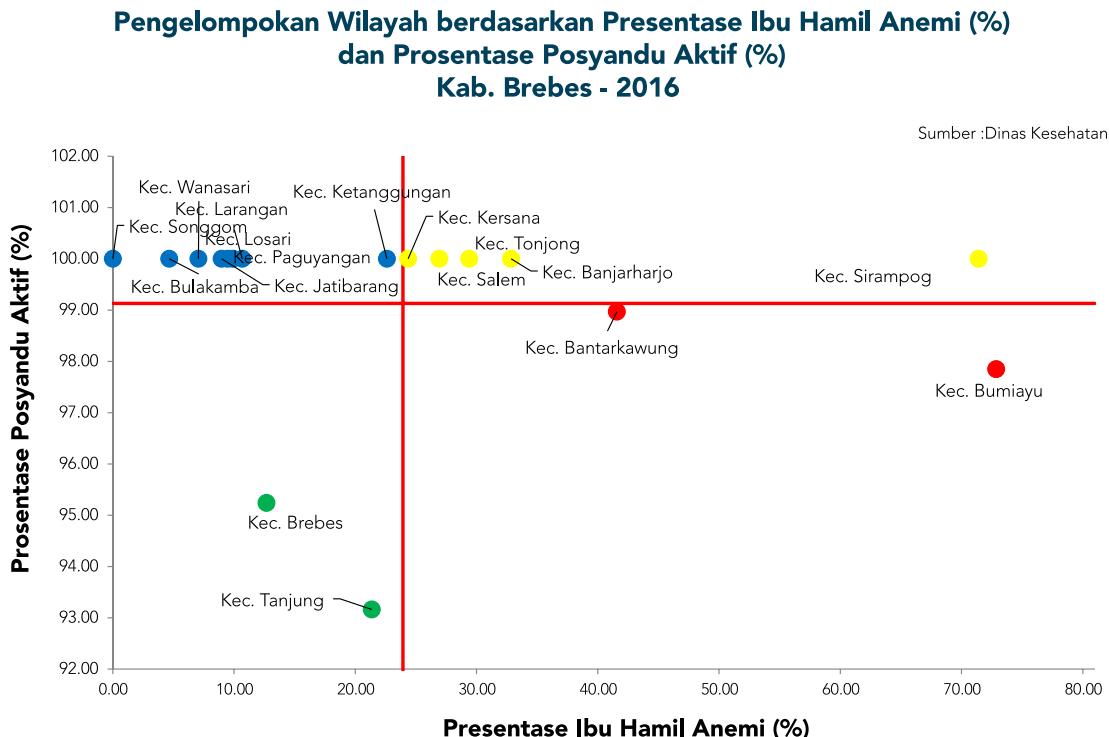
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dilakukan guna untuk mencegah atau menanggulangi kejadian anemia pada ibu hamil. Prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi atau mencegah ibu hamil anemi dengan meningkatkan pemberian PMT pada ibu hamil dapat dilakukan di Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.25)

Gambar 3.26 Prioritas Wilayah Intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Mengurangi Ibu Kurang Energi Kronis (KEK)



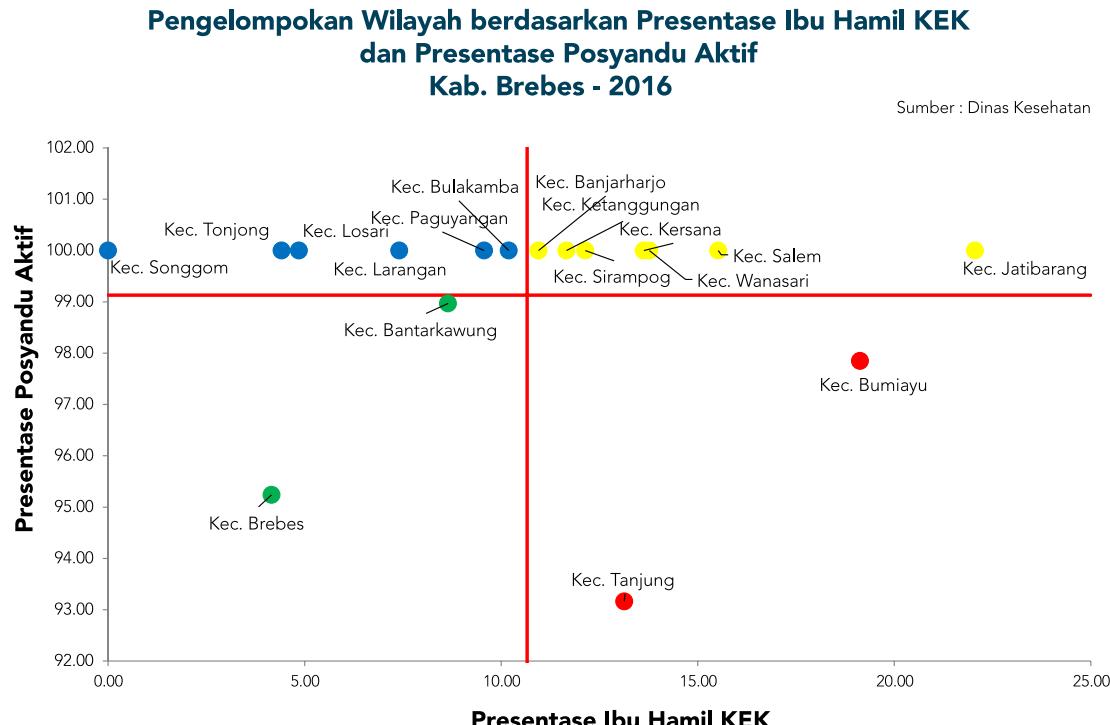
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil dilakukan guna untuk mencegah atau menanggulangi kejadian kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil. Prioritas wilayah intervensi untuk mengurangi atau mencegah ibu hamil KEK dengan meningkatkan pemberian PMT pada ibu hamil dapat dilakukan di Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.26)

Gambar 3.27 Prioritas Wilayah Intervensi Posyandu Aktif untuk Mengurangi Ibu Anemi



Keaktifan Posyandu pada suatu wilayah dapat mencegah atau menurunkan ibu hamil dengan anemi, hal ini karena dengan aktifnya posyandu di suatu daerah itu berarti pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan atau oleh kader dapat maksimal. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan ibu hamil anemi dengan Posyandu aktif dapat dilakukan di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.27)

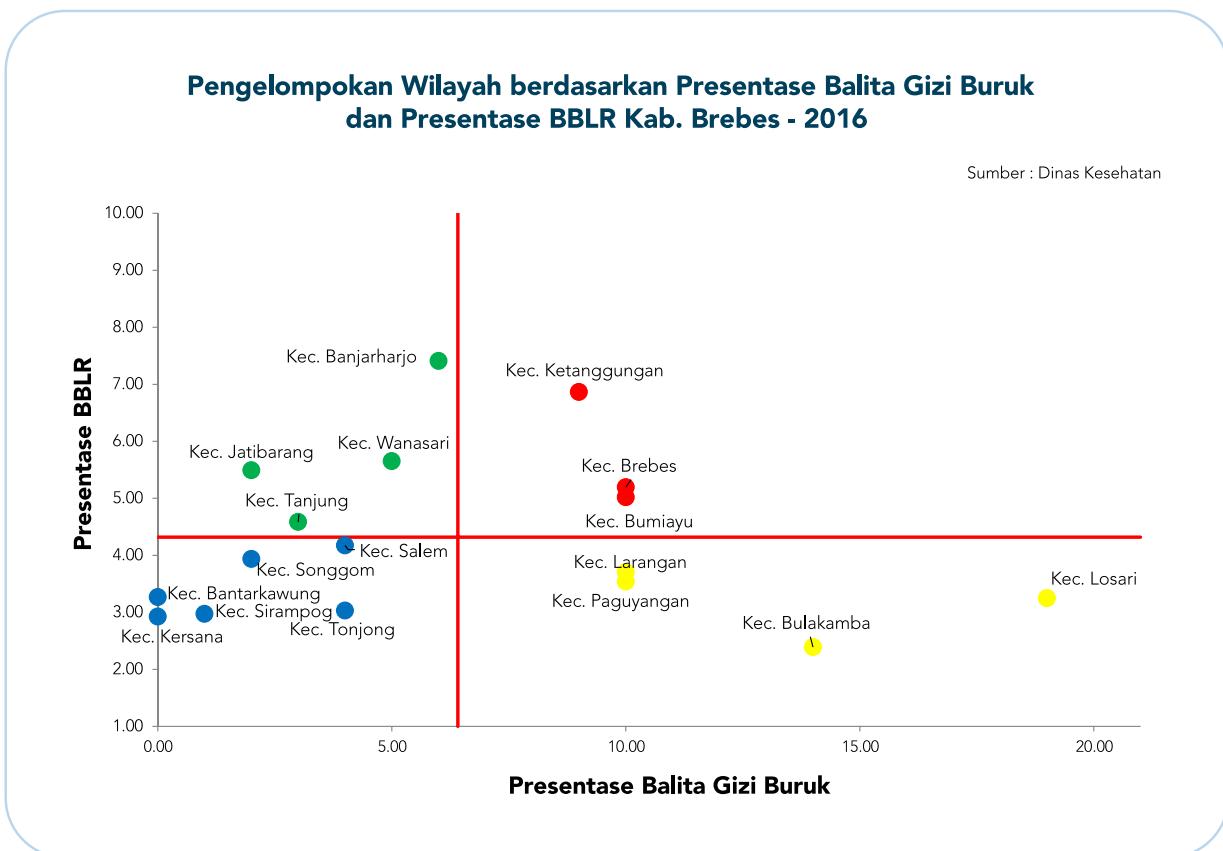
Gambar 3.28 Prioritas Wilayah Intervensi Posyandu Aktif untuk Mengurangi Ibu Kurang Energi Kronis



Keaktifan Posyandu pada suatu wilayah dapat mencegah atau menurunkan ibu hamil KEK, hal ini karena dengan aktifnya posyandu di suatu daerah itu berarti pemantauan ibu hamil oleh tenaga kesehatan atau oleh kader dapat maksimal. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan ibu hamil KEK dengan Posyandu aktif dapat dilakukan di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.28)

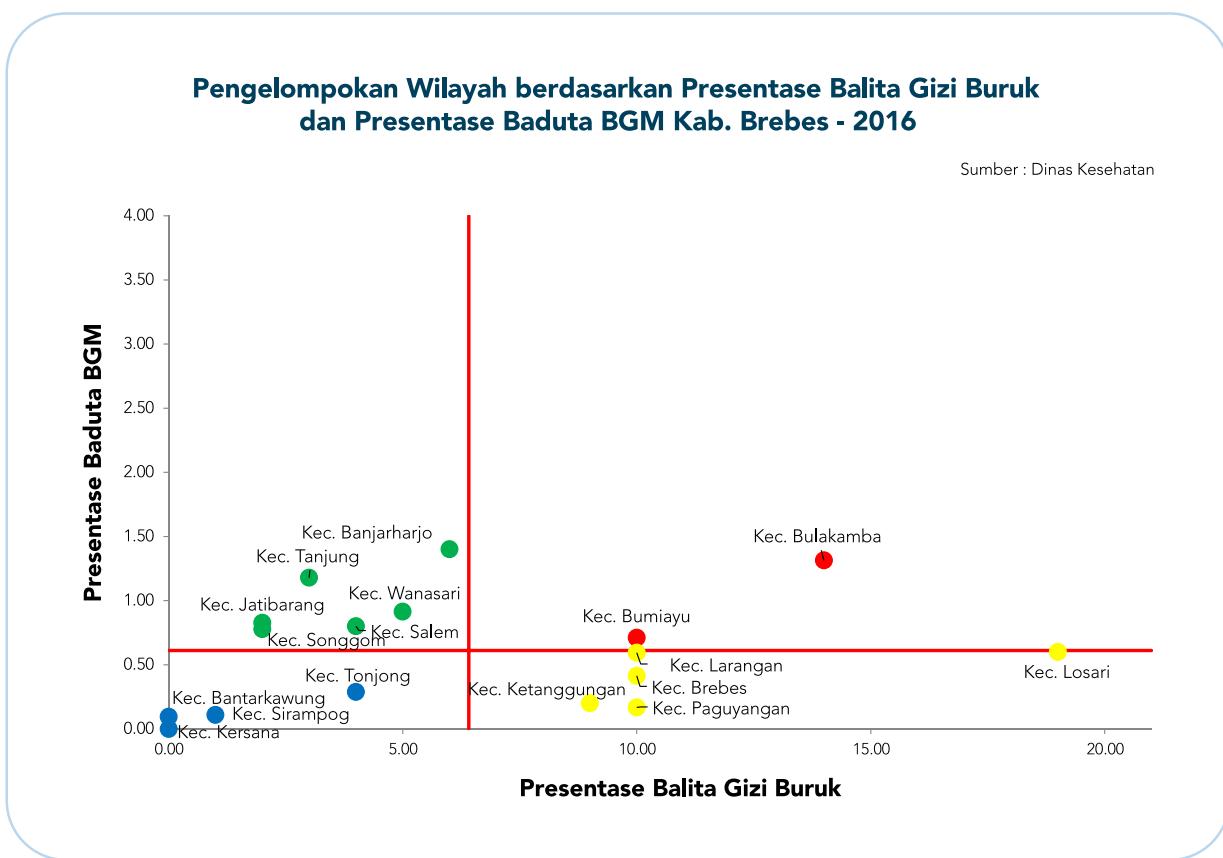
Meningkatnya Kesehatan Balita

Gambar 3.29 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase BBLR



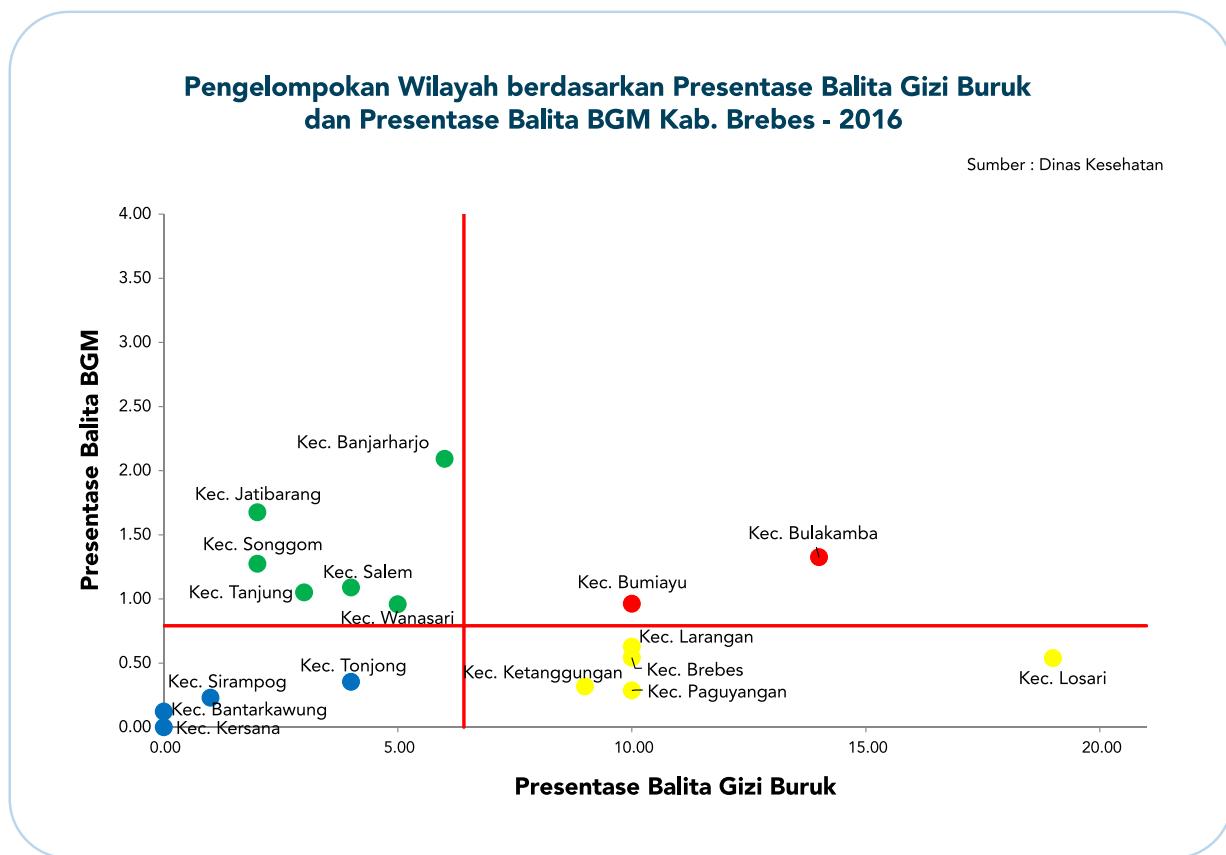
Berat badan lahir rendah atau BBLR adalah salah satu faktor akar penyebab dari terjadinya kasus gizi buruk pada balita. Prioritas wilayah intervensi untuk penurunan persentase balita gizi buruk dengan penurunan persentase BBLR dapat dilakukan di Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Brebes, dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.29)

Gambar 3.30 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Baduta BGM



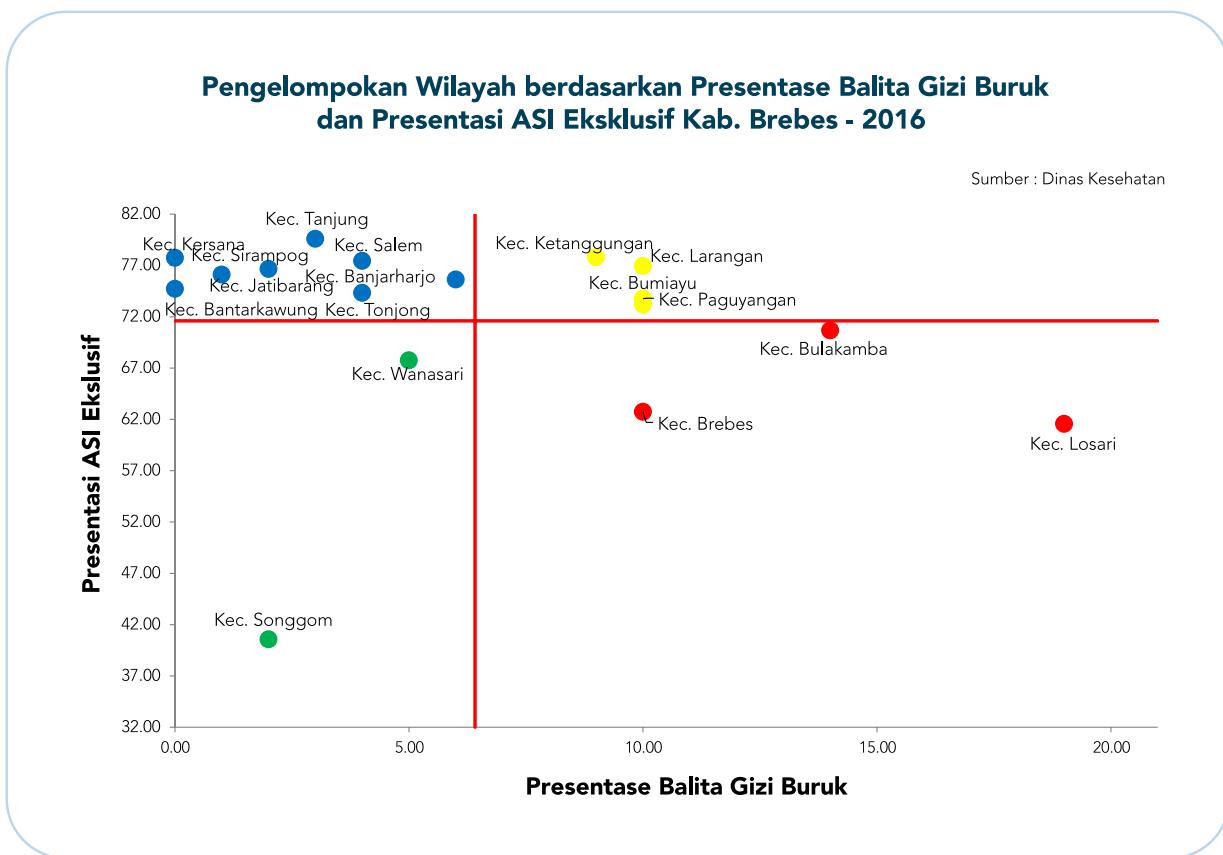
Salah satu upaya penurunan balita gizi buruk dapat dilakukan dengan penurunan kasus baduta bawah garis merah / BGM. Prioritas wilayah intervensi untuk penurunan persentase balita gizi buruk dengan penurunan persentase baduta BGM dapat dilakukan di Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.30)

Gambar 3.31 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita BGM



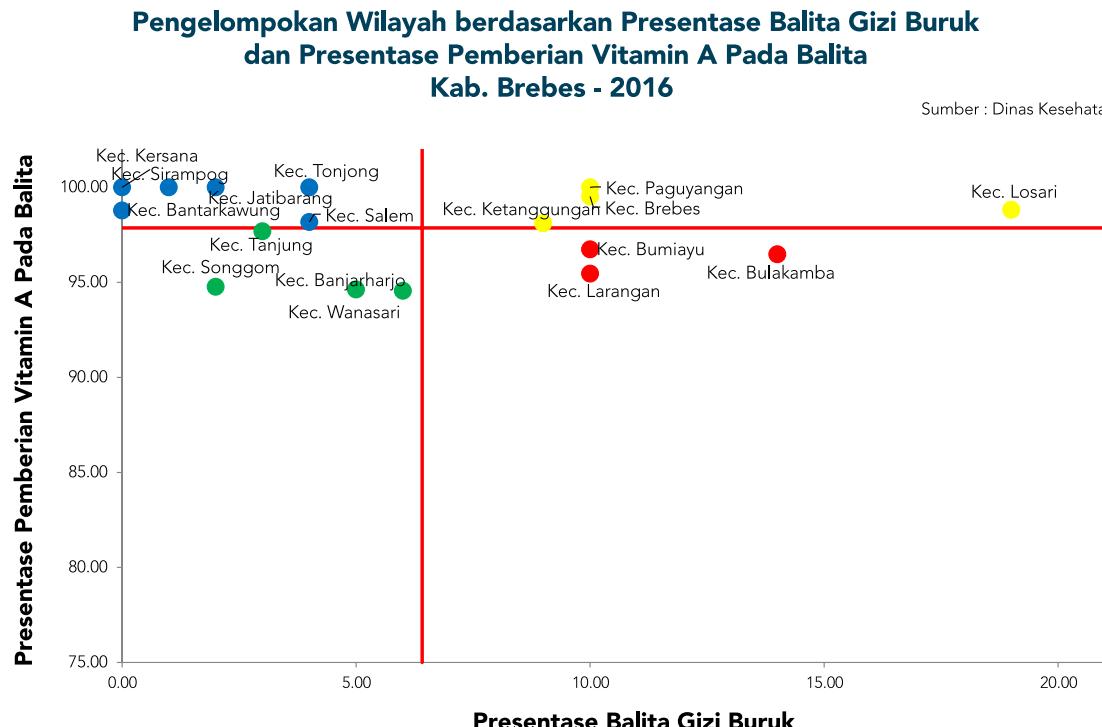
Salah satu upaya penurunan balita gizi buruk dapat dilakukan dengan penurunan kasus balita bawah garis merah/BGM. Prioritas wilayah intervensi untuk penurunan persentase balita gizi buruk dengan penurunan persentase balita BGM dapat dilakukan di Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.31)

Gambar 3.32 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase ASI Eksklusif



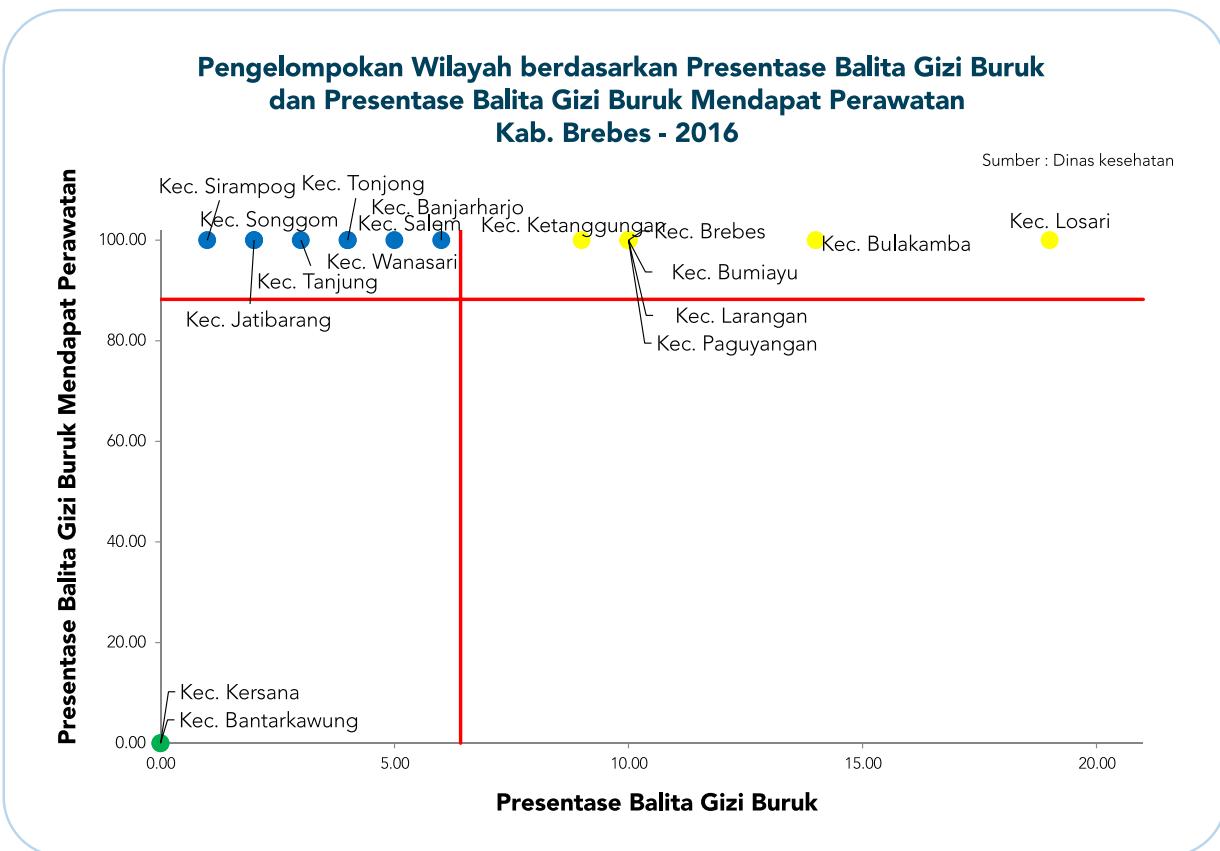
Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama sejak kelahiran menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh bagi bayi dan balita. Meningkatnya kekebalan tubuh pada bayi dan balita dapat menjadi salah satu faktor untuk menurunkan balita dengan gizi buruk. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan persentase balita gizi buruk dengan meningkatkan pemberian ASI eksklusif dapat dilakukan di Kecamatan Brebes, Kecamatan Bulakamba, dan Kecamatan Losari. (Gambar 3.32)

Gambar 3.33 Pengelompokan Wilayah Balita Gizi Buruk dan Persentase Pemberian Vitamin A Pada Balita



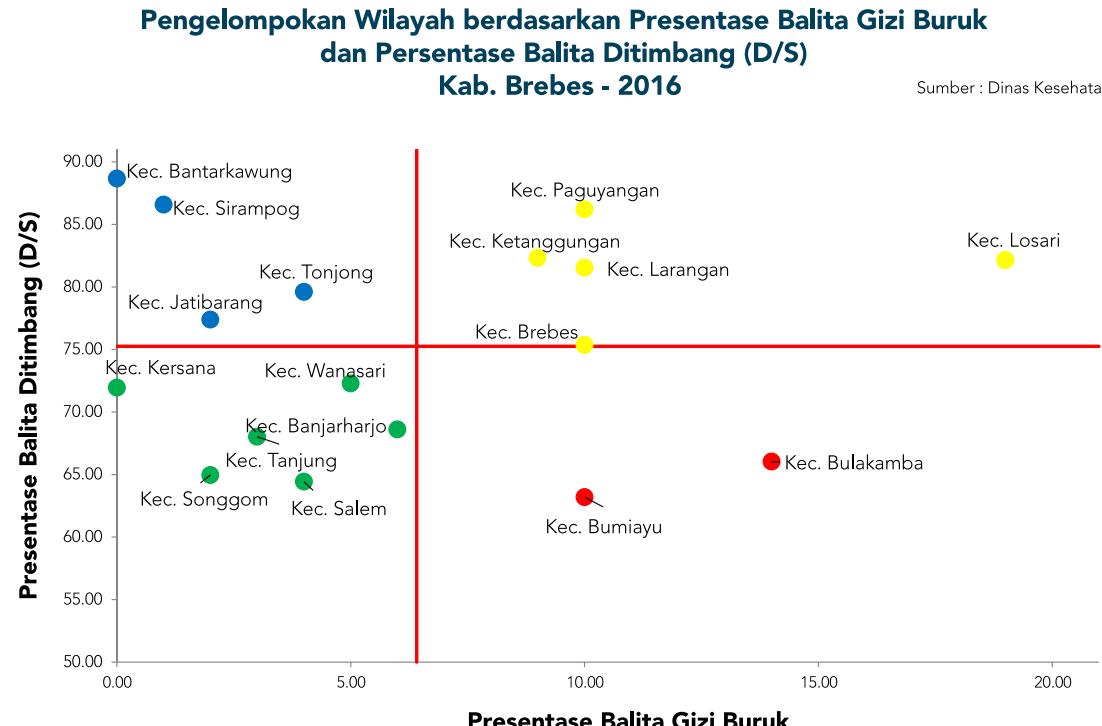
Pemberian vitamin A pada balita menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi kasus gizi buruk pada balita. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan persentase balita gizi buruk dengan peningkatan pemberian vitamin A dapat dilakukan di Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Bulakamba. (Gambar 3.33)

Gambar 3.34 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan



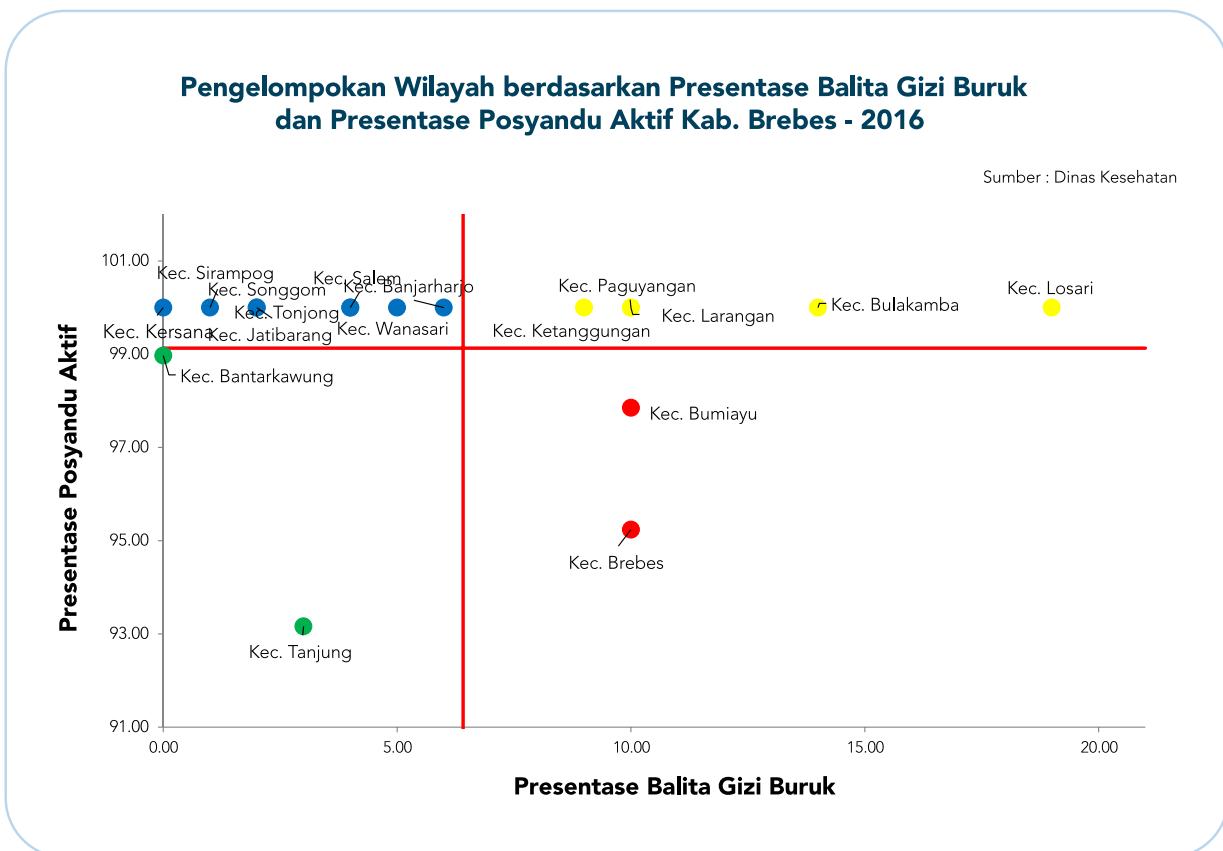
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2016, hampir semua kecamatan mencapai 100%, hal ini diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi keparahan dari balita gizi buruk. (Gambar 3.34)

Gambar 3.35 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Balita Ditimbang



Balita ditimbang adalah indikator positif, di mana indikator ini lebih menunjukkan peran serta dan keaktifan dari pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanganan kasus balita gizi buruk. Peningkatan persentase balita ditimbang berjalan sejajar dengan peningkatan balita gizi buruk, semakin tinggi angka balita yang ditimbang maka semakin tinggi juga peluang ditemukannya kasus balita gizi buruk di masyarakat. Prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan penemuan gizi buruk di masyarakat dengan meningkatkan persentase balita ditimbang dapat dilakukan di Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Bumiayu. (Gambar 3.35)

Gambar 3.36 Pengelompokan Wilayah Persentase Balita Gizi Buruk dan Persentase Posyandu Aktif



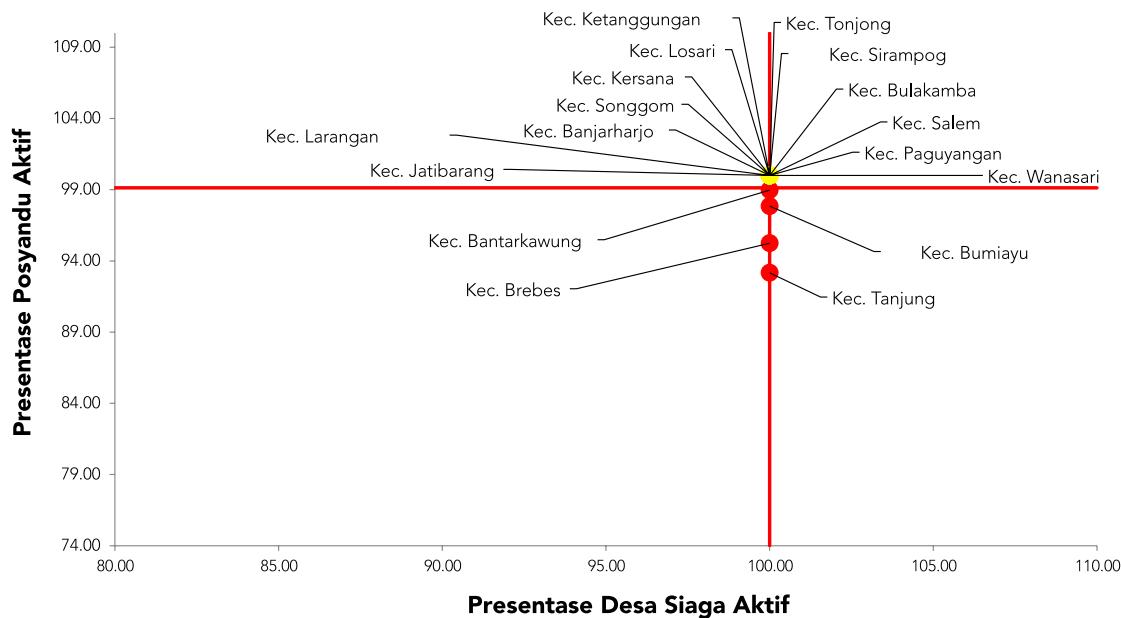
Keaktifan Posyandu di suatu daerah dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keaktifan peran serta masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan di masyarakat dan keaktifan posyandu juga dapat mencegah dan menaggulangi gizi buruk pada balita. Prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan persentase balita gizi buruk dengan meningkatkan persentase posyandu aktif dapat dilakukan di Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Brebes. (Gambar 3.36)

Meningkatnya Desa Siaga Aktif

Gambar 3.37 Pengelompokan Wilayah Persentase Desa Siaga Aktif dan Persentase Posyandu Aktif

Pengelompokan Wilayah berdasarkan Presentase Desa Siaga Aktif dan Presentase Posyandu Aktif Kab. Brebes - 2016

Sumber : Dinas Kesehatan



Keaktifan Posyandu di suatu daerah dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keaktifan peran serta masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan di masyarakat. Persentase desa siaga aktif di Kabupaten Brebes pada tahun 2016, sudah semua kecamatan mencapai 100%. Oleh karena itu capaian persentase posyandu aktif diharapkan dapat terus mempertahankan capaian dari persentase desa siaga aktif dan hal itu dapat dilakukan di Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Brebes, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tanjung. (Gambar 3.37)

3.4 MODUS OPERANDI SEKTOR KESEHATAN

Mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, masing-masing prioritas intervensi yang telah teridentifikasi dari analisis keterkaitan di atas berkaitan dengan paket program dan kegiatan tertentu sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Program Terkait Prioritas Intervensi dalam Rangka Penurunan Stunting menurut Dinas Terkait di Kabupaten Brebes

| SASARAN | PRIORITAS INTERVENSI | PROGRAM DAN KEGIATAN |
|------------------------------------|---|---|
| Meningkatnya rumah sehat | Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat |
| | Peningkatan Akses Air Bersih | Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Kegiatan: Pendampingan Pamsimas |
| | Peningkatan Jamban Layak dan Sehat | Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Kegiatan: Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Lingkungan |
| Menurunnya Ibu Hamil Resiko Tinggi | Penurunan Penyakit Menular pada Ibu Hamil | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular |
| | Peningkatan Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi (Resti) | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Ibu |
| | Penurunan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Anak |
| | Peningkatan Peran Serta UKBM | Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringanya - Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kegiatan: Pengembangan Desa Siaga |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Meningkatnya Kesehatan Balita | Penurunan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) | <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Anak <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Anak |
| | Penurunan Bayi dan Balita Gizi Kurang | <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya |
| | Penurunan Prevalensi Gizi Buruk | <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat | <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Meningkatnya desa siaga aktif | Peningkatan Peran Serta UKBM | <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Peningkatan Kesehatan Masyarakat <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Pengembangan Desa Siaga |
| Meningkatnya penganekaragaman dan keamanan pangan | Kecukupan Gizi Masyarakat | <p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan: Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan |

3.5 PENERIMA PROGRAM SEKTOR KESEHATAN

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 2012 -2017, masing-masing dari prioritas intervensi yang telah teridentifikasi dari analisis keterkaitan yang berkaitan dengan paket program dan kegiatan (modus operandi) dapat dilihat di Tabel 3.2

**Tabel 3.2 Lokasi Belanja Program dan Kegiatan Terkait Prioritas Intervensi
Dalam Rangka Penurunan Persentase Stunting**

| Sasaran | Prioritas Intervensi | Prioritas Wilayah (Prioritas Pertama) | Wilayah Pengalokasian Anggaran (APBD) |
|---------|--|---|--|
| | Peningkatan presentase rumah tangga ber PHBS | Kecamatan Losari, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Bulakamba | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanäsari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| Meningkatnya Rumah Sehat | Peningkatan presentase penduduk yang memiliki akses air minum | Kecamatan Wanasari, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Kersana, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Losari | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase penduduk dengan jamban layak | Kecamatan Wanasari, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Ketanggungan | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Menurunnya Ibu Hamil Resiko Tinggi (Dilihat Dari Presentase Ibu Hamil Anemi) | Penurunan presentase ibu hamil HIV | Kecamatan Banjarharjo | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat Fe3 | Kecamatan Salem, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat PMT | Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanäsari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase Posyandu aktif | Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanäsari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Menurunnya Ibu Hamil Resiko Tinggi (Dilihat Dari Presentase Ibu Hamil KEK) | Penurunan presentase ibu hamil HIV | Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Jatibarang | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasisi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat Fe3 | Kecamatan Tanjung, Kecamatan Wanasisi, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasisi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat PMT | Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase Posyandu aktif | Kecamatan Tanjung Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| Meningkatnya Kesehatan Balita | Penurunan presentase BBLR | Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Brebes, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat Fe3 | Kecamatan Tanjung, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | Peningkatan presentase ibu hamil mendapat PMT | Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase Posyandu aktif | Kecamatan Tanjung Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Meningkatnya Kesehatan Balita | Penurunan presentase BBLR | Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Brebes, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, |
| | Penurunan presentase baduta BGM | Kecamatan Bulakamba Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Paguyangan Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | Penurunan presentase balita BGM | Kecamatan Bulakamba Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Peningkatan presentase ASI Eksklusif | Kecamatan Brebes, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Losari | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Peningkatan presentase pemberian vitamn A | Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Bulakamba | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Mempertahankan presentase balita gizi buruk mendapat perawatan | Kecamatan Losari | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

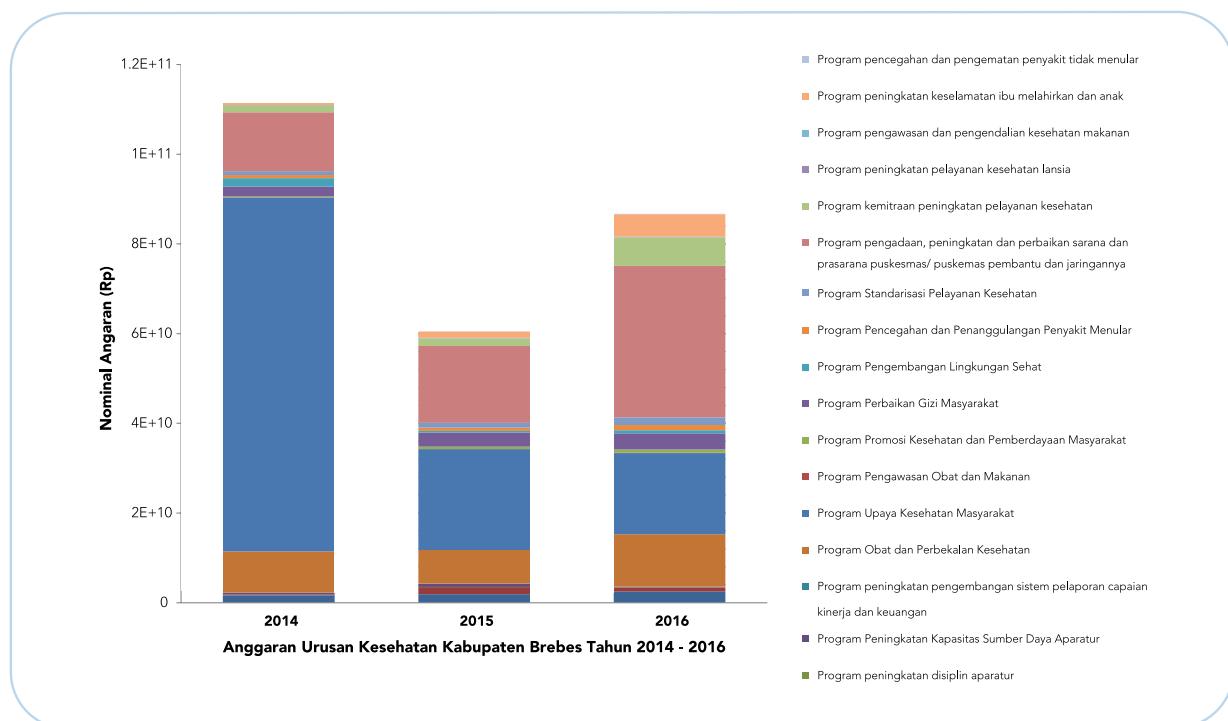
| | | | |
|--|--|---|--|
| | Meningkatkan presentase D/s | Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Bumiayu | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
| | Meningkatkan presentase Posyandu aktif | Kecamatan Bumiayu Kecamatan Brebes | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasi, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Meningkatnya Desa Siaga Aktif | Meningkatnya presentase Posyandu Aktif | Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Brebes, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tanjung | Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanäsari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan |
|-------------------------------------|--|--|--|

3.6 KECUKUPAN ANGGARAN SEKTOR KESEHATAN

Sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016, anggaran urusan kesehatan Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi. Dari berbagai program urusan kesehatan yang ada, beberapa program terus menjadi prioritas anggaran dalam struktur APBD Kabupaten Brebes. Salah satu dari program tersebut yaitu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Di tiap tahun dari 2014 hingga 2016 program-program tersebut selalu mendapatkan anggaran yang besar dibandingkan program lainnya. (Gambar 3.38)

Gambar 3.38 Anggaran Urusan Kesehatan Per Program di Kabupaten Brebes Tahun 2014-2016

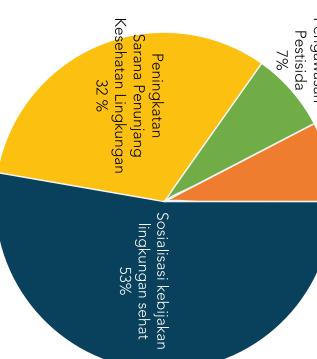


Berdasarkan Theory of change (TOC) yang disusun oleh Tim teknis TKPK Kabupaten Brebes, ada tujuh program bidang kesehatan dan satu program lintas sektor yang dianggap dapat menurunkan stunting di Kabupaten Brebes. Program bidang kesehatan tersebut adalah Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya, dan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Total anggaran dari ketujuh program ini sebesar Rp 62.334.619.000 dan dapat terserap atau ter-realisisasi sebesar Rp 52.898.140.158 atau sebesar 84,86%. Dari ketujuh program tersebut, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu Rp 33.690.378.000. Rincian dan uraian dari ketujuh program dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program |
|----|--|-----------------|-------------------|------------------|--|
| 1. | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 683.200.000 | 644.524.997 | 94,34 | Pembinaan dan Pengawasan Sanitas Tempat-tempat umum 8% |
| A | Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat | 355.200.000 | 339.735.000 | 95,65 | Pembinaan dan Pengawasan Pestisida 7% |
| B | Peningkatan Sarana Penunjang Kesehatan Lingkungan | 228.000.000 | 208.010.023 | 91,23 | |
| C | Pembinaan dan Pengawasan Pestisida | 50.000.000 | 48.198.000 | 96,4 | |
| D | Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Tempat - tempat umum | 50.000.000 | 48.581.974 | 97,16 | |

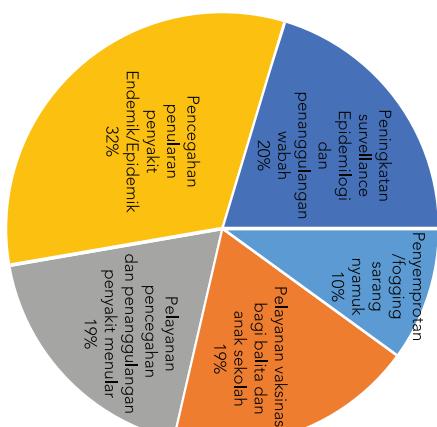


Uraian: Program Pengembangan Lingkungan Sehat memiliki dua kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut antara lain: Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dan Peningkatan sarana penunjang kesehatan lingkungan. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Meningkatnya persentase rumah tangga ber PHBS, Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses air minum, dan Memurunya persentase penduduk dengan jamban layak.

Realisasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat tahun 2016 mencapai 94,34%, dan dalam program ini kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dan peningkatan sarana penunjang kesehatan lingkungan mendapat alokasi anggaran terbesar yaitu sebesar Rp 355.200.000 dan Rp 228.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kegiatan ini mendapat alokasi anggaran lebih dari 85% dari seluruh anggaran program pengembangan lingkungan sehat. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja terbesar ada pada kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat, yaitu sebesar 53%. (Tabel 3.3)

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program | |
|----|--|-----------------|-------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | Penyemprotan /fogging sarang nyamuk |
| 2. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 1.167.101.000 | 1.021.289.421 | 87,51 | | |
| A | Penyemprotan/fogging sarang nyamuk | 119.066.000 | 100.886.881 | 84,73 | | |
| B | Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah | 202.496.000 | 191.652.448 | 94,64 | | |
| C | Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | 270.479.000 | 190.832.242 | 70,55 | | |
| D | Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik | 366.082.000 | 331.234.015 | 90,48 | | |
| E | Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah | 208.978.000 | 206.683.835 | 98,9 | | |

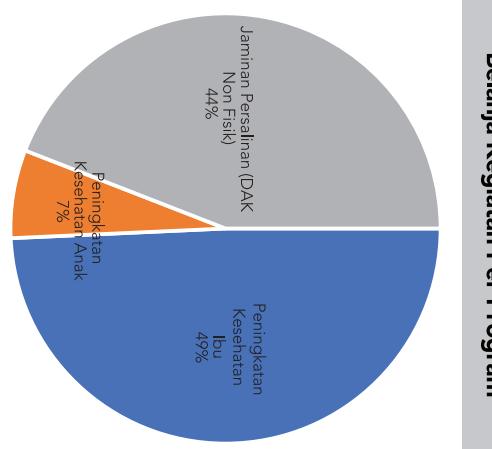


Uraian: Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular memiliki satu kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Menurunnya persentase ibu hamil HIV.

Realisasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat tahun 2016 mencapai 87,51%, dan dalam program ini kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 270.479.000. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran lebih dari 23% dari seluruh anggaran program pengembangan lingkungan sehat. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, yaitu sebesar 19%. (Tabel 3.4)

Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program |
|----|---|-----------------|-------------------|------------------|---|
| 3. | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | 4.998.071.000 | 3.255.540.580 | 65,14 | |
| A | Peningkatan Kesehatan Ibu | 1.634.536.000 | 1.604.363.830 | 98,15 | |
| B | Peningkatan Kesehatan Anak | 218.565.000 | 215.815.000 | 98,74 | |
| C | Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) | 3.144.970.000 | 1.435.361.750 | 45,64 | |



Uraian: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak memiliki dua kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Peningkatan kesehatan ibu dan Peningkatan kesehatan anak.

Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Meningkatnya persentase ibu hamil mendapat Fe3, Meningkatnya persentase ibu hamil mendapat PMT, Menurunkan persentase BBLR, Menurunkan balita BGM, Meningkatkan persentase ASI eksklusif, Meningkatkan persentase pemberian vitamin A, Meningkatkan persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, dan Meningkatkan persentase D/S.

Realisasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat tahun 2016 mencapai 65,14%, dan dalam program ini kegiatan Peningkatan kesehatan ibu dan Peningkatan kesehatan anak mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.634.536.000 dan Rp 218.565.000. Kedua kegiatan ini mendapat alokasi anggaran lebih dari 37% dari seluruh anggaran program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan terbesar adalah kegiatan peningkatan kesehatan ibu, yaitu sebesar 49%. (Tabel 3.5)

Tabel 3.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------------|---|--|
| | | | | | Belanja Kegiatan Per Program | Belanja Kegiatan Per Program |
| 4. | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.585.993.000 | 3.539.985.677 | 98,72 | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi mikro Lainnya untuk penerapan keluarga sadar gizi | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi |
| A | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | 2.620.632.000 | 2.614.957.229 | 99,78 | 5% | 95% |
| B | Pemberian tambahan makanan dan vitamin | 723.060.000 | 704.858.050 | 97,48 | Pemberian tambahan makanan dan vitamin 20% | 74% |
| C | Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya | 199.038.000 | 176.907.398 | 88,88 | Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi | 74% |
| D | Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi | 43.263.000 | 43.263.000 | 100,00 | | |

Uraian: Program Perbaikan Gizi Masyarakat memiliki tiga kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Pemberian tambahan makanan dan vitamin, Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya, dan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Menurunkan persentase BBLR, Menurunkan persentase baduta BGM, Menurunkan balita BGM, Meningkatkan persentase ASI eksklusif, Meningkatkan persentase pemberian vitamin A, Meningkatkan persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, dan Meningkatkan persentase D/S.

Realisasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat tahun 2016 mencapai 98,72%, dan dalam program ini kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 723.060.000, kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 199.038.000, dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 43.263.000. Ketiga kegiatan ini hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 27% dari seluruh anggaran program perbaikan gizi masyarakat. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan terbesar adalah kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, yaitu sebesar 74%. (Tabel 3.6)

Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------------|--|---|
| | | | | | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | Peningkatan pelayanan bagi pengungsi korban bencana |
| 5. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 17.484.959.000 | 16.450.539.129 | 94,08 | | |
| A | Peningkatan kesehatan masyarakat | 2.031.224.000 | 2.001.704.000 | 98,55 | | |
| B | Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana | 15.000.000 | 14.824.000 | 98,83 | | |
| C | Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan | 320.885.000 | 176.907.398 | 88,88 | | |
| D | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 65.640.000 | 41.343.455 | 62,99 | | |
| E | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Khusus | 101.046.000 | 97.611.000 | 96,60 | | |
| F | Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan di Puskesmas (Sisa JKN) | 289.452.000 | 0 | 0,00 | | |
| G | Pelayanan JKN pada FKTP (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) | 3.223.142.000 | 2.953.028.817 | 91,62 | | |
| H | Bantuan Operasional Kesehatan/BOK (DAK Non Fisik) | 11.438.570.000 | 11.027.560.657 | 96,41 | | |

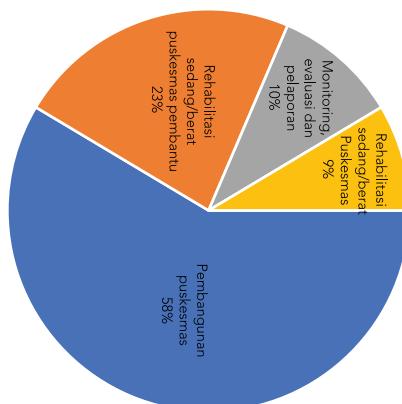
Uraian: Program Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki satu kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Meningkatkan persentase Posyandu aktif.

Realisasi anggaran program pengembangan lingkungan sehat tahun 2016 mencapai 94,08%, dan dalam program ini kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.031.224.000. Kegiatan ini hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 12% dari seluruh anggaran program upaya kesehatan masyarakat. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan terbesar adalah kegiatan bantuan operasional kesehatan / BOK (DAK Non Fisik), yaitu sebesar 67%, sedangkan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat hanya sebesar 12%. (Tabel 3.7)

Tabel 3.8 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya

Di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program | |
|----|---|-----------------|-------------------|------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Rehabilitasi sarana dan prasarana | Pembangunan sarana dan prasarana |
| 6. | Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya | 33.690.378.000 | 27.310.209.404 | 81,06 | | |
| A | Pembangunan puskesmas | 5.844.243.000 | 5.354.534.450 | 91,62 | | |
| B | Rehabilitasi sedang/berat pustikesmas pembantu | 500.000.000 | 494.675.000 | 98,94 | | |
| C | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | 36.020.000 | 29.744.639 | 82,58 | | |
| D | Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas | 1.699.763.000 | 1.680.678.500 | 98,88 | | |
| E | Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu | 100.000.000 | 98.500.000 | 98,50 | | |
| F | Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK) | 495.900.000 | 452.400.000 | 91,23 | | |
| G | Pengadaan Puskesmas Keliling (Fendamping DAK) | 4.670.000 | 0 | - | | |
| H | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) | 2.100.000.000 | 2.055.170.000 | 97,87 | | |
| I | Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Pendamping DAK) | 9.400.000 | 9.400.000 | 100,00 | | |
| J | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (DAK) | 16.970.000.000 | 11.204.724.815 | 66,03 | | |
| K | Kegiatan Pengadaan Ambulans Transport (DAK) | 5.850.000.000 | 5.850.000.000 | 100,00 | | |
| L | Kegiatan Pembangunan Puskesmas (DAK 2014) | 4.210.000 | 4.210.000 | 100,00 | | |
| M | Pembangunan Puskesmas (DAK 2015) | 76.172.000 | 76.172.000 | 100,00 | | |



Uraian: Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya memiliki satu kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Meningkatkan persentase Posyandu aktif.

Realisasi anggaran program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya tahun 2016 mencapai 81,06%, dan dalam program ini kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000. Kegiatan ini hanya mendapat alokasi anggaran kurang dari 1% dari seluruh anggaran program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan terbesar adalah kegiatan Pembangunan Puskesmas, yaitu sebesar 58%. (Tabel 3.8)

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Brebes Tahun 2016

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%) | Komposisi Realisasi Belanja Kegiatan Per Program | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------|---|-------------------------|-----|--|-----|---|-----|
| 7. | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 724.917.000 | 676.050.950 | 93,26 | | | | | | | |
| A | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 435.200.000 | 394.985.500 | 90,76 | | | | | | | |
| B | Pemberdayaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja | 123.748.000 | 123.727.450 | 99,98 | | | | | | | |
| C | Pengembangan Desa Siaga | 165.969.000 | 157.338.000 | 94,80 | <table border="1"> <tr> <td>Pengembangan Desa Siaga</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat</td> <td>59%</td> </tr> <tr> <td>Pemberdayaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja</td> <td>18%</td> </tr> </table> | Pengembangan Desa Siaga | 23% | Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 59% | Pemberdayaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja | 18% |
| Pengembangan Desa Siaga | 23% | | | | | | | | | | |
| Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat | 59% | | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja | 18% | | | | | | | | | | |

Uraian: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki satu kegiatan yang dapat menjawab persoalan stunting di Kabupaten Brebes. Adapun kegiatan tersebut adalah: Pengembangan Desa Siaga. Kegiatan tersebut dapat menjawab sub-determinan kunci: Meningkatkan persentase Posyandu aktif.

Realisasi anggaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 mencapai 93,26%, dan dalam program ini kegiatan Pengembangan Desa Siaga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 165.969.000. Kegiatan ini hanya mendapat alokasi anggaran sekitar 23% dari seluruh anggaran Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Komposisi realisasi belanja kegiatan per program dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran kegiatan terhadap realisasi anggaran program, dan dalam hal ini komposisi realisasi belanja kegiatan Pengembangan Desa Siaga, yaitu sebesar 23%. (Tabel 3.9)

3.7 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR KESEHATAN

Berdasarkan rangkaian analisis belanja publik yang telah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dalam upaya untuk menurunkan stunting maka dirumuskan beberapa rekomendasi berikut ini:

- Meningkatkan dan mengoptimalkan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tataran rumah tangga. Di mana dalam hal ini menitikberatkan peran Puskesmas dalam melakukan tugas promosi kesehatan dan edukasi kesehatan tentang PHBS kepada masyarakat.
- Menerapkan secara penuh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan mengoptimalkan anggaran yang sudah di berikan baik itu APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk meningkatkan secara kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air minum komunal di masyarakat.
- Dalam hal peningkatan akses jamban ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan di antaranya adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan yang lebih intensif, meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter serta dengan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang.
- Mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam melaksanakan tes HIV pada ibu hamil, serta meningkatkan pengetahuan melalui promosi kesehatan kepada setiap orang yang rentan tertular HIV.
- Meningkatkan peran serta masyarakat, tenaga kesehatan dan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya ibu hamil memeriksakan kondisi kehamilannya minimal 4 kali selama masa kehamilan.
- Melaksanakan pembangunan pangan dan perbaikan gizi dengan cara dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya.
- Melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang pangan untuk perbaikan status gizi masyarakat.
- Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk dapat menerapkan atau melaksanakan Gerakan Nasional Perbaikan Gizi diterbitkan untuk mendukung upaya penggalangan partisipasi dan kedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinir untuk percepatan perbaikan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK).

